PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

2025-2029









BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
17. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
    e. BAB V Penutup.
(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..20...Agustus..2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2025.. NOMOR ....2....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2 / 2 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, digunakan sebagai pedoman RKPD Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR...!!?..

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan RPJMD ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Kubu Raya menghadapi berbagai tantangan dan peluang, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan terarah. Dokumen RPJMD ini akan memberikan arah dan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Diharapkan dokumen RPJMD ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi para *stakeholders*, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Dokumen RPJMD ini juga disusun berdasarkan prinsip partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif juga diharapkan rencana strategis yang dibuat akan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Dengan tersusunnya dokumen Rancangan RPJMD ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 20 Agustus 2025
BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2025-2030 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024 telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, gambaran keuangan daerah, serta

program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJMN serta selaras dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi tersebut dalam rangka mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu:

1. Meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan:

1. Berorientasi Proses:
    a. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
    b. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)*;
    c. Pendekatan Politik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD;

d. Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)* dan Bawah-Atas *(bottom-up)*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dengan musyawarah pembangunan (musrenbang) Kabupaten.

2. Berorientasi Substansi:
   a. Pendekatan *holistic-tematik*, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan lainnya;
   b. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
   c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 114);

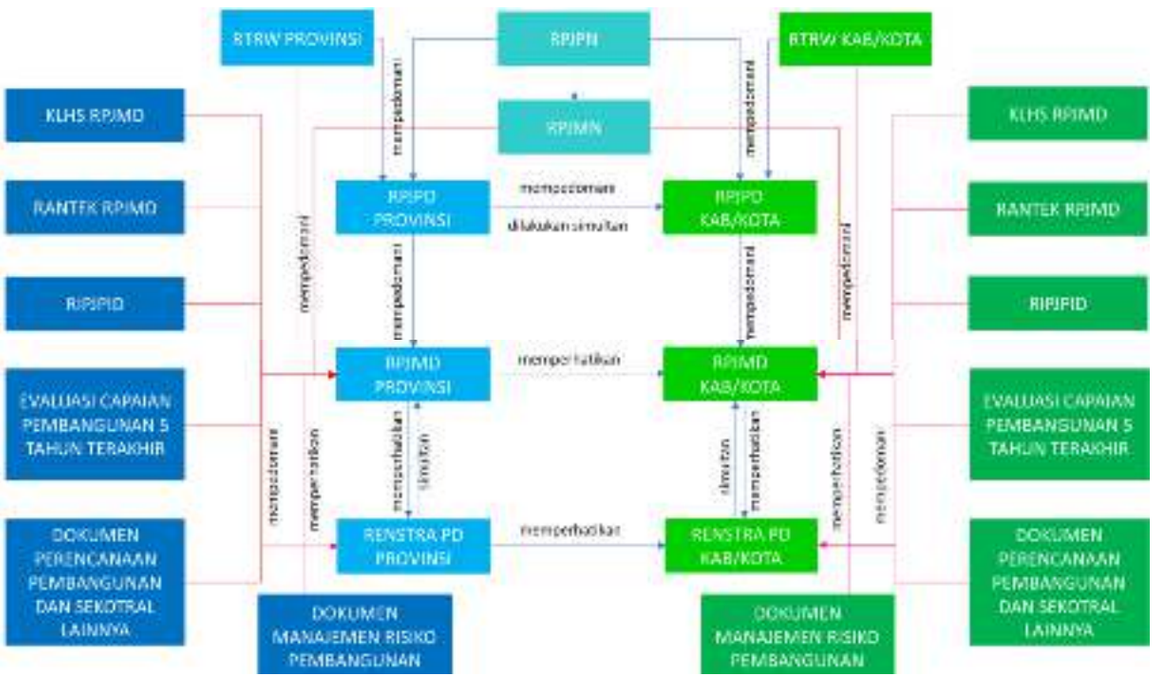
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya



1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah ***"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"***. RPJPN Tahun 2025-2045 ini didukung dengan 5 (lima)

sasaran Visi Indonesia Emas, 8 (delapan) Misi Agenda Pembangunan, 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan yang akan digunakan dalam mengevaluasi jalannya pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

RPJPN Tahun 2025-2045 dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan RPJMN, dimana RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini memperhatikan RPJMN pertama, yaitu RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa Visi Presiden periode 2025-2029 adalah ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***. Visi tersebut dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita, yaitu:

1. Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi, Misi, dan program yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk penyelarasan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini selain memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode Tahun 2025-2030, juga harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dalam RPJPD tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 adalah ***"Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan"***, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri : Mempunyai makna bahwa Kabupaten Kubu Raya mempunyai keinginan untuk menjadi suatu wilayah yang mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya serta potensi daerah secara optimal tanpa tergantung secara berlebihan pada pihak eksternal. Mandiri juga merupakan kondisi Kabupaten Kubu Raya yang berdaya saing tinggi dan didukung dengan kemandirian fiskal, kemampuan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta diperhitungkan dalam konstelasi nasional.

Unggul : Mempunyai makna bahwa Kabupaten Kubu Raya mempunyai keinginan untuk menjadi suatu wilayah yang dapat memenuhi sumber daya manusia yang mampu mengekspresikan potensi dan kualitas dalam menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat

dengan didukung oleh kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal. Maksud dari unggul disini juga mencerminkan pelayanan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif, pembangunan keluarga dan kesetaraan gender dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi serta melayani.

Berkelanjutan : Mempunyai makna bahwa dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara berkesinambungan dengan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan tetap berlandaskan prinsip menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta memperhatikan risiko bencana dan perubahan iklim. Prinsip berkelanjutan dapat dilihat melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk pemerataan pembangunan wilayah dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta tangguh terhadap bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan SDM Kubu Raya yang Unggul, Berdaya Saing dan Inovatif;
2. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan;
3. Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif, Efisien dan Transparan;
4. Mewujudkan Kesejahteraan dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Mewujudkan Stabilitas Sosial Budaya dan Lingkungan Alami yang Lestari;
6. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kawasan untuk Memperkecil Kesenjangan Sosial;
7. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, terutama untuk sasaran yang ada di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat namun tidak ada kewenangannya di Kabupaten, seperti urusan ketahanan energi, ataupun sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang memerlukan dukungan daerah seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan"***, dengan misi:

1. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dari Desa hingga Kota;
3. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government*;
5. Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kesehatan;
6. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan sesuai dangan Kearifan Lokal;
7. Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera;
8. Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Keadilan dan Kesejahteraan Gender;
9. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
10. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
11. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2043

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2043. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya dengan asumsi-asumsi yang meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang tercantum di dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2043 akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan RIPJPID Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

Hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah didasarkan pada hasil riset dan inovasi

Penyusunan dokumen RIPJPID menentukan produk-produk unggulan daerah dan pengkajian isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, potensi dan permasalahan utama yang tersusun selama penyusunan RIPJPID dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD. Penguatan ekosistem riset dan inovasi difokuskan pada sebuah tema prioritas yang mampu mendorong penguatan daya saing sehingga menjadi pengungkit bagi perekonomian daerah, sekaligus menyelesaikan permasalahan atau isu strategis di daerah. Adapun sasaran RIPJPD Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah untuk mendukung target kinerja Bupati Kubu Raya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029.

Tema prioritas yang diangkat dalam RIPJPID adalah pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia. Sedangkan hasil penyepakatan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kubu Raya adalah pada sektor industri pengolahan dengan sub sektor makanan dan minuman dengan bahan baku pertanian, perkebunan dan pertanian.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap bidang urusan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dibawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan, agar dapat berjalan baik serta memastikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga terjadi konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, sehingga akan memudahkan dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan

APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial.
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
10. Menyesuaikan dengan perubahan dan perbaikan regulasi dan aturan yang terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang dikemukakan secara ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD dalam RPJPD, keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam dasar hukum

penyusunan, memuat uraian ringkas dasar hukum penyusunan RPJMD baik berskala nasional maupun lokal. Dalam hubungan antar dokumen, memuat penjelasan yang terkait dengan keterhubungan dokumen RPJMD dengan RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, KLHS, RIPJPID dan Rencana Sektoral lainnya. Dalam maksud dan tujuan dijelaskan secara ringkas terkait dengan tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD. Sedangkan dalam sistematika penulisan, diuraikan tata cara penyusunan RPJMD termasuk dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, yang disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, bab ini juga menyajikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Untuk permasalahan diidentifikasi berdasarkan data dan informasi yang disajikan sebelumnya. Sedangkan untuk isu strategis disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Dimana visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang diturunkan dari visi dan misi serta menggambarkan

tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, dan selaras dengan RPJPD dan RPJMN. Sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Selain itu, bab ini juga memuat dan menjelaskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merujuk pada program prioritas Kepala Daerah dan disertai dengan indikator program, target kinerja, serta proyeksi pendanaan yang dibutuhkan. Selain itu bab ini juga memuat target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) selama periode 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kubu Raya akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan yang akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Analisis ini tidak hanya mengidentifikasi pencapaian positif, tetapi juga menyoroti unsur-unsur yang memerlukan peningkatan atau optimalisasi di berbagai sektor. Analisis mendalam ini bertujuan untuk merinci aspek-aspek kunci yang menjadi pilar pembangunan, membuka wawasan terhadap permasalahan yang perlu diselesaikan, dan memberikan dasar bagi penyusunan strategi di masa depan. Tujuannya tidak hanya terbatas pada menilai keberhasilan pembangunan saat ini, tetapi juga memberikan pandangan proaktif terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan tercapainya keberhasilan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah ini adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah definitif ± 6.985,24 Km² atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa. Tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadi 8.549,294 Km² yang terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan 123 (seratus dua puluh tiga) desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat 0°13'40,83" sampai dengan 1°00'53,09" Lintang Selatan, serta 109°02'19,32" sampai dengan 109°58'32,16" Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak

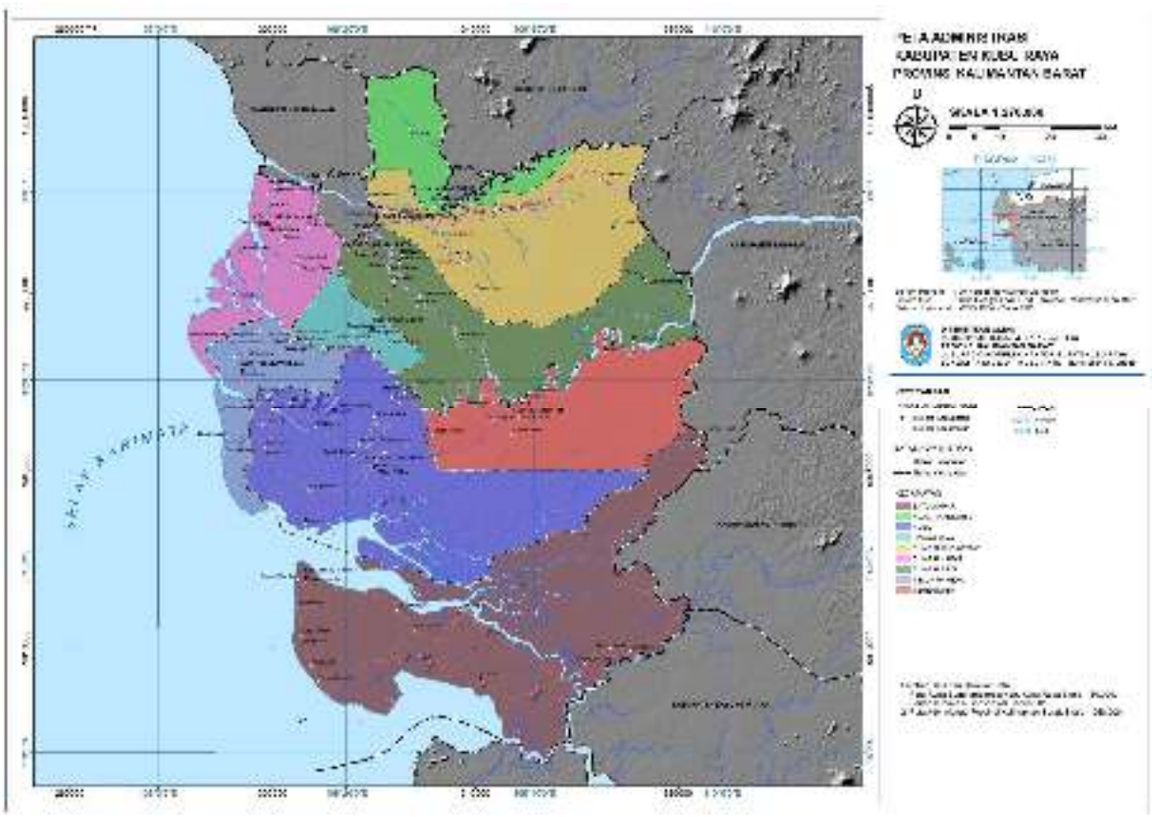
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Natuna

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 123 desa dengan luas wilayah yang tercatat di BPS Kabupaten Kubu Raya sebesar 8.567,99 km². Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan
Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.431,36	28,38
2	Terentang	Terentang	10	677,20	7,90
3	Kubu	Kubu	20	1.562,46	18,24
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	409,38	4,78
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	15	587,33	6,85
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	209,18	2,44
7	Sungai Raya	Arang Limbung	22	1.190,32	13,89
8	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	15	1.180,75	13,78
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	6	320,01	3,74
Kabupaten Kubu Raya			**123**	**8.567,99**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Kecamatan dengan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah 2.431,36 km² atau 28,38 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Rasau Jaya dengan luas wilayah 209,18 km² atau 2,44 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa yang paling banyak terletak di Kecamatan Sungai Raya dengan jumlah 22 desa dan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Rasau Jaya dengan jumlah 6 desa.

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043, Pasal 8 disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pontianak, meliputi 3 wilayah, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai

Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;

- Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 Km² (7.408 Km × 194 Km = 1.630,68 Km²);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;
- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan; Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Kubu Raya berjumlah 46 (empat puluh enam) buah Pulau-pulau Kecil yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.

Tabel 2.2.
Nama Pulau Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

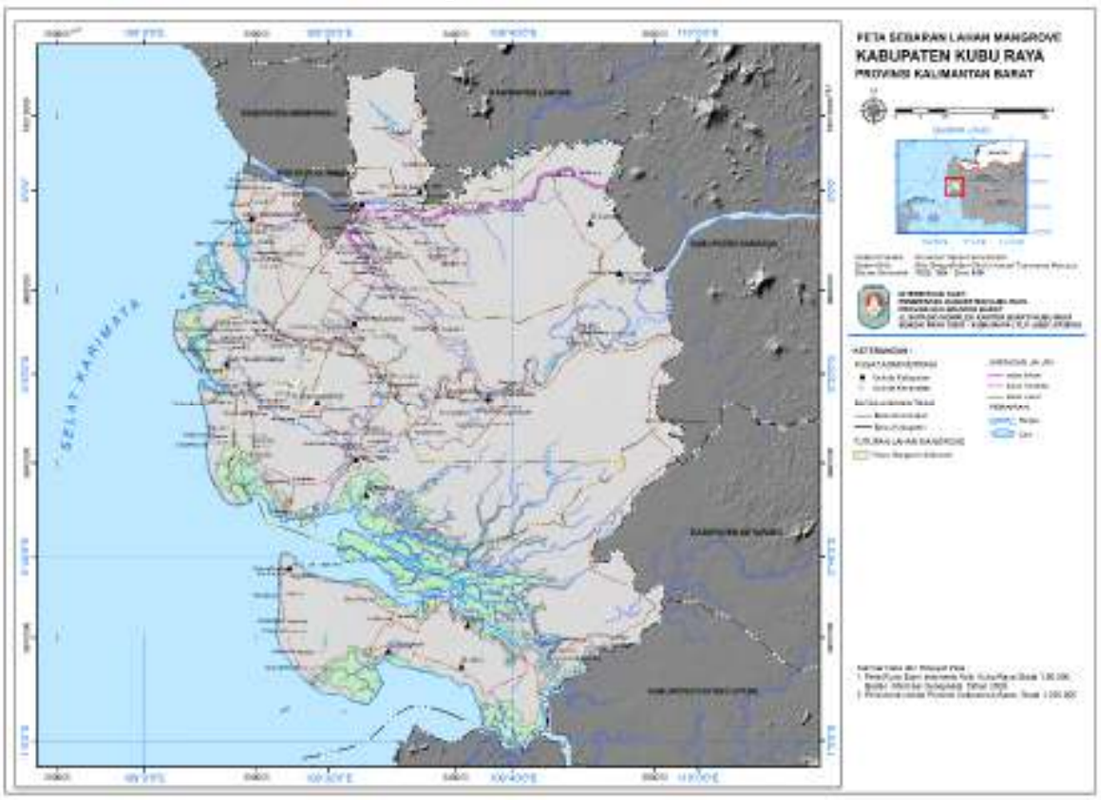
No.	Kecamatan	Nama Pulau
1	Batu Ampar	1. Pulau Gelanggang 2. Pulau Padangtikar 3. Pulau Selatsih 4. Pulau Tenggaramandi 5. Pulau Perling 6. Pulau Telokair Satu 7. Pulau Telokair Dua 8. Pulau Telokair Tiga 9. Pulau Sejenuairtawar 10. Pulau Pulaibuntung 11. Pulau Munggu' Linang 12. Pulau Apong Sembilan 13. Pulau Berembang 14. Pulau Bidara 15. Pulau Pakawal 16. Pulau Panjang 17. Pulau Sempede Dalam 18. Pulau Panjang Tiga
2	Kubu	19. Pulau Burung Besar 20. Pulau Dabong 21. Pulau Tiga 22. Pulau Muarakubu

No.	Kecamatan	Nama Pulau
		23. Pulau Ola-Ola
3	Teluk Pakedai	24. Pulau Pelombak 25. Pulau Teluk Pakedai
4	Sungai Kakap	26. Pulau Kurnia 27. Pulau Nyamuk 28. Pulau Sepokkeladi 29. Pulau Sepoklaut 30. Pulau Sepokperupuk 31. Pulau Tanjungsaleh 32. Pulau Tempurung 33. Pulau Minyak 34. Pulau Betingtengah 35. Pulau Dua Besar 36. Pulau Dua Kecil
5	Sungai Raya	37. Pulau Tanjungsapi 38. Pulau Limbung 39. Pulau Buntutlimbung 40. Pulau Keranji 41. Pulau Telukbayur 42. Pulau Jambu 43. Pulau Separoh 44. Pulau Benuang 45. Pulau Sekancil
6	Sungai Ambawang	46. Pulau Hanyut

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan *mangrove* dan gambut. Kawasan *mangrove* Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun jumlah kawasan *mangrove* tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2021 menunjukkan tutupan hutan *mangrove* di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9 persen diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya (Data Bentang Kalimantan, 2022). Peta Sebaran *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2.
Hutan *Mangrove* di Kalimantan Barat



Terdapat 67 (enam puluh tujuh) spesies *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya, tediri dari 33 spesies *mangrove* sejati (*true mangrove*) dan 34 spesies *mangrove* ikutan (*associate mangrove*). Dari 67 spesies tersebut terdapat 1 spesies *mangrove* langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*). Spesies ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nuigini). Di Kabupaten Kubu Raya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu NGO yaitu SAMPAN, spesies Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*) atau istilah lokal masyarakat di Kabupaten Kubu Raya disebut Tumuk Putih hanya terdapat 7 batang pohon saja yang terdapat di Hutan desa Tanjung Harapan dengan status *Critically Endangered* (CN) (SAMPAN, 2018).

Mengingat pentingnya fungsi kawasan *mangrove* tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah negara ke-4 terbesar yang miliki lahan gambut di dunia (*Wetland*

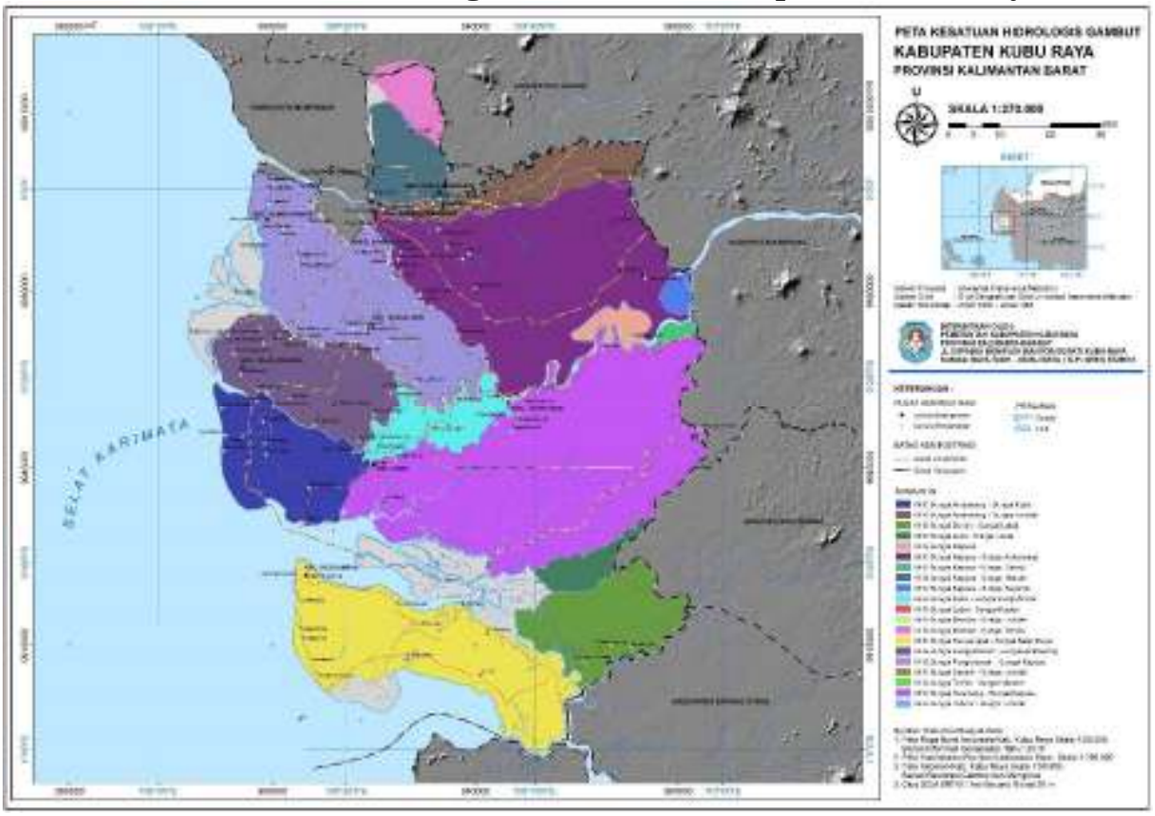
International, 2008). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Departemen Pertanian, di Tahun 2011 tercatat luas lahan gambut di Indonesia ± 14,9 Juta Ha. Pulau Sumatera memiliki ± 6,4 Juta Ha (43 persen), Pulau Kalimantan ± 4,8 Juta Ha (32 persen) dan Papua memiliki ± 3,7 Juta Ha (25 persen).

Di Kalimantan Barat terdapat ± 1,68 Juta Ha lahan gambut. Dan dari ± 1,68 Ha Juta lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80 persen dari target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu:

1. KHG Batu Ampar-1;
2. KHG Batu Ampar-2;
3. KHG Kuala Mandor;
4. KHG Kubu;
5. KHG Kubu - Terentang;
6. KHG Sungai Ambawang;
7. KHG Sungai Ambawang – Sungai Raya;
8. KHG Sungai Kakap – Rasau Jaya;
9. KHG Sungai Kapuas - Sungai Terentang;
10. KHG Teluk Pakedai; dan
11. KHG Terentang – Batu Ampar.

Peta Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dimana kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

Gambar 2.3.
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.1.3. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0 - > 60 persen. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2 persen. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief > 10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - > 60 m.

2.1.1.1.4. Kondisi Geologi

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat

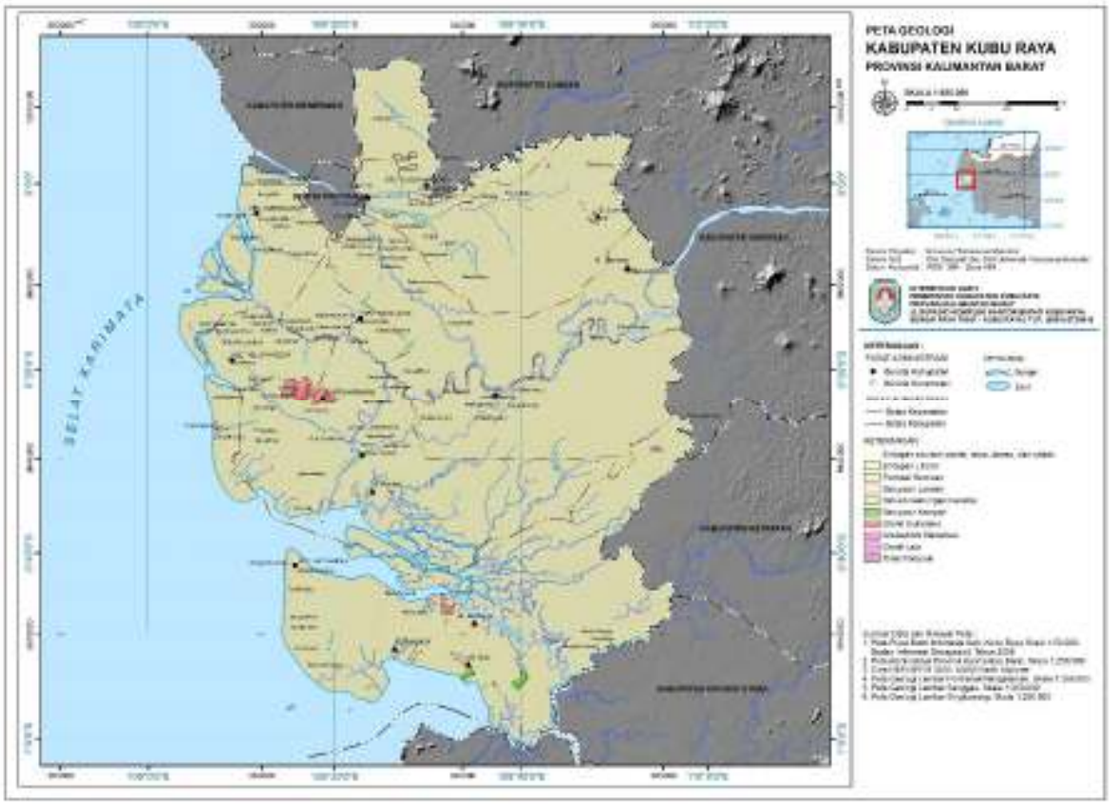
yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada di antara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, *gleisol*, *organosol* dan regosol.

1. Aluvial, jenis tanah aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol*, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau Tanah Gambut atau Tanah Organik, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30 persen untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20 persen untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60 persen, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya sebagimana pada Gambar 2.4. sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya



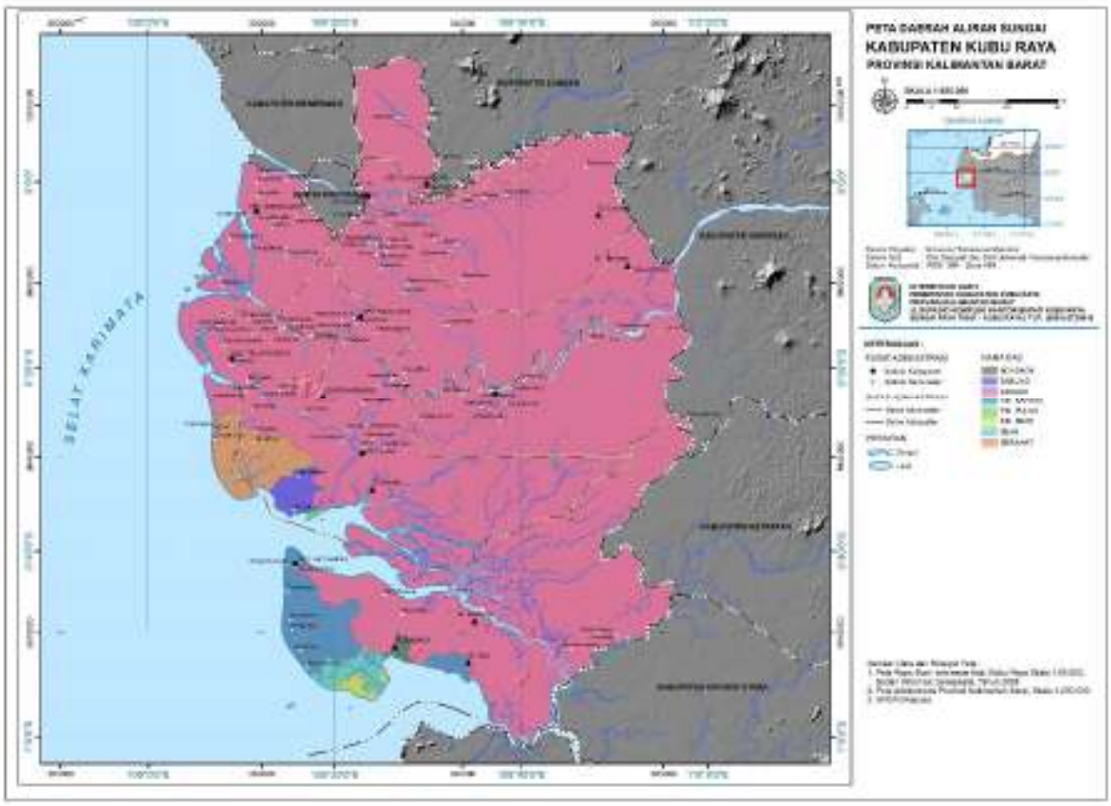
2.1.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar.

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.5. sebagai berikut:

Gambar 2.5.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya



Sedangkan untuk Daerah Irigasi Rawa (DIR) dan Daerah Irigasi (DI) terdiri dari:

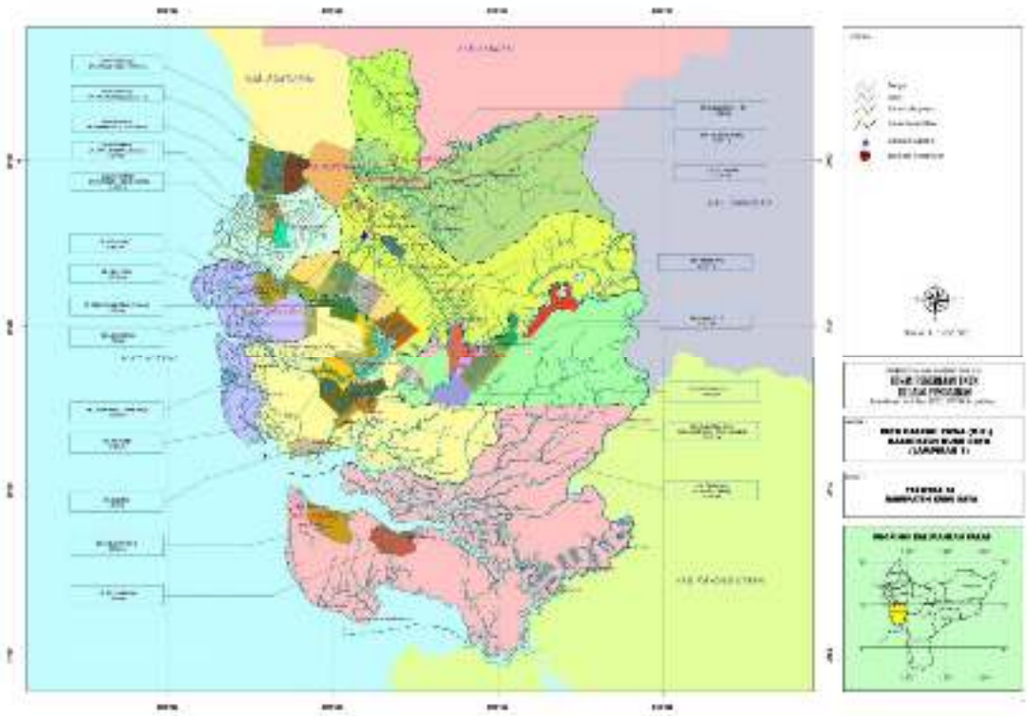
1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Nasional, terdiri atas 3 (tiga) DIR yaitu DIR. Teluk Bayur, DIR. Kubu Komplek dan DIR. Kerawang Komplek.
2. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR. Kapuas Kecil I, DIR. Kapuas Kecil II, DIR. Tebang Kacang, DIR. Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR. Jawi – Kalimas – Betutu, DIR. Punggur Selat Kering, DIR. Pinang Komplek, DIR. Olak-Olak Kubu dan DIR. Teluk Nibung.
3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten, terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yaitu DIR. Air Putih, DIR. Ambangah, DIR. Ambarawa, DIR. Arus Deras, DIR. Bemban, DIR. Betuah, DIR. Biong, DIR. Dabung, DIR. Durian, DIR. Dusun Obyek S. Durian, DIR. Gunung Tamang, DIR. Jalo, DIR. Jangkang I + II, DIR. Jawa Tengah, DIR. Kapuas Kecil III, DIR. Kapur, DIR. Korek, DIR. Kuala Dua, DIR. Kuala Karang, DIR. Kuala Mandor A, DIR. Kuala Mandor B, DIR. Kubu Padi, DIR. Lais, DIR. Lingga, DIR. Lintang Batang, DIR. Loncek, DIR. Mengkalang, DIR. Nipah Panjang, DIR. Padang Tikar, DIR. Padang Tikar I, DIR. Padang Tikar II,

DIR. Pancaroba, DIR. Pancaroba Sungai, DIR. Pasak, DIR. Pasak Piang, DIR. Puguk, DIR. Pulau Limbung, DIR. Pulau Nyamuk, DIR. Radak I + II, DIR. Retok, DIR. S. Jawi, DIR. Selat Remis, DIR. Sepuk Keladi, DIR. Sepuk Laut, DIR. Sepuk Perupuk, DIR. Simpang Kanan, DIR. Suka Maju, DIR. Sungai Ambawang Kuala, DIR. Sungai Bulan, DIR. Sungai Enau, DIR. Sungai Nibung, DIR. Sungai Nipah, DIR. Sungai Selamat – Seruat, DIR. Sungai Tempayan, DIR. Tamang, DIR. Tanjung Bunga, DIR. Tanjung Harapan, DIR. Tanjung Saleh, DIR. Tapah, DIR. Tasik Malaya, DIR. Teluk Gelam, DIR. Teluk Kapuas, DIR. Teluk Lerang dan DIR. Terentang.

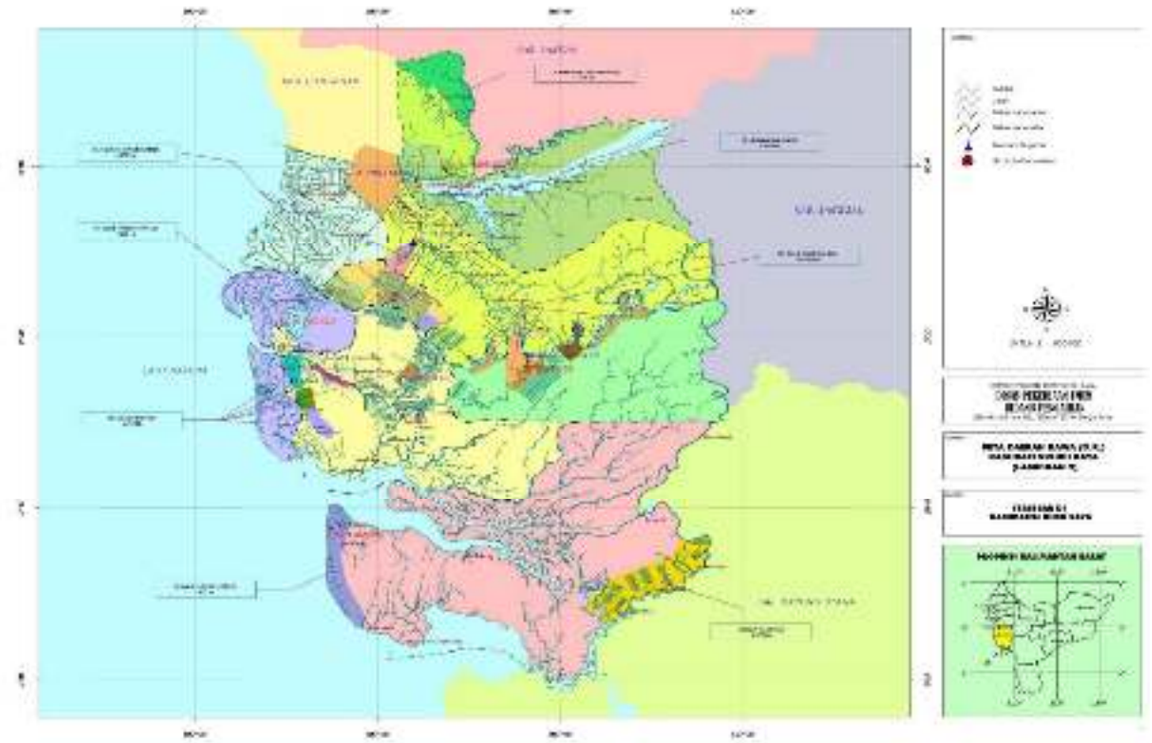
4. Daerah Irigasi (DI) Kabupaten, terdiri dari 8 (delapan) DI yaitu DI. Baharu Ambawang, DI. Bemban Barat, DI. Bemban Timur, DI. Ence Manan, DI. Nuri, DI. Padu Empat, DI. Samak dan DI. Radak.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.6. dan Gambar 2.7. di bawah ini.

Gambar 2.6.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya



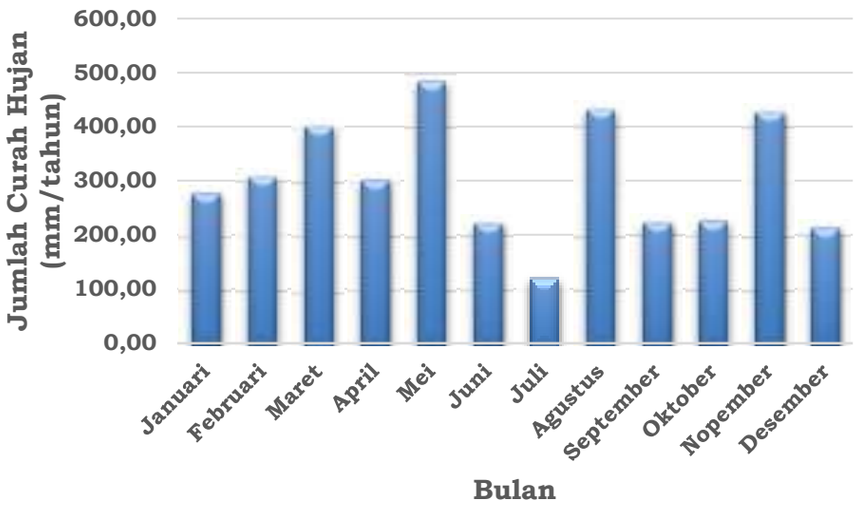
Gambar 2.7.
Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 259 mm. Jumlah hari hujan berdasarkan catatan BMKG Supadio pada tahun 2023 adalah 220 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 27° Celsius.

Grafik 2.1.
Jumlah Curah Hujan Bulanan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2024



2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pola ruang menunjukkan sebaran peruntukan yang berfungsi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan cagar budaya. Sementara itu, kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

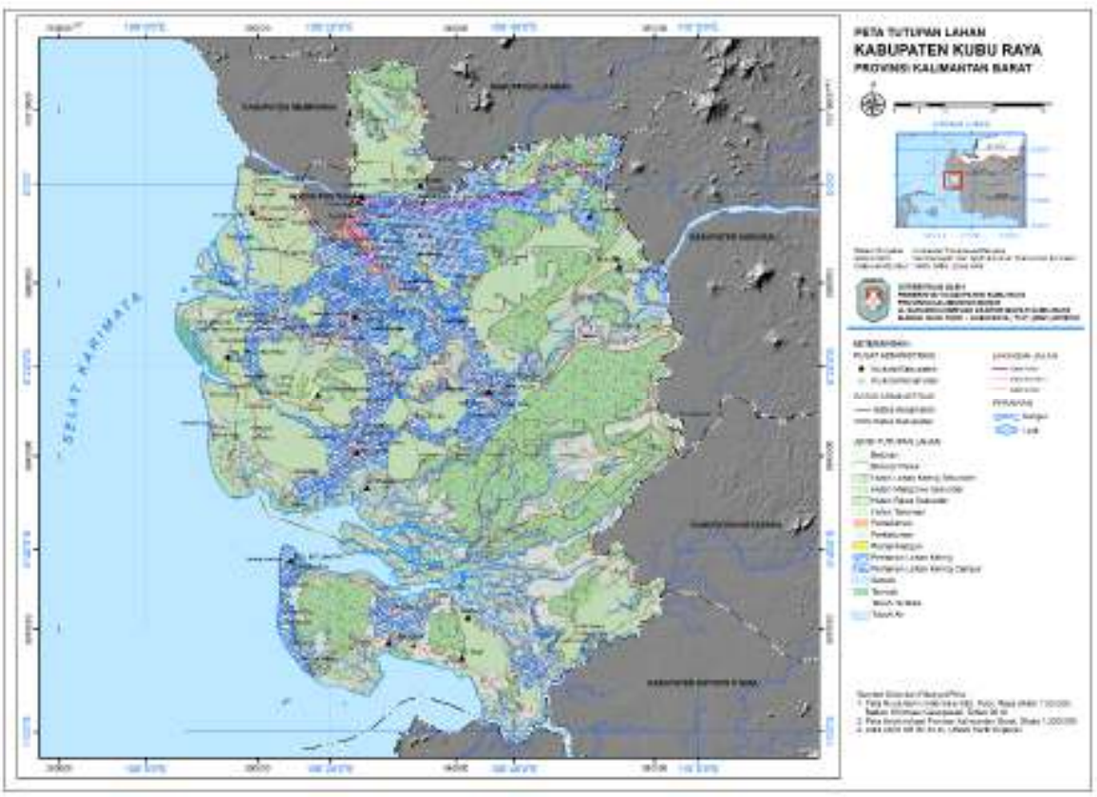
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya dengan luas kurang lebih 29.236,16 hektar dan tersebar di seluruh Kecamatan. Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 134.174,712 hektar yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang, dan Kecamatan Batu Ampar. Untuk kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Kubu Raya kurang lebih seluas 7.667,04 hektar yang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Teluk Pakedai.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan kawasan perkebunan dengan luas 275.021,07 hektar, yang diikuti dengan kawasan hutan produksi tetap dengan luas 201.393,77 hektar, dan kawasan hortikultura dengan luas 82.617,36 hektar.

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.8. berikut:

Gambar 2.8.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya



2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah *hinterland* Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalaman Sanggau-Kapuas Hulu.

Tabel 2.3.
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Kubu Raya

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	PKN Pontianak (Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah)	1. 2. 3.	PKL Kubu (Kecamatan Kubu PKL Rasau Jaya (Kecamatan Rasau Jaya) PKL Sungai Kakap (Kecamatan Sungai Kakap)	1. 2. 3. 4.	PPK Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B) PPK Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar) PPK Permata (Kecamatan Terentang) PPK Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	PPL Air Putih (Kecamatan Kubu) PPL Batu Ampar (Kecamatan Batu Ampar) PPL Jeruju Besar (Kecamatan Sungai Kakap) PPL Lingga (Kecamatan Sungai Ambawang) PPL Mekar Sari (Kecamatan Sungai Raya) PPL Mengkalang (Kecamatan Kubu) PPL Pasak (Kecamatan Sungai Ambawang) PPL Pinang Luar (Kecamatan Kubu) PPL Pulau Limbung (Kecamatan Sungai Raya) PPL Punggur Besar (Kecamatan Sungai Kakap) PPL Seruat Tiga (Kecamatan Kubu) PPL Sumber Agung (Kecamatan Batu Ampar) PPL Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya) PPL Sungai Besar (Kecamatan Batu Ampar) PPL Sungai Enau (Kecamatan Kuala Mandor B) PPL Sungai Nipah (Kecamatan Teluk Pakedai)

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
						17. 18. 19.	PPL Tanjung Bunga (Kecamatan Teluk Pakedai PPL Teluk Bayur (Kecamatan Terentang) PPL Terentang Hulu (Kecamatan Terentang)

Sumber : Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Kakap);
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Kubu, Kecamatan Rasau Jaya, dan Kecamatan Sungai Kakap;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi PPK Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B), PPK Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), PPK Permata (Kecamatan Terentang), dan PPK Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai); dan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi PPL Air Putih, PPL Mengkalang, PPL Pinang Luar, dan PPL Seruat Tiga di Kecamatan Kubu; PPL Batu Ampar, PPL Sumber Agung, dan PPL Sungai Besar di Kecamatan Batu Ampar; PPL Jeruju Besar dan PPL Punggur Besar di Kecamatan Sungai Kakap; PPL Lingga dan PPL Pasak di Kecamatan Sungai Ambawang; PPL Mekar Sari, PPL Pulau Limbung, dan PPL Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya; PPL Sungai Enau (Kecamatan Kuala Mandor B); PPL Sungai Nipah dan PPL Tanjung Bunga di Kecamatan Teluk Pakedai; serta PPL Teluk Bayur dan PPL Terentang Hulu di Kecamatan Terentang.

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. Kawasan Pesisir Sungai Kakap berada di Kecamatan Sungai Kakap, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata, perikanan, dan hortikultura; dan
2. Kawasan Perkotaan Baru Rasau Jaya berada di Kecamatan Rasau Jaya, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan hortikultura dan transmigrasi.

Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan sekitar Gunung Ambawang – PKL Kubu di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai, yang ditujukan untuk:

1. Mempersiapkan kawasan evakuasi bencana dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
2. Menunjang pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan Muara Kubu yang merupakan KSP;
3. Mempercepat pembangunan dermaga Muara Kubu yang terhubung dengan dermaga penyeberangan Teluk Batang dalam rangka mempercepat waktu tempuh perjalanan antara Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya dengan Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara dengan merealisasikan pembangunan ruas Jalan Rasau Jaya;
4. Mendukung kelancaran pemasaran hasil produksi sektor perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah;
5. Menunjang pengembangan pariwisata di Kawasan Gunung Ambawang Kecamatan Kubu dan Pantai Tengkuyung Kecamatan Teluk Pakedai;
6. Menunjang pertumbuhan kawasan transmigrasi Rasau Jaya; dan
7. Kemudahan memperoleh material untuk perbaikan jalan koridor Kuala Dua – Muara Kubu.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup:

1. Kawasan rawan abrasi.
   a. Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap; dan
   b. Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya.
2. Kawasan rawan gelombang pasang.
   Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.
3. Kawasan rawan banjir.
   Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang.
4. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang.
   Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang
5. Kawasan rawan kebakaran.
   Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas:
   a. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; dan
   b. Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan gambut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan patroli ke titik rawan kebakaran. Selain itu, untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD akan mengerahkan helikopter untuk menangani kebakaran serta melakukan *blocking* api agar tidak merambat ke permukiman warga.

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Perkembangan Kependudukan

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data di dalam Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2024, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 649.870 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 332.051 jiwa dan 317.819 jiwa penduduk perempuan. Dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2024 adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu 251.739 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2024 adalah Kecamatan Terentang yaitu 14.475 jiwa.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sungai Raya	235.386	235.759	240.027	247.110	251.739
2	Kuala Mandor B	28.211	27.751	27.591	28.180	28.478
3	Sungai Ambawang	82.443	82.859	85.406	88.040	89.796
4	Terentang	13.743	13.702	13.686	14.150	14.475
5	Batu Ampar	35	36.425	35.786	36.340	36.531
6	Kubu	43.335	43.423	42.484	43.410	43.899
7	Rasau Jaya	30.745	30.986	31.337	32.380	33.099
8	Teluk Pakedai	20.745	20.589	20.241	20.560	20.655
9	Sungai Kakap	118.868	119.145	125.659	129.080	131.198
Total		**609.392**	**615.125**	**622.217**	**639.250**	**649.870**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksi jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Total populasi Kabupaten Kubu Raya pada tahun tersebut mencapai 649.870 ribu, dengan jumlah laki-laki sebesar 332.051 ribu dan perempuan sebesar 317.819 ribu. Analisis menunjukkan bahwa distribusi penduduk paling tinggi terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun, diikuti oleh kelompok umur 0-4 tahun, menandakan adanya konsentrasi penduduk pada rentang usia produktif dan generasi muda. Selain itu, terdapat kecenderungan umum

di mana jumlah penduduk cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sebuah pola yang sering kali ditemukan dalam struktur demografi. Meskipun jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan dalam beberapa kelompok umur, perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan secara keseluruhan.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	29.651	28.422	58.073
2	5 – 9	28.275	26.890	55.165
3	10 – 14	27.849	26.361	54.210
4	15 – 19	27.883	25.942	53.825
5	20 – 24	27.255	25.930	53.185
6	25 – 29	29.736	28.464	58.200
7	30 – 34	28.201	26.616	54.817
8	35 – 39	25.719	24.857	50.576
9	40 – 44	23.174	22.331	45.505
10	45 – 49	21.126	20.326	41.452
11	50 – 54	18.331	18.025	36.356
12	55 – 59	15.365	14.940	30.305
13	60 – 64	11.919	11.226	23.145
14	65 – 69	7.934	7.517	15.451
15	70 – 74	5.135	5.079	10.214
16	75 +	4.498	4.893	9.391
Jumlah		**332.051**	**317.819**	**649.870**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksi jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui.

2.1.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara natural, laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena adanya mutasi penduduk yang dikarenakan adanya kelahiran, kematian, datang dan pergi/pindah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Terentang yaitu 2,42 persen. Sedangkan laju

pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai yaitu 0,48 persen. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Menurut Kecamatan, 2024

No	Kecamatan	Keterangan	
		Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Sungai Raya	251.739	1,96
2	Kuala Mandor B	28.478	1,09
3	Sungai Ambawang	89.796	2,09
4	Terentang	14.475	2,42
5	Batu Ampar	36.531	0,50
6	Kubu	43.899	1,15
7	Rasau Jaya	33.099	2,34
8	Teluk Pakedai	20.655	0,48
9	Sungai Kakap	131.198	1,71
Kabupaten Kubu Raya		**649.870**	**1,73**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.1.4.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk mencapai 87 jiwa per kilometer persegi, dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 88 jiwa per kilometer persegi. Namun pada tahun 2022 dan 2023, setelah luas wilayah dimutakhir di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, menjadi 8.550 km^2 sehingga mempengaruhi kepadatan penduduk tahun 2022 yang menyebabkan penurunan menjadi 73 jiwa per kilometer persegi, pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 75,28, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 75,85. Data ini bisa digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tren dan kebijakan yang diperlukan untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan

di Kabupaten Kubu Raya, serta untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan, 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (per km²)
1	Sungai Raya	251.739	1.190,32	211,49
2	Kuala Mandor B	28.478	320,01	88,99
3	Sungai Ambawang	89.796	1.180,75	76,05
4	Terentang	14.475	677,20	21,37
5	Batu Ampar	36.531	2.431,36	15,02
6	Kubu	43.899	1.562,46	28,10
7	Rasau Jaya	33.099	209,18	158,23
8	Teluk Pakedai	20.655	409,38	50,45
9	Sungai Kakap	131.198	587,33	223,38
Jumlah		**649.870**	**8.567,99**	**75,85**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah yang ditunjukkan dengan angka *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang terbagi atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga kostan (ADHK). Sedangkan PDRB per kapita adalah indikator yang mengukur pendapatan rata-rata per individu di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Distribusi PDRB-ADHB yang dikelompokkan berdasarkan jenis lapangan usaha di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 32,83 persen, diikuti dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,42 persen dan sektor Konstruksi sebesar 11,36 persen. Namun, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu secara berturut-turut 33,17 persen pada sektor Industri Pengolahan, 11,94 persen pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 11,70 persen pada sektor Konstruksi pada tahun 2023. Ditengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, lapangan usaha Industri Pengolahan memegang peranan terbesar dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Kubu Raya, walaupun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini terutama disebabkan oleh dominasi industri *crude palm* oil (CPO) yang harganya mengalami tren menurun selama tahun 2023, sehingga berdampak pada penurunan permintaan dan produksi industri kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.8.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

Kat.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,13	13,15	12,36	11,94	12,42
B	Pertambangan dan Penggalian	3,49	3,54	3,46	3,59	3,50
C	Industri Pengolahan	33,97	35,31	35,43	33,17	32,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,39	0,37	0,42	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	11,73	12,10	11,74	11,70	11,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,87	9,57	9,40	10,17	10,37
H	Transportasi dan Pergudangan	8,28	6,99	9,56	10,73	10,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	1,55	1,51	1,54	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	3,56	3,59	3,42	3,49	3,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	1,29	1,18	1,15	1,11
L	Real Estat	3,00	2,87	2,62	2,71	2,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,37	0,37	0,40	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95	3,70	3,35	3,45	3,57

Kat.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	3,65	3,62	3,38	3,40	3,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,18	1,13	1,33	1,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,80	0,73	0,70	0,76	0,78
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.9.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

Kat.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,49	3,60	1,27	0,45	4,42
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,03	8,58	4,89	8,60	4,38
C	Industri Pengolahan	-0,46	7,42	6,37	2,02	3,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,37	1,23	3,22	18,68	7,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,89	6,34	8,88	5,38	3,54
F	Konstruksi	-0,43	8,81	2,03	5,27	4,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,98	3,33	5,99	10,31	7,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-32,97	-12,09	26,49	5,53	3,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,72	9,34	9,11	8,41	8,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	8,48	6,41	9,77	6,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,16	2,97	-0,17	5,33	4,72
L	Real Estat	4,10	3,51	0,12	9,75	8,87
M,N	Jasa Perusahaan	-3,21	0,64	4,78	15,69	5,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	-0,38	-0,06	4,50	9,20
P	Jasa Pendidikan	-6,43	4,28	2,78	8,57	9,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,49	38,82	5,53	23,53	6,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-10,32	0,59	7,74	17,25	7,03
Produk Domestik Regional Bruto		**-2,39**	**5,18**	**5,48**	**4,98**	**4,99**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi

dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

PDRB per Kapita Kabupaten Kubu Raya secara rata-rata terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka PDRB per Kapita Kabupaten Kubu Raya ADHB pada tahun 2019 sebesar 29.105,09 miliar rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga sebesar 38.323,80 miliar rupiah pada tahun 2023. Walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19, namun Kabupaten Kubu Raya dapat pulih dan terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2023.

Tabel 2.10.
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ADHB	28.930,52	31.227,44	35.341,87	38.286,16	41.725,56
ADHK	17.831,73	18.754,97	19.772,49	20.757,80	21.794,06
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	47.586,00	50.546,00	56.227,00	59.892,00	64.206,00
ADHK	29.331,00	30.358,00	31.457,00	32.472,00	33.536,00
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-7,74	3,50	3,62	3,23	3,28

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kabupaten Kubu Raya saat ini menggunakan perhitungan laju inflasi dari Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak merupakan kota yang terdekat dari Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.11.
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Kubu Raya (%)

No.	**Uraian**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Pertumbuhan PDRB	-2,39	5,18	5,48	4,98	4,99
2.	Laju Inflasi (Kota Pontianak)	2,11	1,16	6,35	2,09	1,58

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Data tersebut menggambarkan laju inflasi di Kota Pontianak dari tahun 2020 hingga 2024. Laju Inflasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi kearah yang relatif aman untuk kondisi fiskal Kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Inflasi pada tahun 2020 sebesar 2,11 persen dan pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang signifikan dengan laju inflasi mencapai 6,35 persen. Lonjakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga energi dan bahan bakar, fluktuasi mata uang, atau faktor-faktor eksternal lainnya. Namun, pada tahun 2024 inflasi dapat kembali dikendalikan sehingga terjadi penurunan hingga diangka 1,58 persen.

Analisis data ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak beserta pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memantau faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dampak riil pergerakan inflasi yang dihitung berdasarkan IHK akan terasa memberikan dampak secara riiil terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Dengan kondisi geografis yang terpisahkan oleh wilayah perairan, tekanan perubahan IHK terhadap biaya distribusi ke wilayah-wilayah pedalaman, akan dibebankan kepada konsumen, sehingga *purchasing power* menjadi rendah.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut.

2.1.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator

keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.

Tabel 2.12.
Kinerja Pendidikan

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Melek Huruf (Persen)	90,24	91,81	92,09	94,65	n/a
2.	Rata Lama sekolah (Tahun)	6,83	7,00	7,02	7,04	7,05
3.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,85	13,87	13,88	13,88	13,90
4.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI/Paket A	108,24	106,40	107,79	109,27	109,31
	- SMP/MTs/Paket B	116,12	98,88	97,79	94,88	83,94
	- SMA/SMK/MA/Paket C	80,31	99,58	101,62	100,06	92,49
5.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	96,58	97,63	97,54	97,91	98,84
	- SMP/MTs/Paket B	81,11	98,88	80,76	70,47	71,37
	- SMA/SMK/MA/Paket C	53,24	99,58	53,24	49,19	49,77
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	92,93	92,36	99,15	98,80	99,22
	- SMP/MTs/Paket B	113,89	104,48	97,35	95,65	92,79
	- SMA/SMK/MA/Paket C	80,40	64,01	71,05	70,70	69,19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2025

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah berarti jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, tahun 2022 sebesar 7,02 tahun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,04 tahun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2023 rata-rata penduduk Kabupaten Kubu Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 (satu) SMP. Dalam lima tahun

terakhir, rata-rata lama sekolah cenderung belum menunjukkan perubahan yang signifikan, yakni rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai lulus SD.

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua dengan salah satu strateginya adalah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi APS semakin terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

2.1.2.2.2. Kesehatan

Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari motode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2024 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-4 (empat) dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kendatipun secara relatif terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk angka harapan hidup, komponen IPM pada tahun 2024 mencapai 73,42 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan angka harapan hidup sebesar 73,27 tahun. Peningkatan terhadap angka harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.13.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kubu Raya	68,89	69,09	69,83	70,50	71,14
2.	Provinsi Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.14.
Kinerja Kesehatan

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus)	32	55	28	28	28
2.	Angka Harapan Hidup	72,71	72,79	73,01	73,27	73,42
3.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	362	449	280	159	159
4.	Stunting	13,40	7,90	6,80	6,80	6,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2025

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa kinerja kesehatan di Kabupaten Kubu Raya mengalami perubahan selama periode 2019 hingga 2023. Angka Usia Harapan Hidup terus mengalami peningkatan dari angka 70,43 pada tahun 2019 menjadi 73,27 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah balita penderita gizi buruk juga mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 jumlah balita penderita gizi buruk ditunjukkan sebesar 159 jiwa.

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang cukup tinggi sayangnya tidak dikuti dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai

pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least Develop Contries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhaan ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (*basic need*) dengan pendekatan teori Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada beberapa pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minimum Regional (UMR).

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan selama empat tahun berturut sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat diakibatkan karena Kabupaten Kubu Raya termasuk salah satu kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi. Persentase Penduduk Miskin mengalami penurunan hingga tahun 2024 yang

ditunjukkan dengan angka 4,08 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 ditunjukkan dengan jumlah 24,72 ribu jiwa.

Tabel 2.15.
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kemiskinan 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	25.900	25.470	24.390	25.330	24.720
2.	Persentase Kemiskinan (%)	4,42	4,34	4,12	4,23	4,08

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2025

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 sebesar 0,36, ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok termiskin semakin mendekat dari garis kemiskinan yang artinya akan semakin mudah untuk kelompok termiskin untuk keluar dari kemiskinan. Hal yang sama juga terlihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2024 sebesar 0,05, Ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dapat diartikan bahwa ketimpangan antara sesama penduduk miskin juga semakin kecil. Penurunan yang signifikan dalam data diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya telah memberikan dampak yang positif. Namun, meskipun terjadi penurunan, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan ini berkelanjutan dan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Evaluasi terus menerus terhadap kebijakan dan program yang ada mungkin diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.16.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2020	0,62	1,01	0,14	0,23
2021	0,47	1,03	0,10	0,23
2022	0,40	1,04	0,09	0,24

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2023	0,55	1,02	0,15	0,24
2024	0,36	0,86	0,05	0,18

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.2.2.4. Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Kubu Raya sebesar 67,71 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 sebesar 67,47 persen, lalu kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 64,66 persen, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,28 persen. Dan pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Kubu Raya kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,83 persen. Secara gender, TPAK laki-laki mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 87,66 persen dari tahun 2020 sebesar 83,57 persen. Sedangkan TPAK perempuan justru mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 43,07 persen dari tahun 2020 sebesar 51,59 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. TPT berada pada tingkat 5.62% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 7.14% pada tahun 2020 sebelum sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 6.87%, dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 6,76%. Meskipun ada fluktuasi, TPT tetap berada pada tingkat yang bisa dianggap sebagai tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Secara gender, TPT laki-laki mengalami fluktuasi dari tahun 2020, namun menunjukkan tren yang menurun hingga di pada tahun 2024 menjadi sebesar 6,77 persen dari tahun 2020 sebesar 7,08 persen. Untuk TPT perempuan juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 7,24 persen menjadi 6,63 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.17.
Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020-2024

No	Indikator Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**67,71**	**67,47**	**64,66**	**65,28**	**65,83**
	Laki-Laki	83,57	83,53	81,94	84,05	87,66
	Perempuan	51,59	51,18	47,15	45,70	43,07
2.	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**7,14**	**7,02**	**6,87**	**6,76**	**6,73**
	Laki-Laki	7,08	7,58	6,24	5,59	6,77
	Perempuan	7,24	6,09	7,97	9,01	6,63

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2017 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 250 unit dengan jumlah siswa sebanyak 10.635 siswa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka Putus Sekolah idealnya adalah 0 persen. Pada tahun 2017, Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,83 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,57 persen. Angka Angka Putus Sekolah SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP dan SMU, berkolerasi dengan Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonomi untuk membantu orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Perkembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 sebesar 18,00, SMP sebesar 14,00 dan SMU sebesar 18,00. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya cukup ideal.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni pada tahun 2017 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya sebesar 78,56 persen, tahun 2018 sebesar 75,67 persen dan pada tahun 2019 dan 2020 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan menjadi 78,92 persen. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Persentase guru yang sudah bersertifikasi pada tahun 2020 sebesar 33,75 persen mengalami peningkatan apabila dibandingkan dari tahun 2019 yang baru sebesar 23,75 persen.

Tabel 2.18.
Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2024

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
1	Baik	743	311	n/a
2	Rusak Ringan	1.806	655	n/a

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
3	Rusak Sedang	17	0	n/a
4	Rusak Berat	15	0	n/a
5	Rusak Total	0	0	n/a
	Jumlah	**2.581**	**966**	
1	% Baik	28,79	32,19	n/a
2	% Rusak Ringan	69,97	67,81	n/a
3	% Rusak Sedang	0,66	0,00	n/a
4	% Rusak Berat	0,58	0,00	n/a
5	% Rusak Total	0,00	0,00	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2025

Tabel 2.19.
Urusan Konkuren Bidang Pendidikan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melek Huruf (AMH)	90,24	91,81	92,09	94,65	n/a
2	IPM	68,89	69,09	69,83	70,50	71,14
	- Usia Harapan Hidup (UHH)	70,69	70,59	70,69	70,95	73,24
	- Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,64	13,82	13,87	13,88	13,90
	- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,83	7,00	7,02	7,04	7,05
	- Pengeluaran Perkapita (ribuan rupiah)	8.773,42	8.709,08	9.833,19	9.142,00	10.132,00
3	Angka Putus Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	0,08	0,05	1,02	n/a	n/a
	- APS SMP/MTs	0,33	0,22	2,10	n/a	n/a
	- APS SMA/MA/SMK	0,29	0,10	n/a	n/a	n/a
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	92,93	92,36	99,15	98,88	98,88
	- APS SMP/MTs	113,89	104,48	97,35	95,31	95,31
	- APS SMA/MA/SMK	80,40	64,01	71,05	70,20	70,20
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- APM SD/MI	96,58	97,63	97,54	97,61	97,61
	- APM SMP/MTs	81,11	81,33	80,76	80,14	80,14
	- APM SMA/MA/SMK	53,24	52,16	53,24	53,34	53,34

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- APK SD/MI	108,24	106,40	107,79	109,27	109,27
	- APK SMP/MTs	116,12	98,88	97,79	94,88	94,88
	- APK SMA/MA/SMK	80,31	99,58	101,62	100,06	100,06
7	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)					
	- APT SD/MI	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
	- APT SMP/MTs	99,98	100,00	n/a	n/a	n/a
	- APT SMA/MA/SMK	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
8	Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Sekolah PAUD/TK	256	100	110	110	110
	- Jumlah Sekolah SD/MI	544	540	545	545	545
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	240	283	245	245	245
	- Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	137	102	144	144	144
9	Jumlah Murid (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Murid TK/PAUD	11.205	3.713	3.728	3.728	3.728
	- Jumlah Murid SD/MI	71.444	73.159	71.772	71.772	71.772
	- Jumlah Murid SMP/MTs	32.072	32.898	23.526	23.526	23.526
	- Jumlah Murid SMA/SMK/MA	23.474	13.383	25.916	25.916	25.916
10	Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)					
	- Jumlah Guru TK/PAUD	4.164	366	443	443	443
	- Jumlah Guru SD/MI	2.309	4.703	5.257	5.257	5.257
	- Jumlah Guru SMP/MTs	1.479	757	2.553	2.553	2.553
	- Jumlah Guru SMA/SMK/MA	7.952	893	1.779	1.779	1.779
11	Rasio Murid Terhadap Guru					
	- Rasio Murid Terhadap Guru TK/PAUD	10	10	9	9	9

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	- Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	17	17	14	14	14
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	14	14	10	10	10
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	17	17	15	15	15
12	Angka Melanjutkan (AM)					
	- AM SMP	50,00	53,58	n/a	n/a	n/a
	- AM SMA	100,00	104,61	n/a	n/a	n/a
13	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah SD dalam kondisi baik	721	713	743	743	743
	- Sekolah SMP dalam kondisi baik	395	386	311	311	311
	- Sekolah SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	368	342	n/a	n/a	n/a
14	Ketersediaan Sekolah					
	- Ketersediaan SD/MI	544	545	545	545	545
	- Ketersediaan SMP/MTS	240	240	245	245	245
	- Ketersediaan SMA/ MA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Ketersediaan SMK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Ketersediaan TK	256	263	110	110	110
15	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	78,48	78,92	n/a	n/a	n/a
16	Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi	23,75	33,75	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2025
Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Angka melek huruf di Kabupaten Kubu Rata meningkat dari 90,24 persen pada tahun 2019 menjadi 94,65 persen pada tahun 2023, begitu juga rata-rata lama sekolah yang

meningkat dari 6,83 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,05 tahun pada tahun 2024, dan harapan lama sekolah yang juga meningkat dari 13,82 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,90 tahun pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya adalah 7,05 tahun, dimana angka ini hanya naik sebesar 0,01 dari tahun 2024. Untuk mencapai target rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2025 mencapai 7,20 tahun, maka dibutuhkan terobosan-terobosan yaitu dengan strategi peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai suatu wadah kegiatan pembelajaran masyarakat yang programnya antara lain pendidikan kesetaraan (A, B dan C), pendidikan keaksaraan, pendidikan kewarganegaraan, kerumahtanggaan, dan lain-lain. Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 terdapat 21 PKBM, tapi dari segi jumlah dirasakan masih kurang dan belum merata di semua kecamatan.

Tabel 2.20.
Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
1	P9908484	PKBM SIMPATI	Kubu	Jl. Diponegoro TR 12 Desa Jangkang Satu
2	P9908485	PKBM MARGA JAYA	Rasau Jaya	Patok 33 Dusun Banjar Rejo Desa Rasau Jaya Tiga
3	P9952915	SKB KUBU RAYA	Rasau Jaya	Jl. Jendral Sudirman No. 45 Rasau Jaya
4	P9908486	PKBM AINUL YAQIN	Sungai Ambawang	Jl. Trans Kalimantan Gg. Seribut Desa Jawa Tengah
5	P2970101	PKBM ANGGREK	Sungai Ambawang	Jl. Trans Kalimantan
6	P9908780	PKBM PROKINDO	Sungai Kakap	Jl. Primer Desa Jeruju Besar
7	P9948187	PKBM ADAM	Sungai Raya	Jl. Adisucipto Perumahan Teluk Mulus Blok H.11
8	P9934733	PKBM AYO MAJU	Teluk Pakedai	Dusun Suka Harja
9	P9947905	PKBM MERDEKA	Terentang	Jalan Poros Utama No. 09
10	P9996716	PKBM BERKAT MANDIRI	Sungai Kakap	Jl. Parit Berkat Rt.15/Rw.06 Punggur Besar
11	P2970104	PKBM HARAPAN KITA	Sungai Kakap	Jl. Pramuka Komplek PHK Blok 1/88
12	P9970519	PKBM KHADIJAH	Sungai Raya	Jl. Wonodadi 2 No. 22 Rt.004/Rw.011
13	P2970519	PKBM APRILIA	Sungai Raya	Jl. A. Yani 2/Arteri Supadio Km 3,5

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
14	P9970252	PKBM SIRATUL JANNAH	Rasau Jaya	Jl. Rasau Jaya, Kuala Dua
15	P9908490	PKBM HASANAH	Terentang	Desa Teluk Bayur
16	P9908488	PKBM BAHANA KHATULISTIWA	Sungai Raya	Jalan Raya Kuala Dua Desa Kuala Dua
17	P9997854	PKBM BINA MULIA	Sungai Raya	Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Sungai Raya Lestari II BB 3
18	P9970265	PKBM KUNCI ILMU	Kuala Mandor B	Parit Pinang Merah RT.004/RW.001 Dusun Retok Kuala
19	P2970270	PKBM PERMATA HIJAU	Sungai Raya	Jl. Arteri Supadio Prt H. Muksin II Ds. Sungai Raya Dalam Kode Pos 78391ec. Sun
20	P9997788	PKBM RAMA	Sungai Raya	Jl. Adisucipto Komplek Btn Teluk Mulus No.A-9
21	P9970264	PKBM SUMBER ILMU	Kuala Mandor B	Jl. Parit Manuan Dusun Karya Indah RT.003/RW.005

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2025

Pertumbuhan pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya semakin baik. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya juga terus bertambah. Pondok pesantren ini juga bisa menjadi pilihan utama bagi para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.21.
Daftar Lembaga Pondok Pesantren Umum di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
1	510361120001	Abdussalam	Parit Surabaya, Desa Pasak	Sungai Ambawang
2	510061120002	Nahdlatul Athfal	Parit Adam, RT 02/RW 04, Desa Sungai Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
3	510061120003	Raudhatul Ulum I Meranti	Dusun Meranti, Desa Puguk	Sungai Ambawang
4	510061120004	Raudhatul Ulum Khaliliyah	Parit Surabaya, Desa Pasak	Sungai Ambawang
5	510061120005	Mambaul Ulum I	Kampung Baru, Desa Simpang Kanan	Sungai Ambawang

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
6	510061120007	Raudhatul Mubtadiin	Parit Banyu Ates, Desa Pasak Piang RT 02/RW 02	Sungai Ambawang
7	510061120008	Mambaul Ulum	Parit H. Maksum, Punggur Kecil RT 17/RW 15	Sungai Kakap
8	510061120009	Al Hidayah	Parit Naim, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
9	510061120011	Darul Hidayah	Jl. Sultan Agung Patok 5, Desa Rasau Jaya Satu	Rasau Jaya
10	510061120012	Al Aziz	Jl. Parit Timur Dusun Maju Bersama RT 02/RW 01, Desa Pasak	Sungai Ambawang
11	510061120014	Darut Tauhid	Jl. KH. Abdurrahman Wahid	Sungai Raya
12	510061120015	Haebat Islam	Jl. Soekarno Hatta,Gang Pesantren Gontong, Desa Parit Baru	Sungai Raya
13	510061120018	Mansyaul Ulum	Dusun Teluk Lerang, Desa Kuala Mandor A	Kuala Mandor B
14	510061120019	Miftahul Ulum	Jl.Karya Desa Sui Ambangah RT 03/RW 02	Sungai Raya
15	510061120021	Nurul Furqon	Parit Husin Desa Punggur Kecil	Sungai Kakap
16	510061120023	Rubath Naqsabandiyah	Parit Mas, Desa Madu Sari	Sungai Raya
17	510061120026	Nurussyamsi Wal Qomar	RT 04/RW 04 Dusun Kencana Utama, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
18	510061120028	Nahdatut Tullab	Parit Bunga Baru Darat RT 01/RW 02 Desa Madu Sari	Sungai Raya
19	510061120029	Al Khairiyah	Parit Sampang Baru RT 11/RW 15 Desa Lingga	Sungai Ambawang
20	510061120030	Darun Nasyiin	Sungai Pelaik, Simpang Kanan RT 02/RW 01	Sungai Ambawang
21	510061120032	Rabithatul Ikhwan	Dusun Pancamaju Desa Pancaroba	Sungai Ambawang
22	510061120033	Miftahul Ulum	Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Parit Sumber Bahagia, Sungai Asam	Sungai Raya

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
23	510061120036	Al Muttaqin	Dusun Belidak Hulu RT 003/RW 004, Desa Pasak Piang	Sungai Ambawang
24	510061120037	Darud Da'wah	Jl.Pelita III Desa Punggur Kecil	Sungai Kakap
25	510061120038	Hidayatul Mubtadien	Jl. Trans Kalimantan, Parit Masigi Desa Sungai Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
26	510061120039	Al Ikhlas	Parit Cahaya Baru, Desa Kuala Mandor B	Kuala Mandor B
27	510061120040	Miftahul Khairat	Jl. Karya Desa Sungai Ambangah	Sungai Raya
28	510061120041	Nahdatul Ulum	Jl. Kalimas Hulu, Desa Pal Sembilan	Sungai Kakap
29	510061120042	Darul Musabbihin	Parit Bakti Suci II, Desa Mekar Sari	Sungai Raya
30	510061120043	Nurul Amin	Parit Semangat Baru, Desa Kubu Padi	Kuala Mandor B
31	510061120044	As Shidiqiyah	Jl Raya Sungai Itik RT 025/RW 004, Dusun Melati, Desa Sungai Itik	Sungai Kakap
32	510061120045	Ainul Ulum	Jl. Trans Kalimantan KM 14, Parit Seribut Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang
33	510061120046	Hidayatul Muslimin I	Parit Sembin, Jl. Arteri Supadio, Desa Sungai Raya	Sungai Raya
34	510061120047	Mubayyinul Ulum	SP I, Dusun Madani RT 02/RW 11 Desa Mekar Sari	Sungai Raya
35	510061120049	Al Habib Sholeh Bin Alwi Al Haddad	Jl. Trans Kalimantan Parit Masigi, Desa Sungai Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
36	510061120050	Hidayatul Muttaqin	Jl. Zakia Baru, TR I, RT 01/RW 08, Desa Tebang Kacang	Sungai Raya
37	510061120051	Hidayatul Mubtadiin	Kampung Baru, Desa Simpang Kanan	Sungai Ambawang
38	510061120052	Raudlatul Jannah	Dusun Meranti, Desa Puguk	Sungai Ambawang
39	510061120053	Hidayatul Mubtadiien	Jl. Kuala Dua Parit Haji Ali, Desa Kuala Dua	Sungai Raya

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
40	510061120055	An Nur	Jl. Raya Sungai Berembang RT 04/RW 02 Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap
41	510061120056	Raudlatul Firdaus	Jl. Trans Kalimantan KM 17 Siak Alina, Desa Durian	Sungai Ambawang
42	510061120057	Darul Ulum	Jl. Soeharto Desa Kuala Dua	Sungai Raya
43	510061120059	Hidayatul Muslimin II	Jl Raya Desa Kapur, Parit Pak Reweng, Desa Kapur	Sungai Raya
44	510061120060	Khulafaur Rasyidin	Jl. A Yani II Sungai Raya	Sungai Raya
45	510061120063	Al Muhajirin	Jl. Sultan Agung Gang Kauman, Desa Rasau Jaya	Rasau Jaya
46	510061120064	Sunan Ampel	Jl. Jenderal Soedirman No. 48 Dusun Suka Damai RT 005/RW 002, Desa Rasau Jaya	Rasau Jaya
47	510061120065	Anta Al Amin	Parit Tengah, Desa Mekar Sari	Sungai Raya
48	510061120067	Madrasatul Quran	Jl. Pramuka Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap
49	510061120068	Tahfidzul Qur'an	Parit Bugis Desa Kapur	Sungai Raya
50	510061120069	Al Faqihil Muqoddam	Jl. Parit Gondang Legi, Desa Durian	Sungai Ambawang
51	510061120070	Darul Fikri	Jl. Sungai Belidak Gang H. Jelai Dusun Karya Tani RT 04/RW 01, Desa Sungai Belidak	Sungai Kakap
52	510061120072	Darul Falah	Jalan Bujama, Parit Keraka, Desa Pal Sembilan	Sungai Kakap
53	510061120073	Muinul Islam	Jalan Primer Jeruju Darat, RT 02/RW 01, Dusun Karya Utama, Desa Jeruju Besar	Sungai Kakap
54	510061120074	Ad - Da'wah Madinatul Qur'an	Jl. Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda, Kecamatan Sungai Kakap	Sungai Kakap
55	510061120075	Maulana Sulthan Muhammad	Jl. Mega Timur Parit Selatan	Sungai Ambawang

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
56	510361120083	Baitul Mubaroq	Parit Serong RT 037/RW 010, Desa Pal Sembilan, Kec. Sungai Kakap	Sungai Kakap
57	512361120070	Darul Hijrah	Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B	Kuala Mandor B
58	510361120070	Al Mansyur	Jl. Abdurrahman Wahid No. 29, RT 04/RW 04, Desa Kuala Dua	Sungai Raya
59	510361120071	Al Baariq	Jl. Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang
60	510361120175	Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat	Jl. Bani Suyuti, Dsn. Kencana Ungu, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
61	510361120174	Raudlatul Hikam Ismailiyah	Jl. Selat Bantan Dusun Sejahtera, Desa Sungai Kupah	Sungai Kakap
62	510361120077	Serumpun Cahaya	Jl. Parit Jawi, Desa Punggur Besar	Sungai Kakap
63	510061120076	Nurul Yaqin	Jl. Sui Adung, RT 02/RW 06	Sungai Raya
64	510361120078	Nurul Jadid	Jl. Raya Kumpai, Gang Karang Anyar	Sungai Raya
65	510061120084	Az-Zamhari Al-Banjari	Berinang	Sungai Ambawang
66	510061120085	Salafy Nurul Huda 2	Jl. KH. Imam Ubaidillah, RT 61/RW 18	Sungai Kakap
67	510061120086	Syirojul Munir Al Mubarok	Parit Tenaga Baru, RT 003/RW 002	Sungai Raya
68	510061120087	Tahfidz Daarul Hikmah	Jl. Parit H. Muksin II, Gg. Santri	Sungai Raya
69	510061120088	Darul Qur'an Wadda'wah	Jl. Sungai Raya Dalam, Parit Tanggok, RT 001	Sungai Raya
70	510061120089	Nurul Latif		Sungai Raya
71	510061120090	Busyrol Ulum	Jl. Parit Karya Baru	Sungai Raya
72	510061120091	Nurul Huda	Jl. Tanjung Pasir, Dusun Karya Bersama	Kuala Mandor B
73	510061120092	Salafiyah Ibrahimy	Jl. Syekh H. Ismail Mundu, RT 006/RW 003	Terentang
74	510061120093	Al-Ikhsan	Jl. Raya Desa Kapur, Dusun Bunut Jaya	Sungai Raya

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
75	510061120094	Nurussunnah Al Hasaniyyah	Parit Madura, RT 004/RW 002, Desa Madu Sari	Sungai Raya
76	510061120095	Darudda'wah Walhidayah	Jl. Jendral Sudirman, Dusun Purwerejo, RT 010/RW 003	Kubu
77	510061120096	Salafy Nurul Huda III	Jl. Parit Kongsi, Dusun Saga	Kuala Mandor B
78	510061120110	Miftahul Khairat	Jl. Karya, Desa Sungai Ambangah	Sungai Raya
79	510061120112	Nurul Tauhid	Parit Akop, Tenaga Baru	Sungai Raya
80	510061120123	Tuhfatul Athfal	Jl. HM. Soeharto Arah Rasau Jaya, Gg. Utama, RT 04/RW 06	Sungai Raya
81	510061120128	Sunan Ampel	Parit Harum, Desa Sungai Asam	Sungai Raya
82	510061120151	Hidayatul Mubtadiin	Parit Haji Ali, Dusun Karya II, RT 004/RW 004	Sungai Raya
83	510061120160	Bustanul Mubtadi'ien	Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Gg. Selat Madura	Sungai Raya
84	510061120169	Miftahul Ulum	Jl. Parit Berkat, Desa Punggur Besar	Sungai Kakap
85	510061120171	Hidayatul Muhsinin	Jl. Perdamaian, Kota Baru Ujung	Sungai Kakap
86	510061120172	An-Nuriyah	Tanjung Pasir, RT 02/RW 05, Dusun Karya Bersama	Kuala Mandor B
87	510061120173	Mambaul Ulum	Dusun Sui Jawi	Sungai Ambawang
88	510361120010	Nurul Hikmah	Teluk Harapan, Desa Sepuk Laut, Dusun II	Sungai Kakap
89	510361120022	Al Mas'udiyah	Dusun Karya Dua, Desa Kuala Dua	Sungai Raya
90	510361120069	Baitul Mubarok	Parit Serong, RT 037/RW 010, Desa Pal Sembilan	Sungai Kakap
91	510361120070	Al Mansyur	Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 29, RT 04/RW 04, Desa Kuala Dua	Sungai Raya
92	510361120071	Al Baariq	Jl. Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah	Sungai Ambawang
93	510361120077	Serumpun Cahaya	Jl. Parir Jawi, Desa Punggur Besar	Sungai Kakap

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
94	510361120078	Yayasan Mahad Nurul Jadid	Jl. Raya Kumpai, Gg. Karang Anyar	Sungai Raya
95	510361120079	Al Barokah	Jl. Parit Berkat Ilahi, Desa Sungai Asam	Sungai Ambawang
96	510361120080	Nahdlatus Shibyan	Parit Bakti Suci	Sungai Raya
97	510361120081	Al-I'tikaf Al-Islamiyah	Jl. A. Yani 2/Jl. Adi Sucipto Km. 15,5	Sungai Raya
98	510361120083	Baitul Mubarok	Parit Serong, Desa Pal Sembilan	Sungai Kakap
99	510361120174	Raudlatul Hikam Ismailiyah	Jl. Selat Bantan, Dusun Sejahtera, Desa Sui Kupah	Sungai Kakap
100	510361120175	Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat	Jl. Bani Suyuti, Dusun Kencana Utama, Desa Sungai Malaya	Sungai Ambawang
101	512361120070	Darul Hijrah	Dusun Karya Bersama, RT 05/RW 04, Desa Kuala Mandor A	Kuala Mandor B

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan

kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menekan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya penanganan kasus-kasus kematian bayi dan gizi buruk, pada dasarnya bersifat mulitisektor yang memerlukan intervensi dari PD lain. Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukan trend yang fluktuatif. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi, faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran BUMIL (Ibu Hamil) dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdekteksi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif BUMIL (Ibu Hamil) memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas.

Kondisi gizi buruk memiliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti “Gerakan Masyarakat” sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka penderita gizi buruk yang cenderung meningkat setiap tahun walaupun tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 16 orang, namun jumlanya Kembali meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 33 orang. Dari aspek derajat kesehatan pada Angka Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dan penanganan balita gizi buruk mengalami peningkatan, namun Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan jumlah penderita gizi buruk mengalami fluktuatif. Aspek pelayanan kesehatan keluarga pada pelayanan BUMIL K1, pelayanan BUMIL K4, pemeriksaan BUMIL, Imunisasi (UCI), persalinan Nakes, Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Pelayanan Kontrasepsi mengalami fluktuatif.

Tabel 2.22.
Urusan Konkuren Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
DERAJAT KESEHATAN							
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,71	72,79	73,01	73,27	73,42
2.	Angka Kematian Balita	Kasus	1	0	3	1	1
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	14	16	12	26	10

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Angka Kematian Bayi	Kasus	38	31	32	55	28
5.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Kasus	16	33	35	22	22
6.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Jumlah Penderita Gizi Kurang	Kasus	547	743	913	1853	1853
8.	Jumlah Penderita *Stunting*	%	25,60	23,63	13,40	7,90	6,80
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA							
1.	Pelayanan BUMIL K1	%	95,76	97,05	92,64	97,10	97,10
2.	Pelayanan BUMIL K4	%	88,38	89,11	87,12	94,00	94,00
3.	Pemeriksaan BUMIL	%	80,90	n/a	n/a	94,00	94,00
4.	Imunisasi (UCI)	%	90,00	n/a	n/a	50,00	50,00
5.	Imunisasi Dasar Lengkap	%	70,40	n/a	n/a	79,50	79,50
6.	Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	%	88,06	88,74	86,86	93,50	93,50
7.	Rasio Pelayanan Komplikasi Kebidanan	%	62,22	57,07	46,69	50,60	50,60
8.	Pelayanan Kontrasepsi	%	72,94	69,03	68,13	80,00	80,00
KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN							
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan/ Medis	Orang	589	447	536	1042	1042
	a. Tenaga Medis (Dokter)	Orang	41	30	41	65	65
	b. Tenaga Kebidanan/Keperawatan	Orang	465	370	412	770	770
	c. Tenaga Psikologi Klinis	Orang	0	0	0	0	0
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	12	64	64
	e. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	26	26	20	46	46
	f. Tenaga Gizi	Orang	31	25	27	49	49
	g. Tenaga Kesehatan Tradisional	Orang	0	0	0	0	0
	h. Apoteker	Orang	5	5	0	11	11
	i. Teknik Kefarmasian	Orang	18	22	24	37	37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan interkonektivitas antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 721/DPUPRPRKP/2024 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya, untuk Jalan Kabupaten sebanyak 70 ruas dengan panjang total 665,688 Km. Secara detail ruas jalan di Kabupaten Kubu Raya dengan status Jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.23
Daftar Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
1	01	Supadio – Simpang Wonodadi II	JN. KM 7,7 / Persimpangan	JK. KM 2,7 /Persimpangan	2,680	Sungai Raya	JK	
2	02	Simpang Wonodadi II – Sekunder C	JK. KM 2,7 / Persimpangan	JK. KM 7,7 /Persimpangan	9,580	Sungai Raya	JK	
3	03	Sungai Raya Dalam – Punggur	JN. KM 0,0 / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan Parit To'om	10,800	Sungai Raya – Sungai Kakap	JK	
4	04	Simpang Kapur – Batas Kota Pontianak	JN. KM 1,0 / Persimpangan Lampu Merah	Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	0,620	Sungai Raya	JK	
5	05	Simpang Kapur – Kumpai	JN. KM 1,0 / Persimpangan Lampu Merah	Pasar Kumpai	12,600	Sungai Raya	JK	
6	06	Kumpai – Tebang Kacang	Tugu AMD / Persimpangan	Parit Zakia	17,436	Sungai Raya	JK	
7	07	Kuala Dua – Mekar Sari	JP. KM 14,6 / Jembatan	Batas Desa Mekar Sari / Desa Sungai Asam	15,830	Sungai Raya	JK	
8	08	Sungai Asam – Sukulanting	Batas Desa Mekar Sari / Desa Sungai Asam	Dermaga Penyeberangan	12,970	Sungai Raya	JK	
9	09	Kuala Dua – Simpang Wonodadi II	JP. KM 4,5 / Persimpangan	Persimpangan Wonodadi II	7,515	Sungai Raya	JK	
10	10	Jl. Wonodadi I	JN. KM 6,8 / Persimpangan	JP. KM 11,5 / Persimpangan	1,450	Sungai Raya	JK	
11	11	Jl. Wonodadi II	JN. KM 6,8 / Persimpangan	Persimpangan Wonodadi II	2,266	Sungai Raya	JK	
12	12	Jl. Parit Bugis	JN. KM 5,5 / Persimpangan	JP. KM 10,7 / Persimpangan	2,085	Sungai Raya	JK	
13	13	Jl. Madu Sari	JN. KM 5,5 / Persimpangan	JK. KM 1,0 / Persimpangan	3,180	Sungai Raya	JK	
14	14	Jl. Parit H. Muksin	JN. KM 6,9 / Persimpangan	JK. KM 4,6 / Persimpangan	5,578	Sungai Raya	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
15	15	Hutan Kota – Sekunder C	JK. KM 4,0 / Persimpangan	JK. KM 5,5 / Persimpangan	6,870	Sungai Raya – Rasau Jaya	JK	
16	16	Jl. Sungai Durian Laut	JP. KM 0,0 / Persimpangan	Dermaga	0,700	Sungai Raya	JK	
17	17	Nipah Kuning – Jeruju Besar	Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar	11,120	Sungai Kakap	JK	
18	18	Sungai Kakap – Jeruju Besar	JP. KM 18 / Jembatan	Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar	5,820	Sungai Kakap	JK	
19	19	Sungai Kakap – Punggur	JP. KM 14,7 / Jembatan	Jembatan / Persimpangan Parit To'om	13,800	Sungai Kakap	JK	
20	20	Punggur – Parit Sarem	Persimpangan / Jembatan	Dermaga Penyeberangan	15,028	Sungai Kakap	JK	
21	21	Kota Baru – Punggur	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	JK. KM 8,1 / Persimpangan	10,550	Sungai Kakap	JK	
22	22	Jl. Cendana	JK. KM 3,2 / Persimpangan	Parit Keladi / Persimpangan	4,126	Sungai Kakap	JK	
23	23	Jl. Parit Penjara	JP. KM 9,6 / Persimpangan	Parit Keladi / Persimpangan	2,500	Sungai Kakap	JK	
24	24	Jl. Parit Keladi	JP. KM 12,8 / Persimpangan	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	8,938	Sungai Kakap	JK	
25	25	Sungai Kakap – Tanjung Intan	Persimpangan Pasar Sungai Kakap	Dusun Tanjung Intan	8,807	Sungai Kakap	JK	
26	26	Jl. Lingkar Pasar Sungai Kakap	Persimpangan Pasar Sungai Kakap	Kantor Polsek Sungai Kakap	0,947	Sungai Kakap	JK	
27	27	Jeruju Besar – Sungai Kupah	JK. KM 10,9 / Jembatan	Dusun Tanjung Intan	10,744	Sungai Kakap	JK	
28	28	Jl. Industri Tanggul Laut	Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	JK. KM 5,3 / Persimpangan	6,800	Sungai Kakap	JK	
29	29	Jl. Kalimas Hulu	Pasar Kaliman / Persimpangan	JK. KM 1,8 / Persimpangan	8,800	Sungai Kakap	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
30	30	Jl. Kapur II	JN. KM 2,9 / Persimpangan	Persimpangan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	0,634	Sungai Kakap	JK	
31	31	Jl. Purnama III	Persimpangan Parit Leban	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	2,650	Sungai Kakap	JK	
32	32	Jl. Wisata Tanjung Laut	JK. KM 4,2 / Persimpangan	JK. KM 5,0 / Persimpangan	3,470	Sungai Kakap	JK	
33	33	Mega Timur – Sungai Tempayan	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B	10,570	Sungai Ambawang	JK	
34	34	Jl. Ampera	JN. KM 2,2 / Persimpangan	JN. KM 5,0 / Persimpangan	3,740	Sungai Ambawang	JK	
35	35	Durian – Pasak Piang	JN. KM 5,0 / Persimpangan	Simpang 3 / Persimpangan	28,380	Sungai Ambawang	JK	
36	36	Korek – Pasak Piang	JN. KM 18,2 / Persimpangan	Persimpangan	14,710	Sungai Ambawang	JK	
37	37	Kuala Mandor B – Sungai Enau	Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B	Persimpangan Menuju Desa Retok	15,650	Kuala Mandor B	JK	
38	38	Sungai Enau – Kubu Padi	Persimpangan Menuju Desa Retok	Batas Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Landak	21,100	Kuala Mandor B	JK	
39	39	Sungai Enau – Retok	Persimpangan Menuju Desa Retok	Sungai / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak	3,750	Kuala Mandor B	JK	
40	40	Sekunder C – Punggur	JP. KM 10,1 / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan Parit To'om	14,450	Rasau Jaya – Sungai Kakap	JK	
41	41	Sekunder C – Bintang Mas I	JK. KM 5,5 / Persimpangan	Jembatan Bintang Mas 1	9,569	Rasau Jaya	JK	
42	42	Rasau Jaya – Parit Sarem	JP. KM 16,1 / Persimpangan	Persimpangan Dermaga Parit Sarem	17,330	Rasau Jaya	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
43	43	Rasau Jaya – Patok 50	JP. KM 13,8 / Persimpangan	JK. KM 5,0 / Persimpangan	5,160	Rasau Jaya	JK	
44	44	Patok 50 – Sungai Bulan	JK. KM 5,0 / Persimpangan	Dermaga Penyeberangan	13,260	Rasau Jaya – Sungai Raya	JK	
45	45	Jl. Bhakti	JP. KM 14,4 / Persimpangan	JK. KM 4,4 / Persimpangan	5,370	Rasau Jaya	JK	
46	46	Sungai Nipah – Selat Remis	Dermaga Penyeberangan	Jembatan / Pasar Sungai Gorah	13,100	Teluk Pakedai	JK	
47	47	Sungai Nipah – Sungai Deras	JK. KM 1,3 / Jembatan / Persimpangan	Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar	16,740	Teluk Pakedai	JK	
48	48	Selat Remis – Teluk Gelam	Jembaran / Pasar Sungai Gorah	Dermaga Penyeberangan	9,330	Teluk Pakedai	JK	
49	49	Dermaga Pinang Luar – Simpang Pinang Luar	Dermaga Penyeberangan	Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar	2,100	Kubu	JK	
50	50	Pinang Luar – Pinang Dalam	Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar	Jembatan	17,580	Kubu	JK	
51	51	Kampung Baru – Air Putih	Jembatan	Dermaga Penyeberangan	8,830	Kubu	JK	
52	52	Jangkang I – Jangkang II	Dermaga Penyeberangan	Persimpangan Menuju Dermaga	11,540	Kubu	JK	
53	53	Jangkang II – Dermaga	Persimpangan Menuju Dermaga	Dermaga Penyeberangan	1,600	Kubu	JK	
54	54	Jangkang II – Teluk Nangka	Dermaga Penyeberangan	Jembatan TR 9 / Persimpangan	4,620	Kubu	JK	
55	55	Teluk Nangka – Kubu	Jembatan TR 9 / Persimpangan	Jembatan Mesjid Kubu	1,460	Kubu	JK	
56	56	Jl. Lingkar Kota Kubu	Dermaga Pasar Kubu	Dermaga Pasar Kubu	3,046	Kubu	JK	
57	57	Kubu – Sungai Terus	Jembatan / Persimpangan	Jembatan Saluran Sekunder	3,815	Kubu	JK	

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Pengenal Pangkal Ruas	Pengenal Akhir Ruas	Panjang Ruas (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Status Jalan Kabupaten (JK)	Keterangan
58	58	Air Putih – Ambawang	Jembatan / Persimpangan	Jembatan / Persimpangan	7,952	Kubu	JK	
59	59	Teluk Empening – Permata	Dermaga Penyeberangan	Jembatan	9,186	Terentang	JK	
60	60	Permata – Terentang Hilir	Dermaga Terentang	Persimpangan Menuju SMA	1,656	Terentang	JK	
61	61	Terentang Hilir – Radak Satu	Persimpangan Menuju SMA	Jembatan TR 16 (Desa Sungai Radak Satu)	2,717	Terentang	JK	
62	62	Teluk Empening – Teluk Bayur	Persimpangan	Dermaga Penyeberangan	2,412	Terentang	JK	
63	63	Terentang Hilir – Terentang Hulu	Persimpangan Menuju SMA	Sungai	9,600	Terentang	JK	
64	64	Radak Dua – Terentang Hulu	Jembatan TR 16 (Desa Sungai Radak Satu)	Jembatan / Kantor Desa Terentang Hulu	14,338	Terentang	JK	
65	65	Medan Seri – Padang Tikar	Dermaga Padang Tikar	Persimpangan Mesjid	2,582	Batu Ampar	JK	
66	66	Padang Tikar – Tanjung Harapan	Persimpangan Mesjid	Sungai / Selat Sekh	24,386	Batu Ampar	JK	
67	67	Batu Ampar – Padang Tikar	Dermaga Batu Ampar	Persimpangan Mesjid	43,842	Batu Ampar	JK	
68	68	Batu Ampar – Karang Anyar	Persimpangan	Dermaga Penyeberangan	34,978	Batu Ampar	JK	
69	69	Sungai Kerawang – Sumber Agung	Dermaga Sungai Kerawang	Dermaga Desa Sumber Agung	13,560	Batu Ampar	JK	
70	70	Sumber Agung – Muara Tiga	TR 3A (Desa Sumber Agung)	Dermaga Sekunder D	14,785	Batu Ampar	JK	
					665,688		JK	

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2025

Kondisi jalan pada tahun 2024 sebagian besar mengalami kerusakan. Dari 665,688 Km panjang jalan keseluruhan, yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik sebesar 35,07 persen (233,458 Km), kondisi sedang 18,09 persen (120,401 Km), kondisi rusak ringan 29,26 persen (194,790 Km), dan jalan yang mengalami rusak berat mencapai 17,58 persen (117,039 Km) dari total panjang jalan yang ada.

Tabel 2.24.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	274,853	195,732	235,680	235,680	233,458
2	Sedang	116,724	226,221	218,931	218,931	120,401
3	Rusak Ringan	138,877	122,813	89,479	89,479	194,790
4	Rusak Berat	115,719	101,407	102,083	102,083	117,039
	Jumlah	**646,173**	**646,173**	**646,173**	**646,173**	**665,688**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.25.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Jenis Permukaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal / *Asphalted*	252,850	260,024	267,961	267,961	282,950
2	Kerikil / *Gravel*	10,865	24,623	24,623	24,623	32,617
3	Tanah / *Soil*	151,381	120,567	114,156	114,156	72,701
4	Lainnya / *Others*	231,077	240,959	239,433	239,433	277,420
	Jumlah / *Totals*	**646,173**	**646,173**	**646,173**	**646,173**	**665,688**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak, minum, maupun mencuci atau mandi. Bagi daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di pedalaman, penggunaan air bersih masih secara tradisional bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Atau di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Total air bersih/air minum yang disalurkan pada tahun 2024 mencapai 4.949.166 m^3 dengan 32.613 pelanggan. Sebagian besar konsumen PDAM di Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 adalah rumah permanen dengan jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 3.803.117 m^3. Sedangkan

pemakaian terkecil air bersih adalah Sosial Umum sebesar 1.000 m³. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26.
Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih Yang Disalurkan Dirinci Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Sambungan	Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³)
	Kelompok I		
1	Sosial Umum	36	1.000
2	Sosial Khusus A	2.580	130.209
3	Sosial Khusus B	230	17.359
4	Sosial Khusus C	272	23.352
	Kelompok II		
5	Rumah Tangga Semi Permanen	619	11.669
6	Rumah Tangga Permanen	266.104	3.803.117
7	Rumah Tangga Pertokoan dalam Gang	604	15.584
8	Rumah Tangga Mewah	6.779	109.164
9	Instansi Pemerintah	863	46.127
	Kelompok III		
10	Niaga Kecil	9.924	185.913
11	Niaga Menengah	23.157	418.193
12	Niaga Besar	780	142.456
13	Industri Kecil	84	17.161
14	Industri Menengah	82	9.211
15	Industri Besar	180	18.651
	Kelompok IV		
16	Komersil	-	-
17	Non Komersil	-	-
	2 0 2 4	**312.294**	**4.949.166**
	2 0 2 3	224.739	3.802.941
	2 0 2 2	18.094	3.265.056
	2 0 2 1	18.206	2.936.197
	2 0 2 0	17.446	2.674.402

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Sedangkan rencana detail terkait pengaturan ruang dan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini masih dalam tahapan penyusunan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa. Pada saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2021. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan, maka dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Agar pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan efektif dan efisien diperlukan penetapan kawasan perdesaan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2024 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Perdesaan yang sudah berstatus prioritas nasional sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Adapun data selengkapnya adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.27.
Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya Sampai Tahun 2024

No.	Kawasan Perdesaan	Penetapan Peraturan Bupati	RPKP	Status KPPN
1	Agropolitan Rasau Raya	Nomor 41 Tahun 2021	Sudah Ada	Sudah
2	Agropolitan Kuala Mandor Terigas	Nomor 41 Tahun 2021	Sudah Ada	Belum
3	Pertanian Terpadu Sungai Kakap	Nomor 41 Tahun 2021	Sudah Ada	Belum
4	*Rice Estate* Teluk Pakedai	Nomor 41 Tahun 2021	Belum Ada	Belum

No.	Kawasan Perdesaan	Penetapan Peraturan Bupati	RPKP	Status KPPN
5	Pesisir Pantai Teluk Pakedai	Nomor 41 Tahun 2021	Sudah Ada	Belum
6	Pesisir Batu Ampar	Nomor 41 Tahun 2021	Sudah Ada	Belum
7	Pesisir Pantai Padang Tikar	Nomor 41 Tahun 2021	Belum Ada	Belum
8	Pembangunan Kubu Bertuah	Nomor 41 Tahun 2021	Belum Ada	Belum
9	Agropolitan Ambassador	Nomor 41 Tahun 2021	Belum Ada	Belum

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, di mana masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Di Kabupaten Kubu Raya, untuk kawasan kumuh, mengacu pada Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 44/DPUPRPRKP/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum.uh Tahun 2022, meliputi 20 kawasan dengan total luas sebesar 510,66 Ha yang tersebar di 9 kecamatan. Secara detail Kawasan Kumuh di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.28.
Kawasan Kumuh Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No	Lokasi	Luas Kawasan (Ha)	Data Kependudukan		Tingkat Kekumuhan		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Nilai	Tingkat		
1	Kawasan Parit Mayor	16,09	424	115	40	Kumuh Sedang	+	B1

No	Lokasi	Luas Kawasan (Ha)	Data Kependudukan		Tingkat Kekumuhan		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Nilai	Tingkat		
2	Kawasan Sungai Raya	15,01	409	137	33	Kumuh Ringan	+	C1
3	Kawasan teluk Kapuas	0,96	68	332	32	Kumuh Ringan	+	C1
4	Kawasan Arang Limbung	30,27	1007	13	25	Kumuh Ringan	+	C1
5	Kawasan Limbung	31,26	920	235	48	Kumuh Ringan	+	C1
6	Kawasan Kuala Dua	22,25	470	162	55	Kumuh Ringan	+	C3
7	Kawasan Parit Baru	24,65	1253	5619	16	Kumuh Ringan	+	C3
8	Kawasan Sungai Ambawang Kuala	6,79	215	1274	26	Kumuh Ringan	+	C5
9	Kawasan Kuala Mandor B	5,54	59	198	16	Kumuh Ringan	+	C5
10	Kawasan Rasau Jaya Umum	13,08	259	525	28	Kumuh Ringan	+	C5
11	Kawasan Teluk Pakedai	19,77	317	822	21	Kumuh Ringan	+	C5
12	Kawasan Padang Tikar Satu	49,02	394	1929	25	Kumuh Ringan	+	C5
13	Kawasan Padang Tikar Dua	17,69	440	1524	36	Kumuh Ringan	+	C5
14	Kawasan Kubu	23,41	221	970	32	Kumuh Ringan	+	C5
15	Kawasan Terentang	7,55	121	515	26	Kumuh Ringan	+	C5
16	Kawasan Sungai Kakap	29,39	3117	108	23	Kumuh Ringan	+	-
17	Kawasan Batu Ampar	52,01	367	31	17	Kumuh Ringan	+	C3/C5
18	Kawasan Jeruju Besar	76,10	3252	43	22	Kumuh Ringan	+	-

No	Lokasi	Luas Kawasan (Ha)	Data Kependudukan		Tingkat Kekumuhan		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Nilai	Tingkat		
19	Kawasan Sungai Kupah	36,47	2280	61	26	Kumuh Ringan	+	-
20	Kawasan Sumber Agung	33,35	1224	37	30	Kumuh Ringan	+	-
	Total	**510,66**						

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Tabel 2.29.
Banyaknya Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
1	Batu Ampar	1	0
2	Terentang	0	0
3	Kubu	3	0
4	Teluk Pakedai	0	0
5	Sungai Kakap	9	0
6	Rasau Jaya	6	0
7	Sungai Raya	55	9
8	Sungai Ambawang	13	0
9	Kuala Mandor B	2	0
	2 0 2 4	**89**	**9**
	2 0 2 3	152	32
	2 0 2 2	137	30
	2 0 2 1	139	10
	2 0 2 0	137	8

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Perkembangan organisasi kemasyarakat di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2024 terdata sebanyak 89 organisasi masyarakat, jumlah organisasi masyarakat berkurang dibandingkan pada tahun 2023 dengan jumlah 152 organisasi masyarakat dan di tahun 2024 jumlah lembaga swadaya masyarakat menurun dari 32 lembaga swadaya masyarakat menjadi 9 lembaga swadaya masyarakat. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, rehabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertiban umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan perkebunan skala besar membawa resiko terjadinya penguasan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi maupun konflik lainnya terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan

ketertiban umum dan penegakkan Perda, peran Satpol PP sebagai garda Kabupaten cukup efektif melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejenisnya), maupun dalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.30.
Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
1	Bangunan Liar	227	Kabupaten Kubu Raya
2	Pedagang Kaki Lima	227	Kabupaten Kubu Raya
3	Gelandangan dan Pengemis	18	Kabupaten Kubu Raya
4	Reklame/Spanduk/Baliho/ Pamflet Liar	0	Kabupaten Kubu Raya
5	Kost/Hotel/Penginapan/ Losmen	35	Kabupaten Kubu Raya
6	Layang-layang	51	Kabupaten Kubu Raya
7	Anak Sekolah	24	Kabupaten Kubu Raya
8	Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet	32	Kabupaten Kubu Raya
9	Unjuk Rasa	2	Kabupaten Kubu Raya
	2023	**616**	**Kabupaten Kubu Raya**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, 2024

Aspek kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan secara terkoordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Provinsi Kalimantan Barat, BASARNAS Kalimantan Barat, Manggala Agni, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Pihak Swasta/Korporasi dan masyarakat.

2.1.3.1.6. Sosial

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin

cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurusi penderita cacat, sehingga Dinas Sosial belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhabilitasi.

Tabel 2.31.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial

Indikator Kinerja	No	Tahun	Jumlah Penduduk	Segmen					Total	%
			Data Agregat Semester I	PBI APBN (Jamkesmas)	PPU (Pekerja Penerima Upah)	PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)	BP (Bukan Pekerja)	PBI APBD (Jamkesda)		
Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta JKN	1	2014	596.430	184.498	30.310	11.092	4.256	0	230.156	38,59
	2	2015	597.098	184.498	45.814	24.284	3.247	4.371	262.214	43,91
	3	2016	597.764	193.135	56.025	30.570	3.306	4.353	287.389	48,08
	4	2017	601.356	196.157	74.191	41.564	3.410	5.434	320.756	53,34
	5	2018	603.407	205.966	92.656	52.235	3.957	11.756	366.570	60,75
	6	2019	605.787	242.926	103.316	41.478	4.118	54.555	446.393	73,69
	7	2020	610.103	234.794	109.630	44.124	3.422	46.065	438.035	71,80
	8	2021	610.103	229.133	119.687	56.465	3.958	42.410	521.653	85.50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2022

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 didominasi oleh fakir miskin. Adapun rincian Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.32.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Ditangani
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	(ABT) Anak Balita Terlantar Penderita Gizi Buruk dan Kurang	-	-	-	1	-	-	-	-
2	(AT) Anak Terlantar	-	-	-	1	-	-	-	-

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
3	(ABHUK) Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	-	-	-	59	46	46	46	46
4	(AJ) Anak Jalanan	-	1	-	-	-	-	-	-
5	(ADK) Anak Jalanan Kedisabilitasan	-	-	-	104	90	90	135	135
6	(AKTK) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(AMPK) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	1	-	-	-	-
8	(LUT) Lanjut Usia Terlantar	-	201	-	1.654	-	-	-	-
9	(PD) (Penyandang Disabilitas	-	11	-	192	360	360	429	429
10	(TS) Tuna Susila	-	-	-	26	-	-	-	-
11	(GL) Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(PM) Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-
13	(PL) Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	(KM) Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(BWBLP) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(ODHA) Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(NAPZA) Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Zat Adiktif	-	2	-	-	-	-	-	-
18	(KTR) Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	(KTK) Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	(PMBS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis PPKS	Jumlah PPKS							
		2017		2018		2019		2020	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
21	(KBA) Korban Bencana Alam	239	1.053	2.980	12.539	-	-	-	-
22	(KBS) Korban Bencana Sosial	61	364	14	32	-	-	-	-
23	(PRSE) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	(FM) Fakir Miskin	8.097	-	15.300	82.668	22.229	22.229	34.302	34.302
25	(KBSP) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-
26	(KAT) Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**8.397**	**1.632**	**18.294**	**97.277**	**22.725**	**22.725**	**34.912**	**34.912**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, 2022

2.1.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2024 sebesar 65,83 persen. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2024 sebesar 6,73 persen.

Tabel 2.33.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No	Indikator Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,71	67,47	64,66	65,28	65,83
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,14	7,02	6,87	6,76	6,73

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.34.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	**Angkatan Kerja**	**216.478**	**101.998**	**318.476**
	Bekerja	201.818	95.240	297.058
	Pengangguran Terbuka	14.660	6.758	21.418
2.	**Bukan Angkatan Kerja**	**30.463**	**134.814**	**165.277**
	Sekolah	17.225	23.697	40.922
	Mengurus Rumah Tangga	3.898	107.794	111.692
	Lainnya	9.340	3.323	12.663
Jumlah Total		**246.941**	**236.812**	**483.753**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Dari sisi jumlah usia produktif, angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 lebih besar dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024 Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya sebanyak 318.476 sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 165.277.

Tabel 2.35.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Berusaha Sendiri	48.091	35.026	83.117
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	15.650	5.945	21.595
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	5.580	519	6.099
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	111.424	34.321	145.745
5	Pekerja Bebas	15.530	1.709	17.239
6	Pekerjaan Keluarga/Tidak Dibayar	5.543	17.720	23.263
Jumlah		**201.818**	**95.240**	**297.058**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 sebanyak 402 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan jumlah 268 pencari kerja.

Tabel 2.36.
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
1	≤ SD	145.477	5.982	151.459
2	SMP	48.593	2.738	51.331
3	SMA	81.367	10.855	92.222
4	Perguruan Tinggi	21.621	1.843	23.464
	Kubu Raya	**297.058**	**21.418**	**318.476**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37.
Aspek Pelayanan Umum
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,35	84,31	85,25	85,64	85,92
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24	73,24	78,05	77,63	68,66
3	Indeks Ketimpangan Gender (IDG)	0,526	0,541	0,515	0,524	0,570
4	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	n/a

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	53,4	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas P3KB Kabupaten Kubu Raya, 2025

Kabupaten Kubu Raya mendapatkan penilaian Pratama untuk status kabupaten layak anak pada sejak tahun 2019 dan meningkat menjadi Madya di tahun 2023.

2.1.3.2.3. Pangan

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih mengandalkan konsumsi pangan pada komoditas beras dengan alternatif makanan pokok pengganti beras pada komoditas ubi kayu, jagung dan ubi jalar. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.38. di bawah ini.

Tabel 2.38.
Komoditas Pangan Serta Ketersediaan Energi dan Protein
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Produksi Komoditas Pangan Nabati**						
1.1.	Beras	Ton	97.643	176.225	0	0	0
1.2.	Jagung	Ton	3.306	6.411	4.075	9.727	3.338
1.3.	Kedelai	Ton	7	11	38	6	0,7
1.4.	Kacang Tanah	Ton	62	62	0	0	0
1.5.	Ubi Kayu	Ton	4.223	4.068	0	0	0
1.6.	Ubi Jalar	Ton	2.083	2.083	0	0	0
1.7.	Sayur	Ton	0	0	0	0	0
1.8.	Buah-Buahan	Ton	0	1.794	0	65.302	57.220
1.9.	Minyak Goreng	Ton	0	0	0	0	0
1.10.	Gula	Ton	0	0	0	0	0
2.	**Produksi Komoditas Pangan Hewani**						
2.1.	Daging Sapi dan Kerbau	Ton	227	643	1.417	1.027	753
2.2.	Daging Ayam	Ton	12.593	13.701	16.293	13.266	9.846
2.3.	Telur	Ton	4.436	4.436	0	0	0
2.4.	Susu	Ton	0	0	0	0	0
2.5.	Ikan	Ton	0	20.688	0	0	0

No.	Jenis	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	**Ketersediaan Energi dan Protein**						
3.1.	Energi	Kalori / Kapita / Hari	2.027	2.027	0	0	0
3.2.	Protein	Kalori	60	60	0	0	0

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.1.3.2.4. Pertanahan

Berdasarkan data dari Bagian Kerjasama dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dari tahun 2019-2020, melalui kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam program Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) telah menerbitkan 128 sertifikat hak atas tanah dan 51 Sertifikat Hak Pakai (SHP).

Tabel 2.39.
Sertifikat yang Dikeluarkan Melalui Kerjasama Badan Pertanahan Nasional dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2020

No.	Sertifikat	2019	2020
1	Sertifikat Hak Pakai (SHP)	35	16
2	Sertifikat Hak Atas Tanah	128	*

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021
Keterangan : * Tahun 2020 tidak ada sertifikat yang terbit karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan pengukuran

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang sukup mendasar. Keterbatasan penanganan permasalahan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel pada titik tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan terhadap aktivitas perusahaan

besar, yang diperkiraan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.40.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Dokumen	
		AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan
1	Batu Ampar	-	-
2	Terentang	-	-
3	Kubu	-	1
4	Teluk Pakedai	-	1
5	Sungai Kakap	-	3
6	Rasau Jaya	-	1
7	Sungai Raya	1	6
8	Sungai Ambawang	-	4
9	Kuala Mandor B	-	-
	2 0 2 4	**1**	**16**
	2 0 2 3	4	4
	2 0 2 2	-	7
	2 0 2 1	-	33
	2 0 2 0	3	19

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.41.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan				
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri	Pembangunan Perumahan	Pertambangan	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-
3	Kubu	1	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	1	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	2	-	1	-	-
6	Rasau Jaya	1	-	-	-	-
7	Sungai Raya	1	1	2	-	2
8	Sungai Ambawang	-	1	1	-	2
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-
	2 0 2 4	**6**	**2**	**4**	**-**	**4**
	2 0 2 3	-	2	-	-	2
	2 0 2 2	2	2	-	-	3
	2 0 2 1	2	6	1	5	19
	2 0 2 0	-	-	1	5	13

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.42.
Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen AMDAL Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kegiatan			
		Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Industri Pengolahan Kayu	Pembangunan Gedung	Lain-Lain
1	Batu Ampar	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	1
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-
	2 0 2 4	**-**	**-**	**-**	**1**
	2 0 2 3	1	-	1	2
	2 0 2 2	-	-	-	-
	2 0 2 1	-	-	-	-
	2 0 2 0	-	-	1	2

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk pertisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.43.
Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk (Persen)	97,11	102,87	94,89	99,51	99,51
2.	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran (Persen)	46,36	64,48	87,37	88,56	88,56
3.	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah (Persen)	29,14	30,55	43,57	100,00	100,00
4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Persen)	97,11	102,87	94,89	99,51	99,51
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	66,91	67,03	87,37	93,45	93,45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sampai akhir tahun 2024, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 Kecamatan yang terbagi menjadi 123 desa.

Tabel 2.44.
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Batu Ampar	15	15	15	15	15
2	Terentang	10	10	10	10	10
3	Kubu	20	20	20	20	20
4	Teluk Pakedai	14	14	14	14	14
5	Sungai Kakap	13	15	15	15	15
6	Rasau Jaya	6	6	6	6	6
7	Sungai Raya	20	22	22	22	22
8	Sungai Ambawang	15	15	15	15	15
9	Kuala Mandor B	5	6	6	6	6
	Kabupaten Kubu Raya	**118**	**123**	**123**	**123**	**123**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis perkembangan Indeks Desa Membangun seluruh Indonesia. Meskipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penguatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembang (desa mandiri). Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2024 terdapat total 52 desa mandiri di Kabupaten Kubu Raya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48.
Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kubu Raya 2024

No.	Kecamatan	Status Desa					Jumlah
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Batu Ampar	2	5	8	0	0	15
2	Terentang	4	3	2	1	0	10
3	Kubu	11	7	2	0	0	20
4	Teluk Pakedai	6	5	3	0	0	14
5	Sungai Kakap	13	2	0	0	0	15
6	Rasau Jaya	6	0	0	0	0	6
7	Sungai Raya	15	5	2	0	0	22
8	Sungai Ambawang	14	1	0	0	0	15
9	Kuala Mandor B	0	4	2	0	0	6
Jumlah		**71**	**32**	**19**	**1**	**0**	**123**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, 2025

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap desa yang ada.

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan dropping dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relatif terkendala.

Tabel 2.46.
Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
1	Batu Ampar	434	3.299
2	Terentang	132	2.551
3	Kubu	240	4.181
4	Teluk Pakedai	314	4.006
5	Sungai Kakap	1.809	13.141
6	Rasau Jaya	122	1.734
7	Sungai Raya	1.546	11.944
8	Sungai Ambawang	1.185	7.080
9	Kuala Mandor B	276	1.825
	2 0 2 4	**6.058**	**49.761**
	2 0 2 3	6.391	70.609
	2 0 2 2	9.693	69.159
	2 0 2 1	8.792	68.399
	2 0 2 0	14.367	66.155

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Gerakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kesehatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran. Untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Pada tahun 2024 jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 49.761 akseptor menurun dari tahun 2023 yang sejumlah 70.609 akseptor.

Tabel 2.47.
Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		SUNTIK	PIL	IMPLAN	KONDOM	IUD	VASEK	TUBEK	
1	Batu Ampar	2.869	379	46	3	2	0	0	**3.299**
2	Terentang	1.966	482	49	46	8	0	0	**2.551**
3	Kubu	1.727	527	111	13	3	0	0	**4.181**
4	Teluk Pakedai	3.133	839	27	6	1	0	0	**4.006**
5	Sungai Kakap	11.635	1.390	84	13	19	0	0	**13.141**
6	Rasau Jaya	1.133	464	65	61	11	0	0	**1.734**
7	Sungai Raya	10.466	1.316	106	8	48	0	0	**11.944**
8	Sungai Ambawang	6.096	738	178	36	32	0	0	**7.080**
9	Kuala Mandor B	1.422	373	28	2	0	0	0	**1.825**
	2 0 2 4	**42.247**	**6.508**	**694**	**188**	**124**	**0**	**0**	**49.761**
	2 0 2 3	33.319	16.659	11.016	1.662	6.333	257	1.363	70.609
	2 0 2 2	32.226	16.891	10.535	1.783	6.176	250	1.300	69.161
	2 0 2 1	31.158	17.294	10.339	1.888	6.201	258	1.261	68.399
	2 0 2 0	30.578	15.816	10.328	1.789	6.030	244	1.330	66.115

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.48.
Akseptor KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		SUNTIK	PIL	IMPLAN	KONDOM	IUD	VASEK	TUBEK	
1	Batu Ampar	322	28	81	1	2	0	0	**434**
2	Terentang	97	12	13	1	9	0	0	**132**
3	Kubu	200	6	29	1	4	0	0	**240**
4	Teluk Pakedai	185	43	67	5	13	0	1	**314**
5	Sungai Kakap	1.312	146	168	19	164	0	0	**1.809**
6	Rasau Jaya	62	9	27	1	16	0	7	**122**
7	Sungai Raya	1.056	124	172	8	123	8	55	**1.546**

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		SUNTIK	PIL	IMPLAN	KONDOM	IUD	VASEK	TUBEK	
8	Sungai Ambawang	859	42	196	2	86	0	0	**1.185**
9	Kuala Mandor B	205	49	13	7	2	0	0	**276**
	2 0 2 4	**4.298**	**459**	**766**	**45**	**419**	**8**	**63**	**6.058**
	2 0 2 3	3.250	1.333	1.064	179	425	137	3	6.391
	2 0 2 2	5.186	2.268	1.344	155	615	125	0	9.693
	2 0 2 1	5.094	1.919	1.176	172	330	91	10	8.792
	2 0 2 0	8.102	3.816	1.359	206	726	157	1	14.367

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.49.
Banyaknya Kelompok Ketahanan Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	BKB	BKL	BKR	PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah
1	Batu Ampar	10	2	2	3	**17**
2	Terentang	7	2	3	6	**18**
3	Kubu	8	1	4	4	**17**
4	Teluk Pakedai	11	6	4	6	**27**
5	Sungai Kakap	14	2	3	11	**40**
6	Rasau Jaya	6	6	4	7	**23**
7	Sungai Raya	16	4	3	17	**40**
8	Sungai Ambawang	16	3	4	11	**34**
9	Kuala Mandor B	6	3	2	1	**12**
	2 0 2 4	**94**	**29**	**29**	**66**	**218**
	2 0 2 3	51	4	30	0	85
	2 0 2 2	101	42	30	77	250

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

Tabel 2.50.
Aspek Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Arus Penumpang Angkutan (Orang)	3.348.376	3.655.853	1.247.692	2.372.960	2.209.186
Rasio Izin Trayek	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029	0,00030
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit)	7.401	2.597	1.620	2.443	2.515
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal (Unit)	7	7	7	7	7
Persentase Layanan Angkutan Darat (Persen)	0,26	0,12	0,26	0,22	4,09
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan (Persen)	77,78	78,29	93,16	81,82	65,09
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	48.908.314	22.070.382	32.195.236	34.019.478	24.353.424
Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun	48.908.314	22.070.382	32.195.236	34.019.478	24.353.424

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Aktivitas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidang komunikasi dan informatika baik swasta maupun negeri, cukup diminati mengingat memiliki prospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

Tabel 2.51.
Banyaknya Menara Telekomunikasi Dirinci Menurut Pemiliknya
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 – 2024

No.	Pemilik Menara Telekomunikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. TELKOMSEL, Tbk	41	25	11	4	4
2	PT. INDOSAT, Tbk	14	0	0	0	0
3	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	17	17	20	29	29
4	PT. PROTELINDO	34	36	38	47	47
5	PT. XL AXIATA Tbk	6	2	2	2	2
6	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	24	51	75	85	85
7	PT. HCPT	2	2	2	2	2
8	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	4	4	4	4	4
9	INTI BANGUN SEJAHTERA	0	4	2	2	2
10	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	0	5	5	10	10
11	EPID MENARA ASSETCO	0	14	14	14	14
12	PERSADA SOKKA TAMA	0	0	0	1	1
	Jumlah	**142**	**160**	**173**	**200**	**200**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.52.
Sarana Komunikasi Yang Dapat Digunakan Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Sarana Komunikasi Yang Digunakan
1	Batu Ampar	Telepon Genggam (HP), Internet
2	Terentang	Telepon Genggam (HP) , Internet
3	Kubu	Telepon Genggam (HP) , Internet
4	Teluk Pakedai	Telepon Genggam (HP) , Internet
5	Sungai Kakap	Telepon Genggam (HP), Telepon Kabel, Internet
6	Rasau Jaya	Telepon Genggam (HP) , Internet
7	Sungai Raya	Telepon Genggam (HP), Telepon Kabel, Internet
8	Sungai Ambawang	Telepon Genggam (HP), Telepon Kabel, Internet
9	Kuala Mandor B	Telepon Genggam (HP) , Internet

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha koperasi memiliki kendala utama yang bersifat internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal ini menimbulkan kendala lain yang lebih spesifik, yaitu kelemahan

dalam pemodalan. Sebagaimana diketahui modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong sumber daya ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan oleh koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi.

Tabel 2.53.
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Batu Ampar	32	32	32	32	32
2	Terentang	18	18	17	17	17
3	Kubu	50	50	51	53	56
4	Teluk Pakedai	16	16	16	16	17
5	Sungai Kakap	48	49	49	50	51
6	Rasau Jaya	45	45	43	43	43
7	Sungai Raya	160	168	165	167	168
8	Sungai Ambawang	61	62	63	65	66
9	Kuala Mandor B	16	16	18	19	21
	Kubu Raya	**446**	**456**	**454**	**462**	**471**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.54.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi					
		Produsen	Konsumen	Jasa	Simpan Pinjam	Pemasaran	Jumlah
1	Batu Ampar	14	18	0	0	0	32
2	Terentang	7	10	0	0	0	17
3	Kubu	38	17	0	1	0	56
4	Teluk Pakedai	11	5	0	1	0	17
5	Sungai Kakap	16	32	1	2	0	51
6	Rasau Jaya	13	24	3	3	0	43
7	Sungai Raya	49	98	13	8	0	168
8	Sungai Ambawang	24	34	5	2	1	66
9	Kuala Mandor B	13	6	1	1	0	21
	Kubu Raya	**185**	**244**	**23**	**18**	**1**	**471**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut, makin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas, lebih mudah, cepat, terjangkau dan transparan.

Perkembangan nilai realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuasi.

Tabel 2.55.
Indikator Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	196	233	312	405	412
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	11.211.960.000,00	12.751.260.000,00	13.786.600.000,00	14.553.470.000,00	16.084.060.000,00
3	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen)	n/a	n/a	11,26	-7,91	16,68

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2025

Tabel 2.56.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan (Rp)	Tambahan (Dolar)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					WNI	WNA
1	**Sektor Primer**	**27**	**49.832.574.571,00**	**-**	**309**	**-**
	a. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	21	47.597.715.794,00	-	217	-
	b. Kehutanan	6	2.234.858.777.00	-	92	-
	c. Perikanan	-	-	-	-	-
	d. Pertambangan	-	-	-	-	-
2	**Sektor Sekunder**	**43**	**69.292.387.772,00**	**-**	**21**	**4**
	a. Industri Makanan	24	37.074.352.068,00	-	21	4
	b. Industri Tekstil	-	-	-	-	-
	c. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	d. Industri Kayu	-	-	-	-	-
	e. Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-
	f. Industri Kimia dan Farmasi	6	51.369.236.000,00	-	-	-
	g. Industri Karet dan Plastik	11	848.799.704,00	-	-	-
	h. Industi Mineral Non Logam	1	-	-	-	-
	i. Industri Logam Dasar, Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	1	-	-	-	-
	j. Industri Instrumen Kodekteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	-
	k. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	-
	l. Industri Lainnya	-	-	-	-	-
3	**Sektor Tersier**	**59**	**2.276.740.719,00**	**-**	**10**	**2**
	a. Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-
	b. Kosntruksi	-	-	-	-	-
	c. Perdagangan dan Reparasi	47	1.129.740.719,00	-	10	2
	d. Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-
	e. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	5	1.147.000.000,00	-	-	-
	f. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	-	-	-
	g. Jasa Lainnya	4	-	-	-	-
	2 0 2 4	**129**	**141.401.703.062,00**	**-**	**340**	**6**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.57.
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Tambahan (Rp)	Penyerapan Tenaga Kerja	
				WNI	WNA
1	**Sektor Primer**	**50**	**155.699.905.045,00**	**179**	**-**
	a. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	33	150.949.395.735,00	179	-
	b. Kehutanan	-	-	-	-
	c. Perikanan	8	1.200.509.310,00	-	-
	d. Pertambangan	9	3.550.000.000,00	-	-
2	**Sektor Sekunder**	**67**	**216.492.670.843,00**	**548**	**-**
	a. Industri Makanan	23	160.615.907.276,00	73	-
	b. Industri Tekstil	-	-	-	-
	c. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-
	d. Industri Kayu	16	11.340.885.000,00	350	-
	e. Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-
	f. Industri Kimia dan Farmasi	3	-	-	-
	g. Industri Karet dan Plastik	5	369.540.324,00	7	-
	h. Industi Mineral Non Logam	7	5.200.000,00	1	-
	i. Industri Logam Dasar, Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	5	43.140.746.423,00	23	-
	m. Industri Instrumen Kodekteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-
	n. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	15.000.000,00	28	-
	o. Industri Lainnya	7	1.005.391.820,00	66	-
3	**Sektor Tersier**	**387**	**492.395.172.618,00**	**417**	**-**
	a. Listrik, Gas dan Air	6	846.486.739,00	6	-
	b. Kosntruksi	86	21.031.500.370,00	15	-
	c. Perdagangan dan Reparasi	182	225.286.671.223,00	179	-
	d. Hotel dan Restoran	13	62.382.055.304,00	73	-
	e. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	37	29.900.741.282,00	10	-
	f. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	17	54.943.334.592,00	46	-
	g. Jasa Lainnya	46	98.004.383.108,00	88	-
	2 0 2 4	**504**	**864.587.748.506,00**	**1.144**	**-**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.58.
Jumlah Prestasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	33	34	27
2	Jumlah Pemuda Berprestasi	2	2	9	-	6
3	Jumlah Kwartir Pramuka	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Porapar Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.2.14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun untuk kepentingan lainnya. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistk, data lainnya yang dihasilkan oleh PD teknis dalam bentuk data pokok, profil juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2020-2024 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.59.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indikator Makro pembangunan KKR	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Perekonomian Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta intensitas kegiatannya dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Invetarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke Tingkat Nasional	Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta	Memperkenalkan karya kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ke Tingkat Nasional

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
2.	Gelar seni dan Budaya Daerah (6 etnis besar di Kubu Raya) dan Lomba Drumband Tingkat Sekolah Dasar	Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya	Perlunya ditingkatkan lagi intensitasnya gelaran apresiasi Seni Budaya
3.	Pelestarian aktualisasi adat dan budaya daerah : a. Wayang Kulit b. Bakar Wangkang c. Festival Sekapur Sirih - Qasidah - Hadrah d. Gawai Rakyat e. Naik Dango f. Makan Saprahan g. Robo'-Robo' h. Haul Raja Kubu	 Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kec. Rasau Jaya Kec. Sungai Ambawang Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Raya, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Sungai Kakap, Kec. Kubu Kec. Kubu	Perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi kegiatan seni budaya Kabupaten Kubu Raya
4.	Pengiriman tim kreatif ke tingkat provinsi	Kota Singkawang	Pagelaran seni budaya yang bertujuan menjadikan seni budaya Kab. Kubu Raya agar dikenal masyarakat luas
5.	Pembentukan komunitas kreatif : a. Generasi pesona indonesia (Genpi) KKR b. Komunitas fashion dan tata rias c. Komunitas musik KKR	Kec. Sungai Raya	Perlunya pembinaan dan perhatian khusus

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2025

Tabel 2.61.
Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
A. Sudah Dilestarikan		
1.	Makam Ismail Mundu	Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai
2.	Makam Panglima Raja Kubu	Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar
3.	Keraton Kubu	Desa Kubu, Kecamatan Kubu
4.	Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut)	Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
5.	Padogi	Sui Samak, Kecamatan Sungai Ambawang
6.	Rumah Panjang (Betang)	Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang
7.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
8.	Makam Sultan Manggis	Suka Lanting, Kecamatan Sungai Raya
9.	Guci	Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang
10.	Masjid Nasrullah	Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai
B. Belum Dilestarikan		
1.	Makam Syech Abdullah Ibnu	Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap
2.	Makam Puang Haji Beni	Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap
3.	Makam Haji Patah Munambung	Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap
4.	Masjid Attamimi	Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan budaya baca masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Perkembangan teknologi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah buku yang dipinjam, demikian pula dengan penambahan fasilitas di perpustakaan seperti internet. Ada kecenderungan masyarakat mengunjungi perpustakaan untuk memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber bacaan ataupun penggunaan media *e-book*.

Tabel 2.62.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)	6.689	2.308	8.191	5.945	6.342
2.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	1,15	1,28	1,62	1,65	1,65
3.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (Buku)	6.692	7.534	8.003	9.144	9.744

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	49,93	58,64

Sumber : Dinas Perpusip Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip belum adanya dukungan ketersediaan gedung arsip Kabupaten. Selain itu, pengelolan arsiparis masih bersifat manual, belum dilakukan duplikasi secara digital. Tenaga pengelola yang berasal dari fungsional hanya berjumlah 40 orang, yang keberadaannya tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.63.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (Persen)	23,53	44,12	64,71	70,27	81,08

Sumber : Dinas Perpusip Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan. Produksi penangkapan ikan pada tahun 2019-2023 adalah fluktuatif dan tertinggi di tahun 2023 berjumlah 33.992,45 ton.

Tabel 2.64.
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Perikanan (ton)	24.005,74	22.603,09	27.021,27	30.798,86	33.992,45
2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	30,50	28,61	36,89	33,40	34,00
3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	10	10	12	6	14

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, 2025

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata, mengingat Kabupaten Kubu Raya memiliki poensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa jenis wisata, yaitu Wisata Alam (*mangrove* terbaik kedua di Indonesia setelah Papua dan habitat terlengkap di dunia), Wisata 13 Perhutanan Sosial, Wisata Pantai, Wisata Agro (kafe sawah dan buah-buah tropis), Wisata Belanja dan Kuliner, Wisata Budaya 6 etnis besar dengan total 36 event per tahunnya (masing-masing etnis ada event musik dan kesenian etnis, event permainan dan olahraga tradisional, event kuliner tradisional, pakaian tradisional, upacara adat, foto dan lukisan etnik), Wisata Rohani dalam rangka revolusi moral (bukan hanya religi untuk agama tertentu saja), Wisata Olahraga (*track* sensasi gambut dan *track* sensasi *mangrove*).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya akan menimbulkan *multiplier effect*, yakni menumbuhkan kegairahan ekonomi masyarakat sekaligus memperbesar kesempatan/lapangan kerja di bidang-bidang:

- Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Usaha Penyediaan Akomodasi
- Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Usaha Kawasan Pariwisata
- Usaha Jasa Transportasi Wisata
- Usaha Daya Tarik Wisata
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Usaha Jasa Pariwisata
- Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- Usaha Jasa Tirta
- Usaha Spa

Tabel 2.65.
Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Menurut Jenisnya
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
A.	**Wisata Alam**	
1.	Batu Gajah	Batu Ampar
2.	Pantai Kupang	Batu Ampar
3.	Wisata Mangrove Batang Pesisir	Batu Ampar
4.	Bukit Ambawang dan Bukit Wangkang	Kubu
5.	Puncak 5	Kubu
6.	Mangrove Beteng Batang Dabung	Kubu
7.	Wisata Air Terjun Mandiri	Teluk Pakedai
8.	Curug Taman Batu dan Wisata Alam Indah Lestari	Teluk Pakedai
....		.....
9.	Bukit Bendera	Teluk Pakedai
10.	Ekowisata Telok Bediri	Sungai Kakap
11.	Kawasan Konservasi dan Pemantauan Orang Utan	Sungai Raya
B.	**Wisata Buatan**	
1.	Drmaga Batu Ampar	Batu Ampar
2.	Pelabuhan Padang Tikar	Batu Ampar
3.	Embung Parong	Kubu
4.	Wisata Saung Nila	Teluk Pakedai
5.	Saung Sunda	Teluk Pakedai
6.	Kolam Pemancingan Air Berembang	Sungai Kakap
7.	Equator Park	Sungai Kakap
8.	Kampung Nelayan	Sungai Kakap
9.	Taman Rekadena	Sungai Kakap
10.	Wisata Susur Sungai Muare Kakap	Sungai Kakap
11.	Taman Fantasi KALBAR	Sungai Raya
12.	Waterpark Paradise Q	Sungai Raya
13.	Transmart Studio Mini	Sungai Raya
14.	Mall GAIA	Sungai Raya
15.	Rumah Pelangi	Sungai Ambawang
16.	Tugu Alianyang	Sungai Ambawang
17.	Kampung Kencana	Sungai Ambawang
18.	Borneo Business Icon	Sungai Ambawang
19.	Hutan HTI	Sungai Ambawang
20.	Pasar Rakyat Teluk Bakung	Sungai Ambawang
21.	Amal Zone	Sungai Kakap
22.	Alam Ndeso	Rasau Jaya
23.	Taman Inspirasi Stroberi	Rasau Jaya
C.	**Wisata Budaya**	
1.	Makam Panglima Raja	Batu Ampar
2.	Makam Panglima Raja Kubu/Situs	Kubu
3.	Replika Istana Raja Kubu	Kubu
4.	Batu Masjid	Kubu
5.	Guci/Artefak	Sungai Ambawang
6.	Padogi/Situs	Sungai Ambawang
7.	Rumah Panjang/Situs	Sungai Ambawang

No.	Nama Tempat Rekreasi	Lokasi
8.	Bekas Keraton/Situs	Sungai Kakap
9.	Hien Bu Cheng Hua (Klenteng Tengah Laut)	Sungai Kakap
10.	Makam H. Fatah Mumbung	Sungai Kakap
11.	Mungguk Mas/Situs	Sungai Kakap
12.	Pesanggrahan Raja Kubu/Situs	Sungai Kakap
13.	Tangga Mas/Situs	Sungai Kakap
14.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sungai Raya
15.	Makam Sultan Manggis	Sungai Raya
16.	Vihara Maitreya	Sungai Raya
17.	Makam H. Ismail Mundu	Teluk Pakedai
18.	Masjid Nasrullah/Situs	Teluk Pakedai
19.	Masjid Batu	Teluk Pakedai
20.	Langkau Etnika	Sungai Kakap
21.	Tamae Ogokng	Sungai Raya
D.	**Industri Pariwisata**	
1.	Hotel Dangau	Sungai Raya
2.	Gardenia *Resort & Spa*	Sungai Raya
3.	Hotel/Villa Harmony In	Sungai Raya
4.	Penginapan *Family*	Sungai Raya
5.	*Gold Line*	Sungai Raya
6.	Sun Set Restoran & Bar	Sungai Raya
7.	Rumah Makan Periuk	Sungai Raya
8.	Restoran Teratai Indah	Sungai Kakap
9.	Restoran Pantai Indah Kakap	Sungai Kakap
10.	Restoran Harmony In	Sungai Raya
11.	Restoran Dangau	Sungai Raya
12.	*Cafe* Tanggoe	Sungai Raya
13.	Restoran Papyrus	Sungai Raya
14.	Penangkaran Arwana	Sungai Raya
15.	Kerajinan Tikar Lampit	Sungai Ambawang
16.	Industri Pengolahan Sagu	Sungai Ambawang
17.	Industri Kerajinan Keladi Air	Sungai Ambawang
18.	Industri Pembuatan Rebana	Rasau Jaya
19.	Industri Pembuatan Marning dan Rengginang	Rasau Jaya
20.	Industri Pengolahan Kelapa	Sungai Kakap
21.	Industri Pengolahan Arang Kelapa	Sungai Kakap
22.	Kerajinan Tikat Bede	Kuala Mandor B
23.	Industri Makanan Onde Ceplis	Terentang

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya. Potensi sumber daya alam di sektor ini cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai.

Tabel 2.66.
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PADI					
1.1	Luas Tanam (Ha)	48.252,00	39.187,00	34.375,00	31.223,00	31.223,00
1.2	Luas Panen (Ha)	51.863,00	50.039,00	38.443,00	33.371,00	33.371,00
1.3	Produktivitas (Kw/Ha)	31,72	31,72	29,85	29,85	29,85
1.4	Produksi (Ton)	164.509,00	158.722,00	114.753,00	99.613,00	99.613,00
2.	JAGUNG					
2.1.	Luas Tanam (Ha)	2.901,30	1.661,40	1.418,00	1.629,00	1.629,00
2.2.	Luas Panen (Ha)	2.226,00	1.415,00	2.385,00	821,00	821,00
2.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	28,80	28,80	40,61	40,61	40,61
2.4.	Produksi (Ton)	6.411,00	4.075,00	9.727,00	3.338,00	3.338,00
3.	KEDELAI					
3.1.	Luas Tanam (Ha)	39,00	5,00	4,20	0,50	0,50
3.2.	Luas Panen (Ha)	10,00	32,00	5,60	0,70	0,70
3.3.	Produktivitas (Kw/Ha)	12,03	12,03	10,70	10,70	10,70
3.4.	Produksi (Ton)	11,00	38,00	6,00	0,70	0,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, 2025

Berdasarkan Tabel 2.66, Produksi padi di Kubu Raya pada tahun 2024 mencapai 93.856,00 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya benar-benar memperhatikan kualitas dan terus melakukan pengembangan di sektor pertanian. Dengan keunggulan sektor pertanian tersebut, Kabupaten Kubu Raya dapat menghasilkan beras-beras lokal yang berkualitas.

Tabel 2.67.
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat (Ton)

Kabupaten / Kota	Produksi Padi		Produksi Beras	
	2023	2024	2023	2024
Kabupaten Sambas	177.411	185.799	104.955	109.917
Kabupaten Bengkayang	34.799	41.921	20.587	24.800
Kabupaten Landak	100.241	110.215	59.302	65.202
Kabupaten Mempawah	48.852	57.137	28.900	33.802
Kabupaten Sanggau	64.524	78.278	38.172	46.309
Kabupaten Ketapang	88.139	111.907	52.142	66.204
Kabupaten Sintang	24.486	30.423	14.486	17.998
Kabupaten Kapuas Hulu	17.793	17.657	10.526	10.446
Kabupaten Sekadau	27.516	44.141	16.278	26.114
Kabupaten Melawi	9.196	10.074	5.441	5.960
Kabupaten Kayong Utara	38.144	37.520	22.566	22.197
Kabupaten Kubu Raya	56.228	61.413	33.264	36.331
Kota Pontianak	410	412	243	244
Kota Singkawang	12.551	13.095	7.425	7.747
Kalimantan Barat	**700.291**	**799.993**	**414.286**	**473.269**

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah tertinggi kelima penghasil beras setelah Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau dengan jumlah produksi beras mencapai 36.331 ton di tahun 2024 atau sebesar 7,68 persen dari total produksi beras Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis tanaman sayur dan buah semusim yang menjadi komoditas utama Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 adalah ketimun, semangka dan cabai rawit. Produksi ketimun pada tahun 2024 sebesar 16.188,00 kuintal, luas panen sebesar 156,32 hektar dengan demikian produktivitasnya mencapai 103,56 kuintal/hektar. Untuk komoditi semangka memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 15.705,00 kuintal, 77,40 hektar dan 202,91 kuintal/hektar. Sedangkan komoditi cabai rawit memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 14.625,00 kuintal, 164,30 hektar dan 89,01 kuintal/hektar.

Tabel 2.68.
Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Sayur di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Jenis Produksi	Luas Panen (Ha)	Produksi Panen (Kuintal)
1	Bawang Merah	0,00	0,00
2	Bayam	10,50	797,00
3	Cabai Rawit	164,30	14.625,00
4	Kacang Panjang	14.780,00	11.632,00
5	Kangkung	72,16	3.187,00
6	Ketimun	156,32	16.188,00
7	Labu Siam	0,00	0,00
8	Melon	9,50	2.313,00
9	Petsai/Sawi	12,27	865,00
10	Semangka	77,40	15.705,00
11	Terung	48,70	3.078,00
12	Tomat	76,75	7.524,00
13	Cabai Besar/TW/Teropong	82,25	8.055,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Untuk tanaman perkebunan, dibagi menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan usaha/hukum di atas tanah negara dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang, sedangkan diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Tanaman yang diusahakan oleh perkebunan besar adalah kelapa sawit yang sudah berproduksi secara konsisten.

Tabel 2.69.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 (Ton)

No.	Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	15.380	15.410	14.652	13.712	13.676
2	Kelapa Dalam	39.105	38.505	34.991	34.435	33.843
3	Kelapa Hibrida	2.779	1.446	1.728	1.627	1.617
4	Kelapa Deres	1.195	1.774	5.710	5.618	5.616
5	Kelapa Sawit	184.064	246.854	278.210	313.247	318.388
6	Kakao	39	33	6	0	0
7	Lada	230	186	97	82	78
8	Kopi	1.369	1.299	744	712	700
9	Pinang	608	625	1.849	580	569

No.	Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
10	Sagu	89	214	925	931	1.169
	Jumlah	**244.858**	**306.346**	**338.912**	**370.944**	**375.656**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Untuk peternakan, dibedakan menjadi golongan ternak besar dan golongan ternak kecil. Pada tahun 2024 untuk golongan ternak besar, jumlah populasi sapi tercatat sebanyak 5.896 ekor, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8.357 ekor. Untuk golongan ternak kecil, jumlah populasi ternak yang terbanyak adalah kambing yang mencapai 13.198 ekor, sedangkan jumlah populasi ternak babi pada tahun 2024 adalah 1.179 ekor. Untuk produksi ternak unggas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 2.70.
Jumlah Populasi Ternak dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 (Ekor)

No.	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil		
		Sapi	Kerbau	Babi	Kambing	Domba
1	Batu Ampar	955	0	80	3.400	2
2	Terentang	308	29	102	765	4
3	Kubu	716	0	70	1.427	0
4	Teluk Pakedai	80	0	144	490	5
5	Sungai Kakap	336	0	95	905	20
6	Rasau Jaya	1.138	0	65	1.924	4
7	Sungai Raya	2.269	0	49	3.703	2
8	Sungai Ambawang	34	0	302	408	0
9	Kuala Mandor B	60	0	272	176	0
	2 0 2 4	**5.896**	**29**	**1.179**	**13.198**	**37**
	2 0 2 3	8.357	42	2.064	13.432	42

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.71.
Produksi Unggas dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 (Kg)

No.	Kecamatan	Ayam Ras		Ayam Buras	Itik
		Pedaging	Petelur		
1	Batu Ampar	0	0	39.041	539
2	Terentang	0	0	17.008	338

No.	Kecamatan	Ayam Ras		Ayam Buras	Itik
		Pedaging	Petelur		
3	Kubu	44.996	0	1.069.584	1.411
4	Teluk Pakedai	8.539	857	70.394	478
5	Sungai Kakap	481.712	17.242	578.624	1.088
6	Rasau Jaya	234.287	29.232	660.407	942
7	Sungai Raya	11.824	13.541	102.259	769
8	Sungai Ambawang	4.555.463	126.000	165.762	615
9	Kuala Mandor B	0	0	190.893	559
	2 0 2 4	**5.336.821**	**186.871**	**2.893.974**	**6.739**
	2 0 2 3	10.812.065	347.056	3.127.888	42.420

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2024

Adapun data kelompok tani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Kubu Raya per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72.
Data Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Penyuluh Swadaya	Jenis		
				Poktan	Gapoktan	Jumlah Anggota Poktan dan Gapoktan
1	Batu Ampar	15	9	202	17	4.213
2	Terentang	10	4	145	13	2.942
3	Kubu	20	7	225	19	5.705
4	Teluk Pakedai	14	5	104	15	2.390
5	Sungai Kakap	15	10	361	31	7.912
6	Rasau Jaya	6	3	129	7	3.257
7	Sungai Raya	22	7	346	31	8.669
8	Sungai Ambawang	15	4	329	34	7.142
9	Kuala Mandor B	6	4	86	5	1.796
	2 0 2 4	**123**	**53**	**1.927**	**172**	**44.026**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.73.
Data Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa	Nama P4S	Jumlah Anggota
1	Rasau Jaya	Rasau Jaya Tiga	Pucuk Rindang	
2	Terentang	Teluk Empening	Empening Mandiri	

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.3.4. Kehutanan

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 4 (empat) jenis hutan yang termasuk dalam Areal Dalam Kawasan yang luasannya mengalami perubahan dari tahun 2016. Untuk Hutan Lindung (HL), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 171.477 Ha menjadi 143.124 Ha. Untuk Hutan Produksi (HP), luas kawasannya mengalami penambahan dari 98.104 Ha menjadi 134.136 Ha. Untuk Hutan Produksi Konversi (HPK), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 53.042 Ha menjadi 27.877 Ha. Sedangkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), luas kawasannya mengalami penambahan dari 65.770 Ha menjadi 66.916 Ha.

2.1.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan di segala bidang pembangunan. Hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang terbatas. Dengan kondisi tersebut maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan baik untuk menjamin ketersediaannya yang berkelanjutan guna kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Potensi pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74.
Potensi Pertambangan dan Penggalian Dirinci Menurut Jenis Bahan Tambang dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

No.	Kecamatan	Jenis Tambang/Galian	Keterangan
1	Batu Ampar	Andesit/Dasit (AM), Granit/Diorit/Granodiorit, Batuan, Bauksit	-

2	Terentang	Bauksit, Batu Bara, Pasir Sungai	-
3	Kubu	Granit, Pasir Sungai, Batuan, Tanah Urug	-
4	Teluk Pakedai	Pasir Kuarsa, Tanah Urug	-
5	Sungai Kakap	Gas Methan (CH4)	-
6	Rasau Jaya	Gambut	-
7	Sungai Raya	Pasir Sungai, Gambut	-
8	Sungai Ambawang	Bauksit, Pasir Kuarsa, Gambut	-
9	Kuala Mandor B	Pasir Sungai	-

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.3.6. Perdagangan

Kabupaten Kubu Raya secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup penting. Berdasarkan data perusahaan perdagangan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 180 perusahaan perdagangan dengan jumlah SIUP terbesar dimiliki oleh jenis pedagang menengah sejumlah 99 usaha atau 55,00 persen dari total SIUP yang dikeluarkan.

Tabel 2.75.
Banyaknya Perusahaan UTTP Menurut Jumlah Pedagang yang Masuk Dalam Program Tera dan Tera Ulang Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Pedagang	Jumlah UTTP
1	Batu Ampar	278	490
2	Terentang	74	154
3	Kubu	59	59
4	Teluk Pakedai	59	76
5	Sungai Kakap	305	544
6	Rasau Jaya	137	229
7	Sungai Raya	267	441
8	Sungai Ambawang	65	89
9	Kuala Mandor B	107	153
	2 0 2 4	**1351**	**2.235**
	2 0 2 3	1351	2.235
	2 0 2 2	1.351	2.235

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.3.7. Perindustrian

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri yang berkembang di Kabupaten Kubu Raya adalah sektor industri kecil yang didominasi oleh Industri Makan dan Minum.

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 tercatat sebanyak 883 perusahaan, dimana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang hanya 789 perusahaan/usaha, atau meningkat 11,91 persen. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap perusahaan Industri Besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 tercatat sebesar 2.456 orang, turun sekitar 54,16 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai investasinya pada kelompok industri kecil menengah, dari nilai total investasi tahun 2024 sebesar 147,84 triliun rupiah, dengan nilai investasi terbesar pada industri makanan sebesar 27,73 triliun rupiah. Sedangkan pada golongan industri besar, nilai investasi terbesar terdapat pada jenis usaha industri makanan dengan nilai investasi 1,05 triliun rupiah atau 50,02 persen dari total nilai investasi industri besar di tahun 2024 yang berjumlah 2,10 triliun rupiah.

Tabel 2.76.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
1	Makanan	409	899	27.733.654
2	Minuman	61	160	11.077.653
3	Pengolahan Tembakau	1	6	189.800
4	Tekstil	4	5	89.800
5	Pakaian Jadi	34	72	1.601.000
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	4	11.000
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	12	74	1.740.505
8	Kertas dan Barang dari Kertas	2	3	91.000
9	Percetakan dan Produksi Media Rekaman	9	12	148.800

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1	6	50.000
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	14	51	5.543.500
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	6	140	2.559.500
13	Industri Karet dan Bahan dari Karet dan Plastik	5	71	4.030.000
14	Barang Galian Bukan Logam	13	67	10.005.640
15	Logam Dasar	2	5	1.390.000
16	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	30	94	9.679.612
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	1	2	1.000
18	Industri Peralatan Listrik	1	1	142.000
19	Mesin dan Perlengkapan YTDL	19	47	1.350.000
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	4	8	770.000
21	Alat Angkutan Lainnya	15	116	12.100.130
22	Furniture	12	84	4.041.000
23	Pengolahan Lainnya	17	27	384.250
24	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	7	64	16.505.000
25	Produksi Es	2	3	85.000
26	Pengumpulan Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	1	5	150.000
27	Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	141	327	32.957.027
28	Penerbitan	5	8	247.500
29	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI	6	8	409.500
30	Jasa Informasi	3	4	15.320
31	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis	1	9	348.750
32	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	2	3	105.000
33	Aktivitas Pengepakan	1	2	100.000

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
33	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	13	46	2.183.500
	2 0 2 4	**856**	**2.433**	**147.836.441**
	2 0 2 3	760	2.123	107.435.693

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.77.
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Besar Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)
1	Makanan	8	681	1.049.849.309
2	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	2	106	114.631.796
3	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	79	81.568.025
4	Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik	4	609	480.614.458
5	Bahan Galian Bukan Logam	3	377	152.934.454
6	Logam Dasar	2	94	64.444.214
7	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	39	101.790.104
8	Alat Angkut Lainnya	2	240	18.586.142
9	Furniture	1	78	11.554.468
10	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya	1	148	12.600.000
11	Jasa Informasi	1	5	10.439.115
	2 0 2 4	**27**	**2.456**	**2.099.012.085**
	2 0 2 3	29	5.358	637.696.874.000

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.1.3.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakannya transmigrasi adalah untuk meratakan penyebaran penduduk di wilayah

nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib

Realisasi dari target yang ditetapkan belum memenuhi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
   a. Desa Sungai Radak Dua SP 1, target 224 dan realisasi 200 (tahun 2006/2007)
   b. Desa Sungai Radak Dua SP 2, target 275 dan realisasi 205 (tahun 2007/2009)
   c. Desa Terentang Hulu SP 1, target 250 dan realisasi 200 (tahun 2010/2011)

Realisasi dari target yang ditetapkan yang memenuhi/melebihi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
   a. Desa Permata, target 300 dan realisasi 300 (tahun 2012)
   b. Desa Sungai Radak Satu SP 1, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2013)
2. Kecamatan Kubu :
   a. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2004)
   b. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2006)
   c. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2007)
3. Kecamatan Sungai Raya :
   a. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2010)
   b. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2012)
   c. Desa Sungai Bulan C, target 40 dan realisasi 40 (tahun 2014)
4. Kecamatan Teluk Pakedai :
   a. Desa Teluk Pakedai Hulu, target 100 dan realisasi 150 (tahun 2012)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita. Konsumi per kapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (*basic needs*), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, serta penunjang lainnya.

Tabel 2.78.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023-2024

No	Kelompok Barang	2023	2024
1.	**Makanan**	**539.231**	**600.118**
	a. Padi-padian	79.861	85.472
	b. Umbi-umbian	4.865	4.990
	c. Ikan/Udang/Cumi/Kerang	56.463	62.077
	d. Daging	20.354	32.241
	e. Telur dan Susu	34.615	33.273
	f. Sayur-sayuran	41.837	43.591
	g. Kacang-kacangan	9.373	9.092
	h. Buah-buahan	14.902	25.418
	i. Minyak dan Kelapa	16.645	15.211
	j. Bahan Minuman	21.610	19.931
	k. Bumbu-bumbuan	13.810	16.100
	l. Konsumsi Lainnya	14.532	14.831
	m. Makanan dan Minuman Jadi	134.708	151.586
	n. Rokok	75.656	86.305
2.	**Bukan Makanan**	**502.331**	**486.603**
	a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	280.685	288.163
	b. Aneka Barang dan Jasa	97.954	97.959
	c. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	24.797	23.673
	d. Barang Tahan Lama	50.182	23.483
	e. Pajak, Pungutan dan Asuransi	37.388	38.001

No	Kelompok Barang	2023	2024
	f. Keperluan Pesta dan Upacara	11.325	15.325
JUMLAH		**1.041.562**	**1.086.721**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Di sisi lain besarnya angka konsumsi berarti kemampuan investasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi relatif kecil, karena sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari prespektif ekonomi pembangunan (P.Todaro), besarnya angka konsumsi justru kontra produktif dengan kemajuan daerah. Persentase pengeluaran makanan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 mengalami peningkatan sementara pengeluaran non makanan mengalami penurunan. Dengan melihat perbandingan pengeluaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa indeks kesejahteraan penduduk Kabupaten Kubu Raya secara bertahap sudah relatif semakin membaik.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

2.1.4.2.1. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melaui jaringan Perumda Air Minum Tirta Raya mengalami peningkatan. Permasalahan utama Perumda Air Minum Tirta Raya selain dari aspek finansial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

Tabel 2.79.
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
1.	Batu Ampar	-	-	-
2.	Terentang	-	-	-
3.	Kubu	-	-	-
4.	Telok Pakedai	-	-	-
5.	Sungai Kakap	373	35.318	166.977.800,00

No.	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
6.	Rasau Jaya	-	-	-
7.	Sungai Raya	23.403	3.687.286	23.404.241.200,00
8.	Sungai Ambawang	8.837	1.226.562	6.907.690.600,00
9.	Kuala Mandor B	-	-	-
	2 0 2 4	**32.613**	**4.949.166**	**30.478.909.600,00**
	2 0 2 3	29.016	4.421.900	20.550.990.800,00

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.80.
Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM	18.206	18.094	19.769	29.016	n/a
2	Jumlah Air yang Disalurkan (ribu m^3)	2.938,00	3.265,00	3.896,00	4.421,90	n/a
3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak (persen)	85,05	96,76	94,64	94,44	n/a
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Bersih (persen)	13,53	12,05	10,65	14,55	n/a

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Data mengenai aspek daya saing bidang ketersediaan air bersih Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam infrastruktur dan aksesibilitas terhadap air bersih di wilayah tersebut. Pertama, terjadi peningkatan yang drastis dalam jumlah pelanggan PDAM dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan air bersih kepada masyarakat. Peningkatan yang signifikan terlihat dalam jumlah air yang disalurkan oleh PDAM, yang meningkat dari 2.674 ribu m^3 pada tahun 2019 menjadi 4.421,9 ribu m^3 pada tahun 2023. Jumlah pelanggan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 17.446 pada tahun 2019 menjadi 29.016 pada tahun 2023. Persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak pada tahun 2023 sebesar 94,44 persen, sedangkan

persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih pada tahun 2023 masih sebesar 14,55 persen.

2.1.4.2.2. Fasilitas Listrik

Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin.

Tabel 2.81.
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Batu Ampar	4.196	4.306	4.426	7.277	8.794
2	Terentang	1.675	1.926	2.186	3.423	3.665
3	Kubu	3.558	3.836	4.259	11.954	12.697
4	Teluk Pakedai	2.843	3.263	4.018	5.574	5.800
5	Sungai Kakap	27.229	29.576	31.068	38.709	43.166
6	Rasau Jaya	11.413	11.606	11.825	11.116	11.748
7	Sungai Raya	44.930	46.633	48.178	78.261	83.507
8	Sungai Ambawang	13.572	14.177	14.720	25.309	27.466
9	Kuala Mandor B	9.675	10.106	10.493	4.185	4.493
	Kabupaten Kubu Raya	**119.091**	**115.333**	**131.173**	**185.808**	**201.336**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini terjadi di semua kecamatan yang tercantum dalam data tersebut. Kecamatan dengan jumlah pelanggan listrik terbanyak pada tahun 2024 adalah Sungai Raya dengan jumlah pelanggan sebanyak 83.507, diikuti oleh Sungai Kakap dengan jumlah pelanggan sebanyak 43.166. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah pelanggan listrik terkecil pada tahun 2024 adalah Terentang dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.665.

Secara keseluruhan, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Kubu Raya meningkat dari 119.091 pada tahun 2020 menjadi 201.336 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap listrik bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat setiap tahunnya.

2.1.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Dengan makin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kubu Raya, menyebabkan bertambahnya wisatawan yang datang. Dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kubu Raya, otomatis meningkatkan kebutuhan akan tempat menginap.

Tabel 2.82.
Banyaknya Tamu Menginap di Hotel Berbintang Menurut Kewarganegaraan di Kabupaten Kubu Raya ,Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Tamu		Jumlah Total
		WNA	WNI	
1	Januari	2	3.828	3.830
2	Fenruari	28	4.407	4.435
3	Maret	10	4.223	4.233
4	April	13	4.485	4.498
5	Mei	4	5.094	5.098
6	Juni	14	5.559	5.573
7	Juli	0	5.323	5.323
8	Agustus	0	4.964	4.964
9	September	14	5.203	5.217
10	Oktober	21	5.506	5.527
11	November	6	5.054	5.060
12	Desember	24	6.042	6.066
	2 0 2 4	**136**	**59.688**	**59.824**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya mengalami perkembangan yang positif dalam sektor pariwisata, yang didukung oleh peningkatan infrastruktur akomodasi baik bintang maupun non bintang. Peningkatan ini dapat meningkatkan daya tarik wisata wilayah tersebut, meningkatkan pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Dengan memperhatikan tren positif ini, langkah-langkah strategis lebih lanjut dapat diambil untuk memperkuat posisi Kabupaten Kubu Raya sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kubu Raya periode 2020-2024 dapat digambarkan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.83.
Aspek Daya Saing dalam Bidang Penanaman Modal
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	413	696	504	1.506	2.483
2	Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)	61	100	129	183	262
3	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (juta rupiah)	451.569,80	961.191,00	141.401,70	1.004.905,40	1.268.618,89
4	Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) (juta rupiah)	1.087.728,48	160.404,50	864.587,75	12.675,00	10.788,44

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2025

Data mengenai aspek pelayanan umum dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam daya tarik investasi di wilayah tersebut. Terjadi peningkatan yang drastis dalam jumlah investor berskala nasional (PMDN) dari tahun 2020 hingga 2024, meningkat dari 180 pada tahun 2020 menjadi 1.506 pada tahun 2024. Selain itu, jumlah penanaman modal asing (PMA) juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berhasil menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Peningkatan jumlah investor dan penanaman modal yang signifikan ini dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stabilitas politik, infrastruktur yang berkembang, kebijakan investasi yang mendukung, serta potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah tersebut.

Selain itu, terlihat pula bahwa jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) dalam nilai jutaan rupiah juga mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah yang besar tetapi juga beragam sektor, yang dapat mendiversifikasi perekonomian Kabupaten Kubu Raya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kubu Raya telah berhasil menarik minat investor dan meningkatkan jumlah penanaman modal, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya didukung tenaga oleh Aparatur Sipil Negara yang berkompeten. Data mengenai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kubu Raya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I	7	0	7
2	II	201	267	468
3	III	1.076	1.662	2.737
4	IV	416	601	1.018
	Jumlah	**1.700**	**2.530**	**4.230**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

Tabel 2.85.
PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No.	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	10	1	11
2	SMP	6	0	6
3	SMA	230	164	394
4	D I	1	8	9
5	D II	86	101	187
6	D III	182	484	666
7	D IV/S 1	1.023	1.639	2.662
8	S 2/Pasca Sarjana	162	132	294
9	S 3/Doktor /Ph.D	0	1	1
	Jumlah	**1.700**	**2.530**	**4.230**

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai atau realisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsistensi dan signifikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka

pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya mengandung makna bahwa:

1. Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Belanja Daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan.
3. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*) oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan belanja melalui tahapan analisis belanja, standar pelayanan minimal, standar harga satuan barang dan harga satuan pokok kegiatan atas komponen belanja tiap kegiatan, sehingga dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Kubu Raya, pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaran urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja yang kurang strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) harus diminimalisir.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya khususnya Tahun 2019-2024, dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Masa lalu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2020-2024 berdasarkan data kinerja keuangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 2.67. sebagai berikut:

Tabel 2.67.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**PENDAPATAN**	**1.477.080.851.351,36**	**1.553.468.400.345,62**	**1.557.558.858.426,59**	**1.681.097.804.226,03**	**1.790.615.563.778,77**	**4,97**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**151.009.789.228,78**	**160.894.591.482,61**	**200.314.165.508,71**	**201.559.443.902,57**	**253.234.841.010,77**	**14,33**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	108.258.139.705,97	117.410.605.437,62	150.238.525.520,84	146.879.974.790,35	189.613.037.911,53	15,82
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.536.273.588,00	7.085.594.060,00	8.076.124.035,00	10.208.626.095,00	11.720.929.660,00	15,90
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.148.708.997,00	3.883.426.436,00	3.828.815.922,00	4.239.841.563,00	4.106.849.626,00	(0,05)
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.066.666.937,81	32.514.965.548,99	38.170.700.030,87	40.231.001.454,22	47.794.023.813,24	10,75
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.040.956.520.388,00**	**1.310.650.071.331,01**	**1.344.923.091.240,88**	**1.477.538.360.323,46**	**1.537.380.722.768,00**	**10,61**
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	964.995.503.675,00	1.037.969.327.864,00	1.109.866.798.109,00	1.228.414.059.098,00	1.306.822.936.058,00	7,89

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	73.961.016.713,00	159.272.287.000,00	129.940.602.600,00	131.562.288.800,00	131.576.277.900,00	24,55
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	113.408.456.467,01	105.115.690.531,88	117.562.012.425,46	98.981.508.810,00	(3,76)
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**285.114.541.734,58**	**81.923.737.532,00**	**12.321.601.677,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**(85,00)**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	91.442.321.273,76	6.513.461.532,00	12.321.601.677,00	2.000.000.000,00	0,00	(46,87)
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	193.672.220.460,82	75.410.276.000,00	0,00	0,00	0,00	(40,27)
2.	**BELANJA**	**1.487.430.843.703,43**	**1.658.062.567.714,77**	**1.628.205.312.413,70**	**1.549.639.386.757,85**	**1.786.190.875.665,61**	**5,03**
2.1.	**Belanja Operasi**	**1.115.601.970.995,50**	**1.207.244.857.512,76**	**1.221.717.311.075,10**	**1.176.570.842.855,73**	**1.361.750.401.702,29**	**5,36**
2.1.1.	Belanja Pegawai	544.999.216.271,81	554.510.088.430,00	551.447.350.820,10	561.323.636.439,46	632.747.481.619,19	3,93
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.522.845.386,24	632.438.958.928,58	630.624.314.818,14	559.359.346.780,77	642.672.362.619,10	19,68
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	68.288.154,18	931.091.176,86	4.866.532.206,50	0,00	421,54
2.1.4.	Belanja Hibah	209.086.609.337,45	20.101.615.000,00	38.714.554.260,00	51.021.327.419,00	86.279.164.464,00	25,78
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	993.300.000,00	125.907.000,00	0,00	0,00	51.393.000,00	(46,83)
2.2.	**Belanja Modal**	**140.383.569.994,93**	**216.971.032.899,01**	**186.661.389.731,60**	**151.197.584.762,12**	**186.070.234.463,32**	**11,16**

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**9.139.189.438,00**	**7.696.037.303,00**	**4.776.908.007,00**	**2.908.232.940,00**	**1.781.839.000,00**	**(32,89)**
2.4.	**Belanja Transfer**	**222.306.113.275,00**	**226.150.640.000,00**	**215.049.703.600,00**	**218.962.726.200,00**	**236.588.400.500,00**	**1,67**
2.4.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.176.172.675,00	11.329.662.000,00	13.244.340.000,00	14.469.884.700,00	16.014.295.000,00	9,55
2.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	211.129.940.600,00	214.820.978.000,00	201.805.363.600,00	204.492.841.500,00	220.574.105.500,00	1,22
	Surplus/Defisit	**(10.349.992.352,07)**	**(104.594.167.369,15)**	**(70.646.453.987,11)**	**131.458.417.468,18**	**4.424.688.113,16**	**123,85**
3.	**PEMBIAYAAN**	**62.078.310.356,79**	**135.515.735.976,56**	**83.219.307.304,59**	**(125.574.543.273,02)**	**3.883.813.096,37**	**(68,57)**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**62.078.310.356,79**	**135.515.735.976,56**	**167.006.725.276,43**	**12.572.853.317,48**	**5.883.813.096,37**	**(1,03)**
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	62.078.310.356,79	51.728.318.004,72	30.857.296.042,99	12.572.853.317,48	5.883.813.096,37	(42,37)
3.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	83.787.417.971,84	136.149.429.233,44	0,00	0,00	(100,00)
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**83.787.417.971,84**	**138.147.396.590,50**	**2.000.000.000,00**	**16,84**
3.2.1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.2.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	83.787.417.971,84	136.147.396.590,50	0,00	62,49
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**51.728.318.004,72**	**30.921.568.607,41**	**12.572.853.317,48**	**5.883.874.195,16**	**8.308.501.209,53**	**(27,89)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 4,97 persen, berasal dari:
   a. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,33 persen, dari:
      - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020: Rp151.009.789.228,78
      - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021: Rp160.894.591.482,61
      - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022: Rp200.314.165.508,71
      - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023: Rp201.559.443.902,57
      - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024: Rp253.234.841.010,77
   b. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 10,61 persen, dari:
      - Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2020: Rp1.040.956.520.388,00
      - Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2021: Rp1.310.650.071.331,01
      - Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2022: Rp1.344.923.091.240,88
      - Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2023: Rp1.477.538.360.323,46
      - Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2024: Rp1.537.380.722.768,00
   c. Rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -85,00 persen, dari:
      - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020: Rp285.114.541.734,58
      - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021: Rp81.923.737.532,00
      - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022: Rp12.321.601.677,00
      - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023: Rp2.000.000.000,00
      - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024: Rp0,00
2. Rata-rata pertumbuhan Belanja sebesar 5,03 persen, berasal dari:
   a. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 5,36 persen, dari:
      - Belanja Operasi Tahun 2020: Rp1.115.601.970.995,50

- Belanja Operasi Tahun 2021: Rp1.207.244.857.512,76
- Belanja Operasi Tahun 2022: Rp1.221.717.311.075,10
- Belanja Operasi Tahun 2023: Rp1.176.570.842.855,73
- Belanja Operasi Tahun 2024: Rp1.361.750.401.702,29

b. Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 11,16 persen, dari:
- Belanja Modal Tahun 2020: Rp140.383.569.994,93
- Belanja Modal Tahun 2021: Rp216.971.032.899,01
- Belanja Modal Tahun 2022: Rp186.661.389.731,60
- Belanja Modal Tahun 2023: Rp151.197.584.762,12
- Belanja Modal Tahun 2024: Rp186.070.234.463,32

c. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tak Terduga sebesar -32,89 persen, dari:
- Belanja Tak Terduga Tahun 2020: Rp9.139.189.438,00
- Belanja Tak Terduga Tahun 2021: Rp7.696.037.303,00
- Belanja Tak Terduga Tahun 2022: Rp4.776.908.007,00
- Belanja Tak Terduga Tahun 2023: Rp2.908.232.940,00
- Belanja Tak Terduga Tahun 2024: Rp1.781.839.000,00

d. Rata-rata pertumbuhan Belanja Transfer sebesar 1,67 persen, dari:
- Belanja Transfer Tahun 2020: Rp222.306.113.275,00
- Belanja Transfer Tahun 2021: Rp226.150.640.000,00
- Belanja Transfer Tahun 2022: Rp215.049.703.600,00
- Belanja Transfer Tahun 2023: Rp218.962.726.200,00
- Belanja Transfer Tahun 2024: Rp236.588.400.500,00

3. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan sebesar -68,57 persen, berasal dari:

a. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan sebesar -1,03 persen, dari:
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020: Rp62.078.310.356,79
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021: Rp135.515.735.976,56
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022: Rp167.006.725.276,43
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023: Rp12.572.853.317,00
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024: Rp5.883.813.096,37

b. Rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 16,84 persen, dari:
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020: Rp0,00
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021: Rp0,00
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022: Rp83.787.417.971,84
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023: Rp138.147.396.590,50

- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024: Rp2.000.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024 sebagian besar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah. Untuk itu perlu dikembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD, antara lain dengan:

1. Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek Pajak serta Integrasi data antar instansi terkait;
2. Digitalisasi Sistem Perpajakan dalam rangka memperluas kanal pembayaran dan memberikan kemudahan pelaporan pajak secara online;
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pajak;
4. Memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, kedepannya diharapkan bahwa sumber pendapatan dapat dikembangkan melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, apalagi dengan sudah berdirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kubu Raya. Pendirian BUMD merupakan salah satu bentuk investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pendapatan daerah menjadi bertambah. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya;
2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain;
3. Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta;
4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas;
5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi PMA dan PMDN.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur (pemberi pinjaman) kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari Neraca Daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih

terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan ratarata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 2.68. berikut ini:

Tabel 2.68.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**ASET**	**2.038.217.301.583,58**	**2.280.319.643.996,93**	**2.240.376.148.039,21**	**2.300.478.364.136,86**	**2.336.240.338.587,59**	**3,47**
1.1.	**Aset Lancar**	**137.675.616.888,15**	**102.191.012.090,48**	**96.338.740.275,14**	**93.237.562.689,50**	**84.494.873.195,89**	**(11,49)**
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	49.498.426.421,15	28.664.269.915,30	8.090.346.211,54	85.971.754,04	5.657.182.112,37	(41,86)
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	894.500,00	288.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	77.220,00	100,00
1.1.4.	Kas di BLUD	1.782.679.714,46	1.227.363.152,42	3.459.453.198,67	2.890.919.197,08	613.100.175,47	(23,42)
1.1.5.	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	26.113.881,29	0,00	0,00
1.1.6.	Kas di Bendahara BOS	446.341.699,11	1.030.301.585,69	1.018.270.682,27	282.005.027,75	472.568.645,75	1,44
1.1.7.	Kas Lainnya	0,00	0,00	4.772.253,00	3.390.410,00	0,00	(100,00)
1.1.8.	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.	Piutang Pendapatan	91.360.677.205,14	86.700.544.386,66	105.897.028.681,87	119.513.635.124,01	121.655.818.797,16	7,42
1.1.11.	Piutang Lainnya	135.944.221,60	100.720.448,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.12.	Penyisihan Piutang	(22.423.494.702,56)	(28.520.470.626,34)	(36.976.662.737,78)	(46.166.364.048,81)	(57.102.263.702,79)	26,32
1.1.13.	Beban Dibayar Dimuka	1.896.186.917,25	2.123.631.954,85	2.286.456.389,00	1.833.108.279,68	1.819.390.872,99	(1,03)
1.1.14.	Persediaan	14.977.960.912,00	10.864.362.773,90	12.558.990.596,57	12.078.511.949,46	9.799.697.414,94	(10,06)
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**58.123.078.630,00**	**58.123.078.630,00**	**59.620.914.075,05**	**62.231.314.504,71**	**64.231.314.504,71**	**2,53**
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	58.123.078.630,00	58.123.078.630,00	59.620.914.075,05	62.231.314.504,71	64.231.314.504,71	2,53
1.3.	**Aset Tetap**	**1.775.303.230.751,21**	**2.038.865.478.783,23**	**1.985.349.945.406,47**	**2.024.367.329.077,86**	**2.082.865.723.627,61**	**4,08**
1.3.1.	Tanah	105.471.184.427,60	116.969.432.591,60	141.417.841.441,60	152.001.800.861,60	172.431.016.052,60	13,08
1.3.2.	Peralatan Mesin	328.348.960.084,52	375.905.402.028,58	400.954.145.003,58	438.752.278.553,58	454.527.748.892,18	8,47
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	858.085.307.625,70	941.930.851.618,29	1.021.777.850.454,89	1.071.461.394.613,22	1.115.917.005.559,84	6,79
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.252.352.759.359,97	1.311.831.405.864,09	1.426.670.336.933,32	1.515.981.214.682,82	1.608.361.611.973,37	6,45
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	85.540.584.571,99	89.474.987.634,61	94.032.300.570,61	100.888.575.590,61	117.006.754.319,62	8,15
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.081.610.700,00	6.463.138.950,00	1.265.633.450,00	1.564.978.450,00	1.565.648.450,00	(15,57)

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.7.	Akumulasi Penyusunan	(857.577.176.018,57)	(803.709.739.903,94)	(1.100.768.162.447,53)	(1.256.282.913.673,97)	(1.386.944.061.620,00)	12,77
1.4.	**Properti Investasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.208.195.492,85**	**3.208.195.492,85**	**0,00**
1.4.1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.808.108.499,73	3.808.108.499,73	0,00
1.4.3.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	(599.913.006,88)	(599.913.006,88)	0,00
1.5.	**Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	**Aset Lainnya**	**67.115.375.314,22**	**81.140.074.493,22**	**99.066.548.282,55**	**117.433.962.371,94**	**101.440.231.766,53**	**10,88**
1.6.1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	116.750.080,00	20.761.680,00	20.761.680,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Aset Tidak Berwujud	1.275.423.436,10	3.936.729.280,01	7.610.123.798,26	8.245.275.298,25	8.321.765.464,25	59,82
1.6.5.	Aset Lain-Lain	65.723.201.798,12	103.343.582.563,31	(6.727.186.840,75)	120.601.981.197,48	131.369.709.290,88	18,90

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.6.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(2.677.904.088,83)	119.919.205.318,31	(7.178.365.296,59)	(7.614.345.005,00)	41,67
1.6.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(23.483.094.941,27)	(27.385.395.148,27)	(27.424.646.827,20)	(31.260.070.983,60)	10,00
1.6.8.	Dana Bagi Hasil-Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	5.629.039.475,00	23.189.718.000,00	623.173.000,00	(66,73)
2.	**KEWAJIBAN**	**2.921.844.698,02**	**86.813.018.146,67**	**146.155.492.502,18**	**214.701.293.594,67**	**12.752.863.138,44**	**44,54**
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**2.921.844.698,02**	**86.813.018.146,67**	**146.155.492.502,18**	**214.701.293.594,67**	**12.752.863.138,44**	**44,54**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	24.330,00	654.546,00	74.028,00	94.797.190,00	13.728.604,06	387,38
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	87.035.107,84	147.495.215,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	83.787.417.971,84	136.149.429.233,44	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	835.584.806,02	708.847.016,99	1.044.380.893,74	1.142.974.341,72	969.293.652,38	3,78
2.1.5.	Utang Beban	2.084.308.062,00	2.229.063.504,00	4.659.113.132,00	209.308.522.062,95	7.527.840.882,00	37,86
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.927.500,00	0,00	4.155.000.000,00	4.155.000.000,00	4.242.000.000,00	(100,00)
2.1.7.	R/K PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	**Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**EKUITAS**	**2.035.295.456.885,56**	**2.193.506.625.850,26**	**2.094.220.655.537,03**	**2.085.777.070.542,19**	**2.323.487.475.449,15**	**3,37**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.68. tersebut di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aset daerah dari Tahun 2020-2024 mencapai 3,47 persen, sedangkan kewajiban daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai 44,54 persen, dan ekuitas rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,37 persen.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah, harus mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen, untuk pendidikan 20 persen dan infrastruktur 40 persen sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Dan dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga dapat melakukan pengembangan pembiayaan inovatif seperti pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, pemanfaatan pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU (Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha), melakukan pendekatan pembiayaan yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki dampak sosial positif *(blended finance)* serta pinjaman daerah untuk mendukung pendanaan terkait pencapaian visi dan misi daerah serta peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2020-2024 adalah data yang telah diaudit oleh BPK RI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun APBD Kabupaten Kubu Raya masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik.

Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.69. sebagai berikut:

Tabel 2.69.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun Anggaran 2020	544.999.216.271,81	1.487.430.843.703,43	36,64
2	Tahun Anggaran 2021	554.510.088.430,00	1.658.062.567.714,77	33,44
3	Tahun Anggaran 2022	551.447.350.820,10	1.711.992.730.385,54	32,21
4	Tahun Anggaran 2023	561.323.636.439,46	1.687.786.783.348,35	33,26
5	Tahun Anggaran 2024	632.747.481.619,19	1.788.190.875.665,61	35,38

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung fluktuatif. Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 juga cenderung fluktuatif. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.3. tersebut di atas, menunjukkan bahwa persentase Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur:

- Tahun 2020 sebesar 36,64 persen
- Tahun 2021 sebesar 33,44 persen, turun sebesar 3,20 persen dibandingkan Tahun 2020
- Tahun 2022 sebesar 32,21 persen, turun sebesar 1,23 persen dibandingkan Tahun 2021
- Tahun 2023 sebesar 33,26 persen, meningkat sebesar 1,05 persen dibandingkan Tahun 2022
- Tahun 2024 sebesar 35,38 persen, meningkat sebesar 2,13 persen dibandingkan Tahun 2023

Jadi kecenderungan proporsi Belanja Aparatur turun dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 1,90 persen.

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah

terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.70. sebagai berikut:

Tabel 2.70.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.477.080.851.351,36	1.553.468.400.345,62	1.557.558.858.426,59	1.681.097.804.226,03	1.790.615.563.778,77
	Dikurangi Realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.487.430.843.703,43	1.658.062.567.714,77	1.628.205.312.413,70	1.549.639.386.757,85	1.786.190.875.665,61
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	83.787.417.971,84	138.147.396.590,50	2.000.000.000,00
	Defisit Riil	**(10.349.992.352,07)**	**(104.594.167.369,15)**	**(154.433.871.958,95)**	**(6.688.979.122,32)**	**2.424.688.113,16**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	(499,79)	(29,56)	(8,14)	(87,96)	342,66
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	(80,11)	(88,16)	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Berdasarkan Tabel 2.71. tersebut di atas, diketahui bahwa komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2020 hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang persentase kontribusi menutupi defisit anggarannya sebesar -499,79 persen. Sedangkan komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2021-2022 bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah yang persentase kontribusi menutupi defisit anggarannya juga berfluktuasi. Pada Tahun 2021 kontribusi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar -29,56 persen dan menurun tajam pada Tahun 2022 menjadi sebesar -8,14 persen. Untuk persentase kontribusi penerimaan pinjaman daerah pada Tahun 2021 sebesar -80,11 persen dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi -88,16 persen. Pada Tahun 2023 dan 2024 komponen untuk menutup defisit anggaran kembali hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan kontribusi sebesar -87,96 persen di tahun 2023 dan 342,66 persen di tahun 2024.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

Adapun realisasi SiLPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.72. sebagai berikut:

Tabel 2.72.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	51.728.318.004,72	3,36	30.921.568.607,41	1,83	12.572.853.317,48	0,73	5.883.874.195,16	0,35	8.308.501.209,53	0,46
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2025

Berdasarkan Tabel 2.72. tersebut di atas, Tahun 2020 sampai dengan 2023 SiLPA Kabupaten Kubu Raya terus mengalami penurunan. SiLPA pada Tahun 2020 berjumlah Rp51.728.318.004,72, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp30.921.568.607,41, pada Tahun 2022 turun kembali menjadi Rp12.572.853.317,48, dan pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi Rp5.883.874.195,16. tetapi pada Tahun 2024 meningkat menjadi Rp8.308.501.209,53.

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program Pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memproyeksikan struktur APBD ini menggunakan teknik peramalan (*Forecasting*). Dimana teknik peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.73. sebagai berikut:

Tabel 2.73.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	**PENDAPATAN**	**1.981.640.638.283,64**	**1.920.722.670.197,82**	**2.016.758.803.707,71**	**2.117.596.743.893,10**	**2.223.476.581.087,75**	**2.334.650.410.142,14**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**270.503.546.133,64**	**284.028.723.440,32**	**298.230.159.612,34**	**313.141.667.592,96**	**328.798.750.972,60**	**345.238.688.521,23**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	217.263.951.020,44	228.127.148.571,46	239.533.506.000,04	251.510.181.300,04	264.085.690.365,04	277.289.974.883,29
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	46.327.686.904,60	48.644.071.249,83	51.076.274.812,32	53.630.088.552,94	56.311.592.980,58	59.127.172.629,61
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.909.604.017,60	4.105.084.218,48	4.310.338.429,40	4.525.855.250,87	4.752.148.118,42	4.989.755.524,34
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.002.304.191,00	3.152.419.400,55	3.310.040.370,58	3.475.542.389,11	3.649.319.508,56	3.831.785.483,99
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.711.137.092.150,00**	**1.636.693.946.757,50**	**1.718.528.644.095,37**	**1.804.455.076.300,14**	**1.894.677.830.115,15**	**1.989.411.721.620,91**
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.515.350.146.000,00	1.431.117.653.300,00	1.502.673.535.965,00	1.577.807.212.763,25	1.656.697.573.401,41	1.739.532.452.071,48
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	140.367.826.000,00	147.386.217.300,00	154.755.528.165,00	162.493.304.573,25	170.617.969.801,91	179.148.868.292,01
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	55.419.120.150,00	58.190.076.157,50	61.099.579.965,38	64.154.558.963,64	67.362.286.911,83	70.730.401.257,42
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA**	**1.991.741.388.360,07**	**1.920.722.670.197,82**	**2.016.758.803.707,71**	**2.117.596.743.893,10**	**2.223.476.581.087,75**	**2.334.650.410.142,14**
2.1.	**Belanja Operasi**	**1.435.126.168.084,91**	**1.339.812.213.043,00**	**1.406.802.823.695,16**	**1.477.192.964.879,91**	**1.551.102.613.123,91**	**1.628.707.743.780,11**

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1.	Belanja Pegawai	703.472.253.710,99	576.216.801.059,35	605.027.641.112,31	635.279.023.167,93	667.042.974.326,33	700.395.123.042,64
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.380.299.282,92	712.908.116.138,11	748.553.521.945,01	786.031.198.042,27	825.382.757.944,38	866.701.895.841,60
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	48.218.315.091,00	50.629.230.845,55	53.160.692.387,83	55.818.727.007,22	58.609.663.357,58	61.540.146.525,46
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	55.300.000,00	58.065.000,00	60.968.250,00	64.016.662,50	67.217.495,63	70.578.370,41
2.2.	**Belanja Modal**	**287.770.728.535,89**	**302.159.264.962,69**	**317.367.228.210,83**	**333.285.589.621,37**	**349.999.869.102,44**	**367.549.862.557,56**
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**5.271.927.746,77**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
2.4.	**Belanja Transfer**	**263.572.563.992,50**	**276.751.192.192,13**	**290.588.751.801,73**	**305.118.189.391,82**	**320.374.098.861,40**	**336.392.803.804,47**
2.4.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	26.359.163.792,50	27.677.121.982,13	29.060.978.081,23	30.514.026.985,29	32.039.728.334,55	33.641.714.751,28
2.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	237.213.400.200,00	249.074.070.210,00	261.527.773.720.50	274.604.162.406,53	288.334.370.526,85	302.751.089.053,19
	SURPLUS/DEFISIT	**(10.100.750.076,43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**PEMBIAYAAN**	**10.100.750.076,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**10.100.750.076,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	10.100.750.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL APBD	**1.991.741.388.360,07**	**1.920.722.670.197,82**	**2.016.758.803.707,71**	**2.117.596.743.893,10**	**2.223.476.581.087,75**	**2.334.650.410.142,14**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.73. di atas, dimana proyeksi dilakukan terhadap struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa secara umum proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 kecenderungan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,28 persen. Proyeksi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi terus membaik dan Kabupaten Kubu Raya termasuk mempunyai pertumbuhan ekonomi yang berada di atas Provinsi dan Nasional, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, daerah perbatasan, terdepan, terluar dan daerah terpencil. Disamping itu juga untuk Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya difokuskan pembangunan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pemukiman dan perumahan sehingga alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat meningkat yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026-2030.

Belanja daerah Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, dan memperkirakan situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2026-2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien, yang diarahkan untuk:

1. Program-program yang langsung mendukung penyelesaian permasalahan daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program-program prioritas dan isu strategis yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026-2030;
3. Memenuhi belanja wajib, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan capaian pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Mengoptimalkan alokasi belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan sebagainya.

2.2.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui gambaran perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2026-2030 dapat dilihat dari realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2020-2024.

Tabel 2.74.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.981.640.638.283,64	1.920.722.670.197,82	2.016.758.803.707,71	2.117.596.743.893,10	2.223.476.581.087,75	2.334.650.410.142,14
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	**1.981.640.638.283,64**	**1.920.722.670.197,82**	**2.016.758.803.707,71**	**2.117.596.743.893,10**	**2.223.476.581.087,75**	**2.334.650.410.142,14**
	Dikurangi:						
4.	Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga	1.440.398.095.831,68	1.341.812.213.043,00	1.408.802.823.695,16	1.479.192.964.879,91	1.553.102.613.123,91	1.630.707.743.780,11
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**541.242.542.451,96**	**578.910.457.154,82**	**607.955.980.012,56**	**638.403.779.013,19**	**670.373.967.963,85**	**703.942.666.362,04**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.74. tersebut di atas, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026-2030 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2026 mencapai Rp578.910.457.154,82, dan pada tahun 2030 meningkat menjadi sebesar Rp703.942.666.362,04.

Berdasarkan hasil proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, maka rencana arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar diarahkan kepada:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai yang berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan sebagaimana yang menjadi amanat atau kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, serta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk belanja-belanja tidak langsung seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja tidak terduga dimana pengalokasian dana pada prioritas ini baru akan dipenuhi setelah pemenuhan prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 2.75.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	541.242.542.451,96	578.910.457.154,82	607.955.980.012,56	638.403.779.013,19	670.373.967.963,85	703.942.666.362,04
2.	Prioritas I	351.807.652.593,77	376.291.797.150,63	395.171.387.008,16	414.962.456.358,57	435.743.079.176,50	457.562.733.135,32
3.	Prioritas II	146.135.486.462,03	156.305.823.431,80	164.148.114.603,39	172.369.020.333,56	181.000.971.350,24	190.064.519.917,75
4.	Prioritas III	43.299.403.396,16	46.312.836.572,39	48.636.478.401,00	51.072.302.321,05	53.629.917.437,11	56.315.413.308,96

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan sesuatu yang diharapkan. Dalam perspektif pembangunan, permasalahan dapat diterjemahkan sebagai suatu perbedaan antara kinerja yang ditargetkan dengan kenyataan pencapaian yang sebenarnya. Secara umum permasalahan dapat ditentukan dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan dirunut dari gambaran kondisi umum daerah, mengenai capaian kinerja yang telah dicapai di periode sebelumnya, kinerja yang belum tercapai dan harapan pencapaian kinerja pada periode pembangunan berikutnya.
2. Permasalahan difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan

Selain itu, dinamika internal dan eksternal juga mempengaruhi penentuan masalah. Selama kurun waktu satu periode RPJMD atau selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan dinamika yang terjadi dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun jika Pemerintah Daerah tidak dapat menyelaraskan diri secara sepadan atas isu-isu strategisnya maka bisa dipastikan pemerintah daerah akan menghadapi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Suatu isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 tidak lepas dari berbagai isu strategis daerah yang mendasari suatu gagasan untuk menganalisis kondisi-kondisi daerah menuju pada perbaikan ke arah yang lebih baik. Analisis isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya diuraikan berdasarkan masukan berbagai unsur perencanaan serta kajian sinergitas dan keterkaitan berbagai elemen daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan, baik yang dihadapi saat ini maupun berpotensi terjadi di masa depan merupakan suatu prasyarat penting dalam perencanaan yang berkualitas dan dapat diangkat

menjadi isu-isu strategis ataupun sebagai dasar untuk merespons isu-isu tersebut

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diharapkan (*gap expectation*). Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah; sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan dearth pada periode sebelumnya. Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional, isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rincian permasalahan pembangunan yang dipilah menjadi beberapa urusan, seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus, penjabaran keempatnya disajikan pada Tabel 2.75. di bawah.

Tabel 2.76.
Permasalahan Pembangunan

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	1. Masih adanya kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		2. Belum adanya pemerataan guru antar sekolah maupun antar wilayah
		3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		4. Tidak memadainya aksesibilitas siswa dan guru dari dan ke lokasi pendidikan di daerah terpencil, di samping itu tidak tersedianya sarana angkutan maupun akomodasi guru dan siswa
		5. Belum adanya konsep dan strategi penanganan yang komprehensif dalam mengatasi siswa putus sekolah, termasuk penyediaan lembaga kursus yang memberdayakan dan meningkatkan keterampilan hidup

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		6. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan
		7. Masih kurang berkualitasnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
		8. Tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap yang masih rendah
		9. Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
		10. Masih kurangnya pengembangan pembinaan karakter siswa
		11. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi
		12. Pembinaan minat dan bakat siswa belum dilakukan secara berkesinambungan
		13. Belum adanya dukungan yang optimal bagi siswa miskin
		14. Belum optimalnya peran PKBM dalam mendukung pendidikan non formal
2	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal
		2. Rasio dokter/tenaga medis dan Paramedis masih kurang
		3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah
		4. Kurang memadainya alat kesehatan
		5. Kondisi/bangunan fisik sarana kesehatan yang belum memadai dan belum merata.
		6. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
		7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
		8. Belum optimalnya promosi dan advokasi kesehatan
		9. Tingginya keluhan masyarakat terhadap kualitas dan intensitas pelayanan kesehatan pada setiap satuan pelayanan
		10. Kurangnya keinginan tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di pulau ataupun di daerah terpencil
		11. Pembiayaan kesehatan masyarakat yang belum optimal
		12. Prevalensi stunting masih tinggi
3	Urusan Pekerjaan Umum	1. Jalan dan Jembatan a. Rasio jalan dan jembatan dalam kondisi rusak yang masih banyak dan belum tertangani b. Belum optimalnya penanganan jalan/jembatan poros kabupaten dan jalan/jembatan lingkungan
		2. Drainase a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (sungai) c. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase dalam skala kawasan
		3. Irigasi/Rawa a. Kurangnya sinergisitas penanganan masalah-masalah irigasi/rawa antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta antar Perangkat Daerah dalam Kabupaten b. Masih terbatasnya perawatan saluran Irigasi/Rawa Kabupaten c. Kurangnya SDM/pengawas dan kelembagaan terkait pengaturan dan perawatan irigasi/rawa
		4. Air Minum a. Cakupan pelayanan air minum perkotaan masih rendah b. Di musim kemarau panjang terjadi kedangkalan dan intrusi air baku c. Keterbatasan sumber air perdesaan di beberapa desa d. Belum optimalnya penguatan kelembagaan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di desa
		5. Persampahan a. Belum optimalnya penanganan pengangkutan dan pengelolaan sampah b. Belum adanya Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, *Recycle* (TPS3R) untuk mengurangi volume sampah c. Belum ada TPA yang representatif d. Belum optimalnya kewenangan kecamatan dalam pengelolaan kebersihan berbasis partisipatif e. Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah masih kurang
		6. Bangunan Gedung a. Masih banyaknya bangunan gedung yangbelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik baru maupun perubahan fungsi/fisik b. Belum diimplementasikannya pengendalian Bangunan Gedung (Perda Bangunan Gedung)
		7. Air Limbah a. Rendahnya kepemilikan fasilitas pengolahan air limbah setempat yang layak b. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi, persentase desa ODF (*Open Defecation Free*) masih rendah c. Belum adanya penerapan teknologi untuk penanganan air limbah di daerah pesisir d. Belum ada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		8. Air Baku a. Air Permukaan - Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan daerah tangkapan air (*catchment area*) b. Air Tanah - Belum adanya pengendalian pemanfaatan air tanah
4	Urusan Penataan Ruang	1. Masih belum tersusunnya RDTRK dan Peraturan Zonasi pada kawasan yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya
		2. Masih belum tersusunnya RDTRK pada kawasan strategis daerah, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya
		3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM tata ruang
		4. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
		5. Tingginya potensi alih fungsi lahan dan adanya kendala terkait dengan aturan tata ruang (misalnya aturan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru)
		6. Minimnya Ruang Terbuka Hijau
		7. Belum tertibnya pengendalian Ruang Terbuka Non Hijau
5	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh
		2. Rendahnya daya dukung sarana dan prasarana wilayah permukiman
		3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi
		4. Masih adanya bangunan-bangunan liar di daerah sempadan sungai dan sempadan jalan
		5. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman
		6. Belum adanya tindakan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Produk Hukum Daerah
		2. Masih tingginya pelanggaran ketertiban umum
		3. Belum efektifnya peran lembaga swakarsa masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
		4. Belum tersedianya *Early Warning System* di daerah rawan bencana (kebakaran hutan dan lahan)
7	Urusan Sosial	1. Belum optimalnya penerapanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)/Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		2. Masih rendahnya keterampilan/keahlian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		3. Verifikasi dan validasi data Basis Data Terpadu (BDT) belum optimal
		4. Masih terbatasnya penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain)
		5. Masih rendahnya perhatian dan penanganan atas penduduk lanjut usia
		6. Belum maksimalnya penanganan pasca bencana secara terpadu
		7. Masih minimnya sarana dan prasarana penanganan pasca bencana
		8. Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pasca bencana belum memadai dan terlatih
		9. Belum berkembangnya kelembagaan di masyarakat yang turut membantu penanganan pasca bencana
		10. Masih minimnya penanganan dan pemberdayaan kaum disabilitas
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Meningkatnya angka pengangguran
		2. Belum tersedianya Balai Pelatihan Kerja
		3. Belum adanya data lengkap ketenagakerjaan yang didukung sistem.
		4. Belum adanya rencana strategi yang komprehensif bagi penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		5. Terbatasnya lapangan kerja yang variatif
		6. Masih minimnya upaya kesehatan dan keselamatan tenaga kerja
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih rendahnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender
		2. Pengarusutamaan gender masih lemah
		3. Belum optimalnya implementasi data terpilah dalam pengarusutamaan gender
		4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih terbatas
		5. Advokasi terhadap perempuan rentan masih rendah
		6. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam ketahanan rumah tangga
		7. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
		8. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak
3	Urusan Pangan	1. Belum optimalnya pengelolaan pangan non beras
		2. Penggunaan alat teknologi pangan masih rendah
		3. Belum meratanya pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		4. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Kabupaten
		5. Minimnya pengendalian harga bahan pangan yang sering fluktuatif
4	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih sering muncul sengketa atas tanah dan masalah sertifikat ganda terkait dengan kepemilikan tanah di tingkat desa dan kabupaten/kota
		3. Masih rendahnya peran lembaga dan institusi yang berwenang dalam legalitas dan keabsahan serta koordinasi lintas lembaga dari desa, kecamatan dan kabupaten
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penerapan regulasi dalam pelestarian lingkungan hidup
		2. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin kurang terkontrol
		3. Kondisi kultur agronomi dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
		4. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut
		5. Belum adanya SDM yang bersertifikasi auditor lingkungan hidup
		6. Belum diwujudkannya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan
		7. Peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah masih kurang
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan
		2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan
		3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemerintah Desa
		2. Pembinaan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di tingkat desa masih kurang
		3. Jumlah status Desa Mandiri dan Desa Maju masih relatif sedikit dibandingkan Desa Berkembang dan Desa Tertinggal
		4. Belum optimalnya penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa secara partisipatif dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
		5. Masih banyaknya sengketa batas Desa

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		6. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)
		7. Belum optimalnya pengelolaan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan desa
		8. Belum maksimalnya pendataan dan pengelolaan aset desa
		9. Belum optimalnya perencanaan, pemetaan dan pengembangan potensi desa
		10. Belum optimalnya penyusunan Produk Hukum Desa
		11. Belum optimalnya partisipasi *stakeholder* dan analisa masalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes
		12. Tidak proporsionalnya alokasi program, kegiatan dan penganggaran terhadap urusan-urusan desa
		13. Belum maksimalnya implementasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
		14. Belum optimalnya hubungan kerjasama antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung pemerintahan desa sesuai dengan peran dan fungsinya
		15. Belum maksimalnya pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes)
		16. Terbatasnya sarana dan prasarana desa
		17. Minimnya kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, dengan mengembangkan berbagai sentra produksi berdasarkan potensi unggulan lokal
		18. Terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan perkantoran desa yang terkoneksi secara teknologi baik sistem kerja maupun jaringan komunikasi dan teknologi informasi
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Cakupan layanan dan intervensi program KB yang menyentuh bagi keluarga miskin dalam mengontrol laju pertembuhan penduduk yang berimplikasi pada peningkatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih Sejahtera
		2. Belum ditetapkannya standar klinis pelayanan KB yang harus diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ataupun yang harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, termasuk tubektomi interval
		3. Belum berkembangnya kelompok masyarakat peduli KB yang diharapkan dapat memfasilitasi dan menopang program pemerintah

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
		4. Kurangnya sarana dan prasarana serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB
		5. Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja
		6. Belum optimalnya komitmen dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan kampung KB yang mempromosikan dan melaksanakan manajemen keluarga berencana
9	Urusan Perhubungan	1. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, dan perdesaan
		2. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, serta tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah
		3. Kuantitas dan kualitas jalan masih belum memadai terutama di daerah terpencil dan ke sentra-sentra produksi
		4. Tingginya potensi daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb
		5. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil
		6. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen andalalin yang dimiliki
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multimedia dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah
		3. Pelayanan jaringan komunikasi belum merata, akses jaringan komunikasi antar desa masih terbatas
		4. Kapasitas media lokal sebagai sarana informasi bagi masyarakat masih terbatas, selain itu penguasaan Teknologi Informasi masih rendah
		5. Belum seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki penguasaan komprehensif tentang TIK
		6. Masih terbatasnya sarana pendukung untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ *Smart City*

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Masih tingginya ketergantungan usaha mikro, kecil, dan koperasi pada bantuan pemerintah
		2. Masih banyaknya koperasi yang tidak berlegalitas
		3. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM
		4. Sulitnya akses permodalan usaha terutama untuk usaha mikro dan kecil, serta koperasi, sehingga menyulitkan mereka mengakses ke lembaga keuangan
		5. Sarana dan Prasarana IT untuk pengelolaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas
		6. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM
12	Urusan Penanaman Modal	1. Adanya prosedur perijinan investasi yang belum kondusif dan menghambat kegiatan investasi dan operasional dunia usaha yang berimbas pada daya saing investasi daerah
		2. Belum optimalnya promosi investasi daerah
		3. Masih lemahnya koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi daerah
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
		2. Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik
		3. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai
		4. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan
14	Urusan Statistik	1. Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang *update* dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan
		2. Lemahnya kontribusi data institusi yang didukung dengan kurangnya kompetensi aparatur terhadap ketersediaan data
		3. Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan Kabupaten Kubu Raya disertai kemudahan akses dan distribusinya
15	Urusan Persandian	1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM persandian
		2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian
16	Urusan Kebudayaan	1. Kurikulum pada institusi pendidikan belum memberi bobot yang besar pada pengembangan kebudayaan dan kesenian lokal
		2. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah
		3. Minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal relatif rendah
		4. Relatif terbatasnya kuantitas dan kualitas sanggar seni

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
17	Urusan Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
		2. Masih terbatasnya berbagai literatur dan sarana penunjang keperpustakaan
		3. Kurang terorganisirnya perpustakaan sesuai dengan aturan kearsipan
		4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah
		5. Kurangnya tenaga fungsional Pustakawan
18	Urusan Kearsipan	1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip daerah
		2. Kurangnya tenaga fungsional Arsiparis
		3. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip
III	URUSAN PILIHAN	
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Data potensi perikanan yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya terutama disebabkan oleh penjualan ilegal nelayan lokal dan *illegal fishing*
		2. Terbatasnya penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) yang lebih maju
		3. Belum memadainya peralatan pendukung usaha perikanan, seperti kapal penangkap yang representatif, sarana pasar untuk komoditas perikanan, *cold storage*, dan pabrik pengolahan hasil perikanan
		4. Masih rendahnya produksi perikanan
		5. Masih terdapat bantuan operasional nelayan yang salah sasaran
		6. Pembinaan dan pendampingan bagi nelayan belum berlangsung secara berkelanjutan
		7. Masih rendahnya konsumsi ikan di masyarakat
		8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan
2	Urusan Pariwisata	1. Rendahnya kunjungan wisatawan manca negara di Kabupaten Kubu Raya
		2. Objek-objek wisata belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal
		3. Belum memadainya utilitas dan infrastruktur pariwisata sesuai standar di berbagai destinasi pariwisata
		4. Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modal pada bisnis pariwisata di Kabupaten Kubu Raya
		5. Masih lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku bisnis pariwisata, baik yang ada di Kabupaten Kubu Raya maupun di luar daerah
		6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosi pariwisata Kabupaten Kubu Raya

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
3	Urusan Pertanian	1. Masih rendahnya tata kelola air
		2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna, baik untuk kegiatan sebelum panen, saat panen, dan pasca panen untuk menunjang produktivitas pertanian
		3. Masih terdapat kendala dalam pemasaran hasil pertanian dan perkebunan secara berkesinambungan
		4. Keterlibatan pihak perbankan untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan masih sangat rendah, terkait risiko bisnis dan persoalan teknis lapangan
		5. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit *zoonosis*
		6. Pembinaan dan pendampingan bagi petani belum berlangsung secara berkelanjutan
		7. Belum adanya rencana aksi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan peternakan
4	Urusan Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis Kabupaten
		2. Belum terimplementasikannya penetapan 13 (tiga belas) kawasan perhutanan sosial
		3. Masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan pengamanan hutan
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Masih lemahnya data potensi, eksplorasi dan eksploitasi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kubu Raya
		2. Insentif untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai sementara disinsentif untuk pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi energi dan konservasi energi belum dilaksanakan secara konsisten
		3. Pasokan listrik PLN bagi konsumen belum optimal (kurang tersedianya listrik di daerah terpencil)
		4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik
6	Urusan Perdagangan	1. Belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan di setiap kecamatan
		2. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta pengembangan keunggulan lokal
		3. Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
		4. Kurang terintegrasinya promosi perdagangan produk unggulan baik dari sisi hulu hilir
		5. Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan)
		6. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pasar lokal

No.	Urusan	Permasalah Pembangunan
7	Urusan Perindustrian	1. Masih lemahnya daya saing industri daerah
		2. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif
		3. Dalam pembinaan industri kecil dan menengah belum berkembangnya keterampilan tenaga kerja, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi, dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik
		4. Agroindustri yang ada belum kreatif dan inovatif untuk membuat produk-produk turunan yang lebih bervariasi dari komoditas unggulan yang dimiliki
		6. Masih rendahnya produk industri kecil menengah yang memperoleh fasilitas HaKI
8	Urusan Transmigrasi	1. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) sering mengabaikan penyelesaian legalitas lahan dan persetujuan masyarakat, sehingga berpotensi menjadi masalah hukum atas kepemilikan lahan
		2. Kurangnya koordinasi lintas lembaga serta sosialisasi dan pemahaman terkait dengan program transmigrasi sehingga sering menimbulkan multitafsir seperti halnya pembebasan lahan; tuntutan ganti rugi tanah atas lahan transmigrasi oleh masyarakat
IV	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
1	Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi (dari sektor bahan galian dan jual beli tanah serta bangunan)
		2. Belum tergalinya potensi penerimaan daerah lainnya
		3. Masih rendahnya kesiapan SDM dan kelembagaan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak yang dialihkan pemerintah pusat ke daerah
		4. Masih minimnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu-isu strategis merupakan acuan pemerintah dalam penentuan prioritas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Penetapan isu-isu

strategis Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada analisis kondisi aktual dan permasalahan-permasalahan saat ini maupun yang berpotensi muncul di masa depan. Penetapan ini juga mengakomodasi isu-isu strategis dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang relevan dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya. Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menganggarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya.

2.3.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan

2.3.2.1.1. Global Megatren

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transformasi global ini terdiri dari 10 (sepuluh) komponen, yang meliputi:

1. Demografi Global

   Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan penganggaran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.

2. Urbanisasi Dunia

   Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasi bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

3. Peranan *Emerging Economics*

   Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4. Perdagangan Internasional

   Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

5. Keuangan Internasional

   Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi *multi currencies*.

6. Kelas Menengah

   Jumlah *middle* dan *upper income class* akan terus meningkat, dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

7. Persaingan Sumber Daya Alam

   Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse, recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

8. Teknologi

   Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. Tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

9. Perubahan Iklim

   Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada Upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celcius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, sehingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

10. Perubahan Geopolitik

    Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian oleh pemerintah atau pemangku kepentingan mengenai *Environmental Assesment* (penilaian lingkungan) dengan adanya *Megatrend*, yaitu: 1) Menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian; 2) Meningkatkan efisiensi; 3) Menghadapi perubahan yang signifikan; 4) Menghadapi komunikasi dan partisipasi. Peningkatan populasi yang cepat, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang terus berkembang mempengaruhi kompleksitas pengambilan keputusan dan juga ketidakpastian akan perubahan. Diperkirakan bahwa masa depan menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk diprediksi, salah satu kasus yang telah terjadi adalah pada perubahan iklim.

Selain itu, dengan adanya perubahan demografi, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang membuat lebih banyak populasi penduduk maka diperlukan efisiensi dalam meningkatkan informasi sehingga mempersingkat waktu pengambilan keputusan, khususnya dalam hal regulasi di pemerintahan. Terdapat empat prinsip mendukung efisiensi, yaitu relevan, hemat biaya, fokus, dan kredibel. Berbagai analisis *Megatrend* menunjukkan

bahwa di masa depan, permintaan terhadap sumber daya akan terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan terjadi. Peraturan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi isu utama yang diperhatikan.

Di masa depan, perkembangan yang pesat pada teknologi komunikasi dan urbanisasi sekali lagi menjadi aspek penting. Hal ini karena setiap orang akan lebih mudah terhubung antara satu sama lain melalui teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan lebih mudah diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah memberikan informasi dan meminta masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat.

Perkembangan *Megatrend* dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kendati demikian, pemahaman terhadap *Megatrend* dapat berbeda, tergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi global, dapat dilihat sebagai faktor pendorong atau sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Contoh lainnya adalah urbanisasi yang dapat dianggap sebagai faktor yang membebani keberlangsungan ekosistem atau sebagai peluang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat sumber daya. Dengan memahami hal tersebut maka peluang yang mungkin muncul akibat *Megatrend* dapat ditangkap dan dimanfaatkan serta permasalahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.

2.3.2.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 (lima belas) tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Siciety Organization* (CSO).

Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok

masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepas dari peranan penting pemerintah daerah. Oleh karena pemerintah daerah berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua per tiga nasib dan kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kualitas sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya kondisi masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

2.3.2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatrend global, modal dasar, perubahan iklim, daya tamping dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**. Visi tersebut dicerminkan dalam 5 (lima) sasaran visi yang dicapai melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur keberhasilannya melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan; (3)

meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional; (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia; dan (5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai US$23.000 – 30.300 dan masuk dalam 5 (lima) ekonomi terbesar di dunia dengan fokus utama pada peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan kemaritiman. Sasaran kedua, tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 0,5 – 0,8 persen, ketimpangan pendapatan penduduk berada pada kisaran Rasio Gini 0,290 – 0,320, dan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 28,5 persen. Sasaran ketiga diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia yang mencerminkan adanya penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, dan berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu global. Sasaran keempat diukur melalui peningkatan *Human Capital Index* (HCI) menjadi 0,73 pada tahun 2045 yang dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segala aspek. Sasaran kelima ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. 8 (delapan) misi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Keseimbangan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas melalui Kaidah Pelaksanaan dan Pembiayaan Pembangunan yang Efektif

Selanjutnya arah pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional jangka panjang dibedakan ke dalam 4 (empat) tahapan. Tahap Pertama atau tahun 2025-2029 merupakan tahap perkuatan fondasi transformasi, dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,6 – 6,1 persen per tahun dengan fokus pembangunan dalam setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial, difokuskan pada penuntasan pemenuhan Layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) dan peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Transformasi Ekonomi, difokuskan pada upaya lanjutan hilirisasi SDA unggul, peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Pembangunan sektor energi diarahkan lebih berkelanjutan dengan pembatasan pembangunan PLTU batu bara dan pengalihan subsidi fosil ke subsidi energi terbarukan secara bertahap.

3. Transformasi Tata Kelola, difokuskan pada perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, difokuskan pada penguatan stabilitas politik, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan asas hukum yang berlandaskan Pancasila, dan penguatan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia sebagai modal sosial dan akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
6. Pembangunan Wilayah, difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pembangunan bertahap *national grid* (Sumatera – Jawa) untuk mendukung transisi energi, percepatan pembangunan konektivitas laut, melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster Ibu Kota Nusantara (IKN).
7. Pembiayaan Pembangunan, difokuskan pada optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah dan reformasi tata kelola fiskal.

Visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan langkah transformasi menyeluruh, mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial ditujukan untuk memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan menjadi manusia Indonesia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Adapun transformasi ekonomi menjadi titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan perekonomian menjadi negara maju. Sementara itu, transformasi tata kelola menjamin terlaksananya transformasi sosial dan ekonomi serta menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif guna mencapai prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain ketiga transformasi tersebut, dibutuhkan landasan stabilitas nasional yang kuat dan ketangguhan diplomasi untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Di samping itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah transformasi tahap pertama yang sekaligus menjadi tema dan arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.77.
Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029

No.	Transformasi	Penguatan Fondasi Transformasi
1	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2	Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja (kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6 – 6,1 persen)
3	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah) dalam Rancangan Akhir RPJPN

2.3.2.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, setidaknya terdapat 7 (tujuh) isu strategis kewilayahan pada wilayah Kalimantan, yaitu meliputi:

1. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
2. Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA
3. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar
4. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar
5. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan
6. Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah

Selanjutnya, upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan pembangunan yang dinamis,

dimana hal tersebut perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. *World Economic Forum Global Risk Report* 2024 dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 9 (sembilan) risiko global jangka menengah yang akan dihadapi, yakni meliputi cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, *biodiversity loss* dan gangguan ekosistem, krisis sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk teknologi AI, *involuntary migration*, *cyber insecurity*, polarisasi sosial, serta polusi. Sementara itu, terdapat 5 (lima) isu jangka menengah yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: (1) dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi Perekonomian Indonesia, oleh karena itu hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar; (2) sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, dimana sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional; (3) penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global, dimana produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global; (4) transisi energi untuk mendorong pemerataan, dimana perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, serta perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan; dan (5) *aging population* negara maju, dimana usia produktif negara maju menurun, serta potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

Pemerintah telah menetapkan target indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang tercantum di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.78.
Target Indikator Makro Provinsi Kalimantan Barat

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2025	2029
1	LPE	Persen	6,9 (rata-rata 2025-2029)	7,9
2	PDRB per Kapita	Rp Juta	55,5	81,2
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,3	1,4
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,65 – 6,15	3,45 – 4,45
5	Rasio Gini	-	0,315 – 0,321	0,271 – 0,275
6	Indeks Modal Manusia	-	0,51	0,54

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2025	2029
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	67,73	85,43
8	IKLH Daerah	-	77,51	78,07
9	TPT	Persen	4,73 – 4,86	3,46 – 4,52

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun tema pembangunan wilayah Kalimantan periode 2025-2029 sebagaimana yang dikutip dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Superhub Ekonomi Nusantara. Wilayah Kalimantan memiliki kontribusi dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, tema pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah. Adapun *highlight* arah kebijakan untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.79.
***Highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi**
Provinsi Kalimantan Barat

Transformasi	*Highlight* Indikasi Intervensi
Sosial	1. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah terutama Kalimantan Barat melalui perlindungan sosial adaptif 2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka
Ekonomi	1. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Barat (kelapa sawit, bauksit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan 3. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Barat seperti Pelabuhan Kijing yang dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi 4. Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah di Kota Pontianak sebagai Bandara Utama (Bandara Supadio)

Transformasi	*Highlight* Indikasi Intervensi
	5. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis surya dan persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta transmisi Sistem Kalbar
Tata Kelola	1. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan asset daerah 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	1. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di Kalimantan Barat 2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Pengembangan diversifikasi pangan 2. Rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan pasca tambang serta penghambatan laju deforestasi 3. Pengembangan irigasi di WS Kapuas dan Sambas guna mendukung pengembangan pangan local 4. Pengembangan pangan akuatik di Kalimantan Barat 5. Peningkatan dan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, perumahan, sanitasi dan air minum layak serta persampahan

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

2.3.2.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, terdapat beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi kualitas kehidupan masyarakat, transformasi ekonomi berkelanjutan, konektivitas dan aksesibilitas pemerataan pembangunan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia berdaya saing. Berdasarkan isu strategis, kondisi daerah, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesar, serta dengan merujuk dan menyandingkan dengan visi Indonesia Emas 2045 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 adalah "**Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

Pencapaian visi tersebut dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema Perkuatan Fondasi Transformasi pada periode lima tahun pertama (tahun 2025-2029); Akselerasi Transformasi pada periode II (tahun 2030-2034); Ekspansi Global pada periode III (tahun 2035-2039); serta Perwujudan Kalbar Emas pada periode IV (tahun 2040-2045). Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada periode I (tahun 2025-2029), meliputi:

1. Arah kebijakan misi 1, Transformasi Sosial, yaitu melalui penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan manusia produktif.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

   a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
   b. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis), serta afirmasi di daerah 3TP
   c. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan, terutama di daerah perbatasan
   d. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   e. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema *education to employment*
   f. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
   g. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan

h. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif
i. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melallui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka
j. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor

2. Arah kebijakan misi 2, Transformasi Ekonomi, yaitu melalui hilirisasi sumber daya unggulan, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru serta penyediaan energi mendukung industrialisasi.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

   a. Pengembangan pusat-pusat industri melalui: (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan terutama kelapa sawit, batu bara, bauksit, lignit, dan migas; dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, seperti industri *oleochemicals* dan *petrochemicals*
   b. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk: (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro brid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x)

pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan

3. Arah kebijakan misi 3, Transformasi Tata Kelola, yaitu melalui peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

   a. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
   b. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah
   c. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
   d. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
   e. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
   f. Peningkatan responsi terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
   g. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
   h. Optimalisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah

4. Arah kebijakan misi 4, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, yaitu melalui pengembangan budaya hukum mengedepankan kepastian, keadilan, pemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, lembaga demokrasi yang kuat berbasis nilai serta menjaga stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

   a. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP)

b. Penguatan pengendalian inflasi daerah
c. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama

5. Arah kebijakan misi 5, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yaitu melalui peningkatan peran keluarga dan nilai agam untuk membangun modal sosial Kalimantan Barat yang Tangguh menghadapi perubahan dan bencana.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

   a. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
   b. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi
   c. Peningkatan mitigasi struktural dan non struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
   d. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
   e. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi diantaranya Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan
   f. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
   g. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah Kalimantan
   h. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
   i. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang

6. Arah kebijakan misi 6, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, yaitu melalui peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan penyiapan pembentukan Daerah Otonom Baru.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:

a. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
b. Pengembangan Pelabuhan-pelabuhan, seperti Pelabuhan Kijing yang dikembangkan secara terpadu (Pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional) untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi
c. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
d. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya, seperti di Pontianak maupun kota-kota lainnya

7. Arah kebijakan misi 7, Sarana Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan, yaitu melalui penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk listrik dan *micro grid*) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:
   a. Pengembangan pasokan listrik terintegritasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia
   b. Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
   c. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman

8. Arah kebijakan misi 8, Kesinambungan Pembangunan, yaitu melalui peningkatan tata kelola fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah.

   Pada tahap ini, upaya transformasi yang ditetapkan yaitu:
   a. Sinkronisasi substansi dan periodesasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
   b. Sinkronisasi periodesasi RPJPD dan RTRW Provinsi
   c. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran Prioritas Nasional

d. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
e. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*

2.3.2.1.6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045

Berdasrkan dokumen RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, terdapat 7 (tujuh) isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yaitu: 1) rendahnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Kubu Raya; 2) rendahnya kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Kubu Raya; 3) tata kelola pemerintahan yang masih belum berbasis sistem informasi di Kabupaten Kubu Raya; 4) konektivitas dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang masih belum merata; 5) pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang belum berwawasan lingkungan; 6) kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang belum optimal; dan 7) pembangunan dan pengembangan kebudayaan masyarakat yang masih rendah. Dengan mempertimbangkan kondisi, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 dirumuskan **"Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri, Unggul dan Berkelanjutan"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut dan mengacu pada 8 (delapan) misi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, Kabupaten Kubu Raya menetapkan 8 (misi), yaitu:

1. Mewujudkan SDM Kubu Raya yang Unggul, Berdaya Saing dan Inovatif
2. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan
3. Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif, Efisien dan Transparan
4. Mewujudkan Kesejahteraan dan Ketenteraman Masyarakat
5. Mewujudkan Stabilitas Sosial Budaya dan Lingkungan Alami yang Lestari
6. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kawasan untuk Memperkecil Kesenjangan Sosial
7. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian visi tersebut dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema Penguatan Fondasi Pembangunan pada periode lima tahun pertama (tahun 2025-2029); Akselerasi Pembangunan pada periode II (tahun 2030-2034); Perluasan Pembangunan pada periode III (tahun 2035-2039); dan Perwujudan Visi Pembangunan pada periode IV (tahun 2040-2045). Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya pada periode I (tahun 2025-2029), meliputi:

1. Misi 1, Mewujudkan SDM Kubu Raya yang Unggul, Berdaya Saing dan Inovatif, yaitu melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang merata di seluruh wilayah.
2. Misi 2, Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan, yaitu melalui pengembangan ekonomi berbasis wilayah dan sumber daya local dengan teknologi digital yang didukung oleh riset dan inovasi.
3. Misi 3, Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif, Efisien dan Transparan, yaitu melalui mewujudkan *digital government* dan ASN *Agile*.
4. Misi 4, Mewujudkan Kesejahteraan dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan kepada masyarakat.
5. Misi 5, Mewujudkan Stabilitas Sosial Budaya dan Lingkungan Alami yang Lestari, yaitu melalui peningkatan peran keluarga dan nilai agama untuk membangun modal sosial yang tangguh menghadapi bencana.
6. Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kawasan untuk Memperkecil Kesenjangan Sosial, yaitu melalui pembentukan dan pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
7. Misi 7, Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan, yaitu melalui pemenuhan infrastruktur dasar.
8. Misi 8, Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu melalui pemenuhan pembiayaan pembangunan.

2.3.2.1.7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, Pusat Pertumbuhan Wilayah secara hirarki terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Terdapat satu PKN yaitu PKN Pontianak yang terdiri atas seluruh Kota Pontianak, sebagian wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, sebagian wilayah Kecamatan Sungai Raya, dan sebagian wilayah Kecamatan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya, serta sebagian wilayah Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah. PKN tersebut ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW terdiri atas:

1. Sambas di Kabupaten Sambas
2. Singkawang di Kota Singkawang
3. Mempawah di Kabupaten Mempawah
4. Ketapang di Kabupaten Ketapang
5. Sanggau dan Entikong di Kabupaten Sanggau
6. Entikong di Kabupaten Sanggau
7. Sintang di Kabupaten Sintang
8. Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu

PKW tersebut di atas ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN.
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN terdiri atas:

1. Temajuk (Paloh) dan Aruk di Kabupaten Sambas
2. Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang
3. Entikong di Kabupaten Sanggau
4. Sungai Keling (Jasa) di Kabupaten Sintang
5. Badau di Kabupaten Kapuas Hulu

PKSN tersebut di atas ditetapkan sebagai:

- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
- Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitar.
- Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL terdiri atas:

1. Selakau, Pemangkat, Tebas, Sentebang, Sekura, dan Liku di Kabupaten Sambas
2. Sungai Duri, Samalantan, Bengkayang, Sanggau Ledo, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang
3. Sungai Pinyuh, Anjongan, dan Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah
4. Karangan, Pahauman, Ngabang, dan Darit di Kabupaten Landak
5. Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kubu di Kabupaten Kubu Raya
6. Teluk Batang, Sukadana, dan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara
7. Kendawangan, Manis Mata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Bekuak di Kabupaten Ketapang
8. Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, dan Pusat Damai di Kabupaten Sanggau
9. Sekadau, Nanga Mahap, Sungai Ayak, dan Balai Sepuak di Kabupaten Sekadau
10. Nanga Pinoh, Kota Baru, dan Nanga Ella di Kabupaten Melawi
11. Nanga Merakai, Nanga Sepauk, Nanga Mau, dan Nanga Serawai di Kabupaten Sintang
12. Nanga Silat, Semitau, Tepuai, dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu

PKL tersebut di atas ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Selanjutnya Pusat Pertumbuhan Wilayah didukung dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Provinsi adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- Mendukung tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.
- Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi.
- Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan.
- Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah Provinsi.
- Berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayah Provinsi.
- Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah Provinsi yang memiliki kekhususan.
- Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi.
- Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namum harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi yang jelas.
- Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah Provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat.
- Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah Provinsi.
- Dapat berupa kawasan yang berada pada satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota.
- Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Pertumbuhan Wilayah sinergi dengan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi.
- Memiliki potensi ekspor.
- Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah.
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi.
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- Memiliki pusat pengembangan produk unggulan.
- Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kriteria tersebut, KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Metropolitan Pontianak Raya
2. Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit
3. Kawasan Pariwisata Pesisir Kabupaten Sambas – Kota Singkawang – Kabupaten Bengkayang
4. Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Maya – Pulau Pelapis dan sekitarnya
5. Kawasan Industri Ketapang dan sekitarnya
6. Kawasan Industri Tayan – Toba dan sekitarnya

2.3.2.1.8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya

Penataan ruang Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada sektor pertanian dan perikanan dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan yang bersinergi dengan sektor pengembangan agroindustri, perdagangan dan jasa,

budaya serta sektor lain yang mendukung perkembangan Kabupaten dan sebagai beranda depan Provinsi. Adapun arahan penataan ruang yang termuat dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut.

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang saling terhubung. Rencana sistem pusat permukiman meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sistem jaringan prasarana yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Untuk mendukung struktur ruang tersebut, diperlukan strategi penataan ruang yang disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah. Kebijakan penataan ruang mencakup: (1) pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan prasarana wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial secara merata; (2) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah, sinergi antarsektor dan antarwilayah baik dalam lingkup internal maupun eksternal, percepatan perwujudan fungsi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), serta memudahkan upaya mitigasi perubahan iklim dan penanganan bencana; (3) pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam; (4) pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (5) pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing yang didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan (6) pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk pengembangan ekonomi hijau.

a. Rencana Sistem Pusat Permukiman

Kabupaten Kubu Raya memiliki 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan 19 (sembilan belas) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rincian penetapan pusat kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.80.
Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kubu Raya

Sistem Pusat Permukiman	Lingkup Kawasan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Sungai Kakap 2. Rasau Jaya 3. Kubu
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. PPK Padang Tikar Dua di Kecamatan Batu Ampar 2. PPK Selat Remis di Kecamatan Teluk Pakedai 3. PPK Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B 4. PPK Permata di Kecamatan Terentang
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. PPL Sungai Enau di Kecamatan Kuala Mandor B 2. PPL Lingga di Kecamatan Sungai Ambawang 3. PPL Pasak di Kecamatan Sungai Ambawang 4. PPL Mekar Sari di Kecamatan Sungai Raya 5. PPL Sungai Asam di Kecamatan Raya 6. PPL Pulau Limbung di Kecamatan Kumpai Raya 7. PPL Teluk Bayur di Kecamatan Terentang 8. PPL Terentang Hulu di Kecamatan Terentang 9. PPL Jeruju Besar di Kecamatan Sungai Kakap 10. PPL Punggur Besar di Kecamatan Sungai Kakap 11. PPL Sungai Nipah di Kecamatan Teluk Pakedai 12. PPL Tanjung Bunga di Kecamatan Teluk Pakedai 13. PPL Seruat Tiga di Kecamatan Kubu 14. PPL Mengkalang di Kecamatan Kubu 15. PPL Pinang Luar di Kecamatan Kubu 16. PPL Air Putih di Kecamatan Kubu 17. PPL Sungai Besar di Kecamatan Batu Ampar

Sistem Pusat Permukiman	Lingkup Kawasan
	18. PPL Sumber Agung di Kecamatan Batu Ampar 19. PPL Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Kubu Raya meliputi: 1) sistem jaringan jalan; 2) sistem jaringan kereta api; 3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; 4) sistem jaringan transportasi laut; dan 5) sistem jaringan transportasi udara. Keseluruhan rencana jaringan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Kubu Raya.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas jalan umum, jalan tol dan terminal penumpang. Rincian penetapan sistem jaringan jalan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81.
Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Kubu Raya

Sistem Jaringan Jalan		Lingkup Jaringan
Jalan Umum	Jalan Arteri Primer	1. Jalan Supadio (Kubu Raya) 2. Jalan Major Alianyang (Kubu Raya) 3. Batas Kota Pontianak (Tugu Khatulistiwa) – Simpang Ampar/Tayan
	Jalan Kolektor Primer	1. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya (Kubu Raya) 2. Jalan Batas Kota Pontianak – Sungai Kakap 3. Jalan Batas Kota Pontianak – Sungai Durian 4. Jalan Sungai Raya Dalam I 5. Kuala Dua – Dermaga Penyeberangan Sungai Asam (Sukalanting, Kubu Raya) 6. Dermaga Penyeberangan Sungai Nipah – Selat Remis (Kubu Raya) 7. Rasau Jaya – Kubu 8. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Muara Kubu/Kalang Kubu (Kubu Raya) 9. Sungai Kakap – Dermaga Penyeberangan Parit Sarim 10. Jalan Lingkar Luar Barat Perkotaan Pontianak 11. Jalan Lingkar Luar Selatan Perkotaan Pontianak 12. Pontianak – Sebangki 13. Jalan Sungai Raya Dalam II

Sistem Jaringan Jalan		Lingkup Jaringan
		14. Jalan Akses Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas (Kubu Raya) 15. Jalan Akses Jembatan Punggur Besar 16. Batu Ampar – Pelabuhan Laut Pengumpang Regional Padang Tikar 17. Simpang Ya' M. Sabran – Tugu Alianyang 18. Jalan Akses Jembatan Kapuas III 19. Dermaga Penyeberangan Tanjung Harapan – Permata (Kubu Raya)
	Jalan Lokal	1. Jalan Lokal Primer yang melintas di seluruh Kecamatan 2. Jalan Lokal Sekunder yang melintas di seluruh Kecamatan
	Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Sekunder yang melintas di seluruh Kecamatan
	Jembatan	1. Kecamatan Sungai Raya (68 lokasi) 2. Kecamatan Batu Ampar (107 lokasi) 3. Kecamatan Terentang (80 lokasi) 4. Kecamatan Kubu (136 lokasi) 5. Kecamatan Teluk Pakedai (19 lokasi) 6. Kecamatan Rasau Jaya (35 lokasi) 7. Kecamatan Kuala Mandor B (43 lokasi) 8. Kecamatan Sungai Ambawang (64 lokasi) 9. Kecamatan Sungai Kakap (73 lokasi) 10. Rencana Jembatan Lainnya: a. Jembatan Sungai Mandor (Kecamatan Kuala Mandor B) b. Jembatan Sungai Landak II (Kecamatan Sungai Ambawang) c. Jembatan Sungai Ambawang III (Kecamatan Sungai Ambawang) d. Jembatan Kapuas IV (Kecamatan Sungai Raya) e. Jembatan Sungai Punggur Besar (Kecamatan Rasau Jaya) f. Jembatan Sungai Ambawang Kubu (Kecamatan Kubu) g. Jembatan Sungai Kapuas III (Kecamatan Sungai Kakap)
Jalan Tol		1. Pontianak – Tayan 2. Lingkar Kota Pontianak 3. Sei Pinyuh - Pontianak
Terminal Penumpang		1. Terminal Penumpang Tipe A Sungai Ambawang 2. Terminal Penumpang Tipe C: a. Terminal Sungai Raya b. Terminal Rasau Jaya c. Terminal Sungai Kakap

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api yang dimaksud adalah jaringan jalur kereta api antar kota yang meliputi jaringan kereta api antar kota pada lintas Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara (Sambas) dan jaringan kereta api antar kota Pontianak – Sanggau – Sintang – Putussibau. Untuk stasiun kereta api berupa stasiun penumpang Bandara Supadio di Kecamatan Sungai Raya.

Rencana pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas pelabuhan sungai dan danau, alur pelayanan sungai, lintas penyeberangan antar kabupaten dan/atau kota dalam provinsi, dan pelabuhan penyeberangan. Rincian penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.82.
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Kabupaten Kubu Raya

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Lingkup Jaringan
Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pelabuhan Pengumpan Rasau Jaya 2. Pelabuhan Pengumpan Batu Ampar 3. Pelabuhan Pengumpan Kubu 4. Pelabuhan Pengumpan Sungai Kakap 5. Pelabuhan Pengumpan Terentang 6. Pelabuhan Pengumpan Tanjung Harapan 7. Pelabuhan Pengumpan Sei Asam 8. Pelabuhan Pengumpan Parit Sarem 9. Pelabuhan Pengumpan Rengas 10. Pelabuhan Pengumpan Teluk Malike 11. Pelabuhan Pengumpan Kubu 12. Pelabuhan Pengumpan Jangkang Dua 13. Pelabuhan Pengumpan Tl. Kelang Kubu 14. Pelabuhan Pengumpan Padang Tikar 15. Pelabuhan Pengumpan Dermaga Teluk Malike 16. Pelabuhan Pengumpan Dermaga Jangkang II 17. Pelabuhan Sungai KM 9,2 (kilometer sembilan koma dua) Sungai Raya 18. Pelabuhan Sungai Sungai Bulan 19. Pelabuhan Sungai Jangkang I 20. Pelabuhan Sungai Teluk Bayur 21. Pelabuhan Sungai Olak-Olak 22. Pelabuhan Sungai Cabang Ruan 23. Pelabuhan Sungai Kerawang
Alur Pelayaran Sungai	1. Sungai Landak 2. Sungai Lida 3. Sungai Kapuas 4. Sungai Punggur Besa

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Lingkup Jaringan
	5. Muara Kubu
Lintas Penyeberangan antar Kabupaten	1. Lintas Penyeberangan antar Kabupaten Rasau Jaya – Teluk Batang (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara) 2. Lintas Penyeberangan antar Kabupaten Sumber Agung – Seponti Jaya (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara)
Pelabuhan Penyeberangan	1. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Rasau Jaya 2. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Tanjung Harapan 3. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Pinang Luar 4. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Parit Sarem 5. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Sungai Nipah 6. Pelabuhan Penyeberangan Parit Cahaya Utara 7. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Mandor 8. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Malike 9. Pelabuhan Penyeberangan Jangkang II 10. Pelabuhan Penyeberangan Sukalanting 11. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Bayur 12. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bayur (Terentang) 13. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gelam 14. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Muara Kubu 15. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Sumber Agung

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

Untuk rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut yang berupa pelabuhan laut di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perikanan. Untuk pelabuhan pengumpan adalah Pelabuhan Pengumpan Regional Teluk Air/Padang Tikar. Sedangkan yang termasuk pelabuhan perikanan adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap, Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap, Ppi Batu Ampar, Ppi Dabong, Ppi Medan Seri, Ppi Muara Kubu, Ppi Rasau Jaya, Ppi Sepok Laut, dan Ppi Tanjung Bunga.

Sedangkan untuk sistem jaringan transportasi udara adalah berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, yaitu Bandar Udara Supadio di Kecamatan Sungai Raya.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi difokuskan pada pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman untuk mendukung kegiatan perekonomian serta pengembangan kawasan. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ini dilakukan melalui jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Rincian jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.83.
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan Kabupaten Kubu Raya

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Lingkup Jaringan
Pembangkit Tenaga Listrik	1. PLTD: a. PLTD Sei Raya di Kecamatan Sungai Raya b. PLTD Punggur Kecil di Kecamatan Sungai Kakap c. PLTD Kubu di Kecamatan Kubu d. PLTD Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar e. PLTD Pulau Limbung di Kecamatan Sungai Raya f. PLTD Tanjung Saleh di Kecamatan Sungai Kakap g. PLTD Sepuk Laut di Kecamatan Sungai Kakap 2. PLTS: a. PLTS Tanjung Beringin b. PLTS Sumber Agung c. PLTS Muara Tiga 3. Pembangkit Listrik Lainnya: a. PLTBm Rasau Jaya di Kecamatan Sungai Raya
Penyaluran Tenaga Listrik	1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik antar sistem berupa SUTT: a. SUTT Ambawang – TX b. SUTT 150 kV Siantan – Sungai Raya c. SUTT 150 kV Kota Baru – Parit Baru d. SUTT 150 kV Siantan – Tayan e. SUTT Kota Baru – Rasau Jaya f. SUTT Ambawang – Sungai Raya 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik: a. Gardu Listrik: 1) GI Cendana (Jeruju) 2) GI Kota Baru 3) GI Sei Raya 4) GI Ambawang 5) GI Rasau b. SUTM wilayah perkotaan Kubu Raya

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan konektivitas dan akses informasi di seluruh daerah. Selain itu juga direncanakan untuk memperkuat infrastruktur digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pariwisata, dan pelayanan publik dengan menyediakan akses internet yang cepat dan handal. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital antar daerah sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Kubu Raya meliputi: 1) jaringan tetap; 2) infrastruktur jaringan tetap; dan 3) jaringan bergerak. Untuk jaringan tetap telekomunikasi melintas di Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Sungai Kakap. Untuk infrastruktur jaringan tetap telekomunikasi terdapat di Saigon (Kecamatan Sungai Raya), di Sungai Raya (Kecamatan Sungai Raya), di Sungai Raya Dalam (Kecamatan Sungai Raya), dan di Sungai Kakap (Kecamatan Sungai Kakap). Sementara itu untuk jaringan bergerak telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Di dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044, sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air. Adapun pembagian sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.84.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Kubu Raya

Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Lingkup Jaringan
Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Melintas di: 1. Kecamatan Batu Ampar 2. Kecamatan Sungai Kakap 3. Kecamatan Sungai Raya 4. Kecamatan Teluk Pakedai 5. Kecamatan Rasau Jaya 6. Kecamatan Kubu

Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Lingkup Jaringan
	Jaringan Irigasi Sekunder	Melintas di: 1. Kecamatan Batu Ampar 2. Kecamatan Sungai Kakap 3. Kecamatan Sungai Raya 4. Kecamatan Rasau Jaya 5. Kecamatan Kubu 6. Kecamatan Terentang
	Jaringan Irigasi Tersier	Melintas di: 1. Kecamatan Sungai Raya 2. Kecamatan Sungai Kakap 3. Kecamatan Rasau Jaya 4. Kecamatan Kubu 5. Kecamatan Terentang 6. Kecematan Teluk Pakedai 7. Kecamatan Batu Ampar
Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	Melintas di: 1. Kecamatan Sungai Ambawang 2. Kecamatan Sungai Raya 3. Kecamatan Sungai Kakap 4. Kecamatan Rasau Jaya
	Bangunan Pengendalian Banjir	Berada di seluruh Kecamatan
Bangunan Sumber Daya Air		1. Embung Pudak di Kecamatan Kubu 2. Embung Parong di Kecamatan Kubu 3. Embung Padu Empat di Kecamatan Batu Ampar

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

f. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Di dalam Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044, sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem jaringan drainase.

Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kubu Raya meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Adapun pembagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.85.
Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kubu Raya

Sistem Penyediaan Air Minum		Lingkup Jaringan
Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	Merupakan air permukaan yang berasal dari Sungai Kapuas, Sungai Landak (Sungai Mandor), dan Sungai Kakap
	Unit Produksi	1. IPA Arang Limbung di Kecamatan Sungai Raya 2. IKK Sungai Ambawang/Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya 3. IPA Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya 4. IPA Kapur Tirta Raya Kecamatan Sungai Raya 5. IKK Kuala Mandor A di Kecamatan Kuala Mandor B 6. IPA Rasau Jaya di Kecamatan Sungai Raya 7. IKK Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap 8. IKK Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya 9. IPA Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap
	Unit Distribusi	1. Kecamatan Sungai Raya 2. Kecamatan Sungai Kakap 3. Kecamatan Rasau Jaya 4. Kecamatan Sungai Ambawang 5. Kecamatan Kuala Mandor B
	Unit Pelayanan	1. Kecamatan Sungai Raya 2. Kecamatan Rasau Jaya (rencana) 3. Kecamatan Sungai Kakap 4. Kecamatan Sungai Ambawang 5. Kecamatan Kuala Mandor B (rencana)
Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Bor	1. Kecamatan Sungai Ambawang 2. Kecamatan Sungai Raya
	Penampungan Air Hujan (PAH)	1. Kecamatan Sungai Raya 2. Kecamatan Sungai Ambawang 3. Kecamatan Sungai Kakap 4. Kecamatan Rasau Jaya 5. Kecamatan Batu Ampar 6. Kecamatan Kuala Mandor B 7. Kecamatan Kubu 8. Kecamatan Teluk Pakedai 9. Kecamatan Terentang

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

Untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari limbah domestik dan non domestik yang tersebar di kawasan permukiman di seluruh Kecamatan. Untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Kubu Raya berada di

Kecamatan Sungai Ambawang. Untuk sistem jaringan persampahan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari: 1) pengembangan dan pembangunan 2 (dua) stasiun peralihan antara sampah di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang; dan 2) pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah dengan urug saniter di Mungguk Jering Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang. Untuk sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: 1) jalur evakuasi bencana, yang dikembangkan untuk bencana alam dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur darurat menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan pada setiap wilayah rawan bencana alam; dan 2) ruang evakuasi bencana, berupa tempat evakuasi bencana dan tempat evakuasi akhir dapat berbentuk lapangan, ruang publik dan/atau bangunan di setiap wilayah Kecamatan. Sedangkan untuk sistem jaringan drainase di Kabupaten Kubu Raya meliputi: 1) jaringan drainase primer berupa jaringan sungai yang terdapat di seluruh Kecamatan; 2) jaringan drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor dan lokal yang terdapat di seluruh Kecamatan; dan 3) jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan pada jalan lingkungan yang terdapat di seluruh Kecamatan.

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang menunjukkan sebaran peruntukan yang berfungsi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan cagar budaya. Sementara itu, kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya dengan luas kurang lebih 29.236,16 hektar dan tersebar di seluruh Kecamatan. Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung dengan luas kurang

lebih 134.174,712 hektar yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang, dan Kecamatan Batu Ampar. Untuk kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Kubu Raya kurang lebih seluas 7.667,04 hektar yang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Teluk Pakedai. Sedangkan untuk kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kubu Raya adalah:

1) Kelenteng Tengah Laqut (*Xuan Wu Zhen Tan*), Masjid Jami'atus Sholohin dan AT-Tamini Lama di Kecamatan Sungai Kakap;
2) Masjid Miftahurridho di Kecamatan Sungai Ambawang;
3) Masjid Nasrullah (Masjid Batu) dan Makam Tuan Guru Haji Ismail Mundu di Kecamatan Teluk Pakedai; dan
4) Makam Raja Kubu ke I, ke V, ke VI, Meriam Sepasang, dan Mimbar Masjid Khairussa'adah di Kecamatan Kubu.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan kawasan perkebunan dengan luas 275.021,07 hektar, yang diikuti dengan kawasan hutan produksi tetap dengan luas 201.393,77 hektar, dan kawasan hortikultura dengan luas 82.617,36 hektar.

Tabel 2.86.
Kawasan Budidaya Kabupaten Kubu Raya

Kawasan Budidaya			Luas (Ha)	Lokasi
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap		201.393,77	1. Kecamatan Kuala Mandor B 2. Kecamatan Sungai Ambawang 3. Kecamatan Terentang 4. Kecamatan Kubu 5. Kecamatan Batu Ampar
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi		24.620,99	1. Kecamatan Sungai Ambawang 2. Kecamatan Kumpai Raya 3. Kecamatan Batu Ampar
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	10.692,42	1. Kecamatan Batu Ampar 2. Kecamatan Kuala Mandor B 3. Kecamatan Kubu 4. Kecamatan Sungai Kakap 5. Kecamatan Sungai Raya 6. Kecamatan Teluk Pakedai 7. Kecamatan Terentang

Kawasan Budidaya			Luas (Ha)	Lokasi
		Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	4.684,90	1. Kecamatan Batu Ampar 2. Kecamatan Kuala Mandor B 3. Kecamatan Kubu 4. Kecamatan Sungai Kakap 5. Kecamatan Sungai Raya 6. Kecamatan Teluk Pakedai
	Kawasan Perkebunan		275.021,07	Tersebar di seluruh Kecamatan
	Kawasan Hortikultura		82.617,36	Tersebar di seluruh Kecamatan
Kawasan Perikanan	Kawasan Sentra Perikanan Tangkap		-	Berada di perairan laut dan perairan umum daratan yang tersebar di seluruh Kecamatan
	Kawasan Sentra Perikanan Budidaya		3.792,88	1. Kecamatan Kuala Mandor B 2. Kecamatan Sungai Ambawang 3. Kecamatan Sungai Raya 4. Kecamatan Teluk Pakedai 5. Kecamatan Kubu 6. Kecamatan Batu Ampar
Kawasan Pertambangan dan Industri			-	Merupakan wilayah usaha pertambangan yang sudah mendapatkan izin usaha pertambagan, izin usaha pertambagan khusus, dan surat izin penambangan batuan yang tersebar di seluruh Kecamatan
Kawasan Peruntukan Industri			1.172,67	1. Kecamatan Sungai Kakap 2. Kecamatan Sungai Ambawang 3. Kecamatan Batu Ampar 4. Kecamatan Sungai Raya
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan		64.325,61	1. Kecamatan Sungai Raya 2. Kecamatan Sungai Kakap 3. Kecamatan Sungai Ambawang 4. Kecamatan Kubu 5. Kecamatan Batu Ampar 6. Kecamatan Kuala Mandor B 7. Kecamatan Rasau Jaya
	Kawasan Permukiman Perdesaan		28.260,01	Berada di seluruh Kecamatan
Kawasan Pariwisata			-	Merupakan objek dan daya tarik wisata yang tersebar di seluruh Kecamatan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			-	1. KODAM XII/Tanjungpura di Kecamatan Sungai Raya 2. KUNDAM XII/Tanjungpura 3. Batalyon Brajamusti Komando 465 di Kecamatan Sungai Raya 4. Lanud Supadio 5. Detasemen Hanud 473 Pasgat

Sumber : Buku Rencana Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2044

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten meliputi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Dimana KSP yang ada adalah Kawasan Metropolitan Pontianak Raya yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan luas 21.461,02 hektar.

KSK merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten. KSK yang ada terdiri dari:

a. Kawasan Muara Kubu

   Merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil, dimana penetapannya dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi Pulau Olak-Olak, Pulau Dabong, Pulau Tiga, dan Pulau Burung Besar dengan luas kurang lebih 46.624,81 hektar.

b. Kawasan sekitar Gunung Ambawang – PKL Kubu di Kecamatan Kubu

   Penetapannya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk:

   1) Mempersiapkan kawasan evakuasi bencana dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
   2) Menunjang pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan Muara Kubu.
   3) Mempercepat pembangunan dermaga Muara Kubu yang terhubung dengan dermaga penyeberangan Teluk Batang dalam rangka mempercepat waktu tempuh perjalanan antara Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya dengan Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara dengan merealisasikan pembangunan ruas jalan Rasau Jaya.
   4) Mendukung kelancaran pemasaran hasil produksi sektor perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah.
   5) Menunjang pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Ambawang Kecamatan Kubu dan Pantai Tengkuyung Kecamatan Teluk Pakedai.
   6) Menunjang pertumbuhan kawasan transmigrasi Rasau Jaya.

7) Kemudahan memperoleh material untuk perbaikan jalan koridor Kuala Dua – Muara Kubu.

2.3.2.1.9. KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

Penetapan isu paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, didasarkan pada hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD serta keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya, dan isu strategis dokumen perencanaan lainnya. Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 didapat 5 (lima) isu strategis pembangunan, yaitu:

1. Tata Kelola Lahan (Penataan dan Alih Fungsi Lahan)
2. Pengelolaan Lahan Gambut dan Mangrove
3. Bencana Alam (Banjir, Cuaca Ekstrim, dan Karhutla)
4. Kesenjangan
5. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih, termasuk Pencemaran Air

2.3.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah

Penetapan isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah di mas mendatang, dimana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah dokumen perencanaan baik di level Kabupaten, Provinsi, Nasional, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut ini merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya.

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu mengacu pada Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan

Penduduk di Segala Usia), serta Tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua). Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, berbudaya, dan berdaya saing. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, masyarakat Kabupaten Kubu Raya perlu disiapkan dan diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri untuk menghadapi tantangan.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Penciptaan Aktivitas Ekonomi pada Sektor Riil yang Berkelanjutan

Kemiskinan merupan tujuan pertama dan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu “Tanpa Kemiskinan atau Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun”, dimana penghapusan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Dalam upaya percepatan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan tersebut dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, karena permasalahan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multi dimensi. Percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi produktif, mulai dari pelatihan dan perintisan usaha, kemudahan dalam akses permodalan, hingga pada pendampingan untuk pengembangan usaha.

Peningkatan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan atraksi wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, serta melakukan promosi pariwisata secara massif dan intensif; pengembangan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya perikanan, pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien, serta

mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah; pengembangan sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi daerah, membangun sistem pemasaran yang efektif, serta menerapkan teknologi pertanian yang tepat. Berkembangnya investasi daerah juga harus didorong untuk menciptakan lapangan usaha baru untuk generasi produktif, khususnya bagi tenaga kerja lokal, dimana pemerintah harus hadir untuk mengintervensi salah satunya dengan cara penyiapan tenaga kerja yang berkualitas (terdidik, terlatih, dan berkompeten) melalui peningkatan keterampilan dan juga membekali dengan *soft skills* yang dibutuhkan dalam dunia kerja agar mampu bersaing di pasar kerja.

3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh wilayah serta seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh infrastruktur dasar maupun infrastruktur wilayah yang memadai tanpa terkecuali. Pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan akan berdampak pada percepatan pemerataan pembangunan dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah karena dapat mendorong peningkatan investasi, mengurangi kesenjangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, hingga pada pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengacu pada Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim merupakan isu-isu yang saling terkait dan menjadi

tantangan global yang mendesak. Ketiga isu ini saling mempengaruhi, dimana degradasi lingkungan dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam dan mempercepat perubahan iklim. Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana.

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Akselerasi Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera, dimana transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi suatu keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah saat ini. Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti sistem pengaduan, sistem pelayanan perijinan, dan sistem pelayanan kependudukan juga menjadi penting sehingga pelayanan publik semakin berkembang. Selain itu, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Akselerasi transformasi digital ini tidak hanya sekedar mengikuti tren, namun juga merupakan upaya untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara ringkas, keterkaitan isu strategis global, nasional dan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.86.
Rumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya

Isu Global (TPB/SDGs)	Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029 (Untuk Wilayah Kalimantan)	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya
- Goal 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) - Goal 4 (Pendidikan Berkualitas) - Goal 5 (Kesetaraan Gender) - Goal 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM karena Terbatasnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	- Rendahnya Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Kubu Raya - Kualitas Hidup Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang Belum Optimal - Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan Masyarakat yang Masih Rendah		Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Goal 1 (Tanpa Kemiskinan) - Goal 2 (Tanpa Kelaparan) - Goal 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) - Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) - Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)	- Minimnya Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA - Masih Rentannya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang Belum Berwawasan Lingkungan	- Kesenjangan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Penciptaan Aktivitas Ekonomi pada Sektor Riil yang Berkelanjutan

Isu Global (TPB/SDGs)	Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029 (Untuk Wilayah Kalimantan)	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya
- Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan) - Goal 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)				
- Goal 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) - Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) - Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan) - Goal 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)	- Masih Terbatasnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar - Belum Optimalnya Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Tertinggal dan Terluar - Masih Rentannya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	Konektivitas dan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang Masih Belum Merata	- Tata Kelola Lahan (Penataan dan Alih Fungsi Lahan) - Kesenjangan - Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih, termasuk Pencemaran Air	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
- Goal 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) - Goal 13 (Penanganan Perubahan Iklim) - Goal 14 (Ekosistem Lautan) - Goal 15 (Ekosistem Daratan)	- Degradasi Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan dan Perkebunan Kelapa Sawit - Masih Rentannya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kabupaten Kubu Raya	- Pengelolaan Lahan Gambut dan Mangrove - Bencana Alam (Banjir, Cuaca Ekstrim, dan Karhutla) - Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih, termasuk Pencemaran Air	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

Isu Global (TPB/SDGs)	Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029 (Untuk Wilayah Kalimantan)	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya
- Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) - Goal 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelambagaan yang Tangguh) - Goal 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Belum Berbasis Sistem Informasi di Kabupaten Kubu Raya		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Akselerasi Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara *sustainable* atau berkelanjutan. Perencanaan pembangunan diselaraskan dengan visi dan misi daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan

Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU”

Adapun yang dimaksud dengan Kubu Raya Melaju disini adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan **pelayanan** yang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya **Maju** dengan kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta infrastruktur yang mantap. Dengan tagline **“Kubu Raya Melayani Untuk Maju”**.

Keterkaitan antara Visi pembangunan daerah dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, serta RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 sangatlah penting untuk memastikan keselarasan di tingkat nasional dan daerah. Pentingnya keterkaitan ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, baik antara kebijakan pusat dan daerah, maupun antara perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Dengan adanya penyelarasan ini memastikan bahwa Visi dan strategi pembangunan di tingkat kabupaten dapat mendukung pencapaian Visi nasional dan provinsi. Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.1.
Penyelarasan Visi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Visi Nasional		Visi Provinsi Kalimantan Barat		Visi Kabupaten Kubu Raya	
RPJPN 2025-2045	**RPJMN 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan	Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri, Unggul, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kubu Raya Melaju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.1.2. Misi

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi "Kubu Raya Melaju" ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang unggul, dengan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan aparatur yang berkompeten dan profesional, serta menggunakan sistem modern yang berbasis digital. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital ini diharapkan akan memberikan ruang ke publik untuk dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, serta prasarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur ini harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta upaya peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu pembangunan tersebut juga harus berbasis kewilayahan, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik wilayah, terutama di daerah perdesaan sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan pemerataan pembangunan ini diharapkan agar tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Misi Ke Tiga : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas tanpa meninggalkan warisan budaya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan terampil, sedangkan di sektor kesehatan mempunyai fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Literasi baik dari segi informasi maupun digital, juga menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat mempunyai keterampilan untuk menghadapi perkembangan zaman.

Misi Ke Empat : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini dilakukan dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu juga dilakukan upaya untuk terus

meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja, menciptakan iklim usaha dan ivestasi yang kondusif, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta terus menjaga toleransi di kalangan masyarakat.

Keselarasan antara Misi RPJMN Tahun 2025-2029 atau yang lebih dikenal dengan Asta Cita dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 tercermin melalui berbagai tujuan strategis yang saling mendukung dalam mempercepat pencapaian pembangunan nasional dan daerah. Penyelarasan ini dilakukan secara selektif dan strategis dengan tetap mempertimbangkan batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah akan tetap berada dalam koridor regulasi, efektif dalam implementasi, serta realistis dalam pencapaiannya. Pendekatan ini juga tidak hanya akan mencerminkan semangat harmonisasi nasional, tetapi juga tetap menjamin fokus terhadap tugas dan fungsi yang sesuai dengan kapasitas pemerintah daerah. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2.
Penyelarasan Misi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government*	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi
	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dari Desa Hingga Kota	
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)	

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya
	Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan	
	Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Daerah	
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan Sesuai dengan Kearifan Lokal	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Keadilan dan Kesetaraan Gender	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang terukur akan menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan, sehingga setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya periode 2025-2029 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik, sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 periode berkenaan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, serta menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan sejalan dengan aspirasi masyarakat Kubu Raya.

Misi Pertama : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Gambar 3.1.
Cascading Misi 1



Misi Ke Dua : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan

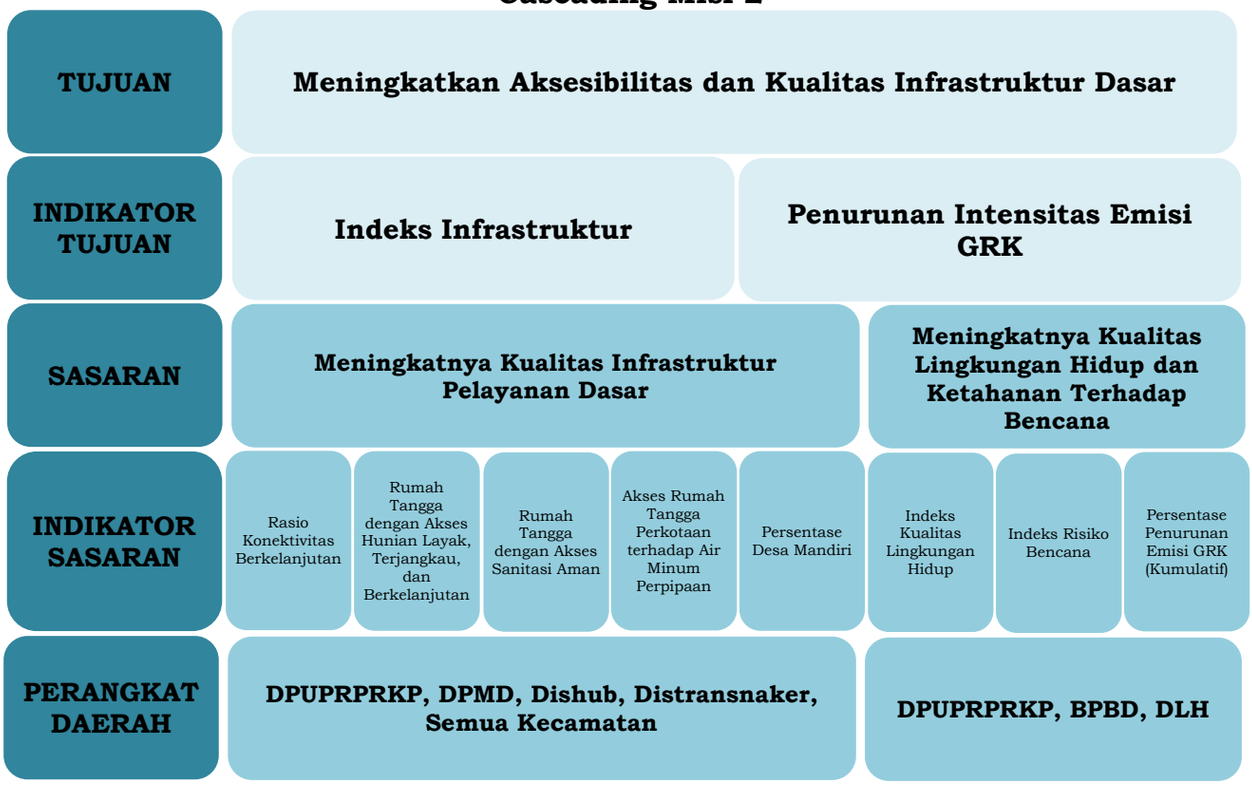
Tujuan :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana

Gambar 3.2.
Cascading Misi 2



Misi Ke Tiga : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Gambar 3.3.
Cascading Misi 3



Misi Ke Empat : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis

Tujuan :

1. Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib

Sasaran :

1. Meningkatnya Daya Saing Daerah
2. Meningkatnya Investasi
3. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat
4. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama
5. Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat

Gambar 3.4.
Cascading Misi 4

TUJUAN	**Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan**			**Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib**	
INDIKATOR TUJUAN	**Pertumbuhan Ekonomi**		**Tingkat Kemiskinan**	**Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya**	
SASARAN	**Meningkatnya Daya Saing Daerah**	**Meningkatnya Investasi**	**Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat**	**Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama**	**Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat**
INDIKATOR SASARAN	Indeks Daya Saing	Nilai Investasi	Rasio Gini	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Trantibumlinmas
PERANGKAT DAERAH	**DKPP, DKUKMPP, Diskan, Disbunnak, Disporapar**	**DPMPTSP**	**Dinsos, Distransnaker**	**Kesbangpol**	**Satpol PP**

Tabel 3.3.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran			Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Capaian					
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi	T.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	IT.1	Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks	BB (76,35)	BB (78,50)	A (81,00)	A (83,50)	A (86,00)	A (88,50)	AA (91,00)
						S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	3,76	3,81	3,86	3,90	3,95	4,00
						S.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.2	Nilai SAKIP	Poin	B (62,63)	B (65,00)	B (67,50)	B (70,00)	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)
								IS.3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan	T.2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	IT.2	Indeks Infrastruktur					Angka	65,01	68,48	70,22	71,96	73,70	75,44	77,18
				IT.3	Penurunan Intensitas Emisi GRK					Persen	n/a	66,46	68,07	69,68	71,29	72,90	74,51
						S.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar	IS.4	Rasio Konektivitas	Persen	4,67	5,45	5,84	6,43	7,01	7,60	8,18
								IS.5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	n/a	77,11	77,29	77,46	77,64	77,82	78,00
								IS.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	2,63	4,96	7,29	9,62	11,95	14,28
								IS.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	n/a	39,86	42,92	45,97	49,03	52,08	55,13
								IS.8	Persentase Desa Mandiri	Persen	n/a	69,11	69,85	70,20	70,74	71,29	71,83

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Capaian					
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						S.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	IS.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,42	70,60	71,03	71,84	72,64	73,45	74,25
								IS.10	Indeks Risiko Bencana	Poin	168,40	159,88	158,40	153,40	148,40	143,40	138,40
								IS.11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	n/a	23,95	25,68	27,41	29,14	30,87	32,60
3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya	T.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.4	Indeks Pembangunan Manusia					Poin	71,14	71,79	72,43	73,06	73,68	74,28	74,86
						S.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.12	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Persen	n/a	58,09	59,94	61,78	63,63	65,47	67,32
								IS.13	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	n/a	53,80	55,60	57,40	59,20	61,00	62,80
								IS.14	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Persen	n/a	59,13	60,67	62,22	63,76	65,30	66,85

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Capaian					
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							IS.15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	n/a	45,06	46,56	48,05	49,55	51,05	52,55
							IS.16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,05	7,12	7,19	7,26	7,34	7,41	7,48
							IS.17	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	13,91	13,93	13,93	13,94	13,95	13,95
					S.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS.18	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,42	73,64	73,83	74,01	74,20	74,39	74,57
							IS.19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persen	n/a	17,48	16,86	16,23	15,61	14,98	14,36
4	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis	T.4	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	IT.5	Pertumbuhan Ekonomi				Persen	4,99	6,048	6,018	6,019	6,019	6,019	6,019
				IT.6	Tingkat Kemiskinan				Persen	4,08	3,98	3,93	3,89	3,86	3,85	3,86
					S.7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	IS.20	Indeks Daya Saing	Angka	n/a	3,10	3,13	3,17	3,20	3,23	3,26
					S.8	Meningkatnya Investasi	IS.21	Nilai Investasi	Rupiah	15.665.648.956.931,10	17.977.239.413.636,70	19.137.648.003.321,50	15.665.648.956.931,10	17.977.239.413.636,70	19.137.648.003.321,50	19.137.648.003.321,50
					S.9	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	IS.22	Rasio Gini	Indeks	0,274	0,265	0,257	0,249	0,241	0,233	0,224
							IS.23	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,73	6,53	6,45	6,37	6,29	6,21	6,13
		T.5	Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib	IT.7	Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya				Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					S.10	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama	IS.24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,61	79,71	82,21	84,71	87,21	89,71	92,21

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Capaian					
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						S.11	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	IS.25	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00

Sumber: Data Diolah, 2025

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan, dimana definisi operasional dan formulasi dari masing-masing indikator terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4.
Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IT.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
IS.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilau indeks.
IS.2	Nilai SAKIP	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi: a. Rencana; b. Perjanjian; c. Pengukuran; d. Pelaporan; e. Reviu dan evaluasi kinerja.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.3	Opini BPK	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
IT.2	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.
IT.3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan Intensitas Emisi GRK untuk memperlihatkan 50 sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
IS.4	Rasio Konektivitas	Rasio Konektivitas adalah indikator untuk mengukur tingkat aksesibilitas antar wilayah, yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah trayek atau lintas angkutan yang beroperasi dengan jumlah kebutuhan trayek atau lintas yang ada. Pengumpulan Data Infrastruktur: Kumpulkan data tentang berbagai jenis infrastruktur transportasi yang menghubungkan Kabupaten/Kota, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Data ini meliputi panjang jalan, jumlah titik akses, dan kondisi infrastruktur. Penentuan Konektivitas Antar Wilayah: Identifikasi dan hitung berbagai jalur dan rute yang menghubungkan Kabupaten atau Kota satu dengan yang lainnya. Ini termasuk menentukan frekuensi dan jenis transportasi yang tersedia, serta kualitas layanan yang diberikan. Perhitungan Rasio Konektivitas: Rasio Konektivitas dapat dihitung dengan berbagai cara, tergantung pada data yang tersedia dan tujuan pengukuran.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria, sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2; 3. Memiliki akses air minum layak; 4. Memiliki akses sanitasi layak.
IS.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
IS.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria: 1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan; 2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3. Tersedia setiap saat; 4. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.8	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri adalah persentase desa dengan status mandiri di Kabupaten. Klasifikasi status desa: • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut). IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Entitas pengukuran IKLH terdiri dari: 1. IKLH Nasional, IKLH Provinsi, dan IKLH Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan 2. IKLH tahun 2020-2024 yang terdiri dari 5 (lima) komponen (sub indeks), yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Dalam penghitungan IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG) diintegrasikan sebagai Indeks Kualitas Lahan. IKLH berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
IS.10	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama.
IT.4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan menggabungkan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: 1. Kesehatan, diukur melalui harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan, diukur melalui dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Standar Hidup Layak, diukur melalui *Gross National Income* (GNI) per kapita dalam PPP (*Purchasing Power Parity*).

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.12	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Jumlah peserta didik di Kabupaten yang memiliki asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta didik di Kabupatan. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus; 2. Dasar; 3. Cakap; 4. Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
IS.13	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Jumlah peserta didik di Kabupaten yang memiliki asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta didik di Kabupatan. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus; 2. Dasar; 3. Cakap; 4. Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.14	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten yang memiliki asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupatan. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus; 2. Dasar; 3. Cakap; 4. Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
IS.15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten yang memiliki asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupatan. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus; 2. Dasar; 3. Cakap; 4. Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
IS.16	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.17	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak pada usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
IS.18	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
IS.19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada anak menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010, adalah sebagai berikut: a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 b. Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0
IT.5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.
IT.6	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.20	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.
IS.21	Nilai Investasi	Nilai investasi (*investment value*) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (*business interest*) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor.
IS.22	Rasio Gini	Rasio Gini merupakan salah satu teknis statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai 2 (dua) aspek sekaligus, yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
IS.23	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
IT.7	Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
IS.24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui 3 (tiga) indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
IS.25	Indeks Trantibumlinmas	Indeks Trantibumlinmas adalah pengukuran capaian penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar di daerah. Indeks ini terdiri dari beberapa sub indeks, seperti sub urusan bencana, trantibum (ketenteraman dan ketertiban umum), dan manajemen satuan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.5.
Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IT.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari Kemenpan-RB
IS.1	Indeks Pelayanan Publik	1. Menentukan nilai untuk setiap indikator: $Nilai\ per\ indikator = \frac{nilai\ F01 + \ nilai\ F02 + nilai\ F03}{3} \times \ bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek: $Nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks: $Nilai\ per\ aspek = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$
IS.2	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
IS.3	Opini BPK	Hasil evaluasi pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK-RI
IT.2	Indeks Infrastruktur	$Indeks\ Infrastruktur = \sum_{i=1}^{n} (w_i \times \ I_i)$ Keterangan: • I_i = nilai indikator ke-i (setelah dinormalisasi ke skala 0-100) • w_i = bobot indikator ke-i (ditentukan oleh pentingnya indikator) • Hasil akhir: skala 0-100, makin tinggi makin baik

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IT.3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Intensitas Emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR miliar) $IE_t = \frac{TE_t}{PDRB_t}$ Keterangan: • IE_t = intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) • TE_t = total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) • $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) • t = titik tahun perhitungan Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) $\%IE_t = \frac{IE_t - IEB_t}{IEB_t}$ Keterangan: • $\%IE_t$ = persentase intensitas emisi GRK pada tahun t • IE_t = intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) • IEB_t = intensitas emisi GRK *baseline* tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) • t = titik tahun perhitungan
IS.4	Rasio Konektivitas	Rasio Konektivitas = (IK1 × Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 × Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) • IK1 (Angkutan Jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota × bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut • IK2 (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut × bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut Keterangan: • IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu • IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan): - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau, dan Penyeberangan: a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50) c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (< 3x dalam seminggu), bobot = 0,5
IS.5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ Keterangan: • PHLTB = persentase rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • JRTHLTB = jumlah rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • JRT = jumlah rumah tangga
IS.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: • PSA = persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman • JRTSPAL = jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T • JRTIPLT = jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • JRT = jumlah rumah tangga seluruhnya

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IS.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ Keterangan: • PASMPP = persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan • JRTASMPP = jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan • JRT = jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan
IS.8	Persentase Desa Mandiri	$Persentase\ Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Jumlah\ Total\ Desa} \times 100\%$
IS.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 × IKA) + (0,405 × IKU) + (0,219 × IKL) Keterangan: • IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • IKA = Indeks Kualitas Air • IKU = Indeks Kualitas Udara • IKL = Indeks Kualitas Lahan
IS.10	Indeks Resiko Bencana	$Risk = \frac{Hazard\ x\ Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: • *Risk* (risiko) • *Hazard* (bahaya), dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya • *Vulnerability* (kerentanan), dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan • *Capacity* (kapasitas), dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan 7 (tujuh) prioritas, yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IS.11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan: $\%PE_t = \frac{PE_t}{EB_t}$ Keterangan: • $\%PE_t$ = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t • PE_t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t • EB_t = emisi GRK total sektoral *baseline* tahun t • t = titik tahun perhitungan Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif: $\%PEK = \frac{\sum^{t_{i=base\ year}} PE_t}{\sum^{t_{i=base\ year}} EB_t}$ Keterangan: • $\%PEK$ = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif • $\sum^{t_{i=base\ year}} PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun t • $\sum^{t_{i=base\ year}} EB_t$ = akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun t • t = titik tahun perhitungan • I = *base year* tahun 2010
IT.4	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{Indeks\ Kesehatan\ x\ Indeks\ Pendidikan\ x\ Indeks\ Standar\ Hidup\ Layak}$ Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup): $Indeks\ Kesehatan = \frac{Harapan\ Hidup - 20}{85 - 20}$ • Harapan Hidup adalah angka harapan hidup saat lahir Indeks Pendidikan: $Indeks\ Pendidikan = \sqrt{\frac{Rata - Rata\ Lama\ Sekolah}{15} \times \frac{Harapan\ Lama\ Sekolah}{18}}$ • Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas • Harapan Lama Sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
		Indeks Standar Hidup Layak: $Indeks\ Standar\ Hidup\ Layak = \frac{log(GNI\ per\ kapita) - log(100)}{\log(75{,}000) - \log(100)}$ • GNI per kapita adalah *Gross National Income* per kapita dalam PPP (*Purchasing Power Parity*)
IS.12	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	$\%serdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} serdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: • $serdik\ min.SKM$ = peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca • n = jumlah peserta didik
IS.13	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	$\%serdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} serdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: • $serdik\ min.SKM$ = peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi n = jumlah peserta didik
IS.14	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: • $satdik\ min.SKM$ = satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca • n = jumlah satuan pendidikan
IS.15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: • $satdik\ min.SKM$ = satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi • n = jumlah satuan pendidikan
IS.16	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ Keterangan: • RLS = Rata-Rata Lama Sekolah • n = jumlah total penduduk yang dihitung (penduduk berusia 25 tahun ke atas) • x_i = lama sekolah penduduk ke-i dalam tahun

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IS.17	Angka Harapan Lama Sekolah	$AHLS = FK \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: • AHLS = Angka Harapan Lama Sekolah • FK = Faktor Koreksi • E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t • P_i^t = jumlah penduduk usia i pada tahun t • i = usia (7, 8, …, n)
IS.18	Usia Harapan Hidup	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCDP) atau *Mortpack*.
IS.19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Cara Perhitungan (1): (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: • $PAB(5)P_{stunting}$ = prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*) • $JAB(5)P_{stunting}$ = jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu • $JAB(5)$ = jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara Perhitungan (2): (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: • $PAB(5)SP_{stunting}$ = prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (*stunting*) • $JAB(5)SP_{stunting}$ = jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu • $JAB(5)$ = jumlah anak balita pada waktu yang sama

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
		Cara Perhitungan (3): Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP
IT.5	Pertumbuhan Ekonomi	$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} X\ 100\%$ Keterangan: • $PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun sebelumnya • $PDRB_{(t)}$ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan
IT.6	Tingkat Kemiskinan	$P_{\propto} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^{\propto}$ Keterangan: • α = 0 • z = garis kemiskinan • y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, …, q), $y_i < z$ • q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan • n = jumlah penduduk
IS.20	Indeks Daya Saing Daerah	 Penjelasan lebih detail mengenai dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadata: https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah
IS.21	Nilai Investasi	Jumlah akumulasi nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) berdasarkan LKPM
IS.22	Rasio Gini	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Keterangan: • p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i • Y_i = proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i • n = jumlah observasi

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
		Klasifikasi nilai dari rasio gini adalah: a. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang b. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang c. Nilai rasio gini terletak antara 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik
IS.23	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: • TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) • PP = jumlah penganggaran (orang) • PAK = jumlah angkatan kerja (orang)
IT.7	Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan: • PPMA = persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya • JPMA = jumlah penduduk yang merasa aman berjalan di area tempat tinggalnya • JP = jumlah penduduk
IS.24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$ Keterangan: • IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama • D_j = dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks\ D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: • D_j = dimensi ke-j • SX_{ji} = nilai indikator I pada dimensi ke-j • n_j = jumlah indikator dimensi ke-j Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah 20,01 – 40,00 rukun rendah 40,01 – 60,00 rukun sedang 60,01 – 80,00 rukun tinggi 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
IS.25	Indeks Trantibumlinmas	Indeks Trantibumlinmas = (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum × Bobot Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) + (Indeks Satlinmas × Bobot Satlinmas) + (Indeks Kebakaran × Bobot Kebakaran) + (Indeks Bencana × Bobot Bencana) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: $I_{PKKU} = \sum_{n}^{i}(WD^{i} \times WS_{n}^{i} \times S_{n}^{i})$ Keterangan: • I_{PKKU} = Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • WD^{i} = nilai bobot pada dimensi ke-i • WS_{n}^{i} = nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-i • S_{n}^{i} = nilai rerata skala likert pada indikator di sub dimensi ke-n dimensi ke-i Indeks Satlinmas: $IPM_{Satlinmas} = \sum_{n}^{i}(\frac{(WD^{i} \times WV_{n}^{i} \times S_{n}^{i})}{k})$ Keterangan: • $IPM_{Satlinmas}$ = total nilai Indeks Satlinmas • WD^{i} = nilai pembobotan pada dimensi i • WV_{n}^{i} = nilai pembobotan pada variabel n dimensi i • S_{n}^{i} = nilai rerata skala likert pada indikator di variabel n dimensi i • k = jumlah skala likert yang digunakan

Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi
		Indeks Kebakaran: Indeks Kebakaran = IK1 + IK2 + IK3 + IK4 + IK5 + IK6 Keterangan: • IK1 = Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020 • IK2 = Perencanaan Anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah • IK3 = Pemenuhan Capaian SPM adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018 • IK4 = Pemenuhan Sarana Prasarana adalah terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan • IK5 = Pemenuhan SDM Tersertifikasi adalah persentase SDM Pemadam Kebakaran yang sudah tersertifikasi • IK6 = Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan Indeks Bencana: $Y_j = \sum_{n=1}^{9} a_i X_{ij}$ Keterangan: • Y_j = Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana • a_i = bobot masing-masing indikator • X_{ij} = nilai standarisasi masing-masing indikator Kriteria penilaian Indeks Trantibumlinmas, yaitu: 0,00 – 20,00 buruk 20,01 – 40,00 kurang baik 40,01 – 60,00 cukup baik 60,01 – 80,00 baik 80,01 – 100 sangat baik

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi "Terwujudnya Kubu Raya Melaju", maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini disusun melalui serangkaian proses perencanaan strategis, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang akan dihadapi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

3.2.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Adapun strategi yang digunakan untuk menjalankan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dirumuskan pada tabel di bawah.

Tabel 3.6.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kubu Raya

VISI: TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi					
T.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	ST.1	Meningkatkan sistem pendukung kualitas pelayanan publik berbasis digital
		S.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.2	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten
				ST.3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
				ST.4	Mengoptimalkan pengendalian internal di semua unit kerja
MISI 2: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan					
T.2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	S.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar	ST.5	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
				ST.6	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi
		S.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	ST.7	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup
				ST.8	Meningkatkan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan
MISI 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya					
T.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	ST.9	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta budaya literasi

VISI: TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
				ST.10	Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara Merata
				ST.11	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
				ST.12	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah
				ST.13	Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung Pendidikan Nonformal atau Kesetaraan
		S.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST.14	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan
				ST.15	Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat
				ST.16	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
				ST.17	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan
				ST.18	Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat
MISI 4: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis					
T.4	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	S.7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	ST.19	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
				ST.20	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
				ST.21	Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan

VISI: TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
				ST.22	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung
				ST.23	Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri
				ST.24	Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen
				ST.25	Meningkatkan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM
				ST.26	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
		S.8	Meningkatnya Investasi	ST.27	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
		S.9	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	ST.28	Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
				ST.29	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
T.5	Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib	S.10	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama	ST.30	Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama
		S.11	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	ST.31	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan

dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah maupun Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 3.7.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Kubu Raya

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Terwujudnya Kubu Raya Melaju	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean* Governance serta Berbasis Digitalisasi	T.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	ST.1	Meningkatkan sistem pendukung kualitas pelayanan publik berbasis digital	AK.1	Penerapan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik
									AK.2	Penerapan inovasi dalam pelayanan publik
									AK.3	Penataan dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
					S.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.2	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten	AK.4	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
									AK.5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen ASN
									AK.6	Penyusunan perencanaan yang berkualitas, partisipatif dan tepat waktu
							ST.3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	AK.7	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
									AK.8	Optimalisasi tata kelola pendapatan daerah melalui penguatan regulasi, digitalisasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak/retribusi
									AK.9	Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
							ST.4	Mengoptimalkan pengendalian internal di semua unit kerja	AK.10	Penerapan sistem laporan kinerja tahunan dan evaluasi berkala
									AK.11	Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
									AK.12	Meningkatkan fasilitasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan	T.2	Meningkatkan Aksesibiltas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	S.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar	ST.5	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	AK.13	Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan yang terjangkau dan layak huni
									AK.14	Pengembangan sistem penyediaan air bersih dan air minum
									AK.15	Pembangunan dan peningkatan fasilitas sanitasi yang layak
							ST.6	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	AK.16	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan
									AK.17	Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi
									AK.18	Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian banjir
									AK.19	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
									AK.20	Perluasan jaringan listrik hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
							AK.21	Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan
			S.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	ST.7	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup	AK.22	Pengendalian pencemaran lingkungan
							AK.23	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
							AK.24	Optimalisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
							AK.25	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah yang efisien serta ramah lingkungan
							AK.26	Peningkatan luasan serta penataan RTH Publik
					ST.8	Meningkatkan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan	AK.27	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
							AK.28	Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					AK.29	Meningkatkan pelayanan informasi bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban
					AK.30	Penguatan kelembagaan bencana
					AK.31	Meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
					AK.32	Peningkatan kapasitas petugas Damkar, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan layak
					AK.33	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
					AK.34	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	3.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya	T.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	ST.9	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta budaya literasi	AK.35	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
									AK.36	Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat pendidikan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
									AK.37	Peningkatan pemenuhan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (wajib belajar 13 tahun)
									AK.38	Penguatan Pendidikan Formal dan Nonformal
									AK.39	Penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
									AK.40	Peningkatan kualitas perpustakaan yang inklusif dan fungsional

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
					ST.10	Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata	AK.41	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
					ST.11	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	AK.42	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
							AK.43	Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan adaptasi terhadap teknologi pendidikan
					ST.12	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah	AK.44	Pengembangan dan peningkatan sekolah berakreditasi
					ST.13	Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung Pendidikan Nonformal atau Kesetaraan	AK.45	Pengembangan dan peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
			S.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST.14	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan	AK.46	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer
							AK.47	Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
						AK.48	Percepatan pelayanan kesehatan keliling terpadu
				ST.15	Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat	AK.49	Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan yang berkelanjutan
				ST.16	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	AK.50	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
				ST.17	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan	AK.51	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata
						AK.52	Penguatan sistem rujukan dan integrasi antara puskesmas dan rumah sakit, serta pengenalan teknologi informasi kesehatan
				ST.18	Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat	AK.53	Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	4.	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis	T.4	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	S.7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	ST.19	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	AK.54	Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan
									AK.55	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah
							ST.20	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	AK.56	Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan
									AK.57	Pengembangan hortikultura berbasis kelompok dan rumah tangga
							ST.21	Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan	AK.58	Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan serta berbasis kelompok dan rumah tangga
							ST.22	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung	AK.59	Pengembangan budi daya perikanan berbasis kelompok dan rumah tangga
									AK.60	Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
						AK.61	Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
				ST.23	Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri	AK.62	Menumbuhkan industri kecil menengah dan industri pengolahan serta manufaktur berbasis sumber daya lokal
						AK.63	Diversifikasi produk pengolahan dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
				ST.24	Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen	AK.64	Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
						AK.65	Pendirian pusat distribusi dan logistik di kawasan strategis
				ST.25	Meningkatkan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM	AK.66	Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi/digital
				ST.26	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah	AK.67	Pengembangan destinasi dan magnet wisata, ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect*

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
								AK.68	Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan prinsip ekowisata
				S.8	Meningkatnya Investasi	ST.27	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah	AK.69	Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal
								AK.70	Penyederhanaan proses perizinan beserta regulasinya
				S.9	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	ST.28	Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial	AK.71	Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
						ST.29	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja	AK.72	Perluasan lapangan kerja
								AK.73	Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor
								AK.74	Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja
		T.5	Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib	S.10	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama	ST.30	Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama	AK.75	Fasilitasi peningkatan kehidupan toleransi umat beragama
								AK.76	Penguatan kolaborasi antar organisasi keagamaan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					AK.77	Peningkatan fasilitasi, kerjasama, dan partisipasi rohaniwan, serta guru-guru mengaji
					AK.78	Peningkatan dorongan pembinaan dan event-event kerohanian
					AK.79	Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan
					AK.80	Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
					AK.81	Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan event-event pembinaan kerohanian
					AK.82	Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
									AK.83	Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti
					S.11	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	ST.31	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum	AK.84	Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah
									AK.85	Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
									AK.86	Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi dan merealisasikan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, maka dirumuskan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Tahapan arah kebijakan tahunan tersebut untuk Tahun 2026 merupakan arah kebijakan transisi dari RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 periode akhir dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 periode awal, yakni melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 dengan meningkatkan eksistensi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan, dan daya saing daerah yang sudah dicapai.

Memperhatikan keseluruhan data-data dan informasi yang tercakup dalam gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, dan strategi, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2026 adalah Pemerataan Perekonomian, Daya Saing dan Keunggulan Daerah melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 adalah membangun kerangka dasar untuk pembangunan Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2027 masih melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan, serta Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 diharapkan akan memperkuat struktur perekonomian, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang kesemuanya berjalan secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2028 masih melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan daya saing daerah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2028 adalah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2028 diharapkan semakin memperkuat daya saing daerah serta dapat

mendorong tumbuh-kembangnya pusat-pusat petumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis kewilayahan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2029 masih melanjutkan penguatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis partisipatif. Oleh karena itu, yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2029 adalah Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sosial Budaya, dan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2029 diharapkan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yakni antara lain adanya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, pekerjaan bernilai tambah pada pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga dan hubungan sosial, kelayakan hunian dan asetnya, kelestarian lingkungan hidup, dan keamanan yang kondusif. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2029 diharapkan juga dapat mendorong tumbuh-kembangnya partisipatif masyarakat Kubu Raya dari semua tingkatan dan kalangan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian di semua bidang. Selain itu, diharapkan juga dapat terpeliharanya pengembangan karakter Sumber Daya Manusia.

Pada Tahun 2030 adalah akhir periode pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dan sekaligus adalah tahun transisi untuk RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2030-2034. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2030 adalah Perwujudan Kabupaten Kubu Raya yang Melaju. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2030 ini merupakan pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, yakni Terwujudnya Kubu Raya Melaju. Selain pencapaian Visi, juga terealisasinya Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Governmet* serta Berbasis Digitalisasi, Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan, Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya, serta Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis.

Tabel 3.9.
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030

Arah Kebijakan				
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Pemerataan Perekonomian, Daya Saing dan Keunggulan Daerah melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan, serta Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sosial Budaya, dan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Perwujudan Kabupaten Kubu Raya yang Melaju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD, serta merupakan implementasi arah kebijakan. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah.
3. Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana.
4. Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional.
5. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
6. Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern.
7. Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif.

Keseluruhan program prioritas di atas dirumuskan ke dalam perwujudan tujuan dan sasaran, serta dioperasionalisasikan dengan pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Adapun rumusan program prioritas berdasarkan tujuan, sasaran, serta program nomenklatur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Rumusan Program Prioritas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur	Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VISI: TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU								
Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi	T.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa			IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi				
		S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IS.1 Indeks Pelayanan Publik				
			IO.1 Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.1 Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
			IO.2 Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.1 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	3.1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	3	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.4	Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	4.1	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	4	Program Penetapan Tanah Ulayat	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.5	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	5.1	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.6	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	6.1	Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah	6	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.7	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah	7.1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	7	Program Penatagunaan Tanah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	8.1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	8	Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							8.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	9.1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	9	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							9.2	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
							9.3	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
							9.4	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan					
					IO.10	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	10.1	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.11	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	11.1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	11	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
					IO.12	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	12.1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	13.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	13	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.14	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
					IO.15	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	15.1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	15	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.16	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	16.1	Tingkat Ketersediaan Arsip	16	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
					IO.17	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	17.1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	17	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
					IO.18	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.1	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.19	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	19.1	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	19	Program Perekonomian dan Pembangunan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
					IO.20	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	20.1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	20	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							20.2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
					OC.21	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	21.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
			S.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			IS.2	Nilai SAKIP					
							IS.3	Opini BPK					
					OC.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							1.2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD					
					OC.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sektoral	2.1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							2.2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
							2.3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	3.1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							3.2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik					
							3.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							3.4	Persentase Penurunan SILPA					
							3.5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu					
					OC.4	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	4.1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.5	Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	5.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							5.2	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan					
							5.3	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital					
					OC.6	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Daerah	6.1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	6	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							6.2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya					
							6.3	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya					
							6.4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							7.2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan					
							7.3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi					
							7.4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.8	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	8.1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	8	Program Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							8.2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah					
							8.3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah					
							8.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.9	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Kewenangan	9.1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							9.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provinsi Tahun Anggaran N-1					
							9.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran N-1					
					OC.10	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	10.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
							10.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					
					OC.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	11.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan	T.2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar					IT.2	Indeks Infrastruktur					
							IT.3	Penurunan Intensitas Emisi GRK					
			S.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar			IS.4	Rasio Konektivitas					
							IS.5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
							IS.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman					
							IS.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan					
							IS.8	Persentase Desa Mandiri					
					OC.1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	1.1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
							1.2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	2.1	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					OC.3	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	3.1	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	4.1	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					OC.5	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	5.1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.6	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	6.1	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	6	Program Penataan Bangunan Gedung	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					OC.7	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	7.1	Tingkat Kemantapan Jalan	7	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.8	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	8.1	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					OC.9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	9.1	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan RTRW	9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.10	Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	10.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	10	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
							10.2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni					
					OC.11	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	11.1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.12	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	12.1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					OC.13	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	13.1	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.14	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	14.1	Konektivitas Darat	14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
							14.2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal					
					IO.15	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	15.1	Konektivitas Laut	15	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan indeks konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
			IO.16	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	16.1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	16	Program Penataan Desa	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
			IO.17	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	17.1	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	17	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
			IO.18	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
					18.2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.19	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	19.1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	19	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
							19.2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat					
					IO.20	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	20.1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	20	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.21	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	21.1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	21	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
					IO.22	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	22.1	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	22	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
					OC.23	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa	23.1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.24	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	24.1	Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	24	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
					OC.25	Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan	25.1	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	25	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
					OC.26	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26.1	Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	26	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Infrastruktur Secara Adil Berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
			S.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana			IS.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
							IS.10	Indeks Risiko Bencana					
							IS.11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)					
					OC.1	Indeks Risiko Bencana	1.1	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					OC.2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2.1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
			OC.3	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	3.1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
			OC.4	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					4.2	Indeks Kualitas Udara					
					4.3	Indeks Tutupan Lahan					
			OC.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5.1	Persentase RTH	5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.6	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	6.1	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					OC.7	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	7.1	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					OC.8	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	8.1	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.9	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	9.1	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					OC.10	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					OC.11	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	11.1	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.12	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	12.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	12	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis berbasis agroindustri, agrowisata, dan potensi unggulan desa, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya	T.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat					IT.4	Indeks Pembangunan Manusia					
			S.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			IS.12	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca					
							IS.13	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi					
							IS.14	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca					
							IS.15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi					
							IS.16	Rata-Rata Lama Sekolah					
							IS.17	Angka Harapan Lama Sekolah					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.1	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1.1	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							1.2	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)					
							1.3	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)					
					OC.2	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	2.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	2	Program Pengembangan Kurikulum	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.3	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.1	Indeks Pemerataan Guru	3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							3.2	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik					
					OC.4	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	4.1	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan / Diperbarui	4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	5.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	5	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
					IO.6	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	6.1	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
					IO.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	7.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	7	Program Pembinaan Sejarah	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.8	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	8.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
							8.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan					
					IO.9	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	9.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	9	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.10	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10.1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	10	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
			S.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			IS.18	Usia Harapan Hidup					
							IS.19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.1	Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil, dan Terjangkau	1.1	Prevalensi Depresi pada Usia ≥15 Tahun	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							1.2	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun					
							1.3	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat					
							1.4	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri					
							1.5	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-21 Tahun					
							1.6	Cakupan Penemuan Kasus TB					
							1.7	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Minimal (SPM) Sesuai Standar					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.2	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	2.1	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							2.2	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.3	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	3.1	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							3.2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu					
							3.3	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan					
							3.4	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan					
							3.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.4	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.1	Persentase Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer)	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							4.2	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat					
					OC.5	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	5.1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.6	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	6.1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	6	Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
					OC.7	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	7.1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.8	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	8.1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	8	Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							8.2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)					
					IO.9	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	9.1	Angkat Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	9	Program Pengendalian Penduduk	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							9.2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.10	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							10.2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)					
					IO.11	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	11.1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.12	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	12.1	Rasio Wirausaha Pemuda	12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
					IO.13	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	13.1	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas/Pelatda	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.14	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	14.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis	T.4	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan					IT.5	Pertumbuhan Ekonomi					
							IT.6	Tingkat Kemiskinan					
			S.7	Meningkatnya Daya Saing Daerah			IS.20	Indeks Daya Saing					
					IO.1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.2	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.1	Skor Pola Pangan Harapan	2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.3	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	3.1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.4	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	4.1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	6.1	Persentase Koperasi Aktif	6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.7	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	7.1	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.8	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	8.1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.9	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	9.1	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
							9.2	Pertumbuhan Wirausaha					
					IO.10	Meningkatnya Daya Saing UMKM	10.1	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.11	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	11.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.12	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	12.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.13	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Peraturan yang Berlaku	13.1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan (Nelayan, Pembudidaya) terhadap Peraturan yang Berlaku	13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.14	Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	14.1	Angka Konsumsi Ikan	14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.15	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	15.1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	15	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.16	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	16.1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	16	Program Pemasaran Pariwisata	Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.17	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	17.1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	17	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.18	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18.1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	18	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan dan peningkatan pariwisata, cabang olahraga unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
					IO.19.1	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	19.1.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	19	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
							19.1.2	Peningkatan Produksi Hortikultura					
					IO.19.2	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Perkebunan dan Peternakan	19.2.1	Peningkatan Produksi Perkebunan					
							19.2.2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.20.1	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	20.1.1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.20.2	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Perkebunan dan Peternakan	20.2.1	Daya Dukung Prasarana Perkebunan Terhadap Produktivitas Kebun					
							20.2.2	Daya Dukung Prasarana Peternakan Terhadap Produktivitas Ternak					
					IO.21	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	21.1	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	21	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
							21.2	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.22.1	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	22.1.1	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	22	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
							22.1.2	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian					
					IO.22.2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	22.2.1	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan					
							22.2.2	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perkebunan					
					IO.23	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	23.1	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	23	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.24.1	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	24.1.1	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	24	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
					IO.24.2	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	24.2.1	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi					
					IO.25	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	25.1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	25	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.26	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	26.1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	26	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.27	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.1	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.28	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	28.1	Nilai Ekspor Barang	28	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.29	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	29.1	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	29	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.30	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	30.1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.31	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	31.1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.32	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	32.1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	32	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Peningkatan produk unggulan daerah dan UMKM naik kelas melalui go digitalisasi dan go publik (ekspor) baik skala lokal, regional maupun internasional	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
			S.8	Meningkatnya Investasi			IS.21	Nilai Investasi					
					IO.1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1.1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.2	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	2.1	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					IO.3	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3.1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.4	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	4.1	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
					IO.5	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	5.1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
			S.9	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat			IS.22	Rasio Gini					
							IS.23	Tingkat Pengangguran Terbuka					
					OC.1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1.1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							1.2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial					
							1.3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.2	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.1	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							2.2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani					
					OC.3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	3.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3	Program Rehabilitasi Sosial	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							3.2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
							3.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya					
							3.4	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya					
							3.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.4	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							4.2	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar					
							4.3	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin					
							4.4	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan					

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.5	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	5.1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	5	Program Penanganan Bencana	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
							5.2	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya					
							5.3	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial					
					OC.6	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	6.1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Ketenaga Kerjaan	6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.7	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	7.1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
					OC.8	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	8.1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.9	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	9.1	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	9	Program Hubungan Industrial	Peningkatan dan pengembangan pendidikan mental spiritual, keagamaan, kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pondok pesantren modern	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	T.5	Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib					IT.7	Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya					
			S.10	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Umat Beragama			IS.24	Indeks Kerukunan Umat Beragama					
					OC.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.2	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	2.1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
					OC.3	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	3.1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
					OC.4	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	4.1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator		Program Nomenklatur		Program Prioritas Daerah	Tagging Prioritas Provinsi	Tagging Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
					OC.5	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	5.1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
			S.11	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat			IS.25	Indeks Trantibumlinmas					
					OC.1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar yang berbasis digitalisasi dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain itu terdapat 17 (tujuh belas) rencana aksi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang merupakan janji kepala daerah dan merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah di atas, yaitu:

1. Pembangunan gedung pemerintahan termasuk kantor DPRD, jembatan, dermaga, penyediaan air minum, menuntaskan pembangunan jalan poros, peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman yang layak dan merata, pembangunan untuk rumah tidak layak huni/bedah rumah, penanganan sampah.
2. Menjadikan pondok pesantren bukan hanya pusat pendidikan, pesantren juga sebagai sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan pembinaan pemuda, bidang keagamaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, serta membangun stadion olahraga di Kabupaten Kubu Raya.
4. Peningkatan perluasan Layanan PBI (Penerima Bantuan Iuran)/BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
5. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi/UMKM dan mendorong BUMDES naik kelas.
6. Memberikan bantuan material/imbal swadaya.
7. Meningkatkan insentif tenaga medis dan para medis yang bertugas di Puskesmas/Pustu/Polindes yang berada di pedalaman, pesisir, dan kepulauan.
8. Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar induk.
9. Meningkatkan insentif untuk guru honorer sekolah/madrasah swasta, TPQ, PAUD, kader posyandu, RT/RW, kepala desa, perangkat desa, BPD, sekdes, kasi/kaur, kadus, dan kader pembangunan manusia.
10. Meningkatkan bantuan sosial dan hibah untuk rumah ibadah, ormas, dan majelis taklim.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan agro wisata dan wisata desa.
12. Pendidikan gratis, memperluas cakupan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), dan memberikan beasiswa untuk siswa/santri berprestasi, yatim dan dhuafa keluarga kurang mampu.
13. Kesehatan gratis mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit dan peningkatan Rumah Sakit Kubu Raya bertaraf nasional.

14. Meningkatkan jumlah penerima insentif petugas fardu kifayah, guru ngaji, imam/khatib, guru, dan imam, serta penyuluh agama lainnya.
15. Memberikan bantuan peningkatan pembangunan sanitasi (air bersih, MCK, dan tempat wudhu) Pondok Pesantren dan rumah/pondok yatim piatu.
16. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (las listrik, servis AC, servis komputer, menjahit, barista, multimedia, servis motor/mobil), pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)/UPT (Unit Pelaksana Teknis) pelatihan kerja daerah dan *job fair*/bursa kerja bagi pencari kerja.
17. Pelestarian lingkungan, adaptasi, dan mitigasi bencana.

Program Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan sasaran pembangunan nasional maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merumuskan, menyelaraskan, dan memetakan dukungan pelaksanaan program di daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.11.
Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPRPRKP
			Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPRKP
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3KB
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP, Disbunnak
		Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPRPRKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPRPRKP
			Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPRKP
			Program Kawasan Permukiman	DPUPRPRKP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUPRPRKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	DPUPRPRKP
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
2	Ketahanan Pangan	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPRPRKP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUKMPP
3	Kesehatan Untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		Makan Bergizi Gratis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
4	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPRPRKP
			Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPRKP
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKMPP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP, Disbunnak
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP, Disbunnak
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disbunnak
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP, Disbunnak
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Disbunnak
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP, Disbunnak
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMPP
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUKMPP
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMPP
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUKMPP
		Kemudahan Perizinan di Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Strategis Nasional Lainnya yang Ditetapkan Oleh Presiden	Stunting	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Dinkes
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPRPRKP
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPRPRKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPRPRKP
			Program Kawasan Permukiman	DPUPRPRKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	DPUPRPRKP
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
			Program Pengelolaan Persampahan	DPUPRPRKP, DLH
			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
			Program Pengendalian Penduduk	DP3KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3KB
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUKMPP
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKMPP
			Program Pengembangan UMKM	DKUKMPP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disbunnak
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DKUKMPP
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua Kecamatan
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
		Posyandu	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPRPRKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPRPRKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPRPRKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPRPRKP
			Program Kawasan Permukiman	DPUPRPRKP
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinkes
			Program Perlindungan Khusus Anak	DP3KB
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

No.	Uraian	Baseline (2025)	Proyeksi (Rp.)				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	**BELANJA**	**1.991.741.388.360,07**	**1.920.722.670.197,82**	**2.016.758.803.707,71**	**2.117.596.743.893,10**	**2.223.476.581.087,75**	**2.334.650.410.142,14**
2.1.	**Belanja Operasi**	**1.435.126.168.084,91**	**1.339.812.213.043,00**	**1.406.802.823.695,16**	**1.477.192.964.879,91**	**1.551.102.613.123,91**	**1.628.707.743.780,11**
2.1.1.	Belanja Pegawai	703.472.253.710,99	576.216.801.059,35	605.027.641.112,31	635.279.023.167,93	667.042.974.326,33	700.395.123.042,64
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.380.299.282,92	712.908.116.138,11	748.553.521.945,01	786.031.198.042,27	825.382.757.944,38	866.701.895.841,60
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	48.218.315.091,00	50.629.230.845,55	53.160.692.387,83	55.818.727.007,22	58.609.663.357,58	61.540.146.525,46
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	55.300.000,00	58.065.000,00	60.968.250,00	64.016.662,50	67.217.495,63	70.578.370,41
2.2.	**Belanja Modal**	**287.770.728.535,89**	**302.159.264.962,69**	**317.367.228.210,83**	**333.285.589.621,37**	**349.999.869.102,44**	**367.549.862.557,56**
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**5.271.927.746,77**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
2.4.	**Belanja Transfer**	**263.572.563.992,50**	**276.751.192.192,13**	**290.588.751.801,73**	**305.118.189.391,82**	**320.374.098.861,40**	**336.392.803.804,47**
2.4.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	26.359.163.792,50	27.677.121.982,13	29.060.978.081,23	30.514.026.985,29	32.039.728.334,55	33.641.714.751,28
2.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	237.213.400.200,00	249.074.070.210,00	261.527.773.720.50	274.604.162.406,53	288.334.370.526,85	302.751.089.053,19

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

4.1.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah terdiri atas:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan, yaitu:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
   f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan, yaitu:

a. Tenaga Kerja;
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan, yaitu:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan;
   e. Perindustrian; dan
   f. Transmigrasi.

   Terdapat 2 (dua) urusan pilihan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu (1) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan (2) urusan Kehutanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, dan juga tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur, yaitu:
   a. Unsur Sekretariat Daerah; dan
   b. Unsur Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi 7 (tujuh) unsur, yaitu:

a. Unsur Perencanaan;
b. Unsur Keuangan;
c. Unsur Kepegawaian;
d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan; dan
e. Unsur Penelitian dan Pengembangan.

Terdapat 2 (dua) unsur penunjang yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu (1) Unsur Penghubung, dan (2) Unsur Perbatasan Daerah.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Inspektorat Daerah;
7. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan;
8. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisi program-program, baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas

tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah.

Tabel 4.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026-2030

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						**547.162.576.575,38**		**574.520.705.404,15**		**603.246.740.674,34**		**633.409.077.708,07**		**665.079.531.593,47**		**3.023.418.631.955,41**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						413.272.319.795,85		433.935.935.785,64		455.632.732.574,92		478.414.369.203,67		502.335.087.663,85		2.283.590.445.023,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						*413.272.319.795,85*		*433.935.935.785,64*		*455.632.732.574,92*		*478.414.369.203,67*		*502.335.087.663,85*		*2.283.590.445.023,93*	
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	73,00	77,00	81,00		85,00		89,00		93,00		97,00		97,00		
2 Program Pengelolaan Pendidikan						127.497.460.931,52		133.872.333.978,10		140.565.950.677,00		147.594.248.210,85		154.973.960.621,40		704.503.954.418,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah)						*127.497.460.931,52*		*133.872.333.978,10*		*140.565.950.677,00*		*147.594.248.210,85*		*154.973.960.621,40*		*704.503.954.418,87*	
1 Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)		Persen	92,83	95,83	97,33		98,83		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)		Persen	101,58	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3 Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)		Persen	63,26	66,26	67,67		69,08		70,49		71,90		73,31		73,31		
3 Program Pengembangan Kurikulum						59.510.816,79		62.486.357,63		65.610.675,51		68.891.209,29		72.335.769,75		328.834.828,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan)						*59.510.816,79*		*62.486.357,63*		*65.610.675,51*		*68.891.209,29*		*72.335.769,75*		*328.834.828,97*	
1 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		Persen	53,48	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						6.303.068.387,81		6.618.221.807,20		6.949.132.897,56		7.296.589.542,44		7.661.419.019,56		34.828.431.654,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)						*6.303.068.387,81*		*6.618.221.807,20*		*6.949.132.897,56*		*7.296.589.542,44*		*7.661.419.019,56*		*34.828.431.654,57*	
1 Indeks Pemerataan Guru		Indeks	80,50	82,75	84,25		85,75		87,25		88,75		90,25		90,25		
2 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan						30.216.643,41		31.727.475,58		33.313.849,35		34.979.541,82		36.728.518,91		166.966.029,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan)						*30.216.643,41*		*31.727.475,58*		*33.313.849,35*		*34.979.541,82*		*36.728.518,91*		*166.966.029,07*	
1 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui		Persen	88,41	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						**272.495.334.499,55**		**286.120.101.224,54**		**300.426.106.285,77**		**315.447.411.600,06**		**331.219.782.180,05**		**1.505.708.735.789,97**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						134.560.791.529,44		141.288.831.105,91		148.353.272.661,21		155.770.936.294,27		163.559.483.108,98		743.533.314.699,81	Dinas Kesehatan
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						*134.560.791.529,44*		*141.288.831.105,91*		*148.353.272.661,21*		*155.770.936.294,27*		*163.559.483.108,98*		*743.533.314.699,81*	
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	76,95	79,00	81,00		83,00		85,00		87,00		89,00		89,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					118.270.932.881,13		124.184.479.525,19		130.393.703.501,45		136.913.388.676,52		143.759.058.110,34		653.521.562.694,63	Dinas Kesehatan
	(Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil, dan Terjangkau)					*118.270.932.881,13*		*124.184.479.525,19*		*130.393.703.501,45*		*136.913.388.676,52*		*143.759.058.110,34*		*653.521.562.694,63*	
1	Prevalensi Depresi pada usia ≥15 tahun	Persen	95,66	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen	164,00	120,00	115,00		110,00		105,00		100,00		95,00		95,00		
3	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	4,10	4,00	3,90		3,80		3,70		3,60		3,50		3,50		
4	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Cakupan penemuan kasus TB	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar minimal (SPM) sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					11.317.357.689,91		11.883.225.574,41		12.477.386.853,13		13.101.256.195,79		13.756.319.005,58		62.535.545.318,82	Dinas Kesehatan
	(Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan)					*11.317.357.689,91*		*11.883.225.574,41*		*12.477.386.853,13*		*13.101.256.195,79*		*13.756.319.005,58*		*62.535.545.318,82*	
1	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					279.584.454,77		293.563.677,51		308.241.861,38		323.653.954,45		339.836.652,17		1.544.880.600,28	Dinas Kesehatan
	(Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman)					*279.584.454,77*		*293.563.677,51*		*308.241.861,38*		*323.653.954,45*		*339.836.652,17*		*1.544.880.600,28*	
1	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					8.066.667.944,30		8.470.001.341,52		8.893.501.408,60		9.338.176.479,03		9.805.085.302,98		44.573.432.476,43	Dinas Kesehatan
	(Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan)					*8.066.667.944,30*		*8.470.001.341,52*		*8.893.501.408,60*		*9.338.176.479,03*		*9.805.085.302,98*		*44.573.432.476,43*	
1	Persentase Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer)	Persen	97,60	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	85,00	85,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**162.927.551.484,99**		**171.048.929.059,24**		**179.576.375.512,21**		**188.530.194.287,80**		**197.931.704.002,19**		**900.014.754.346,43**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					18.221.981.805,84		19.133.080.896,13		20.089.734.940,93		21.094.221.687,98		22.148.932.772,38		100.687.952.103,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*18.221.981.805,84*		*19.133.080.896,13*		*20.089.734.940,93*		*21.094.221.687,98*		*22.148.932.772,38*		*100.687.952.103,26*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	64,35	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					21.594.249.840,46		22.673.962.332,48		23.807.660.449,11		24.998.043.471,56		26.247.945.645,14		119.321.861.738,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi)					*21.594.249.840,46*		*22.673.962.332,48*		*23.807.660.449,11*		*24.998.043.471,56*		*26.247.945.645,14*		*119.321.861.738,75*	
	1 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	62,53	68,78	75,66		82,54		89,41		96,29		103,17		103,17		
	2 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen															
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					13.770.924.306,64		14.459.470.521,97		15.182.444.048,07		15.941.566.250,47		16.738.644.562,99		76.093.049.690,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum)					*13.770.924.306,64*		*14.459.470.521,97*		*15.182.444.048,07*		*15.941.566.250,47*		*16.738.644.562,99*		*76.093.049.690,14*	
	1 Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum	Persen	52,07	54,00	55,00		56,00		57,00		58,00		59,00		59,00		
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Layanan Persampahan Regional)					*500.000.000,00*		*500.000.000,00*		*500.000.000,00*		*500.000.000,00*		*500.000.000,00*		*2.500.000.000,00*	
	1 Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	64,95	67,12	68,00		68,88		69,76		70,64		71,52		71,52		
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					15.699.062.685,33		16.484.015.819,60		17.308.216.610,58		18.173.627.441,11		19.082.308.813,16		86.747.231.369,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah)					*15.699.062.685,33*		*16.484.015.819,60*		*17.308.216.610,58*		*18.173.627.441,11*		*19.082.308.813,16*		*86.747.231.369,78*	
	1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	64,95	67,12	68,00		68,88		69,76		70,64		71,52		71,52		
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					10.767.579.561,31		11.305.958.539,37		11.871.256.466,34		12.464.819.289,66		13.088.060.254,14		59.497.674.110,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase)					*10.767.579.561,31*		*11.305.958.539,37*		*11.871.256.466,34*		*12.464.819.289,66*		*13.088.060.254,14*		*59.497.674.110,82*	
	1 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	71,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		
7	Program Penataan Bangunan Gedung					15.358.978.428,95		16.126.927.350,40		16.933.273.717,92		17.779.937.403,81		18.668.934.274,01		84.868.051.175,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung)					*15.358.978.428,95*		*16.126.927.350,40*		*16.933.273.717,92*		*17.779.937.403,81*		*18.668.934.274,01*		*84.868.051.175,09*	
	1 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	51,00	56,00	61,00		66,00		71,00		76,00		81,00		81,00		
8	Program Penyelenggaraan Jalan					65.729.687.269,82		69.016.171.633,31		72.466.980.214,98		76.090.329.225,73		79.894.845.687,01		363.198.014.030,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman)					*65.729.687.269,82*		*69.016.171.633,31*		*72.466.980.214,98*		*76.090.329.225,73*		*79.894.845.687,01*		*363.198.014.030,85*	
	1 Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	72,52	76,50	78,00		79,50		81,00		82,50		84,00		84,00		
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					258.553.081,69		271.480.735,78		285.054.772,57		299.307.511,19		314.272.886,75		1.428.668.987,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi)					*258.553.081,69*		*271.480.735,78*		*285.054.772,57*		*299.307.511,19*		*314.272.886,75*		*1.428.668.987,98*	
	1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	50,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					1.026.534.504,95		1.077.861.230,20		1.131.754.291,71		1.188.342.006,29		1.247.759.106,61		5.672.251.139,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang)					*1.026.534.504,95*		*1.077.861.230,20*		*1.131.754.291,71*		*1.188.342.006,29*		*1.247.759.106,61*		*5.672.251.139,76*	
	1 Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan RTRW	Persen	72,83	76,05	77,45		78,85		80,25		81,65		83,05		83,05		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**148.274.149.949,76**		**155.687.857.447,25**		**163.472.250.319,61**		**171.645.862.835,60**		**180.228.155.977,38**		**819.308.276.529,60**	
1	Program Pengembangan Perumahan					156.675.000,00		164.508.750,00		172.734.187,50		181.370.896,88		190.439.441,72		865.728.276,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah)					*156.675.000,00*		*164.508.750,00*		*172.734.187,50*		*181.370.896,88*		*190.439.441,72*		*865.728.276,10*	
	1 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Kawasan Permukiman					164.665.425,00		172.898.696,25		181.543.631,06		190.620.812,62		200.151.853,25		909.880.418,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman)					*164.665.425,00*		*172.898.696,25*		*181.543.631,06*		*190.620.812,62*		*200.151.853,25*		*909.880.418,18*	
	1 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	78,00	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni)					*1.000.000.000,00*		*1.000.000.000,00*		*1.000.000.000,00*		*1.000.000.000,00*		*1.000.000.000,00*		*5.000.000.000,00*	
	1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	78,00	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					146.952.809.524,76		154.350.450.001,00		162.117.972.501,05		170.273.871.126,10		178.837.564.682,41		812.532.667.835,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	(Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman)					*146.952.809.524,76*		*154.350.450.001,00*		*162.117.972.501,05*		*170.273.871.126,10*		*178.837.564.682,41*		*812.532.667.835,32*	
	1 Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					**23.014.748.630,81**		**24.165.486.062,36**		**25.373.760.365,48**		**26.642.448.383,74**		**27.974.570.802,94**		**127.171.014.245,33**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					15.368.282.894,46		16.136.697.039,18		16.943.531.891,14		17.790.708.485,70		18.680.243.909,98		84.919.464.220,46	
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*10.030.870.705,79*		*10.532.414.241,08*		*11.059.034.953,13*		*11.611.986.700,79*		*12.192.586.035,83*		*55.426.892.636,62*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,00	75,00	75,00		76,00		77,00		78,00		79,00		79,00		
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.337.412.188,67*		*5.604.282.798,10*		*5.884.496.938,01*		*6.178.721.784,91*		*6.487.657.874,15*		*29.492.571.583,84*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,13	63,30	63,89		64,48		65,07		65,66		66,25		66,25		
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					3.991.494.574,05		4.191.069.302,75		4.400.622.767,89		4.620.653.906,28		4.851.686.601,60		22.055.527.152,57	Satuan Polisi Pamong Praja
	(Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					*3.991.494.574,05*		*4.191.069.302,75*		*4.400.622.767,89*		*4.620.653.906,28*		*4.851.686.601,60*		*22.055.527.152,57*	
	1 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Penanggulangan Bencana					649.587.221,87		682.066.582,97		716.169.912,12		751.978.407,72		789.577.328,11		3.589.379.452,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	(Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana)					*649.587.221,87*		*682.066.582,97*		*716.169.912,12*		*751.978.407,72*		*789.577.328,11*		*3.589.379.452,79*	
	1 Indeks Risiko Bencana	Poin	168,40	159,88	158,40		156,92		155,44		153,96		152,48		152,48		
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					3.005.383.940,43		3.155.653.137,46		3.313.435.794,33		3.479.107.584,04		3.653.062.963,25		16.606.643.419,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	(Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran)					*3.005.383.940,43*		*3.155.653.137,46*		*3.313.435.794,33*		*3.479.107.584,04*		*3.653.062.963,25*		*16.606.643.419,51*	
	1 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)	Menit	15	15	15		15		15		15		15		15		
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					**6.140.182.090,90**		**6.447.191.195,44**		**6.769.550.755,22**		**7.108.028.292,98**		**7.463.429.707,64**		**33.928.382.042,18**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.169.539.410,78		5.428.016.381,32		5.699.417.200,39		5.984.388.060,41		6.283.607.463,43		28.564.968.516,33	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.169.539.410,78*		*5.428.016.381,32*		*5.699.417.200,39*		*5.984.388.060,41*		*6.283.607.463,43*		*28.564.968.516,33*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,50	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		80,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Program Pemberdayaan Sosial					54.004.842,62		56.705.084,75		59.540.338,99		62.517.355,94		65.643.223,74		298.410.846,04	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Pemberdayaan Sosial)					*54.004.842,62*		*56.705.084,75*		*59.540.338,99*		*62.517.355,94*		*65.643.223,74*		*298.410.846,04*	
	1 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					5.251.801,36		5.514.391,43		5.790.111,00		6.079.616,55		6.383.597,38		29.019.517,72	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan)					*5.251.801,36*		*5.514.391,43*		*5.790.111,00*		*6.079.616,55*		*6.383.597,38*		*29.019.517,72*	
	1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Rehabilitasi Sosial					318.802.006,94		334.742.107,29		351.479.212,65		369.053.173,28		387.505.831,95		1.761.582.332,11	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Rehabilitasi Sosial)					*318.802.006,94*		*334.742.107,29*		*351.479.212,65*		*369.053.173,28*		*387.505.831,95*		*1.761.582.332,11*	
	1 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4 Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					491.497.626,28		516.072.507,59		541.876.132,97		568.969.939,62		597.418.436,60		2.715.834.643,06	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial)					*491.497.626,28*		*516.072.507,59*		*541.876.132,97*		*568.969.939,62*		*597.418.436,60*		*2.715.834.643,06*	
	1 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4 Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	Program Penanganan Bencana					101.086.402,92		106.140.723,06		111.447.759,22		117.020.147,18		122.871.154,54		558.566.186,92	Dinas Sosial
	(Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana)					*101.086.402,92*		*106.140.723,06*		*111.447.759,22*		*117.020.147,18*		*122.871.154,54*		*558.566.186,92*	
	1 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					**1.246.839.539,87**		**1.309.181.516,87**		**1.374.640.592,71**		**1.443.372.622,34**		**1.515.541.253,46**		**6.889.575.525,25**	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja					150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,50		828.844.687,50	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja)					*150.000.000,00*		*157.500.000,00*		*165.375.000,00*		*173.643.750,00*		*182.325.937,50*		*828.844.687,50*	
	1 Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Ketenaga Kerjaan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					224.567.000,73		235.795.350,77		247.585.118,30		259.964.374,22		272.962.592,93		1.240.874.436,95	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja)					*224.567.000,73*		*235.795.350,77*		*247.585.118,30*		*259.964.374,22*		*272.962.592,93*		*1.240.874.436,95*	
	1 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Penempatan Tenaga Kerja					225.578.165,51		236.857.073,79		248.699.927,48		261.134.923,85		274.191.670,04		1.246.461.760,67	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja)					*225.578.165,51*		*236.857.073,79*		*248.699.927,48*		*261.134.923,85*		*274.191.670,04*		*1.246.461.760,67*	
	1 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	90,00	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
4	Program Hubungan Industrial					646.694.373,63		679.029.092,31		712.980.546,93		748.629.574,27		786.061.052,99		3.573.394.640,13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi)					*646.694.373,63*		*679.029.092,31*		*712.980.546,93*		*748.629.574,27*		*786.061.052,99*		*3.573.394.640,13*	
	1 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	90,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**14.398.464.255,37**		**15.118.387.468,13**		**15.874.306.841,54**		**16.668.022.183,62**		**17.501.423.292,80**		**79.560.604.041,46**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.677.703.740,80		5.961.588.927,84		6.259.668.374,23		6.572.651.792,95		6.901.284.382,59		31.372.897.218,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.677.703.740,80*		*5.961.588.927,84*		*6.259.668.374,23*		*6.572.651.792,95*		*6.901.284.382,59*		*31.372.897.218,41*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,30	75,50	76,00		76,50		77,00		77,50		78,00		78,00		
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					6.668.732.024,08		7.002.168.625,28		7.352.277.056,54		7.719.890.909,37		8.105.885.454,84		36.848.954.070,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan)					*6.668.732.024,08*		*7.002.168.625,28*		*7.352.277.056,54*		*7.719.890.909,37*		*8.105.885.454,84*		*36.848.954.070,11*	
	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Perlindungan Perempuan					154.230.932,67		161.942.479,30		170.039.603,27		178.541.583,43		187.468.662,60		852.223.261,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan)					*154.230.932,67*		*161.942.479,30*		*170.039.603,27*		*178.541.583,43*		*187.468.662,60*		*852.223.261,27*	
	1 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	85,36	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					135.755.754,00		142.543.541,70		149.670.718,79		157.154.254,72		165.011.967,46		750.136.236,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif)					*135.755.754,00*		*142.543.541,70*		*149.670.718,79*		*157.154.254,72*		*165.011.967,46*		*750.136.236,67*	
	1 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	Pratama (696,5)	Madya (701,0)	Nindya (751,0)												

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Perlindungan Khusus Anak					1.762.041.803,82		1.850.143.894,01		1.942.651.088,71		2.039.783.643,15		2.141.772.825,31		9.736.393.255,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak)					*1.762.041.803,82*		*1.850.143.894,01*		*1.942.651.088,71*		*2.039.783.643,15*		*2.141.772.825,31*		*9.736.393.255,00*	
	1 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	92,18	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
	2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	92,18	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					**16.688.866.847,06**		**17.523.310.189,41**		**18.399.475.698,88**		**19.319.449.483,82**		**20.285.421.958,02**		**91.418.217.330,19**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					16.059.374.637,44		16.862.343.369,31		17.705.460.537,77		18.590.733.564,66		19.520.270.242,89		88.738.182.352,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*16.059.374.637,44*		*16.862.343.369,31*		*17.705.460.537,77*		*18.590.733.564,66*		*19.520.270.242,89*		*88.738.182.352,07*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	64,00	66,00	67,00		68,00		69,00		70,00		71,00		71,00		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					83.975.142,79		88.173.899,93		92.582.594,93		97.211.724,67		102.072.310,91		464.015.673,23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	(Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan)					*83.975.142,79*		*88.173.899,93*		*92.582.594,93*		*97.211.724,67*		*102.072.310,91*		*464.015.673,23*	
	1 Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					213.308.040,68		223.973.442,71		235.172.114,85		246.930.720,59		259.277.256,62		1.178.661.575,45	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	(Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat)					*213.308.040,68*		*223.973.442,71*		*235.172.114,85*		*246.930.720,59*		*259.277.256,62*		*1.178.661.575,45*	
	1 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	72,67	79,04	82,27		85,50		88,73		91,96		95,19		95,19		
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan					288.946.840,96		303.394.183,01		318.563.892,16		334.492.086,77		351.216.691,11		1.596.613.694,01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	(Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan)					*288.946.840,96*		*303.394.183,01*		*318.563.892,16*		*334.492.086,77*		*351.216.691,11*			
	1 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	16,90	11,00	10,00		9,00		8,00		7,00		6,00		6,00		
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan					43.262.185,19		45.425.294,45		47.696.559,17		50.081.387,13		52.585.456,49		239.050.882,43	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	(Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan)					*43.262.185,19*		*45.425.294,45*		*47.696.559,17*		*50.081.387,13*		*52.585.456,49*		*239.050.882,43*	
	1 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					**3.187.803.791,06**		**3.347.193.980,61**		**3.514.553.679,65**		**3.690.281.363,63**		**3.874.795.431,81**		**17.614.628.246,76**	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					346.593.203,32		363.922.863,48		382.119.006,66		401.224.956,99		421.286.204,84		1.915.146.235,29	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan)					*346.593.203,32*		*363.922.863,48*		*382.119.006,66*		*401.224.956,99*		*421.286.204,84*		*1.915.146.235,29*	
	1 Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					1.887.631.859,21		1.982.013.452,17		2.081.114.124,78		2.185.169.831,02		2.294.428.322,57		10.430.357.589,75	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan)					*1.887.631.859,21*		*1.982.013.452,17*		*2.081.114.124,78*		*2.185.169.831,02*		*2.294.428.322,57*		*10.430.357.589,75*	
	1 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					135.347.604,14		142.114.984,34		149.220.733,56		156.681.770,24		164.515.858,75		747.880.951,03	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA))					*135.347.604,14*		*142.114.984,34*		*149.220.733,56*		*156.681.770,24*		*164.515.858,75*		*747.880.951,03*	
	1 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Penetapan Tanah Ulayat					106.252.486,34		111.565.110,66		117.143.366,19		123.000.534,50		129.150.561,22		587.112.058,91	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat)					*106.252.486,34*		*111.565.110,66*		*117.143.366,19*		*123.000.534,50*		*129.150.561,22*		*587.112.058,91*	
	1 Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong					200.338.301,39		210.355.216,46		220.872.977,29		231.916.626,15		243.512.457,46		1.106.995.578,75	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong)					*200.338.301,39*		*210.355.216,46*		*220.872.977,29*		*231.916.626,15*		*243.512.457,46*		*1.106.995.578,75*	
	1 Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah					49.548.483,37		52.025.907,54		54.627.202,92		57.358.563,06		60.226.491,22		273.786.648,11	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah)					*49.548.483,37*		*52.025.907,54*		*54.627.202,92*		*57.358.563,06*		*60.226.491,22*		*273.786.648,11*	
	1 Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	Program Penatagunaan Tanah					462.091.853,29		485.196.445,96		509.456.268,25		534.929.081,67		561.675.535,75		2.553.349.184,92	Sekretariat Daerah
	(Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah)					*462.091.853,29*		*485.196.445,96*		*509.456.268,25*		*534.929.081,67*		*561.675.535,75*		*2.553.349.184,92*	
	1 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					**26.922.997.477,19**		**28.294.147.351,04**		**29.733.854.718,60**		**31.245.547.454,52**		**32.832.824.827,25**		**149.029.371.828,60**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.007.149.445,17		5.257.506.917,43		5.520.382.263,30		5.796.401.376,46		6.086.221.445,29		27.667.661.447,65	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.007.149.445,17*		*5.257.506.917,43*		*5.520.382.263,30*		*5.796.401.376,46*		*6.086.221.445,29*		*27.667.661.447,65*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,90	81,00	84,00		87,00		90,00		93,00		96,00		96,00		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					545.146.181,60		572.403.490,67		601.023.665,21		631.074.848,47		662.628.590,89		3.012.276.776,84	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP)					*545.146.181,60*		*572.403.490,67*		*601.023.665,21*		*631.074.848,47*		*662.628.590,89*		*3.012.276.776,84*	
	1 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00												
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					372.576.555,07		391.205.382,82		410.765.651,96		431.303.934,56		452.869.131,29		2.058.720.655,70	Dinas Lingkungan Hidup
	(Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup)					*372.576.555,07*		*391.205.382,82*		*410.765.651,96*		*431.303.934,56*		*452.869.131,29*		*2.058.720.655,70*	
	1 Indeks Kualitas Air	Indeks	69,42	70,60	71,03		71,46		71,89		72,32		72,75		72,75		
	2 Indeks Kualitas Udara	Indeks	69,42	70,60	71,03		71,46		71,89		72,32		72,75		72,75		
	3 Indeks Tutupan Lahan	Indeks	69,42	70,60	71,03		71,46		71,89		72,32		72,75		72,75		
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					4.466.072.104,59		4.689.375.709,82		4.923.844.495,31		5.170.036.720,08		5.428.538.556,08		24.677.867.585,88	
	(Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)					4.361.622.104,59		4.579.703.209,82		4.808.688.370,31		5.049.122.788,83		5.301.578.928,27		24.100.715.401,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1 Persentase RTH	Persen	0,622	0,681	0,710		0,739		0,768		0,797		0,826		0,826		
	(Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)					104.450.000,00		109.672.500,00		115.156.125,00		120.913.931,25		126.959.627,81		577.152.184,06	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Persentase RTH	Persen	0,622	0,681	0,710		0,739		0,768		0,797		0,826		0,826		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					57.914.363,30		60.810.081,46		63.850.585,54		67.043.114,81		70.395.270,55		320.013.415,66	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3))					*57.914.363,30*		*60.810.081,46*		*63.850.585,54*		*67.043.114,81*		*70.395.270,55*		*320.013.415,66*	
	1 Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	75,00	75,00	75,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					57.914.151,27		60.809.858,83		63.850.351,77		67.042.869,36		70.395.012,83		320.012.244,06	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan)					*57.914.151,27*		*60.809.858,83*		*63.850.351,77*		*67.042.869,36*		*70.395.012,83*		*320.012.244,06*	
	1 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	25,00	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH)					*100.000.000,00*		*100.000.000,00*		*100.000.000,00*		*100.000.000,00*		*100.000.000,00*		*500.000.000,00*	
	1 Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	50,00	50,00	75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					482.255.330,09		511.368.096,60		541.936.501,43		574.033.326,50		607.734.992,82		2.717.328.247,44	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup)					*482.255.330,09*		*511.368.096,60*		*541.936.501,43*		*574.033.326,50*		*607.734.992,82*		*2.717.328.247,44*	
	1 Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	50,00	50,00	75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					50.344.545,91		52.861.773,21		55.504.861,87		58.280.104,96		61.194.110,21		278.185.396,16	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)					*50.344.545,91*		*52.861.773,21*		*55.504.861,87*		*58.280.104,96*		*61.194.110,21*		*278.185.396,16*	
	1 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	50,00	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					75.000.000,00		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		91.162.968,75		414.422.343,75	Dinas Lingkungan Hidup
	(Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup)					*75.000.000,00*		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		91.162.968,75		414.422.343,75	
	1 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	Program Pengelolaan Persampahan					15.708.624.800,19		16.519.056.040,20		17.370.008.842,21		18.263.509.284,32		19.201.684.748,54		87.062.883.715,46	
	(Meningkatnya Tata Kelola Persampahan)					15.602.950.080,07		16.408.097.584,08		17.253.502.463,28		18.141.177.586,44		19.073.236.465,77		86.478.964.179,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	47,45	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
	(Meningkatnya Tata Kelola Persampahan)					105.674.720,12		110.958.456,12		116.506.378,93		122.331.697,88		128.448.282,77		583.919.535,82	Dinas Lingkungan Hidup
	1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	47,45	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**8.779.987.257,25**		**9.218.986.620,10**		**9.679.935.951,11**		**10.163.932.748,66**		**10.672.129.386,09**		**48.514.971.963,21**	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.334.464.365,10		7.701.187.583,36		8.086.246.962,53		8.490.559.310,65		8.915.087.276,19		40.527.545.497,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*7.334.464.365,10*		*7.701.187.583,36*		*8.086.246.962,53*		*8.490.559.310,65*		*8.915.087.276,19*		*40.527.545.497,83*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	72,00	72,50		73,00		73,50		74,00		74,50		74,50		
	2 Program Pendaftaran Penduduk					691.638.797,10		726.220.736,95		762.531.773,80		800.658.362,49		840.691.280,61		3.821.740.950,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	(Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk)					*691.638.797,10*		*726.220.736,95*		*762.531.773,80*		*800.658.362,49*		*840.691.280,61*		*3.821.740.950,95*	
	1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Program Pencatatan Sipil					595.989.985,98		625.789.485,27		657.078.959,54		689.932.907,51		724.429.552,89		3.293.220.891,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	(Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil)					*595.989.985,98*		*625.789.485,27*		*657.078.959,54*		*689.932.907,51*		*724.429.552,89*		*3.293.220.891,19*	
	1 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					151.528.811,17		159.105.251,73		167.060.514,31		175.413.540,03		184.184.217,03		837.292.334,27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	(Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan)					*151.528.811,17*		*159.105.251,73*		*167.060.514,31*		*175.413.540,03*		*184.184.217,03*		*837.292.334,27*	
	1 Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan					6.365.297,90		6.683.562,79		7.017.740,93		7.368.627,98		7.737.059,37		35.172.288,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	(Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan)					*6.365.297,90*		*6.683.562,79*		*7.017.740,93*		*7.368.627,98*		*7.737.059,37*		*35.172.288,97*	
	1 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**9.563.501.174,43**		**10.041.676.233,16**		**10.543.760.044,82**		**11.070.948.047,05**		**11.624.495.449,41**		**52.844.380.948,87**	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.520.892.492,78		6.846.937.117,42		7.189.283.973,29		7.548.748.171,95		7.926.185.580,55		36.032.047.335,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*6.520.892.492,78*		*6.846.937.117,42*		*7.189.283.973,29*		*7.548.748.171,95*		*7.926.185.580,55*		*36.032.047.335,99*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	82,00	85,00		88,00		91,00		94,00		97,00		97,00		
	2 Program Penataan Desa					65.822.389,78		69.113.509,27		72.569.184,74		76.197.643,97		80.007.526,17		363.710.253,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(Meningkatnya Kualitas Penataan Desa)					*65.822.389,78*		*69.113.509,27*		*72.569.184,74*		*76.197.643,97*		*80.007.526,17*		*363.710.253,93*	
	1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa					83.559.317,94		87.737.283,84		92.124.148,03		96.730.355,43		101.566.873,20		461.717.978,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa)					*83.559.317,94*		*87.737.283,84*		*92.124.148,03*		*96.730.355,43*		*101.566.873,20*		*461.717.978,44*	
	1 Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4 Program Administrasi Pemerintahan Desa					1.165.777.668,97		1.224.066.552,42		1.285.269.880,04		1.349.533.374,05		1.417.010.042,75		6.441.657.518,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)					*1.165.777.668,97*		*1.224.066.552,42*		*1.285.269.880,04*		*1.349.533.374,05*		*1.417.010.042,75*		*6.441.657.518,23*	
	1 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.727.449.304,96		1.813.821.770,21		1.904.512.858,72		1.999.738.501,65		2.099.725.426,74		9.545.247.862,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan)					*1.727.449.304,96*		*1.813.821.770,21*		*1.904.512.858,72*		*1.999.738.501,65*		*2.099.725.426,74*		*9.545.247.862,28*	
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**7.187.476.819,95**		**7.546.850.660,95**		**7.924.193.194,01**		**8.320.402.853,69**		**8.736.422.996,39**		**39.715.346.524,99**	
1	Program Pengendalian Penduduk					661.899.650,00		694.994.632,50		729.744.364,13		766.231.582,33		804.543.161,45		3.657.413.390,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk)					*661.899.650,00*		*694.994.632,50*		*729.744.364,13*		*766.231.582,33*		*804.543.161,45*		*3.657.413.390,41*	
1	Angkat Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* /TFR)	Jiwa	60,03	61,00	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		66,00		
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* /ASFR 15-19)	Kelahiran per 1.000 WUS 15 - 19 Tahun	60,03	61,00	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		66,00		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					4.412.775.103,95		4.633.413.859,15		4.865.084.552,11		5.108.338.779,71		5.363.755.718,70		24.383.368.013,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB))					*4.412.775.103,95*		*4.633.413.859,15*		*4.865.084.552,11*		*5.108.338.779,71*		*5.363.755.718,70*		*24.383.368.013,62*	
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	Persen	1,49	1,52	1,55		1,58		1,61		1,64		1,67		1,67		
2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	1,49	1,52	1,55		1,58		1,61		1,64		1,67		1,67		
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					2.112.802.066,00		2.218.442.169,30		2.329.364.277,77		2.445.832.491,65		2.568.124.116,24		11.674.565.120,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS))					*2.112.802.066,00*		*2.218.442.169,30*		*2.329.364.277,77*		*2.445.832.491,65*		*2.568.124.116,24*		*11.674.565.120,96*	
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	52,50	70,00	80,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					**57.328.059.717,88**		**60.194.462.703,77**		**63.204.185.838,96**		**66.364.395.130,92**		**69.682.614.887,45**		**316.773.718.278,98**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.828.380.950,40		11.369.799.997,92		11.938.289.997,82		12.535.204.497,71		13.161.964.722,59		59.833.640.166,44	Dinas Perhubungan
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*10.828.380.950,40*		*11.369.799.997,92*		*11.938.289.997,82*		*12.535.204.497,71*		*13.161.964.722,59*		*59.833.640.166,44*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,50	70,00	70,50		71,00		71,50		72,00		72,50		72,50		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					43.686.934.189,96		45.871.280.899,46		48.164.844.944,43		50.573.087.191,66		53.101.741.551,24		241.397.888.776,75	Dinas Perhubungan
	(Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat)					*43.686.934.189,96*		*45.871.280.899,46*		*48.164.844.944,43*		*50.573.087.191,66*		*53.101.741.551,24*		*241.397.888.776,75*	
1	Konektivitas Darat	Persen	0,045	0,045	0,046		0,047		0,048		0,049		0,050		0,050		
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00		90,00		
3	Program Pengelolaan Pelayaran					2.812.744.577,52		2.953.381.806,39		3.101.050.896,71		3.256.103.441,55		3.418.908.613,62		15.542.189.335,79	Dinas Perhubungan
	(Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut)					*2.812.744.577,52*		*2.953.381.806,39*		*3.101.050.896,71*		*3.256.103.441,55*		*3.418.908.613,62*		*15.542.189.335,79*	
1	Konektivitas Laut	Persen	0,34	0,34	0,35		0,36		0,37		0,38		0,39		0,39		
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**					**9.894.139.843,15**		**10.388.846.835,30**		**10.908.289.177,07**		**11.453.703.635,93**		**12.026.388.817,72**		**54.671.368.309,17**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.891.641.214,89		7.236.223.275,63		7.598.034.439,42		7.977.936.161,39		8.376.832.969,46		38.080.668.060,79	Dinas Komunikasi dan Informatika
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*6.891.641.214,89*		*7.236.223.275,63*		*7.598.034.439,42*		*7.977.936.161,39*		*8.376.832.969,46*		*38.080.668.060,79*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,13	63,30	63,89		64,48		65,07		65,66		66,25		66,25		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					199.768.312,52		209.756.728,15		220.244.564,55		231.256.792,78		242.819.632,42		1.103.846.030,42	Dinas Komunikasi dan Informatika
	(Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah)					*199.768.312,52*		*209.756.728,15*		*220.244.564,55*		*231.256.792,78*		*242.819.632,42*		*1.103.846.030,42*	
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	75,88	80,90	90,00		99,10		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					2.802.730.315,74		2.942.866.831,52		3.090.010.173,10		3.244.510.681,76		3.406.736.215,84		15.486.854.217,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
	(Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika)					*2.802.730.315,74*		*2.942.866.831,52*		*3.090.010.173,10*		*3.244.510.681,76*		*3.406.736.215,84*		*15.486.854.217,96*	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,34	2,60	3,00		3,40		3,80		4,20		4,60		4,60		
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**					**7.298.763.991,72**		**7.663.702.191,31**		**8.046.887.300,87**		**8.449.231.665,91**		**8.871.693.249,21**		**40.330.278.399,02**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.635.996.810,32		6.967.796.650,83		7.316.186.483,37		7.681.995.807,54		8.066.095.597,92		36.668.071.349,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*6.635.996.810,32*		*6.967.796.650,83*		*7.316.186.483,37*		*7.681.995.807,54*		*8.066.095.597,92*		*36.668.071.349,98*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,50	72,00	72,50		73,00		73,50		74,00		74,50		74,50		
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					25.299.484,18		26.564.458,39		27.892.681,31		29.287.315,37		30.751.681,14		139.795.620,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi)					*25.299.484,18*		*26.564.458,39*		*27.892.681,31*		*29.287.315,37*		*30.751.681,14*		*139.795.620,39*	
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					44.921.963,58		47.168.061,76		49.526.464,85		52.002.788,09		54.602.927,50		248.222.205,78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi)					*44.921.963,58*		*47.168.061,76*		*49.526.464,85*		*52.002.788,09*		*54.602.927,50*		*248.222.205,78*	
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					31.251.329,28		32.813.895,75		34.454.590,53		36.177.320,06		37.986.186,06		172.683.321,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian)					*31.251.329,28*		*32.813.895,75*		*34.454.590,53*		*36.177.320,06*		*37.986.186,06*		*172.683.321,68*	
1	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					46.824.951,71		49.166.199,30		51.624.509,26		54.205.734,73		56.916.021,46		258.737.416,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Produktivitas Koperasi)					*46.824.951,71*		*49.166.199,30*		*51.624.509,26*		*54.205.734,73*		*56.916.021,46*		*258.737.416,46*	
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					402.495.391,68		422.620.161,26		443.751.169,33		465.938.727,79		489.235.664,18		2.224.041.114,24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri)					*402.495.391,68*		*422.620.161,26*		*443.751.169,33*		*465.938.727,79*		*489.235.664,18*		*2.224.041.114,24*	
1	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	Program Pengembangan UMKM					111.974.060,97		117.572.764,02		123.451.402,22		129.623.972,33		136.105.170,95		618.727.370,49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Daya Saing UMKM)					*111.974.060,97*		*117.572.764,02*		*123.451.402,22*		*129.623.972,33*		*136.105.170,95*		*618.727.370,49*	
1	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					**7.659.840.285,84**		**8.042.832.300,13**		**8.444.973.915,14**		**8.867.222.610,89**		**9.310.583.741,44**		**42.325.452.853,44**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.880.616.036,92		7.224.646.838,77		7.585.879.180,70		7.965.173.139,74		8.363.431.796,73		38.019.746.992,86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*6.880.616.036,92*		*7.224.646.838,77*		*7.585.879.180,70*		*7.965.173.139,74*		*8.363.431.796,73*		*38.019.746.992,86*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,86	80,67	80,70		80,73		80,76		80,79		80,82		80,82		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					42.580.922,60		44.709.968,73		46.945.467,17		49.292.740,52		51.757.377,55		235.286.476,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi)					*42.580.922,60*		*44.709.968,73*		*46.945.467,17*		*49.292.740,52*		*51.757.377,55*		*235.286.476,57*	
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	15,000	8,015	8,015		8,015		8,015		8,015		8,015		8,015		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Program Promosi Penanaman Modal					72.023.706,40		75.624.891,72		79.406.136,31		83.376.443,12		87.545.265,28		397.976.442,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal)					*72.023.706,40*		*75.624.891,72*		*79.406.136,31*		*83.376.443,12*		*87.545.265,28*		*397.976.442,83*	
	1 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	2	1	1		1		1		1		1		1		
4	Program Pelayanan Penanaman Modal					430.980.501,63		452.529.526,71		475.156.003,05		498.913.803,20		523.859.493,36		2.381.439.327,95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)					*430.980.501,63*		*452.529.526,71*		*475.156.003,05*		*498.913.803,20*		*523.859.493,36*		*2.381.439.327,95*	
	1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	96,02	88,00	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					119.154.157,65		125.111.865,53		131.367.458,81		137.935.831,75		144.832.623,34		658.401.937,08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal)					*119.154.157,65*		*125.111.865,53*		*131.367.458,81*		*137.935.831,75*		*144.832.623,34*		*658.401.937,08*	
	1 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	48,00	55,00	56,00		57,00		58,00		59,00		60,00		60,00		
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					114.484.960,64		120.209.208,67		126.219.669,10		132.530.652,56		139.157.185,18		632.601.676,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	(Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal)					*114.484.960,64*		*120.209.208,67*		*126.219.669,10*		*132.530.652,56*		*139.157.185,18*		*632.601.676,15*	
	1 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	11.308	8.000	8.500		9.000		9.500		10.000		10.500		10.500		
19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**					**7.928.430.169,88**		**8.324.851.678,38**		**8.741.094.262,29**		**9.178.148.975,41**		**9.637.056.424,17**		**43.809.581.510,13**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.788.742.365,75		6.078.179.484,04		6.382.088.458,24		6.701.192.881,15		7.036.252.525,21		31.986.455.714,39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.788.742.365,75*		*6.078.179.484,04*		*6.382.088.458,24*		*6.701.192.881,15*		*7.036.252.525,21*		*31.986.455.714,39*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	78,05	78,10		78,15		78,20		78,25		78,30		78,30		
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					720.883.717,08		756.927.902,94		794.774.298,08		834.513.012,99		876.238.663,64		3.983.337.594,73	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan)					*720.883.717,08*		*756.927.902,94*		*794.774.298,08*		*834.513.012,99*		*876.238.663,64*		*3.983.337.594,73*	
	1 Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					1.042.341.700,56		1.094.458.785,59		1.149.181.724,87		1.206.640.811,11		1.266.972.851,66		5.759.595.873,79	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga)					*1.042.341.700,56*		*1.094.458.785,59*		*1.149.181.724,87*		*1.206.640.811,11*		*1.266.972.851,66*		*5.759.595.873,79*	
	1 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas/Pelatda	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					376.462.386,49		395.285.505,81		415.049.781,10		435.802.270,16		457.592.383,66		2.080.192.327,22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Kualitas Kepramukaan)					*376.462.386,49*		*395.285.505,81*		*415.049.781,10*		*435.802.270,16*		*457.592.383,66*		*2.080.192.327,22*	
	1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					**95.133.466,31**		**99.890.139,63**		**104.884.646,61**		**110.128.878,94**		**115.635.322,88**		**525.672.454,37**	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					95.133.466,31		99.890.139,63		104.884.646,61		110.128.878,94		115.635.322,88		525.672.454,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
	(Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN))					*95.133.466,31*		*99.890.139,63*		*104.884.646,61*		*110.128.878,94*		*115.635.322,88*		*525.672.454,37*	
	1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,29	1,80	2,60		3,40		4,20		5,00		5,80		5,80		
21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					**292.941.027,76**		**307.588.079,15**		**322.967.483,11**		**339.115.857,26**		**356.071.650,13**			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					292.941.027,76		307.588.079,15		322.967.483,11		339.115.857,26		356.071.650,13		1.618.684.097,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
	(Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah)					*292.941.027,76*		*307.588.079,15*		*322.967.483,11*		*339.115.857,26*		*356.071.650,13*		*1.618.684.097,41*	
	1 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					**1.482.248.993,23**		**1.556.361.442,90**		**1.634.179.515,04**		**1.715.888.490,80**		**1.801.682.915,34**		**8.190.361.357,31**	
1	Program Pengembangan Kebudayaan					650.757.676,04		683.295.559,84		717.460.337,83		753.333.354,73		791.000.022,46		3.595.846.950,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	(Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan)					*650.757.676,04*		*683.295.559,84*		*717.460.337,83*		*753.333.354,73*		*791.000.022,46*		*3.595.846.950,90*	
	1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					200.553.652,22		210.581.334,84		221.110.401,58		232.165.921,66		243.774.217,74		1.108.185.528,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	(Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional)					*200.553.652,22*		*210.581.334,84*		*221.110.401,58*		*232.165.921,66*		*243.774.217,74*		*1.108.185.528,04*	
1	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pembinaan Sejarah					230.021.287,81		241.522.352,20		253.598.469,81		266.278.393,30		279.592.312,97		1.271.012.816,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	(Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah)					*230.021.287,81*		*241.522.352,20*		*253.598.469,81*		*266.278.393,30*		*279.592.312,97*		*1.271.012.816,09*	
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					400.916.377,16		420.962.196,02		442.010.305,82		464.110.821,11		487.316.362,17		2.215.316.062,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	(Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan)					*400.916.377,16*		*420.962.196,02*		*442.010.305,82*		*464.110.821,11*		*487.316.362,17*		*2.215.316.062,28*	
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					**6.749.047.476,23**		**7.086.499.850,04**		**7.440.824.842,54**		**7.812.866.084,67**		**8.203.509.388,90**		**37.292.747.642,38**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.112.126.663,02		5.367.732.996,17		5.636.119.645,98		5.917.925.628,28		6.213.821.909,69		28.247.726.843,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.112.126.663,02*		*5.367.732.996,17*		*5.636.119.645,98*		*5.917.925.628,28*		*6.213.821.909,69*		*28.247.726.843,14*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,00	71,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		
2	Program Pembinaan Perpustakaan					1.616.920.813,21		1.697.766.853,87		1.782.655.196,56		1.871.787.956,39		1.965.377.354,21		8.934.508.174,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	(Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan)					*1.616.920.813,21*		*1.697.766.853,87*		*1.782.655.196,56*		*1.871.787.956,39*		*1.965.377.354,21*		*8.934.508.174,24*	
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00		110.512.625,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	(Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno)					*20.000.000,00*		*21.000.000,00*		*22.050.000,00*		*23.152.500,00*		*24.310.125,00*		*110.512.625,00*	
1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	0,00	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					**326.302.684,70**		**342.617.818,92**		**359.748.709,87**		**377.736.145,36**		**396.622.952,63**		**1.803.028.311,48**	
1	Program Pengelolaan Arsip					297.053.907,37		311.906.602,73		327.501.932,87		343.877.029,51		361.070.880,99		1.641.410.353,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	(Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis)					*297.053.907,37*		*311.906.602,73*		*327.501.932,87*		*343.877.029,51*		*361.070.880,99*		*1.641.410.353,47*	
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	76,65	77,00	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					29.248.777,33		30.711.216,19		32.246.777,00		33.859.115,85		35.552.071,64		161.617.958,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	(Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK)					*29.248.777,33*		*30.711.216,19*		*32.246.777,00*		*33.859.115,85*		*35.552.071,64*		*161.617.958,01*	
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					**6.640.918.682,85**		**6.972.964.617,00**		**7.321.612.847,84**		**7.687.693.490,24**		**8.072.078.164,74**		**36.695.267.802,67**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.223.988.109,19		5.485.187.514,65		5.759.446.890,38		6.047.419.234,90		6.349.790.196,64		28.865.831.945,76	Dinas Perikanan
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*5.223.988.109,19*		*5.485.187.514,65*		*5.759.446.890,38*		*6.047.419.234,90*		*6.349.790.196,64*		*28.865.831.945,76*	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	70,50	71,00		71,50		72,00		72,50		73,00		73,00		
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					521.505.862,35		552.581.155,47		585.210.213,24		619.470.723,91		655.444.260,10		2.934.212.215,07	Dinas Perikanan
	(Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap)					*521.505.862,35*		*552.581.155,47*		*585.210.213,24*		*619.470.723,91*		*655.444.260,10*		*2.934.212.215,07*	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	27.371,60	27.770,00	27.771,00		27.772,00		27.773,00		27.774,00		27.775,00		27.775,00		
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					521.946.536,90		553.043.863,75		585.696.056,94		619.980.859,78		655.979.902,77		2.936.647.220,14	Dinas Perikanan
	(Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya)					*521.946.536,90*		*553.043.863,75*		*585.696.056,94*		*619.980.859,78*		*655.979.902,77*		*2.936.647.220,14*	
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.620,85	6.635,00	6.650,00		6.665,00		6.680,00		6.695,00		6.710,00		6.710,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.000.000.000,00	Dinas Perikanan
	(Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Peraturan yang Berlaku)					*200.000.000,00*		*200.000.000,00*		*200.000.000,00*		*200.000.000,00*		*200.000.000,00*		*1.000.000.000,00*	
	1 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan (Nelayan, Pembudidaya) terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	6.620,85	6.635,00	6.650,00		6.665,00		6.680,00		6.695,00		6.710,00		6.710,00		
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					173.478.174,41		182.152.083,13		191.259.687,28		200.822.671,65		210.863.805,23		958.576.421,70	Dinas Perikanan
	(Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat)					*173.478.174,41*		*182.152.083,13*		*191.259.687,28*		*200.822.671,65*		*210.863.805,23*		*958.576.421,70*	
	1 Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/Tahun	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					**1.464.377.449,91**		**1.537.596.322,41**		**1.614.476.138,53**		**1.695.199.945,46**		**1.779.959.942,74**		**8.091.609.799,05**	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					601.646.289,80		631.728.604,29		663.315.034,51		696.480.786,23		731.304.825,55		3.324.475.540,38	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata)					*601.646.289,80*		*631.728.604,29*		*663.315.034,51*		*696.480.786,23*		*731.304.825,55*		*3.324.475.540,38*	
	1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pemasaran Pariwisata					261.892.970,71		274.987.619,25		288.737.000,21		303.173.850,22		318.332.542,73		1.447.123.983,12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata)					*261.892.970,71*		*274.987.619,25*		*288.737.000,21*		*303.173.850,22*		*318.332.542,73*		*1.447.123.983,12*	
	1 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	100.000	105.000	110.000		115.000		120.000		125.000		130.000		130.000		
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					52.225.000,00		54.836.250,00		57.578.062,50		60.456.965,63		63.479.813,91		288.576.092,04	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif)					*52.225.000,00*		*54.836.250,00*		*57.578.062,50*		*60.456.965,63*		*63.479.813,91*		*288.576.092,04*	
	1 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					548.613.189,40		576.043.848,87		604.846.041,31		635.088.343,38		666.842.760,55		3.031.434.183,51	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	(Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)					*548.613.189,40*		*576.043.848,87*		*604.846.041,31*		*635.088.343,38*		*666.842.760,55*		*3.031.434.183,51*	
	1 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					**12.142.196.126,75**		**12.749.305.933,07**		**13.386.771.229,73**		**14.056.109.791,23**		**14.758.915.280,78**		**67.093.298.361,55**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.568.619.619,26		6.897.050.600,22		7.241.903.130,23		7.603.998.286,75		7.984.198.201,08		36.295.769.837,54	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*6.568.619.619,26*		*6.897.050.600,22*		*7.241.903.130,23*		*7.603.998.286,75*		*7.984.198.201,08*		*36.295.769.837,54*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,10	73,40	73,50		73,60		73,70		73,80		73,90		73,90		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					1.855.620.665,53		1.948.401.698,80		2.045.821.783,74		2.148.112.872,93		2.255.518.516,58		10.253.475.537,58	
	(Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian)					1.051.098.876,30		1.103.653.820,11		1.158.836.511,12		1.216.778.336,67		1.277.617.253,51		5.807.984.797,71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2,86	3,00	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50		3,50		
	2 Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	2,86	3,00	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50		3,50		
	(Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Perkebunan dan Peternakan)					804.521.789,23		844.747.878,69		886.985.272,62		931.334.536,26		977.901.263,07		4.445.490.739,87	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1 Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	2,26	2,55	2,78		3,01		3,24		3,47		3,70		3,70		
	2 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	18.236,00	18.327,00	18.694,00		19.061,00		19.428,00		19.795,00		20.162,00		20.162,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					1.694.492.832,56		1.779.217.474,18		1.868.178.347,90		1.961.587.265,29		2.059.666.628,55		9.363.142.548,48	
	(Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian)					1.183.694.661,62		1.242.879.394,70		1.305.023.364,44		1.370.274.532,66		1.438.788.259,29		6.540.660.212,71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Perkebunan dan Peternakan)					510.798.170,94		536.338.079,48		563.154.983,46		591.312.732,63		620.878.369,26		2.822.482.335,77	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1 Daya Dukung Prasarana Perkebunan Terhadap Produktivitas Kebun	Persen	0,20	0,25	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		
	2 Daya Dukung Prasarana Peternakan Terhadap Produktivitas Ternak	Persen	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					212.883.799,25		223.527.989,21		234.704.388,67		246.439.608,11		258.761.588,51		1.176.317.373,75	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	(Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)					*212.883.799,25*		*223.527.989,21*		*234.704.388,67*		*246.439.608,11*		*258.761.588,51*		*1.176.317.373,75*	
	1 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	98,96	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	98,96	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					704.477.923,75		739.701.819,94		776.686.910,93		815.521.256,48		856.297.319,30		3.892.685.230,40	
	(Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian)					609.460.622,55		639.933.653,68		671.930.336,36		705.526.853,18		740.803.195,84		3.367.654.661,61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan)					95.017.301,20		99.768.166,26		104.756.574,57		109.994.403,30		115.494.123,46		525.030.568,79	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1 Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	Persen	76,00	77,00	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		
	2 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perkebunan	Persen	76,00	77,00	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		
6	Program Perizinan Usaha Pertanian					100.305.382,22		105.320.651,33		110.586.683,90		116.116.018,09		121.921.819,00		554.250.554,54	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	(Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian)					*100.305.382,22*		*105.320.651,33*		*110.586.683,90*		*116.116.018,09*		*121.921.819,00*		*554.250.554,54*	
	1 Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persen	70,00	71,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		
7	Program Penyuluhan Pertanian					1.005.795.904,18		1.056.085.699,39		1.108.889.984,36		1.164.334.483,58		1.222.551.207,76		5.557.657.279,26	
	(Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian)					947.220.942,68		994.581.989,81		1.044.311.089,30		1.096.526.643,77		1.151.352.975,96		5.233.993.641,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1 Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian)					58.574.961,50		61.503.709,58		64.578.895,06		67.807.839,81		71.198.231,80		323.663.637,74	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1 Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	1,96	2,07	2,12		2,17		2,22		2,27		2,32		2,32		
30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					**488.627.345,50**		**513.058.712,76**		**538.711.648,42**		**565.647.230,83**		**593.929.592,38**		**2.699.974.529,89**	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					25.276.152,14		26.539.959,74		27.866.957,73		29.260.305,62		30.723.320,90		139.666.696,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha)					*25.276.152,14*		*26.539.959,74*		*27.866.957,73*		*29.260.305,62*		*30.723.320,90*		*139.666.696,13*	
	1 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					41.779.724,25		43.868.710,46		46.062.145,99		48.365.253,29		50.783.515,95		230.859.349,94	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi)					41.779.724,25		43.868.710,46		46.062.145,99		48.365.253,29		50.783.515,95		230.859.349,94	
	1 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					242.239.387,14		254.351.356,50		267.068.924,33		280.422.370,54		294.443.489,07		1.338.525.527,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)					*242.239.387,14*		*254.351.356,50*		*267.068.924,33*		*280.422.370,54*		*294.443.489,07*		*1.338.525.527,58*	
	1 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pengembangan Ekspor					17.852.381,97		18.745.001,06		19.682.251,12		20.666.363,67		21.699.681,86		98.645.679,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor)					*17.852.381,97*		*18.745.001,06*		*19.682.251,12*		*20.666.363,67*		*21.699.681,86*		*98.645.679,68*	
	1 Nilai Ekspor Barang	Rupiah	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					161.479.700,00		169.553.685,00		178.031.369,25		186.932.937,71		196.279.584,60		892.277.276,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk)					*161.479.700,00*		*169.553.685,00*		*178.031.369,25*		*186.932.937,71*		*196.279.584,60*		*892.277.276,56*	
	1 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					**264.686.073,39**		**277.920.377,06**		**291.816.395,91**		**306.407.215,70**		**321.727.576,49**		**1.462.557.638,55**	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					192.305.741,26		201.921.028,33		212.017.079,74		222.617.933,73		233.748.830,42		1.062.610.613,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri)					*192.305.741,26*		*201.921.028,33*		*212.017.079,74*		*222.617.933,73*		*233.748.830,42*		*1.062.610.613,48*	
	1 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri					32.057.475,43		33.660.349,20		35.343.366,66		37.110.534,99		38.966.061,74		177.137.788,02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian)					*32.057.475,43*		*33.660.349,20*		*35.343.366,66*		*37.110.534,99*		*38.966.061,74*		*177.137.788,02*	
	1 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					40.322.856,70		42.338.999,53		44.455.949,51		46.678.746,98		49.012.684,33		222.809.237,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	(Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri)					*40.322.856,70*		*42.338.999,53*		*44.455.949,51*		*46.678.746,98*		*49.012.684,33*		*222.809.237,05*	
	1 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					**5.137.701.212,18**		**5.394.586.272,78**		**5.664.315.586,43**		**5.947.531.365,75**		**6.244.907.934,03**		**28.389.042.371,17**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.738.703.269,76		4.975.638.433,24		5.224.420.354,91		5.485.641.372,65		5.759.923.441,28		26.184.326.871,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*4.738.703.269,76*		*4.975.638.433,24*		*5.224.420.354,91*		*5.485.641.372,65*		*5.759.923.441,28*		*26.184.326.871,84*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	75,80	76,50		77,20		77,90		78,60		79,30		79,30		
2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					104.450.000,00		109.672.500,00		115.156.125,00		120.913.931,25		126.959.627,81		577.152.184,06	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi)					*104.450.000,00*		*109.672.500,00*		*115.156.125,00*		*120.913.931,25*		*126.959.627,81*		*577.152.184,06*	
	1 Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					144.547.942,42		151.775.339,54		159.364.106,52		167.332.311,85		175.698.927,44		798.718.627,77	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi)					*144.547.942,42*		*151.775.339,54*		*159.364.106,52*		*167.332.311,85*		*175.698.927,44*		*798.718.627,77*	
	1 Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.937,50		828.844.687,50	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	(Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi)					*150.000.000,00*		*157.500.000,00*		*165.375.000,00*		*173.643.750,00*		*182.325.937,50*		*828.844.687,50*	
	1 Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1 Sekretariat Daerah						**67.087.083.635,76**		**70.441.437.817,54**		**73.963.509.708,43**		**77.661.685.193,84**		**81.544.769.453,54**		**370.698.485.809,11**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						52.406.344.651,32		55.026.661.883,88		57.777.994.978,08		60.666.894.726,98		63.700.239.463,33		289.578.135.703,59	Sekretariat Daerah
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						*52.406.344.651,32*		*55.026.661.883,88*		*57.777.994.978,08*		*60.666.894.726,98*		*63.700.239.463,33*		*289.578.135.703,59*	
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	78,30	78,50	79,80		81,10		82,40		83,70		85,00		81,10		
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						12.886.620.220,04		13.530.951.231,04		14.207.498.792,60		14.917.873.732,23		15.663.767.418,84		71.206.711.394,75	Sekretariat Daerah
(Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)						*12.886.620.220,04*		*13.530.951.231,04*		*14.207.498.792,60*		*14.917.873.732,23*		*15.663.767.418,84*		*71.206.711.394,75*	
1 Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3 Program Perekonomian dan Pembangunan						1.794.118.764,40		1.883.824.702,62		1.978.015.937,75		2.076.916.734,63		2.180.762.571,37		9.913.638.710,77	Sekretariat Daerah
(Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan)						*1.794.118.764,40*		*1.883.824.702,62*		*1.978.015.937,75*		*2.076.916.734,63*		*2.180.762.571,37*		*9.913.638.710,77*	
1 Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Sekretariat DPRD						**67.354.162.823,67**		**70.721.870.964,85**		**74.257.964.513,10**		**77.970.862.738,75**		**81.869.405.875,69**		**372.174.266.916,06**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						44.147.364.368,69		46.354.732.587,12		48.672.469.216,48		51.106.092.677,30		53.661.397.311,17		243.942.056.160,76	Sekretariat DPRD
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						*44.147.364.368,69*		*46.354.732.587,12*		*48.672.469.216,48*		*51.106.092.677,30*		*53.661.397.311,17*		*243.942.056.160,76*	
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	69,00	70,00	71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		72,00		
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						23.206.798.454,98		24.367.138.377,73		25.585.495.296,62		26.864.770.061,45		28.208.008.564,52		128.232.210.755,30	Sekretariat DPRD
(Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan)						*23.206.798.454,98*		*24.367.138.377,73*		*25.585.495.296,62*		*26.864.770.061,45*		*28.208.008.564,52*		*128.232.210.755,30*	
1 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1 Perencanaan						**13.005.509.745,90**		**13.655.785.233,19**		**14.338.574.494,85**		**15.055.503.219,60**		**15.808.278.380,58**		**71.863.651.074,12**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						9.320.037.585,51		9.786.039.464,78		10.275.341.438,02		10.789.108.509,92		11.328.563.935,42		51.499.090.933,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						*9.320.037.585,51*		*9.786.039.464,78*		*10.275.341.438,02*		*10.789.108.509,92*		*11.328.563.935,42*		*51.499.090.933,65*	
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	78,05	80,00	80,05		80,10		80,15		80,20		80,25		80,10		
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.675.578.337,19		1.759.357.254,05		1.847.325.116,75		1.939.691.372,59		2.036.675.941,22		9.258.628.021,80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah)						*1.675.578.337,19*		*1.759.357.254,05*		*1.847.325.116,75*		*1.939.691.372,59*		*2.036.675.941,22*		*9.258.628.021,80*	
1 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						2.009.893.823,20		2.110.388.514,36		2.215.907.940,08		2.326.703.337,09		2.443.038.503,94		11.105.932.118,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sektoral)						*2.009.893.823,20*		*2.110.388.514,36*		*2.215.907.940,08*		*2.326.703.337,09*		*2.443.038.503,94*		*11.105.932.118,67*	
1 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome				Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2				**Keuangan**					**316.726.580.467,37**		**332.562.909.490,74**		**349.191.054.965,27**		**366.650.607.713,54**		**384.983.138.099,21**		**1.750.114.290.736,13**	
		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					23.649.924.160,79		24.832.420.368,83		26.074.041.387,26		27.377.743.456,63		28.746.630.629,45		130.680.760.002,96	
				(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					10.495.862.976,82		11.020.656.125,66		11.571.688.931,94		12.150.273.378,54		12.757.787.047,46		57.996.268.460,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	80,15	82,50		84,85		87,20		89,55		91,90		91,90		
				(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					13.154.061.183,97		13.811.764.243,17		14.502.352.455,32		15.227.470.078,09		15.988.843.581,99		72.684.491.542,54	Badan Pendapatan Daerah
			1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,00	77,00	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		
		2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah					286.572.351.669,09		300.900.969.252,54		315.946.017.715,17		331.743.318.600,93		348.330.484.530,98		1.583.493.141.768,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				(Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah)					*286.572.351.669,09*		*300.900.969.252,54*		*315.946.017.715,17*		*331.743.318.600,93*		*348.330.484.530,98*		*1.583.493.141.768,71*	
			1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			4	Persentase Penurunan SILPA	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.078.096.508,37		2.182.001.333,79		2.291.101.400,48		2.405.656.470,50		2.525.939.294,03		11.482.795.007,17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				(Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah)					*2.078.096.508,37*		*2.182.001.333,79*		*2.291.101.400,48*		*2.405.656.470,50*		*2.525.939.294,03*		*11.482.795.007,17*	
			1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	73,00	75,00	77,00		79,00		81,00		83,00		85,00		85,00		
		4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.426.208.129,12		4.647.518.535,58		4.879.894.462,36		5.123.889.185,48		5.380.083.644,75		24.457.593.957,29	Badan Pendapatan Daerah
				(Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah)					*4.426.208.129,12*		*4.647.518.535,58*		*4.879.894.462,36*		*5.123.889.185,48*		*5.380.083.644,75*		*24.457.593.957,29*	
			1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	20,00	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
			2	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			3	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3				**Kepegawaian**					**11.218.353.012,95**		**11.779.270.663,60**		**12.368.234.196,78**		**12.986.645.906,62**		**13.635.978.201,95**		**61.988.481.981,90**	
		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.143.121.514,18		7.500.277.589,89		7.875.291.469,39		8.269.056.042,86		8.682.508.845,00		39.470.255.461,32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*7.143.121.514,18*		*7.500.277.589,89*		*7.875.291.469,39*		*8.269.056.042,86*		*8.682.508.845,00*		*39.470.255.461,32*	
			1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,55	77,00	77,05		77,10		77,15		77,20		77,25		77,25		
		2		Program Kepegawaian Daerah					4.075.231.498,77		4.278.993.073,71		4.492.942.727,39		4.717.589.863,76		4.953.469.356,95		22.518.226.520,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				(Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Daerah)					*4.075.231.498,77*		*4.278.993.073,71*		*4.492.942.727,39*		*4.717.589.863,76*		*4.953.469.356,95*		*22.518.226.520,58*	
			1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			3	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome			Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4			**Pendidikan dan Pelatihan**					**5.374.226.060,82**		**5.642.937.363,86**		**5.925.084.232,05**		**6.221.338.443,65**		**6.532.405.365,84**		**29.695.991.466,22**	
	1		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					5.374.226.060,82		5.642.937.363,86		5.925.084.232,05		6.221.338.443,65		6.532.405.365,84		29.695.991.466,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			(Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia)					*5.374.226.060,82*		*5.642.937.363,86*		*5.925.084.232,05*		*6.221.338.443,65*		*6.532.405.365,84*		*29.695.991.466,22*	
		1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	5		**Penelitian dan Pengembangan**					**4.876.390.502,54**		**5.120.210.027,67**		**5.376.220.529,05**		**5.645.031.555,51**		**5.927.283.133,28**		**26.945.135.748,05**	
	1		Program Riset dan Inovasi Daerah					4.876.390.502,54		5.120.210.027,67		5.376.220.529,05		5.645.031.555,51		5.927.283.133,28		26.945.135.748,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			(Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan)					*4.876.390.502,54*		*5.120.210.027,67*		*5.376.220.529,05*		*5.645.031.555,51*		*5.927.283.133,28*		*26.945.135.748,05*	
		1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	-	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	75,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	75,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	75,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																
	1		**Inspektorat Daerah**					**12.659.583.471,50**		**13.292.562.645,07**		**13.957.190.777,33**		**14.655.050.316,19**		**15.387.802.832,00**		**69.952.190.042,09**	
	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.475.959.018,24		10.999.756.969,15		11.549.744.817,61		12.127.232.058,49		12.733.593.661,41		57.886.286.524,90	Inspektorat Daerah
			(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*10.475.959.018,24*		*10.999.756.969,15*		*11.549.744.817,61*		*12.127.232.058,49*		*12.733.593.661,41*		*57.886.286.524,90*	
		1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,50	78,75	79,00		79,25		79,50		79,75		80,00		80,00		
	2		Program Penyelenggaraan Pengawasan					1.736.405.379,61		1.823.225.648,59		1.914.386.931,02		2.010.106.277,57		2.110.611.591,45		9.594.735.828,24	Inspektorat Daerah
			(Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Keuangan)					*1.736.405.379,61*		*1.823.225.648,59*		*1.914.386.931,02*		*2.010.106.277,57*		*2.110.611.591,45*		*9.594.735.828,24*	
		1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	70,00	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
		2	Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Provinsi Tahun Anggaran N-1	Persen	96,00	96,00	96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		
		3	Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran N-1	Persen	92,00	92,00	95,00		98,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					447.219.073,65		469.580.027,33		493.059.028,70		517.711.980,13		543.597.579,14		2.471.167.688,95	Inspektorat Daerah
			(Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi)					*447.219.073,65*		*469.580.027,33*		*493.059.028,70*		*517.711.980,13*		*543.597.579,14*		*2.471.167.688,95*	
		1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,02	3,10	3,20		3,30		3,40		3,50		3,60		3,60		
		2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,02	3,10	3,20		3,30		3,40		3,50		3,60		3,60		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
1 Kecamatan						**35.946.327.549,80**		**37.743.643.927,26**		**39.630.826.123,65**		**41.612.367.429,82**		**43.692.985.801,32**		**198.626.150.831,85**	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						30.421.276.049,21		31.942.339.851,65		33.539.456.844,24		35.216.429.686,47		36.977.251.170,79		168.096.753.602,36	
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						4.777.354.871,04		5.016.222.614,59		5.267.033.745,32		5.530.385.432,59		5.806.904.704,22		26.397.901.367,76	Kantor Camat Sungai Raya
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	71,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.305.065.833,16		3.470.319.124,81		3.643.835.081,05		3.826.026.835,11		4.017.328.176,86		18.262.575.050,99	Kantor Camat Kuala Mandor B
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.608.046.079,98		3.788.448.383,98		3.977.870.803,18		4.176.764.343,34		4.385.602.560,50		19.936.732.170,98	Kantor Camat Sungai Ambawang
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,37	72,00	73,00		74,00		75,00		76,00		77,00		77,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.183.974.151,25		3.343.172.858,81		3.510.331.501,75		3.685.848.076,84		3.870.140.480,68		17.593.467.069,33	Kantor Camat Terentang
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,75	63,00	64,00		65,00		66,00		67,00		68,00		68,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.082.873.439,46		3.237.017.111,44		3.398.867.967,01		3.568.811.365,36		3.747.251.933,63		17.034.821.816,90	Kantor Camat Batu Ampar
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,00	72,00	73,00		74,00		75,00		76,00		77,00		77,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.289.645.240,42		3.454.127.502,44		3.626.833.877,56		3.808.175.571,44		3.998.584.350,02		18.177.366.541,88	Kantor Camat Kubu
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	69,00	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		74,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						2.926.309.482,35		3.072.624.956,46		3.226.256.204,29		3.387.569.014,50		3.556.947.465,23		16.169.707.122,83	Kantor Camat Rasau Jaya
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,00	72,00	73,00		74,00		75,00		76,00		77,00		77,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						2.711.078.853,50		2.846.632.796,17		2.988.964.435,98		3.138.412.657,78		3.295.333.290,67		14.980.422.034,10	Kantor Camat Teluk Pakedai
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,80	71,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)						3.536.928.098,05		3.713.774.502,95		3.899.463.228,10		4.094.436.389,51		4.299.158.208,98		19.543.760.427,59	Kantor Camat Sungai Kakap
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	65,55	65,70	65,75		65,80		65,85		65,90		65,95		65,95		
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						979.190.628,93		1.028.150.160,36		1.079.557.668,39		1.133.535.551,81		1.190.212.329,39		5.410.646.338,88	
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						85.801.212,90		90.091.273,54		94.595.837,22		99.325.629,08		104.291.910,53		474.105.863,27	Kantor Camat Sungai Raya
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,25	86,00	87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		91,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						79.314.852,23		83.280.594,84		87.444.624,58		91.816.855,81		96.407.698,60		438.264.626,06	Kantor Camat Kuala Mandor B
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,00	84,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						100.807.104,66		105.847.459,89		111.139.832,89		116.696.824,53		122.531.665,76		557.022.887,73	Kantor Camat Sungai Ambawang
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92,00	92,39	93,00		93,61		94,22		94,83		95,44		95,44		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						75.731.384,76		79.517.954,00		83.493.851,70		87.668.544,29		92.051.971,50		418.463.706,25	Kantor Camat Terentang
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,00	84,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						66.065.360,33		69.368.628,34		72.837.059,76		76.478.912,75		80.302.858,39		365.052.819,57	Kantor Camat Batu Ampar
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,20	88,00	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						227.820.649,56		239.211.682,04		251.172.266,14		263.730.879,45		276.917.423,42		1.258.852.900,61	Kantor Camat Kubu
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,14	89,00	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						93.764.362,87		98.452.581,01		103.375.210,06		108.543.970,56		113.971.169,09		518.107.293,59	Kantor Camat Rasau Jaya
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,00	87,00	90,00		93,00		96,00		99,00		100,00		100,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						170.693.696,17		179.228.380,98		188.189.800,03		197.599.290,03		207.479.254,53		943.190.421,74	Kantor Camat Teluk Pakedai
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,40	84,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan)						79.192.005,45		83.151.605,72		87.309.186,01		91.674.645,31		96.258.377,57		437.585.820,06	Kantor Camat Sungai Kakap
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,12	87,74	88,45		89,16		89,87		90,58		91,29		91,29		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.699.652.893,01		1.784.635.537,66		1.873.867.314,55		1.967.560.680,27		2.065.938.714,29		9.391.655.139,78	
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					299.022.919,56		313.974.065,54		329.672.768,81		346.156.407,26		363.464.227,62		1.652.290.388,79	Kantor Camat Sungai Raya
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					130.739.794,65		137.276.784,38		144.140.623,60		151.347.654,78		158.915.037,52		722.419.894,93	Kantor Camat Kuala Mandor B
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					88.593.927,19		93.023.623,55		97.674.804,73		102.558.544,96		107.686.472,21		489.537.372,64	Kantor Camat Sungai Ambawang
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					155.365.478,15		163.133.752,05		171.290.439,66		179.854.961,64		188.847.709,72		858.492.341,22	Kantor Camat Terentang
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					110.119.123,15		115.625.079,31		121.406.333,28		127.476.649,94		133.850.482,44		608.477.668,12	Kantor Camat Batu Ampar
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					365.560.118,14		383.838.124,05		403.030.030,25		423.181.531,76		444.340.608,35		2.019.950.412,55	Kantor Camat Kubu
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					100.094.235,68		105.098.947,46		110.353.894,83		115.871.589,57		121.665.169,05		553.083.836,59	Kantor Camat Rasau Jaya
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					280.423.910,19		294.445.105,70		309.167.360,99		324.625.729,04		340.857.015,49		1.549.519.121,41	Kantor Camat Teluk Pakedai
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa)					169.733.386,30		178.220.055,62		187.131.058,40		196.487.611,32		206.311.991,89		937.884.103,53	Kantor Camat Sungai Kakap
1	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					270.000.000,00		283.500.000,00		297.675.000,00		312.558.750,00		328.186.687,50		1.491.920.437,50	
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Sungai Raya
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Kuala Mandor B
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Sungai Ambawang
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Terentang
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Batu Ampar
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Kubu
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Rasau Jaya
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Teluk Pakedai
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan)					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		165.768.937,50	Kantor Camat Sungai Kakap
	1 Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					847.655.401,24		890.038.171,29		934.540.079,86		981.267.083,84		1.030.330.438,04		4.683.831.174,27	
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					110.452.024,10		115.974.625,31		121.773.356,57		127.862.024,40		134.255.125,62		610.317.156,00	Kantor Camat Sungai Raya
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					84.737.984,14		88.974.883,35		93.423.627,52		98.094.808,89		102.999.549,34		468.230.853,24	Kantor Camat Kuala Mandor B
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					93.526.064,55		98.202.367,77		103.112.486,16		108.268.110,47		113.681.515,99		516.790.544,94	Kantor Camat Sungai Ambawang
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					94.858.929,06		99.601.875,51		104.581.969,29		109.811.067,75		115.301.621,14		524.155.462,75	Kantor Camat Terentang
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					73.087.129,78		76.741.486,27		80.578.560,58		84.607.488,61		88.837.863,04		403.852.528,28	Kantor Camat Batu Ampar
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					102.083.254,05		107.187.416,75		112.546.787,59		118.174.126,97		124.082.833,31		564.074.418,67	Kantor Camat Kubu
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					86.852.533,66		91.195.160,34		95.754.918,36		100.542.664,27		105.569.797,49		479.915.074,12	Kantor Camat Rasau Jaya
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					170.935.765,49		179.482.553,76		188.456.681,45		197.879.515,52		207.773.491,30		944.528.007,52	Kantor Camat Teluk Pakedai
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Peran Serta Stakeholder dalam Mendukung Program Pemerintah di Kecamatan)					31.121.716,41		32.677.802,23		34.311.692,34		36.027.276,96		37.828.640,81		171.967.128,75	Kantor Camat Sungai Kakap
	1 Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.728.552.577,41		1.814.980.206,30		1.905.729.216,61		2.001.015.677,43		2.101.066.461,31		9.551.344.139,06	
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					224.692.848,53		235.927.490,96		247.723.865,51		260.110.058,78		273.115.561,72		1.241.569.825,50	Kantor Camat Sungai Raya
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					101.432.591,13		106.504.220,68		111.829.431,72		117.420.903,30		123.291.948,47		560.479.095,30	Kantor Camat Kuala Mandor B
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					137.629.421,10		144.510.892,16		151.736.436,76		159.323.258,60		167.289.421,53		760.489.430,15	Kantor Camat Sungai Ambawang
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					162.745.668,64		170.882.952,08		179.427.099,68		188.398.454,66		197.818.377,40		899.272.552,46	Kantor Camat Terentang
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					265.513.543,17		278.789.220,33		292.728.681,35		307.365.115,42		322.733.371,19		1.467.129.931,46	Kantor Camat Batu Ampar
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					87.855.653,70		92.248.436,39		96.860.858,20		101.703.901,11		106.789.096,17		485.457.945,57	Kantor Camat Kubu
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					176.277.532,76		185.091.409,40		194.345.979,87		204.063.278,87		214.266.442,81		974.044.643,71	Kantor Camat Rasau Jaya
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					176.012.652,79		184.813.285,43		194.053.949,70		203.756.647,18		213.944.479,54		972.581.014,64	Kantor Camat Teluk Pakedai
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	(Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					396.392.665,59		416.212.298,87		437.022.913,82		458.874.059,51		481.817.762,48		2.190.319.700,27	Kantor Camat Sungai Kakap
	1 Persentase Desa yang Meningkat Statusnya	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					**13.290.557.986,69**		**13.955.085.886,02**		**14.652.840.180,34**		**15.385.482.189,34**		**16.154.756.298,82**		**73.438.722.541,21**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.664.609.278,60		3.847.839.742,53		4.040.231.729,66		4.242.243.316,14		4.454.355.481,95		20.249.279.548,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)					*3.664.609.278,60*		*3.847.839.742,53*		*4.040.231.729,66*		*4.242.243.316,14*		*4.454.355.481,95*		*20.249.279.548,88*	
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	71,50	72,00		72,50		73,00		73,50		74,00		74,00		
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.477.618.133,34		2.601.499.040,01		2.731.573.992,01		2.868.152.691,61		3.011.560.326,19		13.690.404.183,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter					*2.477.618.133,34*		*2.601.499.040,01*		*2.731.573.992,01*		*2.868.152.691,61*		*3.011.560.326,19*		*13.690.404.183,16*	
	1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					2.600.673.029,51		2.730.706.680,99		2.867.242.015,04		3.010.604.115,79		3.161.134.321,58		14.370.360.162,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Etika dan Budaya Politik)					*2.600.673.029,51*		*2.730.706.680,99*		*2.867.242.015,04*		*3.010.604.115,79*		*3.161.134.321,58*		*14.370.360.162,91*	
	1 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					2.913.872.926,51		3.059.566.572,83		3.212.544.901,48		3.373.172.146,55		3.541.830.753,88		16.100.987.301,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan)					*2.913.872.926,51*		*3.059.566.572,83*		*3.212.544.901,48*		*3.373.172.146,55*		*3.541.830.753,88*		*16.100.987.301,25*	
	1 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Outcome	Indikator/Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					584.209.544,68		613.420.021,91		644.091.023,01		676.295.574,16		710.110.352,87		3.228.126.516,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat)					*584.209.544,68*		*613.420.021,91*		*644.091.023,01*		*676.295.574,16*		*710.110.352,87*		*3.228.126.516,63*	
	1 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					1.049.575.074,05		1.102.053.827,75		1.157.156.519,14		1.215.014.345,09		1.275.765.062,35		5.799.564.828,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan)					*1.049.575.074,05*		*1.102.053.827,75*		*1.157.156.519,14*		*1.215.014.345,09*		*1.275.765.062,35*		*5.799.564.828,38*	
	1 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 5 (lima) tahun kedepan. Untuk Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Kubu Raya dijabarkan dalam pelayanan urusan wajib baik terkait pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar, dan pelayanan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan pubik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan. Sedangkan Aspek Daya Saing terfokus kepada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas dan infrastruktur wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia. Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, dimana semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dari pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU, IKD dan IKK dalam dokumen RPJMD Kabupaten Raya Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Tabel 4.3.
Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,151	6,048	6,018	6,019	6,019	6,019	6,019
2	PDRB per Kapita	Juta	64,21	70,99	77,83	84,48	90,96	97,27	103,44
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	13,99	14,92	12,41	10,88	9,84	9,08	8,50
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,08	3,98	3,93	3,89	3,86	3,85	3,86
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,73	6,50	6,45	6,37	6,29	6,21	6,13
6	Rasio Gini	Poin	0,274	0,265	0,257	0,249	0,241	0,233	0,224
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,14	71,91	72,43	73,06	73,68	74,28	74,86
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n/a	66,46	68,07	69,68	71,29	72,90	74,51
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	n/a	76,09	76,26	76,43	76,60	76,77	76,94

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	3,76	3,81	3,86	3,90	3,95	4,00
2	Nilai SAKIP	Indeks	B (62,63)	B (65,00)	B (67,50)	B (70,00)	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Rasio Konektivitas	Poin	4,67	5,45	5,84	6,43	7,01	7,60	8,18
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	n/a	77,11	77,29	77,46	77,64	77,82	78,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	2,63	4,96	7,29	9,62	11,95	14,28
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	n/a	39,86	42,92	45,97	49,03	52,08	55,13
8	Persentase Desa Mandiri	Persen	n/a	69,11	69,85	70,20	70,74	71,29	71,83
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,42	70,60	71,03	71,84	72,64	73,45	74,25
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	168,40	159,88	158,40	153,40	148,40	143,40	138,40
11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	n/a	23,95	25,68	27,41	29,14	30,87	32,60

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Persen	n/a	58,09	59,94	61,78	63,63	65,47	67,32
13	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	n/a	53,80	55,60	57,40	59,20	61,00	62,80
14	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Persen	n/a	59,13	60,67	62,22	63,76	65,30	66,85
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Persen	n/a	45,06	46,56	48,05	49,55	51,05	52,55
16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,05	7,12	7,19	7,26	7,34	7,41	7,48

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	13,91	13,93	13,93	13,94	13,95	13,95
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,42	73,64	73,83	74,01	74,20	74,39	74,57
19	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persen	n/a	17,48	16,86	16,23	15,61	14,98	14,36
20	Indeks Daya Saing	Indeks	n/a	3,10	3,13	3,17	3,20	3,23	3,26
21	Nilai Investasi	Rupiah	15.665.648.95 6.931,10	17.977.239.41 3.636,70	19.137.648.00 3.321,50	15.665.648.95 6.931,10	17.977.239.41 3.636,70	19.137.648.00 3.321,50	19.137.648.00 3.321,50
22	Rasio Gini	Poin	0,274	0,265	0,257	0,249	0,241	0,233	0,224
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,73	6,50	6,45	6,37	6,29	6,21	6,13
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,61	79,71	82,21	84,71	87,21	89,71	92,21
25	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,151	6,048	6,018	6,019	6,019	6,019	6,019	Badan Pusat Statistik
2.	Laju Inflasi	Persen	1,57	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	Badan Pusat Statistik
3.	PDRB per Kapita	Juta	64,21	70,99	77,83	84,48	90,96	97,27	103,44	Badan Pusat Statistik
4.	Rasio Gini	Indeks	0,274	0,265	0,257	0,249	0,241	0,233	0,224	Badan Pusat Statistik
5.	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,14	71,91	72,43	73,06	73,68	74,28	74,86	Badan Pusat Statistik
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,05	7,12	7,19	7,26	7,34	7,41	7,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,42	73,64	73,83	74,01	74,20	74,39	74,57	Dinas Kesehatan
9.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
10.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
11.	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
12.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,73	6,50	6,45	6,37	6,29	6,21	6,13	Badan Pusat Statistik
15.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
17.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah
18.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20.	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Produksi Pertanian	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22.	Produksi Perkebunan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	12,42	11,72	12,54	13,32	13,74	14,23	14,60	Badan Pusat Statistik
24.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	Persen	3,50	3,39	3,10	2,87	2,68	2,51	2,37	Badan Pusat Statistik

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	32,83	35,50	35,14	34,85	34,61	34,40	34,23	Badan Pusat Statistik
26.	Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Terhadap PDRB	Persen	0,41	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	Badan Pusat Statistik
27.	Kontribusi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Terhadap PDRB	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Badan Pusat Statistik
28.	Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap PDRB	Persen	11,36	10,93	10,47	9,95	9,77	9,50	9,27	Badan Pusat Statistik
29.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	Persen	10,37	10,38	10,07	9,82	9,61	9,43	9,28	Badan Pusat Statistik
30.	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB	Persen	10,60	10,16	10,30	10,42	10,51	10,59	10,66	Badan Pusat Statistik
31.	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Persen	1,58	1,59	1,61	1,63	1,66	1,64	1,68	Badan Pusat Statistik
32.	Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB	Persen	3,43	3,45	3,67	3,84	3,99	4,11	4,22	Badan Pusat Statistik

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33.	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDRB	Persen	1,11	1,08	1,04	1,01	0,98	0,96	0,94	Badan Pusat Statistik
34.	Kontribusi Sektor Real Estate Terhadap PDRB	Persen	2,75	2,46	3,28	3,95	4,51	4,97	5,37	Badan Pusat Statistik
35.	Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan Terhadap PDRB	Persen	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26	Badan Pusat Statistik
36.	Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Terhadap PDRB	Persen	3,57	3,28	3,10	2,94	2,82	2,71	2,62	Badan Pusat Statistik
37.	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan Terhadap PDRB	Persen	3,53	3,17	2,98	2,82	2,70	2,59	2,49	Badan Pusat Statistik
38.	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Terhadap PDRB	Persen	1,32	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	Badan Pusat Statistik
39.	Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Terhadap PDRB	Persen	0,78	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	Badan Pusat Statistik
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rupiah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik
2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pusat Statistik

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa	Persen	n/a	69,11	69,65	70,20	70,74	71,29	71,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
I.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**									
1.	**Pendidikan**									
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.	Angka Partisipasi Kasar:									
1.2.1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3.	Angka Partisipasi Murni:									
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS):									
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5.	Angka Kelulusan:									
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.6.	Angka Melanjutkan (AM):									
1.6.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.6.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.7.	Fasilitas Pendidikan:									
1.7.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.7.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.9.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.10.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.11.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.12.	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.13.	Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.14.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Pendidikan Dasar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.15.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.16.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.17.	Anak Tidak Sekolah (ATS):									
1.17.1.	Tidak Pernah Bersekolah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.17.2.	Angka Putus Sekolah (DO):									
1.17.2.1.	Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.17.2.2.	Angka Putus Sekolah (DO) SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.17.3.	Anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM):									
1.17.3.1.	Anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.17.3.2.	Anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**Kesehatan**									
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.3.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.6.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.7.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.9.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.10.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.13.	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.15.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.16.	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.17.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.19.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.20.	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.21.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.22.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.23.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.24.	Penderita Diare yang Ditangani	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.25.	Angka Kejadian Malaria	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.26.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.27.	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.29.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.30.	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.31.	Cakupan Puskesmas	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.32.	Cakupan Puskesmas Pembantu	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.33.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.34.	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.35.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.36.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.37.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.38.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.39.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
2.40.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.41.	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1.	Pekerjaan Umum:									
3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.2.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.3.	Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.5.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.6.	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.8.	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.9.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.10.	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.11.	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.12.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.15.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.16.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.17.	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.18.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.19.	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.	Penataan Ruang:									
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.2.2.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.2.3.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.2.4.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.2.5.	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
4.1.	Rasio Rumah Layak Huni	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.	Rasio Permukiman Layak Huni	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.4.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.5.	Persentase Pemukiman yang Tertata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.6.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.7.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.8.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.9.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5.6.	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	**Sosial**									
6.1.	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.2.	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.3.	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.4.	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.5.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Kemasyarakatan (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.7.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.8.	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
6.9.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Sosial
II.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**									
1.	**Tenaga Kerja**									
1.1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	n/a	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.3.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Persen	n/a	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.4.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.5.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.7.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Persen	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.8.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2.1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	n/a	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	Persen	n/a	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	n/a	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4.	Rasio KDRT	Persen	n/a	0,0065	0,0055	0,0045	0,0035	0,0025	0,0015	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.5.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.6.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.10.	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.11.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.12.	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.	Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki di SD	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.	Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki di SMP	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16.	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	**Pangan**									
3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.2.1.	Ketersediaan Energi per Kapita	Kkal/Kapita/ Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.2.2.	Ketersediaan Protein per Kapita	Gram/Kapita /Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	**Pertanahan**									
4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
4.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
4.3.	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
5.	**Lingkungan Hidup**									
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kota	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.3.	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	50,00	67,01	67,11	67,21	67,31	67,41	67,51	Dinas Lingkungan Hidup
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	91,28	82,71	82,81	82,91	83,01	83,11	83,21	Dinas Lingkungan Hidup
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	62,42	79,05	79,06	79,07	79,08	79,09	79,10	Dinas Lingkungan Hidup
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.8.1.	Jumlah PPLHD yang Dilatih dan/atau Dibina	Orang	n/a	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
5.8.2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang Memenuhi Standar Minimum	Unit	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.9.	Jumlah MHA yang Diakui	MHA	n/a	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.10.	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang Diverifikasi	MHA	n/a	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.11.	Penetapan Hak MHA	MHA	n/a	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.12.	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan MHA	Persen	n/a	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.13.	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana MHA	Persen	n/a	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
5.14.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Kali	n/a	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
5.15.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kali	n/a	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
5.16.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.17.	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.18.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.19.	Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.20.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.21.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.22.	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swata yang Diterbitkan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.23.	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	-	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2.	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	-	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3.	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	-	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten/Kota	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.4.	Persentase LSM Aktif	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.6.	Persentase PKK Aktif	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.7.	Persentase Posyandu Aktif	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.8.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	-	n/a	2,10	1,90	1,70	1,50	1,30	1,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	n/a	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.5.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda/ Perkada	n/a	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.6.	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	n/a	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.7.	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja Sama	n/a	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.8.	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.9.	Rasio Akseptor KB	Persen	n/a	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.10.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	Persen	n/a	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.11.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Persen	n/a	25,00	23,00	21,00	19,00	17,00	15,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.13.	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*)	Persen	n/a	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	n/a	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	n/a	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.17.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	n/a	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.18.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	n/a	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.22.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Persen	n/a	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.23.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Persen	n/a	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.24.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.25.	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	Persen	n/a	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.26.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.27.	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.28.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	n/a	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.29.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	**Perhubungan**									
9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.2.	Rasio Ijin Trayek	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.7.	Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.8.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.9.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
9.10.	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Terminal per Tahun		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.	**Komunikasi dan Informatika**									
10.1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.5.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
11.1.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11.2.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11.3.	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12.	**Penanaman Modal**									
12.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	n/a	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	n/a	1.160,40	1.160,40	1.160,40	1.160,40	1.160,40	1.160,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	n/a	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**									
13.1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.2.	Persentase Wirausaha Muda	Persen	n/a	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.4.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	n/a	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.6.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	n/a	30	40	50	60	70	80	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.7.	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	n/a	5	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14.	**Statistik**									
14.1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.2.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.3.	Buku “PDRB”	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	**Persandian**									
15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	**Kebudayaan**									
16.1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.3.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.	**Perpustakaan**									
17.1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	n/a	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	n/a	35.477	35.977	36.477	36.977	37.477	37.977	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Rasio	n/a	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.4.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Angka	n/a	140	150	160	170	180	190	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	n/a	9.994	10.255					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.6.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	n/a	5	6	7	8	9	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**									
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	n/a	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III.	**Layanan Urusan Pilihan**									
1.	**Pariwisata**									
1.1.	Kunjungan Wisata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.	Lama Kunjungan Wisata	Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
1.3.	PAD Sektor Pariwisata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2.	**Pertanian**									
2.1.	Produktivitas Padi per Hektar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.3.	Cakupan Bina Kelompok Pekebun	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
3.1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
3.2.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
4.	**Perdagangan**									
4.1.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.	**Perindustrian**									
5.1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.	**Transmigrasi**									
6.1.	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7.	**Kelautan dan Perikanan**									
7.1.	Produksi Perikanan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan
7.2.	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan
7.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan
7.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan
IV.	**Penunjang Urusan**									
1.	**Perencanaan Pembangunan**									
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	0	1	0	0	0	0	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	**Keuangan**									
2.1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.2.	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	n/a	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.3.	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.4.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	n/a	28,94	28,95	28,96	28,97	28,98	28,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.5.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	n/a	12,26	12,27	12,28	12,29	12,30	12,31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.6.	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	n/a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.7.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**									
3.1.	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20	20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	n/a	22,20	27,86					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	n/a	19,77	21,70					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Orang	32	32	32	32	32	32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.5.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	300	300	300	300	300	300	300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.6.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	n/a	1.771	2.064					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	**Penelitian dan Pengembagan**									
4.1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	n/a	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	n/a	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan SIDa:									
4.3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	n/a	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.	**Pengawasan**									
5.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	n/a	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	Inspektorat Daerah
5.2.	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	n/a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	n/a	20	19	18	17	16	15	Inspektorat Daerah
6.	**Sekretariat Dewan**									
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD
6.3.	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci (Outcome) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**									
1.1.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**									
2.1.	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.3.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.4.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.5.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.6.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.7.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.8.	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.9.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.10.	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.11.	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.12.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.13.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.14.	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1.	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.3.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.4.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.5.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.6.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.8.	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.9.	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
4.1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.4.	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.5.	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**									
5.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.5.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.7.	Waktu Tanggap (*response time*) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**									
6.1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
6.2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
II.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**									
1.1.	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.4.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1.5.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2.1.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	n/a	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	n/a	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	n/a	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**									
3.1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**									
4.1.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
4.2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
4.3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
4.4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah
4.5.	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.6.	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**									
5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	n/a	76,09	76,26	76,43	76,60	76,77	76,94	Dinas Lingkungan Hidup
5.2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.3.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
6.1.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.4.	Jumlah PD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
7.1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
8.1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	n/a	2,10	1,90	1,70	1,50	1,30	1,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	n/a	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	n/a	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**									
9.1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.2.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (V/C Ratio Jalan Kabupaten/Kota)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perhubungan
10.	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**									
10.1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
11.1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11.2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12.	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**									
12.1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	n/a	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**									
13.1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13.3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
14.	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**									
14.1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.2.	Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**									
15.1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**									
16.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**									
17.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	n/a	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**									
18.1.	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	n/a	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.2.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	n/a	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**									
1.1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**									
2.1.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Masuk ke Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2.2.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2.3.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2.4.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**									
3.1.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**									
4.1.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4.2.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4.3.	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**									
5.1.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.2.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.3.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.5.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.6.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
IV.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
1.	**Perencanaan dan Keuangan**									
1.1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.2.	Rasio PAD	Persen	n/a	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	Badan Pendapatan Daerah
1.3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah
			n/a	3,100	3,200	3,300	3,400	3,500	3,500	
1.4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah
			n/a	3,050	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300	
1.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	n/a	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	**Pengadaan**									
2.1.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya, yang Ditandatangani pada Kuarta Pertama	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
2.2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetetif	Persen	n/a	6,93	5,81					Sekretariat Daerah
2.3.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	n/a	60,00	64,71					Sekretariat Daerah
3.	**Kepegawaian**									
3.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	n/a	28,78	34,54					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.2.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	n/a	38,78	46,55					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.3.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	n/a	22,93	27,52					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	**Manajemen Keuangan**									
4.1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	n/a	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	n/a	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.3.	Manajemen Aset:									
4.3.1.	Apakah ada daftar asset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.3.2.	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.3.3.	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.3.4.	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	n/a	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	**Transparansi dan Partisipasi Publik**									
5.1.	Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2.	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.7.
Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IE.1	**Masyarakat Kubu Raya yang Sehat dan Sejahtera**								
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,42	73,64	73,83	74,01	74,20	74,39	74,57
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:								
a.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	n/a	120	115	110	105	100	95
b.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persen	n/a	17,48	16,86	16,23	15,61	14,98	14,36
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):								
a.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	n/a	98,00	98,82	99,64	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IE.2	**Pendidikan Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah Kubu Raya**								
5.	Hasil Pembelajaran:								
a.	Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:								
i.	Literasi Membaca	Persen	n/a	58,09	59,94	61,78	63,63	65,47	67,32
ii.	Numerasi	Persen	n/a	53,80	55,60	57,40	59,20	61,00	62,80
b.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimun pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:								
i.	Literasi Membaca	Persen	n/a	59,13	60,67	62,22	63,76	65,30	66,85
ii.	Numerasi	Persen	n/a	45,06	46,56	48,05	49,55	51,05	52,55
c.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	n/a	7,08	7,26	7,44	7,62	7,81	7,99
d.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	13,91	13,93	13,95	13,97	13,99	14,01
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	n/a	34,64	35,89	37,14	38,39	39,64	40,89

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	n/a	66,78	67,19	67,60	68,01	68,42	68,84
IE.3	**Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Menjangkau Seluruh Masyarakat**								
8.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,08	3,98	3,93	3,89	3,86	3,85	3,86
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	n/a	51,86	55,81	59,76	63,71	67,66	71,61
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	n/a	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
IE.4	**Daya Saing Ekonomi Kubu Raya Melalui Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas**								
11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	n/a	35,50	35,14	34,85	34,61	34,40	34,23
12.	Pengembangan Pariwisata:								
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	n/a	1,59	1,61	1,63	1,66	1,64	1,68
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	n/a	469	624	779	934	1.089	1.244

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Proporsi Investasi Pelaku Ekraf Terhadap Total Investasi di Kabupaten Kubu Raya	Persen	n/a	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:								
a.i.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	n/a	51,21	51,61	52,02	52,42	52,83	53,23
a.ii.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	n/a	2,34	3,27	4,20	5,13	6,06	6,99
b.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	n/a	3,47	3,90	4,32	4,75	5,18	5,60
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	18,47	19,55	20,63	21,71	22,79	23,87
d.	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	n/a	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35
15.	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:								
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,73	6,50	6,40	6,30	6,20	6,10	6,00
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	n/a	17,62	18,32	18,82	19,82	20,32	20,82

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	51,00	51,70	52,40	53,10	53,80	54,50
17.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	62,07	62,38	62,69	63,00	63,32	63,70
IE.5	**Ekonomi Hijau Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**								
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:								
a.	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks							
b.	Porsi EBT Bauran Energi Primer	Persen							
IE.6	**Transformasi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan**								
19.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	n/a	5,94	6,06	6,18	6,30	6,42	6,54
IE.7	**Peningkatan Akses Pasar bagi Produk-Produk Lokal Kubu Raya di Pasar Domestik dan Global**								
20.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	-							
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	n/a	35,26	34,71	34,52	34,64	35,01	35,60
22.	Nilai Ekspor	Persen PDRB	n/a	7,88	7,76	7,72	7,74	7,83	7,96
IE.8	**Pengembangan Kawasasn Perdesaan di Kubu Raya Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**								
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:								

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen							
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	n/a	77,11	77,29	77,46	77,64	77,82	78,00
c.	Persentase Desa Mandiri	Persen	n/a	69,11	69,65	70,20	70,74	71,29	71,83
IE.9	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan di Kubu Raya**								
24.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	n/a	65,02	67,65	69,03	71,52	72,04	74,05
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	n/a	3,30	3,39	3,47	3,56	3,64	3,73
26.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	3,76	3,81	3,86	3,90	3,95	4,00
27.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	n/a	74,52	75,64	76,77	77,89	79,01	80,14
IE.10	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan di Kubu Raya**								
28.	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	n/a	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
29.	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	n/a	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
30.	Persentase Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IE.11	**Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya**								
31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	n/a	0,47	0,54	0,60	0,65	0,69	0,73
32.	Tingkat Inflasi	Persen	n/a	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33.	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan:								
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	n/a	2,89	2,96	3,06	3,20	3,36	3,56
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen							
c.	Nilai Transaksi Saham per Kabupaten Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Rupiah	n/a	2.415,62	2.655,02	2.918,13	3.207,32	3.525,17	3.874,52
d.	Total Kredit/PDRB	Persen	n/a	20,81	20,82	21,06	21,48	22,07	22,81
34.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,69	2,80	2,85	2,90	2,95	3,01	3,04
IE.12	**Daya Saing Daerah Kubu Raya**								
35.	Jumlah Kerja Sama Kabupaten	Kerja Sama	n/a	3	3	3	3	3	4
36.	Persentase Penurunan Konflik SARA	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IE.13	**Masyarakat Kubu Raya yang Religius, Berbudaya, dan Bermartabat**								
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	n/a	44,75	45,00	45,25	45,50	45,75	46,00
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IE.14	**Keluarga yang Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kubu Raya**								
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	n/a	62,00	62,45	62,90	63,35	63,80	64,25
40.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	n/a	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46
IE.15	**Lingkungan Hidup yang Berkualitas di Kubu Raya**								
41.	Persentase RTH	Persen	n/a	0,62	2,09	3,56	5,03	6,50	7,97
42.	Kualitas Lingkungan Hidup:								
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	n/a	76,09	76,26	76,43	76,60	76,77	76,94
b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	2,63	4,96	7,29	9,62	11,95	14,28
c.	Pengelolaan Sampah:								
i.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	n/a	30,89	32,69	34,49	36,29	38,09	39,89

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
ii.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	n/a	29,49	32,09	34,69	37,29	39,89	42,49
IE.16	**Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan di Kubu Raya**								
43.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:								
a.	Ketahanan Energi:								
i.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh							
ii.	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar							
b.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	n/a	17,00	16,33	15,66	14,99	14,32	13,66
c.	Ketahanan Air:								
i.	Kapasitas Air Baku	m3/detik	n/a	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54
ii.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	n/a	39,86	42,92	45,97	49,03	52,08	55,13
IE.17	**Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kubu Raya**								
44.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	168,40	159,88	158,40	153,40	148,40	143,40	138,40

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
45.	Persentase Penurunan Emisi GRK:								
a.	Kumulatif	Persen	n/a	23,95	25,68	27,41	29,14	30,87	32,60
b.	Tahunan	Persen	n/a	66,46	68,07	69,68	71,29	72,90	74,51

Sumber: RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045

Tabel 4.8.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**BIDANG PENDIDIKAN**								
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**								
1.1.	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang		13.527	13.527	13.527	13.527	13.527	13.527
1.2.	Angka Partisipasi Sekolah (5 - 6 Tahun) PAUD	Persen							
1.3.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen		45,70	45,70	45,70	45,70	45,70	45,70
1.4.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)	Persen		51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54
2.	**Pendidikan Dasar**								
2.1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Orang		73.359	73.359	73.359	73.359	73.359	73.359
2.2.	Angka Partisipasi Sekolah (7 - 12 Tahun) SD	Persen							

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah (13 - 15 Tahun) SMP	Persen							
2.4.	Sekolah Dasar:								
2.4.1.	Kemampuan Literasi	Nilai		60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89
2.4.2.	Kemampuan Numerasi	Nilai		54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
2.4.3.	Indeks Iklim Keamanan	Nilai		73,37	73,37	73,37	73,37	73,37	73,37
2.4.4.	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai		71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57
2.4.5.	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai		59,34	59,34	59,34	59,34	59,34	59,34
2.5.	Sekolah Menengah Pertama:								
2.5.1.	Kemampuan Literasi	Nilai		65,15	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15
2.5.2.	Kemampuan Numerasi	Nilai		60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30
2.5.3.	Indeks Iklim Keamanan	Nilai		68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16
2.5.4.	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai		69,89	69,89	69,89	69,89	69,89	69,89
2.5.5.	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai		56,57	56,57	56,57	56,57	56,57	56,57

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	**Pendidikan Kesetaraan**								
3.1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang		1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
3.2.	Angka Partisipasi Sekolah (7 - 18 Tahun) Kesetaraan	Persen		24,65	24,65	24,65	24,65	24,65	24,65
II.	**BIDANG KESEHATAN**								
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**								
1.1.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		12.783	12.783	12.783	12.783	12.783	12.783
1.2.	Jumlah Tablet Tambah Darah (*180 tablet x jumlah ibu hamil*)	Tablet		5.361	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361
1.3.	Jumlah Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket		964.980	964.980	964.980	964.980	964.980	964.980
1.4.	Jumlah Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket		10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.	Jumlah Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket		10	10	10	10	10	10
1.6.	Jumlah Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (*proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil*)	Paket		10	10	10	10	10	10
1.7.	Jumlah Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil: Skrining Triple Eliminasi dengan Tes Cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		10	10	10	10	10	10
1.8.	Jumlah Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket		5.361	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361
1.9.	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		5.361	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361
1.10.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		5.361	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.	Jumlah Gel USG, untuk Puskesmas yang Memiliki Alat USG (*proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil*)	Botol		10	10	10	10	10	10
1.12.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Orang		21	21	21	21	21	21
1.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
1.14.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
1.15.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		21	21	21	21	21	21
1.16.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		21	21	21	21	21	21
1.17.	Jumlah Kunjungan 6 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K6) (*satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**								
2.1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		12.673	12.673	12.673	12.673	12.673	12.673
2.2.	Jumlah Formulir Partograf	Formulir		5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
2.3.	Jumlah Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket		5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
2.4.	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (*terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan*)	Buku		5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
2.5.	Jumlah Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
2.6.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Orang		21	21	21	21	21	21
2.7.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
2.8.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.9.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1
2.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**								
3.1.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		12.029	12.029	12.029	12.029	12.029	12.029
3.2.	Jumlah Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal (*Prefilled Syringe*)	Vaksin		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.3	Jumlah Vitamin K1 Injeksi	Ampul		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.4.	Jumlah Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.5.	Jumlah Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.6.	Jumlah Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.7.	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		5.332	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
3.9.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang		21	21	21	21	21	21
3.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
3.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
3.12.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1
3.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		5	5	5	5	5	5
3.14.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
3.15.	Jumlah Kader Kesehatan	Orang		20	20	20	20	20	20
4.	**Pelayanan Kesehatan Balita**								
4.1.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		46.805	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.	Jumlah Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar Lain yang Berlaku	Formulir		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.3.	Jumlah Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.4.	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.5.	Jumlah Vitamin A Biru (*sesuai standar 6-11 bulan*)	Kapsul		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.6.	Jumlah Vitamin A Merah (*sesuai standar 12-59 bulan*)	Kapsul		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.7.	Jumlah Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.8.	Jumlah Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.9.	Jumlah Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.10.	Jumlah Vaksin Imunisasi Dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.11.	Jumlah Vaksin Imunisasi Dasar: Campak - Rubella	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.12.	Jumlah Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.13.	Jumlah Vaksin Imunisasi Lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.14.	Jumlah Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.15.	Jumlah Peralatan Anafilaktik	Paket		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.16.	Jumlah Formula Terapi Gizi Buruk	Paket		21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
4.17.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21
4.18.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		21	21	21	21	21	21
4.19.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
4.20.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
4.21.	Jumlah Guru PAUD	Orang		0	0	0	0	0	0
4.22.	Jumlah Kader Kesehatan	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**								
5.1.	Jumlah Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		98.049	98.049	98.049	98.049	98.049	98.049
5.2.	Jumlah Form Pencatatan/Buku Rapor Kesehatanku (*sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren*)	Form/Buku		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.3.	Jumlah Form Pencatatan/Buku Pemantauan Kesehatan (*sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan posyandu remaja*)	Form/Buku		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.4.	Jumlah Kuesioner Skrining Kesehatan (*sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar*)	Dokumen		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.5.	Jumlah Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah (*sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/ pesantren*)	Formulir		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.6.	Jumlah Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah (*sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan posyandu remaja per puskesmas*)	Formulir		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.7.	Jumlah Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri Kelas 7-9 dan Usia 12-17 Tahun di Luar Sekolah (*jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota*)	Tablet		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.8.	Jumlah Alat Pemeriksaan Hb (*Hematologi Analyzer di puskesmas dan Hb Meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat*)	Alat		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.9.	Jumlah Strip Hb Sasaran Remaja Putri Kelas 7 (*Hematologi Analyzer di puskesmas dan Hb Meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat*)	Strip		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.10.	Jumlah Media Promosi Kesehatan (*media khusus remaja sehat*)	Paket		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.11.	Jumlah Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (*sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara*)	Vaksin		58.551	58.551	58.551	58.551	58.551	58.551
5.12.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Gigi	Orang		21	21	21	21	21	21
5.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
5.14.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
5.15.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
5.16.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1
5.17.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.18.	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu: Guru	Orang		0	0	0	0	0	0
5.19.	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu: Kader Kesehatan/Dokter Kecil/*Peer Conselor*	Orang		5	5	5	5	5	5
6.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**								
6.1.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		430.162	430.162	430.162	430.162	430.162	430.162
6.2.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.3.	Jumlah Alat dalam Melakukan Skrining: Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		5	5	5	5	5	5
6.4.	Jumlah Alat: Tensimeter	Unit		5	5	5	5	5	5
6.5.	Jumlah Alat: Glukometer	Unit		5	5	5	5	5	5

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.6.	Jumlah Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit		5	5	5	5	5	5
6.7.	Jumlah Alat: Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol	Paket		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.8.	Jumlah Alat: KIT IVA Tes	Unit		5	5	5	5	5	5
6.9.	Jumlah Strip dan Reagen Pemeriksaan Hb	Unit		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.10.	Jumlah Kit Opthalmologi Komunitas	Unit		5	5	5	5	5	5
6.11.	Jumlah Kuesioner PUMA (*deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK*)	Dokumen		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.12.	Jumlah Alat Pelayanan KB:								
6.12.1.	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		0	0	0	0	0	0
6.12.2.	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit		0	0	0	0	0	0
6.12.3.	Vasektomi Set	Unit		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.13.	Jumlah Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.14.	Jumlah Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		318.822	318.822	318.822	318.822	318.822	318.822
6.15.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21
6.16.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
6.17.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
6.18.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
6.19.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1
6.20.	Jumlah Kader Kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang		10	10	10	10	10	10
7.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**								
7.1.	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		61.577	61.577	61.577	61.577	61.577	61.577

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.2.	Jumlah Alat Pemeriksaan Deteksi Dini: Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Lingkar Lengan Atas, dan Tensimeter	Paket		32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139
7.3.	Jumlah Glukometer/Alat Pemeriksaan Gula Darah	Paket		5	5	5	5	5	5
7.4.	Jumlah Alat Pemeriksaan Kolesterol	Paket		5	5	5	5	5	5
7.5.	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai: Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol, Lancet, Kapas Alkohol	Paket		32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139
7.6.	Jumlah Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/*Activity Daily Living* (*ADL Barthel*)	Paket		5	5	5	5	5	5
7.7.	Jumlah Buku Kesehatan Lansia atau Aplikasi Pencatatan Terkait Lainnya	Buku		32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.8.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139
7.9.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21
7.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
7.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
7.12.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
7.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1
7.14.	Jumlah Kader Kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang		10	10	10	10	10	10
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**								
8.1.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		175.207	175.207	175.207	175.207	175.207	175.207

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2.	Jumlah Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (*panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2*)	Paket		123.165	123.165	123.165	123.165	123.165	123.165
8.3.	Jumlah Obat Hipertensi	Paket		123.165	123.165	123.165	123.165	123.165	123.165
8.4.	Jumlah Tensimeter (*mengukur tekanan darah*)	Unit		5	5	5	5	5	5
8.5.	Jumlah Formulir Pencatatan dan Pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen		123.165	123.165	123.165	123.165	123.165	123.165
8.6.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (*peningkatan pengetahuan masyarakat*)	Paket		123.165	123.165	123.165	123.165	123.165	123.165
8.7.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21
8.8.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.9.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
8.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1
8.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		1	1	1	1	1	1
8.12.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1
8.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		10	10	10	10	10	10
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**								
9.1.	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		6.835	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
9.2.	Jumlah Obat Diabetes Melitus	Paket		6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.	Jumlah Fotometer atau Glukometer (*melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan*)	Unit		6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
9.4.	Jumlah BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Gula Darah dalam Pemantauan Kadar Gula dalam Darah: Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit		6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
9.5.	Jumlah Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir		6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.6.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (*minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular*)	Pedoman		6.007	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
9.7.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21
9.8.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
9.9.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
9.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1
9.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1
9.12.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		1	1	1	1	1	1
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**								
10.1.	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
10.2.	Jumlah Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (*minimal 1 per puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik*)	Buku		821	821	821	821	821	821
10.3.	Jumlah Penyediaan Psikofarmaka (*pengobatan/medikasi*)	Paket		821	821	821	821	821	821

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.4.	Jumlah Penyediaan Formulir Skrining Kesehatan Jiwa dan/atau Penyediaan Melalui Aplikasi (*instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver*)	Formulir		821	821	821	821	821	821
10.5.	Jumlah Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (*pencatatan dan pelaporan*)	Formulir		821	821	821	821	821	821
10.6.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media		821	821	821	821	821	821
10.7.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter	Orang		21	21	21	21	21	21

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.8.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi dan Kewenangan di Bidang Kesehatan Jiwa (*contoh: psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih*)	Orang		1	1	1	1	1	1
10.9.	Jumlah Tenaga Profesional Lainnya	Orang		1	1	1	1	1	1
10.10.	Jumlah Tenaga Lain yang Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa	Orang		1	1	1	1	1	1
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**								
11.1.	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453
11.2.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.3.	Jumlah Reagen Zn TB	Kit		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.4.	Jumlah Masker Bedah dan Masker N95	Paket		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.5.	Jumlah Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.6.	Jumlah Katrid Tes Cepat Molekuler	Tes		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.7.	Jumlah Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Dokumen		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.8.	Jumlah Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.9.	Jumlah Tuberkulin	Vial		3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
11.10.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	Orang		21	21	21	21	21	21
11.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
11.12.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1
11.14.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		1	1	1	1	1	1
11.15.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang		1	1	1	1	1	1
11.16.	Jumlah Kader Kesehatan	Orang		10	10	10	10	10	10
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**								
12.1.	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		15.482	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482
12.2.	Jumlah Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342
12.3.	Jumlah Tes Cepat HIV/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) Pertama	Tes		7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.4.	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket		7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342
12.5.	Jumlah Alat Tulis, Rekam Medis yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket		7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342
12.6.	Jumlah Tenaga Medis: Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang		21	21	21	21	21	21
12.7.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang		84	84	84	84	84	84
12.8.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang		84	84	84	84	84	84
12.9.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.10.	Jumlah Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		1	1	1	1	1	1
12.11.	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu: Pendamping dan Penjangkauan	Orang		1	1	1	1	1	1
III.	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**								
1.	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**								
1.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Orang		625.072	625.072	625.072	625.072	625.072	625.072
1.2.	Jaringan Perpipaan:								
1.2.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Sesuai dengan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari Sejumlah 60 Liter/Orang/Hari (4 Galon)	Rumah Tangga		156.268	156.268	156.268	156.268	156.268	156.268

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau, dst (*sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023*)	Rumah Tangga		156.268	156.268	156.268	156.268	156.268	156.268
1.3.	Bukan Jaringan Perpipaan:								
1.3.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Sesuai dengan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari Sejumlah 60 Liter/Orang/Hari (4 Galon)	Rumah Tangga		156.268	156.268	156.268	156.268	156.268	156.268

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau, dst (*sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023*)	Rumah Tangga		156.268	156.268	156.268	156.268	156.268	156.268
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**								
2.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang		625.072	625.072	625.072	625.072	625.072	625.072
2.2.	SPALD Kabupaten/Kota:								
2.2.1.	Kuantitas SPALD:								
2.2.1.1.	Ukuran Kuantitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Setiap Rumah Memiliki Minimal 1 (Satu) Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga		900	900	900	900	900	900
2.2.2.	Kualitas SPALD:								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(*Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T*)								
2.2.2.1.	Ukuran Kualitas Penyediaan Pelayanan Akses Aman terhadap Fasilitas Buang Air Besar Individual dimana Bangunan Atas dilengkapi Kloset Leher Angsa yang Tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(*Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S*)								
2.2.2.2.	Ukuran Kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap Fasilitas Buang Air Besar bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Perdesaan > 25 Jiwa/Hektar dan/atau di Seluruh Wilayah Perkotaan dimana Bangunan Atas dilengkapi Kloset Leher Angsa dan Bangunan Bawah dilengkapi Tangki Septic Sesuai Standar dengan Lumpur Tinja Disedot Secara Berkala Minimal 3 Tahun Sekali dan Diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.2.3.	Ukuran Kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap Fasilitas Buang Air Besar bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Perdesaan < 25 Jiwa/Hektar dimana Bangunan Atas dilengkapi Kloset Leher Angsa dan Bangunan Bawah dapat Menggunakan Tangki Septic Sesuai Standar maupun Lubang Tanah atau Cubluk Kembar	Rumah Tangga		900	900	900	900	900	900
IV.	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**								
1.	**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**								
1.1.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Orang		5	5	5	5	5	5
1.2.	Jika Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat:								
1.2.1.	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.	Jumlah Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Jumlah Pemukiman Kembali bagi Korban Bencana	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Jumlah Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
1.3.	Jika Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3):								
1.3.1.	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (*dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya*)	Form Tahapan							

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (*contoh: dokumen RP3KP, dsb*)	Dokumen							
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								
2.1.	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Orang		5	5	5	5	5	5
2.2.	Jika Ada Relokasi Program Pemerintah:								
2.2.1.	Jumlah Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan:								
2.2.1.1.	Penilaian oleh Tim Penaksir (*appraisal*) Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.2.	Proses Sosialisasi kepada Masyarakat Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.	Proses Penggantian Untung Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Jumlah Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah		0	0	0	0	0	0
2.3.	Jika Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah:								
2.3.1.	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (*dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/ atau dokumen pendukung lainnya*)	Form Tahapan							

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
V.	**BIDANG TRANTIBUMLINMAS**								
1.	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								
1.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	Orang		25	25	25	25	25	25
1.2.	Jumlah Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Satpol PP yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (*jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan*)	Unit		151	151	151	151	151	151

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.	Jumlah Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas Sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (*SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa*)	Dokumen		13	13	13	13	13	13

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.	Jumlah Pemenuhan Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang Telah Lulus Diklat Dasar Satpol PP** dan Satlinmas yang Telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM*** (*jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas*)	Orang		3	3	3	3	3	3

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.	Jumlah Pemenuhan Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda/Perkada terhadap Pelayanan Kerugian Material (*berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman*) dan Pelayanan Pengobatan (*berkoordinasi dengan kesehatan*) dalam Bentuk Dokumen yang Sah dan Legal	Dokumen		0	0	0	0	0	0
1.6.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil (*kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (*pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat*)	Orang		0	0	0	0	0	0
2.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**								
2.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (*tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal*)								
2.2.1.	Ada: Sudah Lama Dibuat (Masa berlaku s.d 2025)								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1.	Tersedianya Dokumen KRB yang Telah Dilegalkan Minimal Perkada dengan Lampiran dalam Bentuk Kajian dan Album Peta	Dokumen							
2.2.1.2.	Tersedianya Dokumen KRB yang Siap Untuk Dilegalkan Sebagai Lampiran Perkada dalam Bentuk Kajian dan Album Peta	Dokumen							
2.2.2.	Ada: Baru Dibuat Tahun 2025								
2.2.2.1.	Tersedianya Dokumen KRB yang Telah Dilegalkan Minimal Perkada dengan Lampiran dalam Bentuk Kajian dan Album Peta	Dokumen							
2.2.2.2	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (*minimal 2*)	Dokumen							
2.2.2.3.	Tersedianya Berita Acara Asistensi yang Ditandatangani BNPB (*minimal 3*)	Dokumen							

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.2.4.	Tersedianya Tenaga Ahli/Personil Penyusunan KRB (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang							
2.2.2.5.	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang							
2.2.3.	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.3.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana								
2.3.1.	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana:								
2.3.1.1.	Tersedianya Bahan Paparan dan/atau Alat Sosialisasi Untuk Pertemuan Tatap Muka (*leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta*)	Eksemplar		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.3.1.2.	Terlaksananya Sosialisasi Tatap Muka	Desa		5	5	5	5	5	5

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.1.3.	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
2.3.1.4.	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		5	5	5	5	5	5
2.3.2.	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia:								
2.3.2.1.	Tersedianya Media Sosial dan Wahana Multimedia (*sesuai dengan kebutuhan*)	Media		4	4	4	4	4	4
2.3.2.2.	Tersedianya Materi Media Sosial dan Wahana Multimedia (*sesuai dengan kebutuhan*)	Buah		4	4	4	4	4	4
2.3.2.3.	Tersedianya Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		2	2	2	2	2	2

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.2.4.	Tersedianya Perancang Materi Sosialisasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
2.3.2.5.	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi Media Sosial dan Multimedia (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
2.3.3.	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik:								
2.3.3.1.	Tersedianya Rambu Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Buah		5	5	5	5	5	5
2.3.3.2.	Tersedianya Papan Informasi Publik (*sesuai dengan kebutuhan*)	Buah		5	5	5	5	5	5
2.3.3.3.	Tersedianya Tim Teknis (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
2.3.3.4.	Tersedianya Tenaga Surveyor (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		7	7	7	7	7	7

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.3.5.	Tersedianya Tenaga Pendukung Lainnya (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		10	10	10	10	10	10
3.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**								
3.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.2.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana:								
3.2.1.	Ada: Sudah Lama Dibuat (Masa berlaku s.d 2025)								
3.2.1.1.	Tersedianya Dokumen RPB yang Telah Dilegalkan dalam Bentuk Perkada	Dokumen							
3.2.1.2.	Tersedianya Dokumen RPB yang Siap untuk Dilegalkan Sebagai Lampiran Perkada	Dokumen							
3.2.2.	Ada: Baru Dibuat Tahun 2025								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.2.1.	Tersedianya Dokumen RPB yang Telah Dilegalkan dalam Bentuk Perkada	Dokumen							
3.2.2.2.	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (*minimal 2*)	Dokumen							
3.2.2.3.	Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (*minimal 2*)	Dokumen							
3.2.2.4.	Tersedianya Tenaga Ahli/Personil Penyusun RPB (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang							
3.2.2.5.	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang							
3.2.3.	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.3.	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON):								
3.3.1.	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.2.	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (*minimal 2 setiap penyusunan RENKON*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
3.3.3.	Tersedianya Personil Penyusun Rencana Kontinjensi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0
3.3.4.	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0
3.4.	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi:								
3.4.1.	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur:								
3.4.1.1.	Tersedianya Perlengkapan Sarpras Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		2	2	2	2	2	2
3.4.1.2.	Tersedianya Materi Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4.1.3.	Tersedianya Sertifikat Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Buah		0	0	0	0	0	0
3.4.1.4.	Tersedianya Asesmen Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.4.1.5.	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		3	3	3	3	3	3
3.4.1.6.	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		3	3	3	3	3	3
3.4.2.	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara:								
3.4.2.1.	Tersedianya Perlengkapan Sarpras Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		2	2	2	2	2	2

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4.2.2.	Tersedianya Materi Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.4.2.3.	Tersedianya Sertifikat Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Buah		0	0	0	0	0	0
3.4.2.4.	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
3.4.2.5.	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4
3.5.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana:								
3.5.1.	Simulasi Dalam Ruangan (*Table-Top Exercise*):								
3.5.1.1.	Tersedianya Dokumen Latihan *Table Top Exercise* (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.5.1.2.	Tersedianya Sarpras dan Peralatan Pendukung Simulasi Dalam Ruangan/*Table Top Exercise* (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.5.1.3.	Tersedianya Penyelenggara Simulasi Dalam Ruang/*Table Top Exercise* (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		1	1	1	1	1	1
3.5.2.	Gladi Lapang:								
3.5.2.1.	Tersedianya Dokumen Latihan Gladi Lapang (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		1	1	1	1	1	1
3.5.2.2.	Tersedianya Sarpras dan Peralatan Pendukung Gladi Lapangan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.5.2.3.	Tersedianya Penyelenggara Gladi Lapang (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		4	4	4	4	4	4

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana:								
3.6.1.	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana:								
3.6.1.1.	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (*minimal jumlah hari dalam setahun*)	Hari		90	90	90	90	90	90
3.6.1.2.	Tersedianya Rapat Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Pertemuan		60	60	60	60	60	60
3.6.1.3.	Tersedianya Manajer Pusdalops (*minimal 1*)	Orang		1	1	1	1	1	1
3.6.1.4.	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		3	3	3	3	3	3

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.6.1.5.	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		10	10	10	10	10	10
3.6.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana:								
3.6.2.1.	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		3	3	3	3	3	3
3.6.2.2.	Tersedianya Sarpras Komando dan Monitoring Utama (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		2	2	2	2	2	2
3.6.2.3.	Tersedianya Sarpras Rapat Pimpinan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		1	1	1	1	1	1
3.6.2.4.	Tersedianya Sarpras Istirahat Petugas Jaga Pusdalops (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		3	3	3	3	3	3
3.6.3.	Penyediaan Layanan Pesan Singkat Secara Broadcast:								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.6.3.1.	Tersedianya Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Layanan Pesan Singkat Secara Broadcast (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.6.3.2.	Tersedianya Operasional Teknologi Informasi Komunikasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.6.4.	Penyediaan Sarana Prasarana Berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat:								
3.6.4.1.	Tersedianya Peralatan Penyebaran Perintah Evakuasi Kepada Masyarakat (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
3.6.4.2.	Tersedianya Alat Komunikasi Darurat Bencana Komunitas (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.7.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana:								
3.7.1.	Tersedianya Peralatan Keselamatan Petugas (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		35	35	35	35	35	35
3.7.2.	Tersedianya Peralatan Keselamatan Keluarga (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.3.	Tersedianya Peralatan Keselamatan Keluarga (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		100	100	100	100	100	100
3.7.4.	Tersedianya Peralatan Penyelamatan Korban Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		2	2	2	2	2	2
4.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								
4.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		52.742	52.742	52.742	52.742	52.742	52.742
4.2.	Jika Terjadi Bencana - Lampirkan SK:								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.1.	Kejadian Bencana:								
4.2.1.1.	Respon Cepat Darurat Bencana:								
4.2.1.1.1.	Tersusunnya Laporan Kaji Cepat (*sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana*)	Dokumen		6	6	6	6	6	6
4.2.1.1.2.	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang Diaktifkan (*sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana*)	Orang		7	7	7	7	7	7
4.2.1.2.	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana:								
4.2.1.2.1.	Tersedianya Peralatan Komunikasi Darurat Lapangan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		1	1	1	1	1	1
4.2.1.2.2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.1.2.3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembuatan Jalur Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		2	2	2	2	2	2
4.2.1.2.4.	Tersedianya Data Operasi Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		1	1	1	1	1	1
4.2.1.2.5.	Tersusunnya Laporan Operasi Pertolongan, Penyelamatan, Evakuasi Korban (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		1	1	1	1	1	1
4.2.1.2.6.	Tersedianya Petugas Pos Lapangan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.1.2.7.	Tersedianya Operator Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi dan Pembuatan Jalur Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		1	1	1	1	1	1
4.2.1.2.8.	Tersedianya Petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		7	7	7	7	7	7
4.2.2.	Status Tanggap Darurat:								
4.2.2.1.	Respon Cepat Darurat Bencana:								
4.2.2.1.1.	Tersusunnya Laporan Kaji Cepat (*sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.1.2.	Tersusunnya SK Penetapan Status Darurat Bencana (*sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.1.3.	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang Diaktifkan (*sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.2.2.2.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana:								
4.2.2.2.1.	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		0	0	0	0	0	0
4.2.2.2.2.	Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.2.3.	Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.2.4.	Tersusunnya Laporan Penanganan Darurat Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.2.5.	Tersusunnya SK Pengorganisasian Pos Komando PDB (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana:								
4.2.2.3.1.	Tersedianya Peralatan Komunikasi Darurat Lapangan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Paket		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.3.3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembuatan Jalur Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Unit		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.4.	Tersedianya Data Operasi Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.5.	Tersusunnya Laporan Operasi Pertolongan, Penyelamatan, Evakuasi Korban (*sesuai dengan kebutuhan*)	Dokumen		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.6.	Tersedianya Petugas Pos Lapangan (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.3.7.	Tersedianya Operator Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi dan Pembuatan Jalur Pertolongan dan Evakuasi (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.2.2.3.8.	Tersedianya Petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana (*sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.3.	Jika Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% Sesuai Kelengkapan Lampiran Dokumen Tahapan SPM								
5.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**								
5.1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang		100	100	100	100	100	100

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.	Jumlah Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (*response time*) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba di Lokasi dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi (*layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar*)	Layanan		15	15	15	15	15	15
5.3.	Jumlah Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi (*seperti SOP MKKG, pemadaman di pemukiman, … dst*)	Dokumen		11	11	11	11	11	11

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.4.	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (*pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll*), Penyelamatan dan Evakuasi (*helm petugas penyelamatan, jaket, ... dll*)	Unit		11	11	11	11	11	11
5.5.	Jumlah Pemenuhan Standar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (*jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I*)	Orang		8	8	8	8	8	8
5.6.	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran (*korban jiwa langsung*)	Layanan		80	80	80	80	80	80

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.7.	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran (*korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran*)	Layanan		100	100	100	100	100	100
VI.	**BIDANG SOSIAL**								
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**								
1.1.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang		71	71	71	71	71	71

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan (*layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*)	Orang		71	71	71	71	71	71

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat (*layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar*)	Orang		71	71	71	71	71	71
1.4.	Jumlah Penyediaan Permakanan (*layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.	Jumlah Penyediaan Sandang (*berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya*)	Orang		0	0	0	0	0	0
1.6.	Jumlah Penyediaan Alat Bantu (*kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas*)	Orang		0	0	0	0	0	0
1.7.	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan (*obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial (*diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya; bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*)	Orang		71	71	71	71	71	71

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (*pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat*)	Orang		71	71	71	71	71	71
1.10.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (*fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit*)	Orang		0	0	0	0	0	0
1.12.	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga (*pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi*)	Orang		0	0	0	0	0	0
1.13.	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (*pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi*)	Orang		1	1	1	1	1	1

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.	Jumlah Layanan Rujukan (*layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya*)	Orang		7	7	7	7	7	7
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**								
2.1.	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan (*layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat (*layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar*)	Orang		0	0	0	0	0	0
2.4.	Jumlah Penyediaan Permakanan (*layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5.	Jumlah Penyediaan Sandang (*berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya*)	Orang		0	0	0	0	0	0
2.6.	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan (*obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial (*diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya; bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.8.	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar (*pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat*)	Orang		0	0	0	0	0	0
2.9.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	Orang		10	10	10	10	10	10
2.10.	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (*fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.11.	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga (*pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi*)	Orang		0	0	0	0	0	0
2.12.	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (*pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi*)	Orang		12	12	12	12	12	12
2.13.	Jumlah Layanan Rujukan (*layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya*)	Orang		10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**								
3.1.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang		0	0	0	0	0	0
3.2.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan (*layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*)	Orang		10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat (*layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar*)	Orang		14	14	14	14	14	14
3.4.	Jumlah Penyediaan Permakanan (*layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari*)	Orang		42	42	42	42	42	42

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.5.	Jumlah Penyediaan Sandang (*berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya*)	Orang		33	33	33	33	33	33
3.6.	Jumlah Penyediaan Alat Bantu (*kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas*)	Orang		0	0	0	0	0	0
3.7.	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan (*obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8.	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial (*diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya; bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*)	Orang		20	20	20	20	20	20

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.9.	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar (*pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat*)	Orang		0	0	0	0	0	0
3.10.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	Orang		10	10	10	10	10	10
3.11.	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (*fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit*)	Orang		4	4	4	4	4	4

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.12.	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga (*pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi*)	Orang		5	5	5	5	5	5
3.13.	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (*pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi*)	Orang		12	12	12	12	12	12
3.14.	Jumlah Layanan Rujukan (*layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya*)	Orang		2	2	2	2	2	2

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**								
4.1.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Orang		0	0	0	0	0	0
4.2.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan (*layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat (*layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.4.	Jumlah Penyediaan Permakanan (*layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5.	Jumlah Penyediaan Sandang (*berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.6.	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan (*obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.7.	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial (*diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya; bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.8.	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis (*pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.9.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti Dokumen Kependudukan	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.10.	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (*fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.11.	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga (*pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi*)	Orang		0	0	0	0	0	0
4.12.	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (*pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.13.	Jumlah Layanan Rujukan (*layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya*)	Orang		0	0	0	0	0	0
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**								
5.1.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		15	15	15	15	15	15
5.2.	Jika Terjadi Bencana:								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.1.	Jumlah Penyediaan Permakanan (*penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan*)	Orang		15	15	15	15	15	15
5.2.2.	Jumlah Penyediaan Sandang (*pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan*)	Orang		11	11	11	11	11	11

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.3.	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (*tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/ tikar/ alas tidur, dan/ atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan*)	Orang		0	0	0	0	0	0
5.2.4.	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (*merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb*)	Orang		0	0	0	0	0	0

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.5.	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial (*upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb*)	Orang		0	0	0	0	0	0
5.3.	Jika Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%:								

No.	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3.1.	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (*dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya*)	Form							

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.9.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**								
1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,00	77,00	81,00	85,00	89,00	93,00	97,00
1.2	Skor Literasi/Numerasi	Skor	90,46	91,60	92,96	94,32	95,68	97,04	98,40
1.3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	80,50	80,17	80,30	80,43	80,56	80,69	80,82
1.4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	63,26	66,26	67,67	69,08	70,49	71,90	73,31
1.5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	103,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	**Dinas Kesehatan**								
2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,95	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00
2.2	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Poin	76,95	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00
2.3	Usia Harapan Hidup	Tahun	164,00	120,00	115,00	110,00	105,00	100,00	95,00
2.4	*Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50
2.5	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	8,78	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20	6,00
2.6	Jumlah Kematian Balita	Kasus	34	51	56	61	66	71	76
2.7	Prevalensi Stunting	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Per 1.000 Penduduk	3.770	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
2.9	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	83,56	83,60	84,00	84,40	84,80	85,20	85,60

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.10	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	40,68	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.11	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	240	49	49	49	49	49	49
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	67,20	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
2.13	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.14	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15	Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.16	Persentase Fasyankes yang Terintegrasi dalam SIKN	Persen	67,91	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2.17	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	95,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.18.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen							
2.19	Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	62,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	64,35	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	72,52	76,50	78,00	79,50	81,00	82,50	84,00
3.3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	63,14	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
3.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,51	75,49	77,00	78,51	80,02	81,53	83,04
4.	**Satuan Polisi Pamong Praja**								
4.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	8000
4.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**								
5.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,13	63,30	63,89	64,48	65,07	65,66	66,25
5.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	168,40	159,88	158,40	153,40	148,40	143,40	138,40
5.3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	15	15	15	15	15	15	15
6.	**Dinas Sosial**								
6.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,50	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
6.2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	95,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
7.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,30	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	36,75	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00
7.3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	85,36	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	92,18	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,67	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00
8.	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								
8.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	64,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00
8.2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,67	79,04	82,27	85,50	88,73	91,96	95,19
8.3	Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	580.000.000,00	580.000.000,00	590.000.000,00	600.000.000,00	610.000.000,00	620.000.000,00	630.000.000,00
9.	**Dinas Lingkungan Hidup**								
9.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,90	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00	96,00
9.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	50,00	67,01	67,11	67,21	67,31	67,41	67,51
10.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
10.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50
10.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	87,59	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50
11.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
11.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
11.2	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	71	85	93	101	107	113	117

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.	**Dinas Perhubungan**								
12.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50
12.2	Rasio Konektivitas	Persen	0,045	0,045	0,046	0,047	0,048	0,049	0,050
13.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**								
13.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,13	63,30	63,89	64,48	65,07	65,66	66,25
13.2	Indeks SPBE	Indeks	75,88	80,90	85,92	90,94	95,96	100,00	100,00
13.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,29	1,80	2,31	2,82	3,00	3,00	3,00
13.4	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	Indeks	2,34	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60
14.	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**								
14.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50
14.2	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00
14.3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	60,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
14.4	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
15.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**								
15.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,86	80,67	80,70	80,73	80,76	80,79	80,82
15.2	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha (BKPM RI)	Poin	74,136	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15.3	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman RI)	Poin	89,29	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
15.4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahunan	Rupiah	16.084.057.365.109,70	17.977.239.413.636,70	19.137.648.003.322,50	20.298.056.593.0008,30	21.458.465.182.694,10	22.618.873.772.379,90	23.779.282.362.065,70
15.5	Jumlah Tambahan Investor Berskala Nasional (PMA dan PMDN)	Investor (NIB)	1.184.646.819.939,00	1.160.408.589.684,87	1.160.408.589.684,87	1.160.408.589.684,87	1.160.408.589.684,87	1.160.408.589.684,87	1.160.408.589.684,87
15.6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/Tahun/ Perusahaan	17.981	21.181	24.681	28.181	31.681	35.181	38.681
15.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	6.638	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.8	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	95	100	100	100	100	100	100
16.	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**								
16.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	78,05	78,10	78,15	78,20	78,25	78,30
16.2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.3	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	23	30	60	90	120	150	180
16.4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	18,68	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
17.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**								
17.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	58,64	61,88	62,25	62,62	62,99	63,36	63,73

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	10,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00
18.	**Dinas Perikanan**								
18.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00
18.2	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	6.620,85	6.635,00	6.650,00	6.665,00	6.680,00	6.695,00	6.710,00
19.	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**								
19.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,10	73,40	73,50	73,60	73,70	73,80	73,90
19.2	Produktivitas Perkebunan	Ton/Ha	2.187.831,09	1.573.851,00	1.657.639,00	1.741.427,00	1.825.215,00	1.909.003,00	1.992.791,00
19.3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	869.072,82	937.576,80	991.280,00	1.044.983,20	1.098.686,40	1.152.389,60	1.206.092,80
20.	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**								
20.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	75,80	76,50	77,20	77,90	78,60	79,30
20.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	72,50	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
20.3	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rupiah	90,00	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00	100,00
21.	**Sekretariat Daerah**								
21.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,30	78,50	79,80	81,10	82,40	83,70	85,00
21.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,78	89,78	90,78	91,78	92,78	93,78	94,78
22.	**Sekretariat DPRD**								
22.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
22.2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	Poin	135	135	138	141	144	147	150
23.	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**								
23.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,05	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25
23.2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	93,88	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
23.3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	-	25,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
24.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								
24.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,00	80,15	82,50	84,85	87,20	89,55	91,90
24.2	Persentase Realisasi APBD	Persen	86,10	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
24.3	Persentase Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah	Persen	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
25.	**Badan Pendapatan Daerah**								
25.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
25.2	Persentase Pendapatan Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,60	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
26.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**								
26.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,55	77,00	77,05	77,10	77,15	77,20	77,24
26.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,00	70,01	70,10	70,19	70,28	70,37	70,46
26.3.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	70,00	70,01	70,10	70,19	70,28	70,37	70,46

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
27.	**Inspektorat Daerah**								
27.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50	79,75	80,00
27.2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3 (3,0000)	3 (3,0500)	3 (3,1000)	3 (3,1500)	3 (3,2000)	3 (3,2500)	3 (3,3000)
27.3	Skor *Monitoring Centre for Prevention* (MCP)	Persen	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
28.	**Kecamatan Sungai Raya**								
28.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
28.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,25	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
28.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	15	17	18	19	20	21	22
29.	**Kecamatan Kuala Mandor B**								
29.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
29.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
29.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	2	3	4	5	6	6
30.	**Kecamatan Sungai Ambawang**								
30.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,37	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
30.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,00	92,39	93,00	93,61	94,22	94,83	95,44
30.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	14	15	15	15	15	15	15
31.	**Kecamatan Terentang**								
31.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	62,75	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
31.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
31.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	4	6	8	10	10	10	10
32.	**Kecamatan Batu Ampar**								
32.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
32.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,20	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
32.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	5	6	7	8	9	10
33.	**Kecamatan Kubu**								
33.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
33.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86,14	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
33.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	11	11	13	15	17	19	20
34.	**Kecamatan Rasau Jaya**								
34.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
34.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,00	87,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
34.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	6	6	6	6	6	6
35.	**Kecamatan Teluk Pakedai**								
35.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,80	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
35.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,40	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
35.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	8	9	10	11	12	13

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36.	**Kecamatan Sungai Kakap**								
36.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	65,55	65,70	65,75	65,80	65,85	65,90	65,95
36.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87,12	87,74	88,45	89,16	89,87	90,58	91,29
36.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	13	15	15	15	15	15	15
37.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**								
37.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00
37.2	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37.3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	77,98	78,00	78,05	78,10	78,15	78,20	78,25

Sumber: Data Diolah

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan arahan bersama bagi Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab serta kerjasama semua pihak dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utamanya, serta mewujudkan strategi dan kebijakan daerah.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kubu Raya. Gambaran pencapaian target-terget kinerja akan terlihat pada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanannya sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini kepada *stakeholder* yang terkait.
b. Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 agar didukung oleh semua Perangkat Daerah maupun *stakeholder* melalui berbagai program dan kegiatan yang

pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.

c. RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

d. Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini menjadi penyelaras antara dokumen RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, sekaligus sebagai penghubung dengan dokumen jangka pendek di bawahnya (RKPD) setiap tahunnya dari tahun 2026-2030. Oleh karena itu, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terhindar dari duplikasi-duplikasi dalam implementasinya di Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*).

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini.

Akhirnya, semoga RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemeritahan, tata kelola pembangunan, dan tata kelola kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, sehingga terwujud **Kubu Raya Melaju**.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO